



**Peraturan Bupati Pesisir Barat
Nomor 14 Tahun 2025
Perubahan RKPD
Kabupaten Pesisir Barat
Tahun Anggaran 2025**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN PESISIR BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2025**



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

22. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 85);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);
32. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 501);
33. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 515);

34. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 531), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 546);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
10. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Dasar Pemerintah Daerah.
11. Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RAPBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah rancangan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

- (2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih dan memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUAdan PPAS;
- (3) Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam perubahan RKPD Tahun 2025, ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dengan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilaksanakan dengan kriteria:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat meugikat;
- c. tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pernerintah maupun masyarakat;

- d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan Iatau Renstra Perangkat Daerah;
- e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pernbangunan daerah; dan
- f. dilakukan jika kegiatan danjatau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	:	PENUTUP

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Perubahan RKPD 2025 disusun berpedoman pada:

- a. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029; dan
- b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan I Tahun 2025.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR

Lampiran
Peraturan Bupati Pesisir Barat
Nomor : Tahun 2025
Tentang : Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun
2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I – 1
	1.1 Latar Belakang	I – 1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I – 3
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I – 6
	1.4 Maksud dan Tujuan	I – 10
	1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD	I – 11
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025	II – 1
	2.1 Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II – 1
	2.2 Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025	II – 112
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
	3.1 Kerangka Ekonomi Daerah	III – 1
	3.2 Kerangka Keuangan Daerah	III – 18
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV – 2
	4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025	IV – 6
	4.3 Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat	IV – 34
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V – 1
	5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah	V – 22
	5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan	V – 34
BAB VI	PENUTUP	VI – 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Semester I Tahun 2025	II – 3
Gambar 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2024	II – 4
Gambar 2.3	PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2024	II – 5
Gambar 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2024	II – 6
Gambar 2.5	Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2024	II – 7
Gambar 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2024	II – 8
Gambar 2.7	Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2023	II – 8
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024	III – 8
Gambar 3.2	PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	III – 9
Gambar 3.3	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2024	III – 10
Gambar 3.4	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024	III – 11
Gambar 3.5	Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024	III – 12
Gambar 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024	III – 13
Gambar 3.7	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun 2025	III – 21
Gambar 3.8	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun 2025	III – 26
Gambar 3.9	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun 2025	III – 29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Makro RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2024	II – 2
Tabel 2.2	Pencapaian Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II – 9
Tabel 2.3	Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II – 11
Tabel 2.4	Pencapaian SPM Bidang Pendidikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II – 22
Tabel 2.5	Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II – 23
Tabel 2.6	Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II – 25
Tabel 2.7	Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II – 25
Tabel 2.8	Pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II – 26
Tabel 2.9	Pencapaian SPM Bidang Sosial sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II – 29
Tabel 2.10	Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025	II – 29
Tabel 2.11	Skala Nilai Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II – 37
Tabel 2.12	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Pesisir Barat	II – 40
Tabel 2.13	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025	II -114
Tabel 3.1	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)	III – 2
Tabel 3.2	Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (dalam %)	III – 4
Tabel 3.3	PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)	III – 6
Tabel 3.4	PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 (milyar Rupiah)	III – 6
Tabel 3.5	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024	III – 8
Tabel 3.6	Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB Tahun 2020-2024 (persen)	III – 12
Tabel 3.7	Sasaran Makro Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025	III – 18
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2025	III – 21
Tabel 3.9	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022 – 2024	III – 22
Tabel 3.10	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025	III – 22
Tabel 3.11	Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025	III – 22
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I	

Tahun 2025	III – 26
Tabel 3.13 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022-2024	III – 27
Tabel 3.14 Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025	III – 28
Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun 2025	III – 30
Tabel 3.16 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022-2024	III – 30
Tabel 3.17 Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025	III – 30
Tabel 4.1 Matriks Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Menurut Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Perubahan RKPD Tahun 2025	IV – 2
Tabel 4.2 Keselarasan Program Prioritas Pemerintah Pusat, Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	IV – 7
Tabel 4.3 Keselarasan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025	IV – 9
Tabel 4.4 Keselarasan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	IV – 9
Tabel 4.5 Keselarasan Target Sasaran Makro Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025	IV – 10
Tabel 4.6 Program Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 dalam RPJMD Tahun 2021-2026	IV – 13
Tabel 4.7 Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian Tujuan SDGs Kabupaten Pesisir Barat	IV – 26
Tabel 4.8 Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat	IV – 32
Tabel 4.9 Arah Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037	IV – 37
Tabel 5.1 Pagu Indikatif Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025	V – 3
Tabel 5.2 Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Nasional Perubahan Tahun 2025	V – 24
Tabel 5.3 Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025	V – 27
Tabel 5.4 Sinkronisasi Program Kabupaten Pesisir Barat dengan Program Prioritas Provinsi Lampung Perubahan Tahun 2025	V – 29
Tabel 5.5 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025	V – 31
Tabel 5.6 Prioritas Daerah, Sasaran Daerah dan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025	V – 44
Tabel 5.7 Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025	V – 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan pada peran, fungsi dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan salah satu tolok ukur awal dalam penilaian keberhasilan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 Tahun 2004) adalah landasan hukum utama bagi pemerintah pusat maupun daerah di bidang perencanaan pembangunan. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan turut melibatkan peran aktif dari masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017) mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan prioritas pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan dalam sisa tahun anggaran berjalan. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025 berikut Pemutakhirannya dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 berikut Perubahannya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 serta RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 dalam hal untuk mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Dokumen Perubahan RKPD memiliki peran yang sangat strategis bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, terlebih dalam kondisi penyesuaian perubahan kerangka ekonomi dan fiskal daerah dalam sisa pelaksanaan tahun perencanaan dan penganggaran. Dokumen perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana strategis ke dalam rencana operasional. Perubahan RKPD menjamin konsistensi antara

capaian tujuan perencanaan strategis ke dalam rencana operasional yang dapat diimplementasikan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan masing-masing perangkat daerah dilingkup pemerintah daerah. Dokumen perencanaan tahunan ini juga mengarahkan pada proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perubahan RKPD juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPPAS), Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (Perubahan RKA-Perangkat Daerah), Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) dan Rancangan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah.

Berikutnya Perubahan RKPD menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan daerah (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum serta instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan, target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan ini juga dapat menjadi acuan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKJP) serta diharapkan dapat menyediakan informasi bagi pemenuhan penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) maupun penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP).

Perubahan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan tentunya harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika serta perubahan kondisi di daerah, walaupun sebagai dokumen perencanaan tetap harus memiliki kerangka-kerangka yang dapat diukur dan rasional. RKPD dapat diubah dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permenadagri No. 86 Tahun 2017 seperti hal-hal di bawah ini:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SilPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini pada dasarnya dilakukan berlandaskan pada:

- 1) Perubahan kerangka keuangan daerah menyebabkan terjadi perubahan dan/atau penyesuaian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2025 ini.
- 2) Perubahan struktur perekenomian daerah menyebabkan terjadinya perubahan target-target pada Renja Perangkat Daerah dikarenakan menyesuaikan dengan kerangka ekonomi daerah yang mengalami koreksi;
- 3) Untuk memenuhi ketentuan peraturan, yaitu: (i) Peraturan Menteri Keuangan nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan (ii) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka diperlukan penataan belanja untuk dapat memenuhi ketentuan pemenuhan belanja yang berasal dari DAU untuk Dukungan Penggajian PPPK Daerah,

Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan dan DAU Bidang Pekerjaan Umum;

Perubahan RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiran maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu/plafon indikatif yang bersumber pada APBD maupun sumber-sumber lain pendapatan yang sah yang ditempuh dengan tetap mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan pada uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan demi terciptanya tertib dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran baik di tingkat Perangkat Daerah dan juga Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Pesisir Barat menyusun dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 sebagai pedoman dalam penyempurnaan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat pada sisa Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

22. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 85);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);

33. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 501);
34. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 515);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan pada Pasal 264 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dokumen RKPD bersama dengan dokumen RPJPD dan RPJMD daerah adalah merupakan dokumen dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan APBD. Maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat menjadi landasan dalam penyusunan KUPA dan PPPAS APBD TA 2025 dan pada akhirnya akan menjadi dasar dalam menyusun Perubahan RAPBD TA 2025 ini.

Secara garis besar Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan dari tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu sebagai berikut:

1.3.1. RPJMN Tahun 2025-2029

RPJM Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 berlampirkan 4 (empat) dokumen, yaitu: (i) Lampiran I yang memuat Narasi RPJMN Tahun 2025-2029; (ii) Lampiran II yang memuat Proyek Prioritas Strategis RPJMN Tahun 2025-2029; (iii) Lampiran III yang memuat Matrik Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029; (iv) Lampiran IV yang memuat Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun 2025-2029.

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan awal dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pesisir Barat, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Sesuai arahan RPJPN 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2025-2029 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 8 agenda asta cita.

1.3.2. Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih pada saat kampanye yang secara garis besar menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan pembangunan di Provinsi Lampung sehingga dapat menjadi pedoman penyusunan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 diarahkan untuk menuju Lampung Maju Indonesia Emas 2045 dengan tujuan. Visi tersebut didukung dengan 3 Misi Pembangunan, yaitu:

- 1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif
- 2) Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif
- 3) Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas

Secara umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diarahkan untuk menyusun perencanaan untuk: (i) mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan inovatif; (ii) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan (iii) Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat dan Berkelanjutan; serta (iv). Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

1.3.3. RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan jangka panjang daerah (20 tahun) Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut “Pesisir Barat Maju Mandiri dan Berkelanjutan”. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

- 1) Transformasi Sosial
- 2) Transformasi Ekonomi
- 3) Transformasi Tata Kelola
- 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
- 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
- 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
- 8) Kestinambungan Pembangunan

Gambaran keberhasilan yang hendak dicapai tersebut ditempuh melalui 4 (empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sebagaimana berikut:

Tahap I (Periode Tahun 2025-2029)

Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan

Tahap II (Periode Tahun 2030-2034)

Percepatan Transformasi Pembangunan

Tahap III (Periode Tahun 2035-2039)

Eksistensi Daerah Skala Nasional

Tahap IV (Periode Tahun 2040-2045)

Perwujudan Visi Pembangunan

1.3.4. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan dan merupakan penjabaran dari periode kedua RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat dan sebagai acuan bagi seluruh *stakeholders* di Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.

RPJMD disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan setidaknya dapat menjawab empat pertanyaan dasar (1) kemana Kabupaten Pesisir Barat akan diarahkan pengembangannya dan tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana cara mencapai tujuan yang hendak dicapai; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai; (4) mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD 2025-2029.

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan” dapat diformulasikan dengan misi-misi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan Infrastruktur yang Berketahanan Pangan dan Tangguh Bencana serta Berkelanjutan
- 2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kerakyatan
- 3) Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya
- 5) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.3.5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

Dalam proses penyusunan RKPD wajib melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan indikasi program pada RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037. Sinkronisasi perlu dijaga dalam upaya mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola ruang. Sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam proses penggunaan lahan serta dalam upaya menjaga keseimbangan pertumbuhan wilayah sehingga mampu mengurangi kesenjangan antar wilayah di daerah.

Penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata berbasis industri pertanian dan kelautan yang memperhatikan aspek kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

- 1) pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- 2) pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah;

- 3) pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan;
- 4) pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor;
- 5) perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai fungsi masing-masing dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
- 6) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.

Proses sinkronisasi termasuk dalam mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana:

- 1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- 4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

1.3.6. Rencana Pembangunan Sektoral

RKPD perlu memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya yang menjadi suplemen dan/atau readiness bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, Beberapa dokumen perencanaan sektoral antara lain dokumen (i) Rencana Aksi Daerah *Sustainable Development Goals* (RAD SDG's), (ii) Pengaturan dan penetapan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian/Lembaga dan diterapkan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat yang melaksanakan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, (iii) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Barat, (iv) Rencana induk Kelitbangan Kabupaten Pesisir Barat dan (v) dokumen perencanaan sektoral lainnya yang dapat memberikan panduan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

1.3.7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat daerah berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun demi menunjang visi, misi dan arah kebijakan dari Bupati Pesisir Barat tahun 2025-2029.

Renstra juga menjadi dokumen perencanaan yang memuat target-target kinerja dari masing-masing perangkat daerah yang dirumuskan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan menjawab target-target pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan.

1.3.8. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan basis data bahan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 berdasarkan pada pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan hingga pada triwulan I Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Februari 2025 tentang 900.1.1/640/SJ tentang Penysuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017.

Berikutnya berdasarkan pada Pasal 353 ayat (1), Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan materi dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD yang akan disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

- 1) Mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 yang digunakan dalam penentuan Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) dari masing-masing urusan pemerintahan daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah;
- 2) Mengacu pada Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang digunakan dalam proses perumusan program dan kegiatan tahunan yang berisi dengan tolok ukur, indikator kinerja sasaran dan juga pagu anggaran dalam tahun berjalan;
- 3) Mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu/plafon indikatif dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sesuai dengan rencana program prioritas dan tema pembangunan pada rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025;
- 4) Mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode triwulan I Tahun 2025 sebagaimana yang terangkum pada Bab II Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran dari Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025; dan
- 5) Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada sisa tahun berjalan (tahun perencanaan 2024).

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah untuk kurun waktu pelaksanaan sisa tahun 2025.

1.4.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2025 dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2025 yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS antara DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya program dan kegiatan tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA-Perangkat Daerah, Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025 dan DPPA TA 2025;
- 2) Menjadi pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- 3) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional Perangkat Daerah dalam sisa waktu pelaksanaan tahun 2025;
- 4) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan Urusan pemerintahan daerah, yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah (yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya) dalam melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2025;
- 5) Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2025, Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025;
- 6) Menyediakan informasi bagi penyusunan dokumen-dokumen, kajian dan/atau laporan terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada relevansinya.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Perubahan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan RKPD bagi daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi hasil triwulan II Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai capaian yang telah diraih oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2025 berdasarkan pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan APBD Tahun 2025.

2.1. Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Mencakup gambaran kinerja dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2025. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dari kinerja pemerintah daerah.

Berikutnya, juga mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan RKPD tahun 2025 yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah.

2.2. Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Pada sub bab ini juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam proses peningkatan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada sisa tahun 2025.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Mengemukakan kondisi ekonomi daerah dengan merujuk pada pencapaian kinerja daerah sampai dengan Triwulan I tahun perubahan RKPD, termasuk membandingkan dengan kondisi ekonomi nasional, regional. Berikutnya memberikan gambaran mengenai potensi dan juga tantangan ekonomi pada tahun perubahan RKPD.

3.2. Kerangka Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah pada Perubahan RKPD.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada perubahan RKPD tahun (n) berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II tahun (n) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD pada periode pelaksanaan Perubahan RKPD tahun (n).

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun perubahan (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana perubahan (n).

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan triwulan I kedudukan tahun rencana perubahan (RKPD) dalam upaya pencapaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Memuat program prioritas daerah dalam upaya mendukung pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.

5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan

Memuat rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan Tahun 2025 untuk mencapai prioritas dan sasaran daerah tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD diperlukan sinergisitas dan sinkronisasi yang profesional dan proposional di jajaran pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I

TAHUN 2025

Evaluasi kinerja pembangunan pada triwulan I Tahun 2025, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah ditentukan dalam kurun waktu Triwulan I tahun 2025 sebagai salah satu syarat dalam penyusunan Perubahan RKPd serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui seberapa besar pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat memberikan hasil dan capaian yang terbaik dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 maupun Rancangan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025.

Pengukuran atau evaluasi secara triwulan atas target-target yang ditetapkan dilakukan untuk melihat tren capaian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan hingga akhir pelaksanaan ditahun anggaran dimaksud. Dengan dasar tersebut, beberapa komponen indikator menjadi alat ukur dalam melakukan evaluasi yang dimaksud. Evaluasi kinerja pembangunan ini dilakukan terhadap indikator sektoral, realisasi keuangan daerah dan indikator kinerja pembangunan selama Triwulan I sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RKPd dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pada akhirnya, proses pengendalian dan evaluasi dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan terhadap dinamika yang dihadapi sehingga mampu memberikan rekomendasi yang efektif dan efisien dengan pendekatan struktural dan sistematis agar target-target yang telah ditetapkan mampu terealisasi. Rekomendasi juga dapat memberikan gambaran terkait dengan perubahan terhadap pencapaian target-target kinerja daerah dan perangkat daerah.

2.1. Evaluasi RKPd Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1.1. Evaluasi Kinerja Indikator Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Penetapan sasaran indikator makro pembangunan daerah pada RKPd Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pencapaian target-target pembangunan yang terangkum dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Berikut target sasaran makro yang terangkum dalam RKPd Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Makro RKPDP Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Sasaran RKPDP 2025	capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,80-4,30	2,61*
2	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	33.57-34.15	35,62*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,4	3,04*
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	13,04	12,64*
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,25	71.04*
6	Indeks Gini	Angka	0,30-0,29	0,315*
7	Nilai Tukar Pertani	Angka	110,04	124,98*

Sumber: RKPDP Tahun 2025 (diolah)
*data tahun 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa data capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum tersedia atau belum dirilis oleh instansi yang berwenang mengeluarkan data capaian, dalam hal ini BPS Provinsi Lampung dan/atau BPS Kabupaten Pesisir Barat, sehingga data-data capaian yang disajikan sebagian besar masih menggunakan data capaian pada tahun 2024 yang lalu. Namun demikian, berdasarkan pada data capaian tersebut dapat memberikan gambaran terhadap gambaran perkembangan dari capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025 mendatang berdasarkan pada tren series.

Lebih lanjut, analisis yang akan dipergunakan mempergunakan data capaian dari Pemerintah Provinsi Lampung. Sebagaimana disampaikan di awal bahwa data-data untuk Kabupaten Pesisir Barat tidak tersedia. Asumsinya analisis dengan menggunakan data capaian Provinsi Lampung sedikit banyak memberikan gambaran tentang kondisi di daerah.

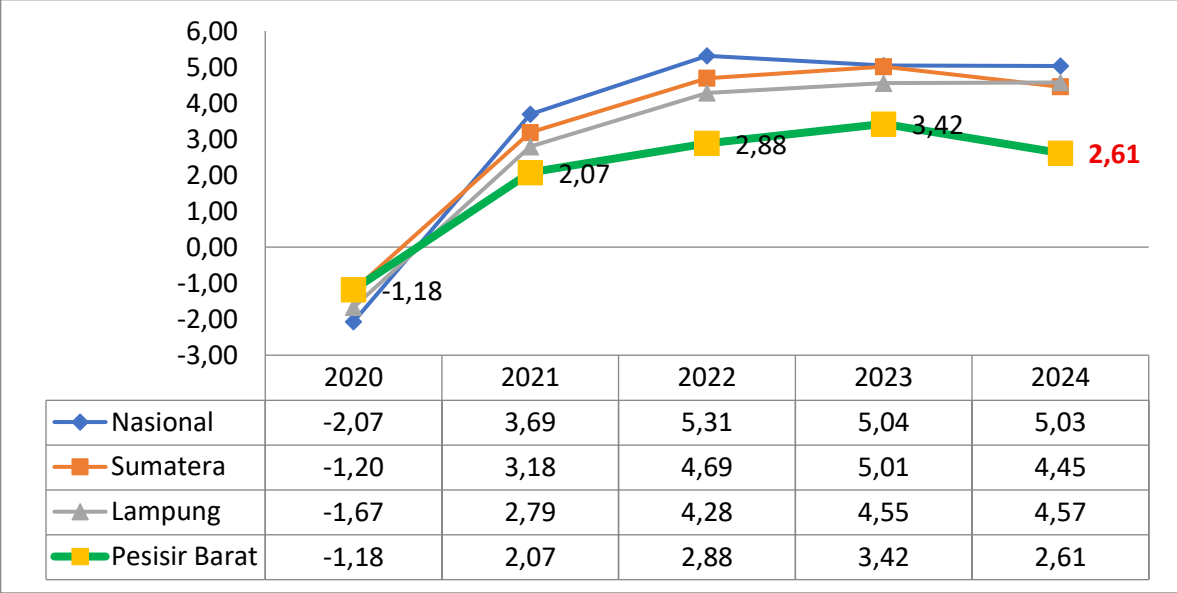
Gambaran mengenai capaian kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana yang ditetapkan pada RKPDP Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Pertumbuhan Ekonomi

Data capaian triwulan I tahun 2025 belum dipublikasi oleh BPS Provinsi Lampung sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 sebesar 2,61% atau menurun 0,81% dari tahun sebelumnya yang tercatat di angka 3,42%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Provinsi Lampung yang mencatatkan nilai 4.57% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat di angka

5,03%. Perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 terkontraksi di angka -1,18%, kemudian di tahun 2021 mengalami pertumbuhan setelah keluar dari pandemi covid-19 yang tercatat tumbuh 2,07%, tahun 2022 kembali tumbuh menjadi 2,88%. Tahun 2023 tumbuh 3,42% namun di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan sebesar 0,81% dibanding tahun 2023, dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tercatat di angka 2,61%. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat secara regional dan nasional di gambarkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2.1 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat hingga Semester I Tahun 2025



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

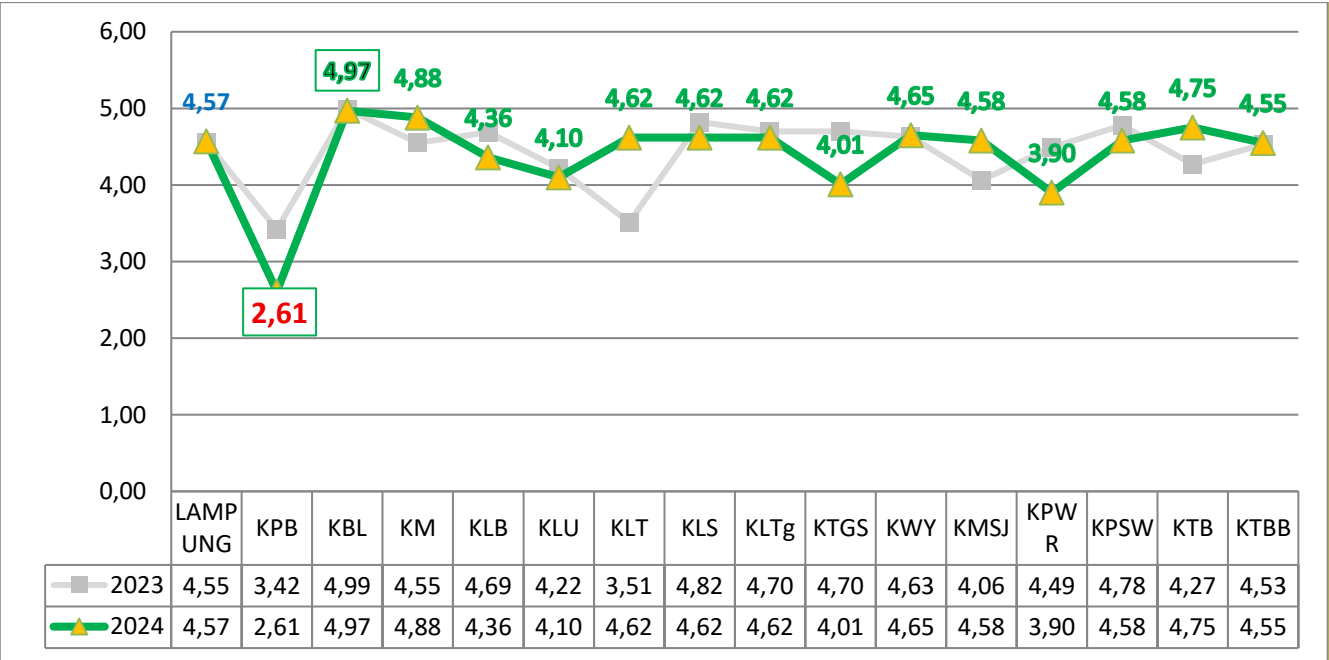
Merujuk pada publikasi Bank Indonesia Wilayah Lampung, Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,78 persen. Ekonomi Provinsi Lampung triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,96 persen.

Perekonomian Kabupaten Pesisir Barat dari sisi pengeluaran baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi yang cukup tinggi sekitar 70%. Hal ini berdasarkan data *time series* tahun 2022-2024 konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku cenderung meningkat dari 69,54% - 73,66%. Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih ditopang oleh sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, di kisaran 40% - 45%. Meskipun kontribusi sektor ini cenderung mengalami penurunan namun terdapat sektor lain mengalami peningkatan kontribusi, yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobi dan sepeda motor yang secara konstan tumbuh secara *time series* dari tahun 2020-2024 dengan tumbuh sekitar di kisaran 50,25%. Selain sektor tersebut terdapat beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan namun belum signifikan dari tahun 2020-2024, seperti transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan, Sosial Wajib, real estate, jasa pendidikan, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor lainnya.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat secara regional di Provinsi Lampung tahun 2024 menempati posisi terakhir (ke-15) dari 15 kabupaten/kota, yaitu 2,61% sedangkan Kota Bandar Lampung mencapai pertumbuhan tertinggi di Provinsi Lampung, yaitu 4,97%. Gambaran perbandingan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2024



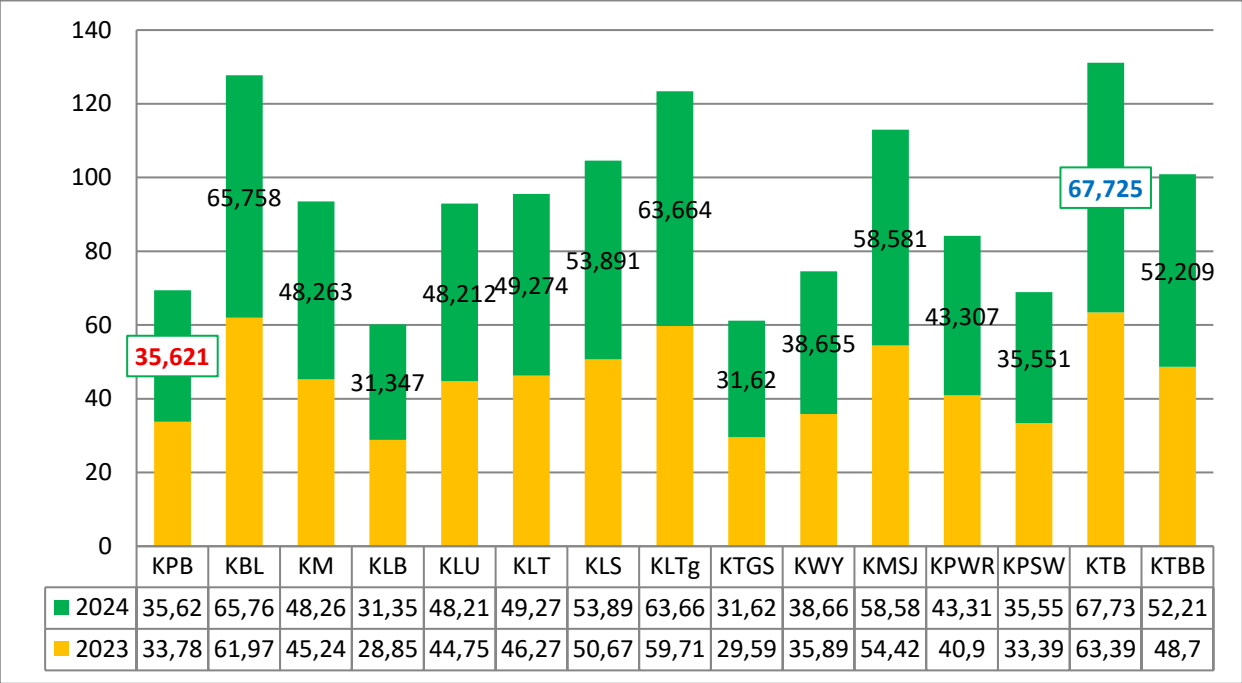
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

b) PDRB Perkapita ADHB

Data capaian triwulan I tahun 2025 masih belum dipublikasi oleh BPS Provinsi Lampung sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian PDRB Perkapita berdasarkan nilai ADHB untuk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 tercatat di angka 35,612 (juta rupiah) atau naik 1,839 (juta rupiah) dari tahun 2023 yang tercatat di angka 33,782 (juta rupiah). Namun secara regional di Provinsi Lampung PDRB Kabupaten Pesisir Barat peringkat 12 dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang menempati urutan tertinggi PDRB Perkapita disusul urutan kedua Kota Bandar Lampung dengan nilai masing - masing 67,625 (juta rupiah) dan 65,758 (juta rupiah), sedangkan untuk Kabupaten dengan nilai PDRB Perkapita terendah adalah Kabupaten Lampung Barat 31,341 (juta rupiah) dan Kabupaten Tanggamus dengan nilai 31,620 (juta rupiah). Jika dibandingkan dengan PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional, Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah PDRB Perkapita Provinsi Lampung sebesar 51,369 (jura rupiah) dan PDRB Perkapita Nasional sebesar 78,600 (juta rupiah) .

Salah satu faktor yang mempengaruhi PDRB Perkapita adalah struktur ekonomi, dimana struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih didominasi oleh 5 kategori lapangan usaha, yaitu yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan 42,93%, Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16,68%, Kontruksi 8,07%, Pertambangan dan Penggalian 5,74% dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,38%.

Gambar 2.3 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
Tahun 2024



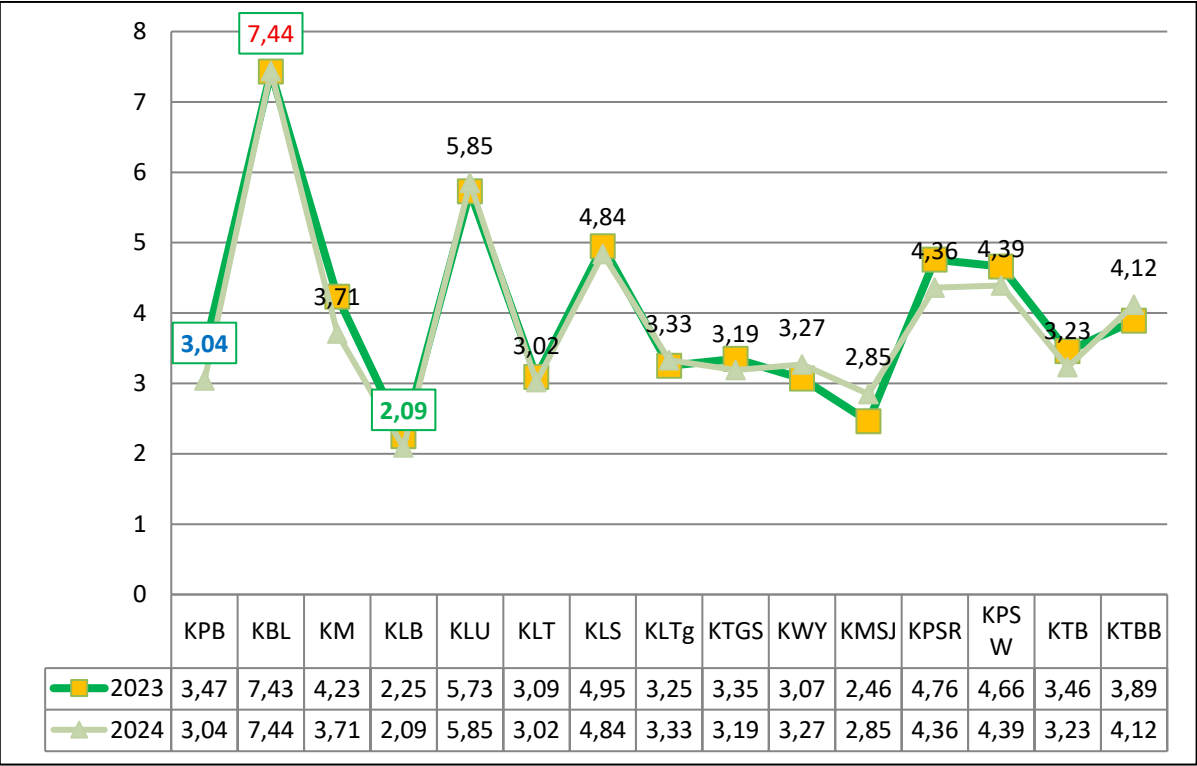
Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

c) Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian triwulan I tahun 2025 masih belum dipublikasi oleh BPS Provinsi Lampung sehingga data capaian masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 tercatat di angka 3,04% atau mengalami penurunan 0,43% dari tahun 2023 yang tercatat di angka 3,47%. Merujuk pada TPT Provinsi Lampung, dan Nasional, TPT Kabupaten Pesisir Barat tercatat lebih baik dimana TPT Provinsi Lampung dan Nasional, dimana masing –masing mencapai 4,19% dan 5,32% artinya TPT Kabupaten Pesisir Barat lebih baik dari pada TPT Provinsi Lampung maupun nasional.

Sementara itu, untuk level Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung nilai TPT Kabupaten Pesisir Barat berada pada urutan ke-4 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dimana TPT terendah terdapat di Kabupaten Lampung Barat dengan nilai 2,09% dan TPT Tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung dengan nilai TPT tertinggi senilai 7,44%. Gambaran perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

d) Tingkat Kemiskinan

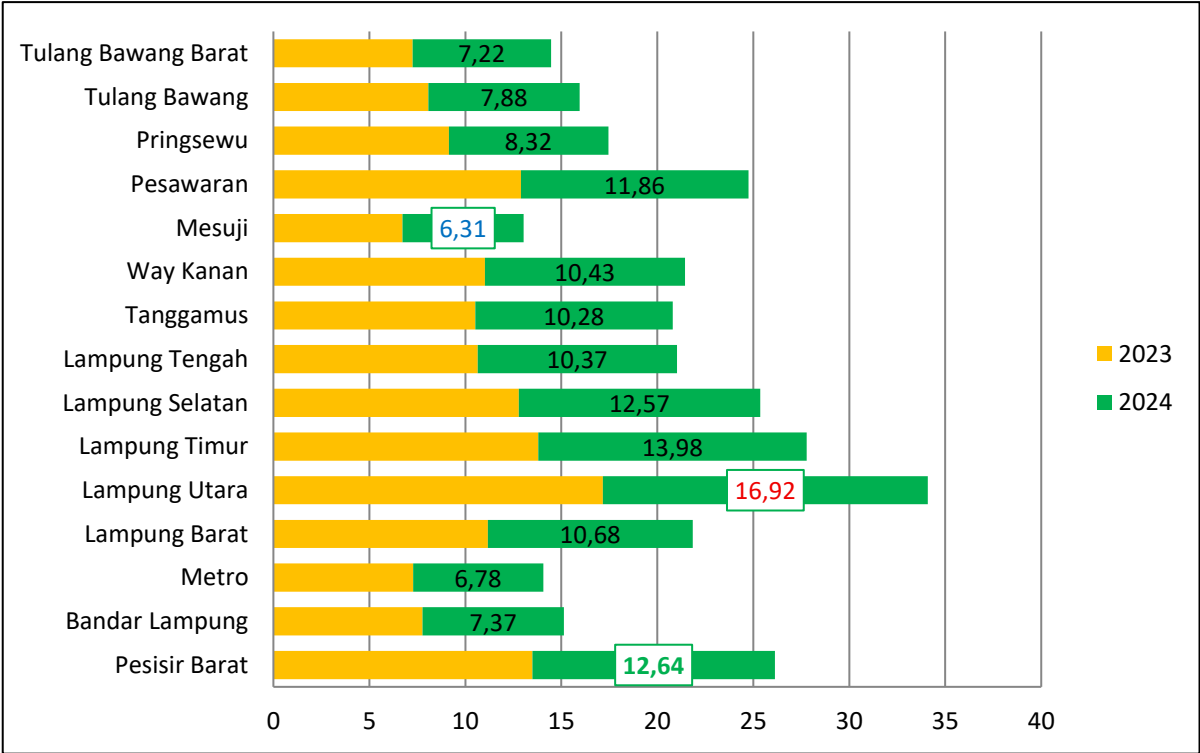
Capaian triwulan I tahun 2025 belum dipublikasi oleh BPS Kabupaten Provinsi Lampung sehingga data masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 12,64% atau mengalami penurunan dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 13,49%, penurunan sebesar 0,85 yang menunjukkan kabar positif bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Sebelumnya di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,35 dari tahun tahun 2022 dengan nilai 13,84%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat tahunn 2024 tercatat sebanyak 20,22 (ribu jiwa) dengan kedalaman kemiskinan (P1) tercatat di angka 2,10 dan dan tingkat keparahan kemiskinan (p2) di angka 0,49 dengan garis kemiskinan 566.040 rupiah/perkapita/bulan.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung maupun nasional dimana tingkat kemiskinan masing – masing tercatat sebesar 10,69% dan 9,03%. Secara regional, tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung ada di Kabupaten Lampung Utara dan lampung Timur yang tercatat masing – masing 16,92% dan 13,19% sedangkan tingkat kemiskinan terrendah ada di Kabupaten Mesuji dan Kota Metro yang tercatat masing – masing sebesar 6,31% dan 6,78%. Secara peringkat Kabupaten Pesisir Barat berada diurutan ke-13 dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat lebih disebabkan pada belum meratanya sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi di masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan yang juga terbatas. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana masyarakat juga merupakan salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan. Meskipun capaian tahun 2024 ini memberikan gambaran bahwa target telah terpenuhi di tahun 2024 ini, namun

diperlukan usaha-usaha yang lebih nyata dan konkrit untuk menekan tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat.

**Gambar 2.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
Tahun 2024**



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

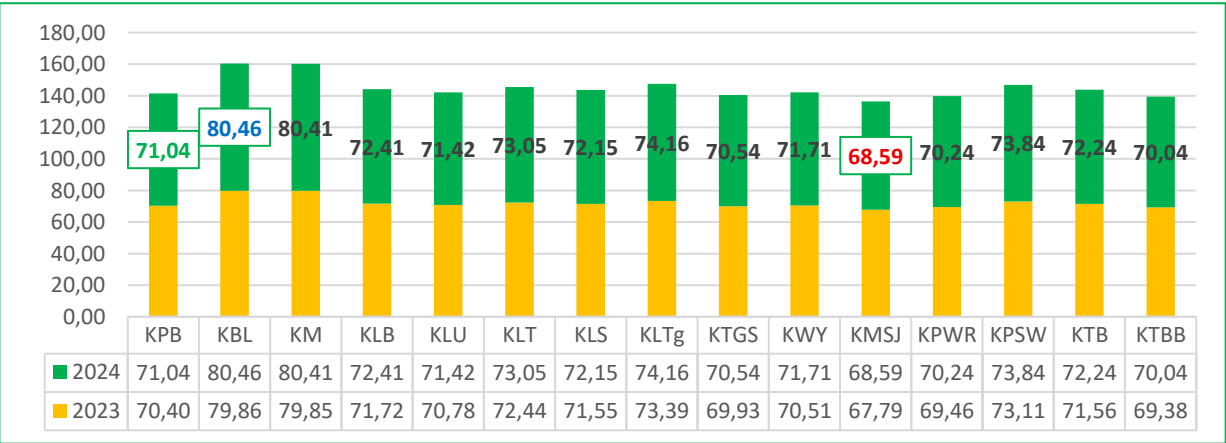
e) Indeks Pembangunan Manusia

Capaian triwulan I tahun 2025 masih belum dipublikasi oleh BPS Provinsi Lampung sehingga masih menggnakan data capaian tahun 2024. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 berdasarkan UHH SP2020 tercatat di angka 71,04 atau naik 0,64 poin dari tahun 2023 yang tercatat di angka 70,40. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Lampung dan Nasional, IPM Kabupaten Pesisir Barat masih di bawah capaian IPM Provinsi Lampung dan Nasional yang masing-masing tercatat di angka 73,13 dan 75,02.

Sementara perbandingan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesisir Barat berada di urutan ke-11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dimana IPM tertinggi dicapai oleh Kota Bandar Lampung yang tercatat di angka 80,46 dan capaian terendah IPM di Kabupaten Mesuji dengan angka IPM 68,59.

Masih rendahnya nilai IPM Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan masih rendahnya derajat status pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kurangnya akses pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utamanya. Ketersediaan infrastruktur serta kondisi geografis daerah turut mempengaruhi kesulitan masyarakat dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Terlebih dari sisi kemampuan daya beli masyarakat yang belum bisa bersaing dengan daerah lain. Gambaran perbandingan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung digambarkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2024

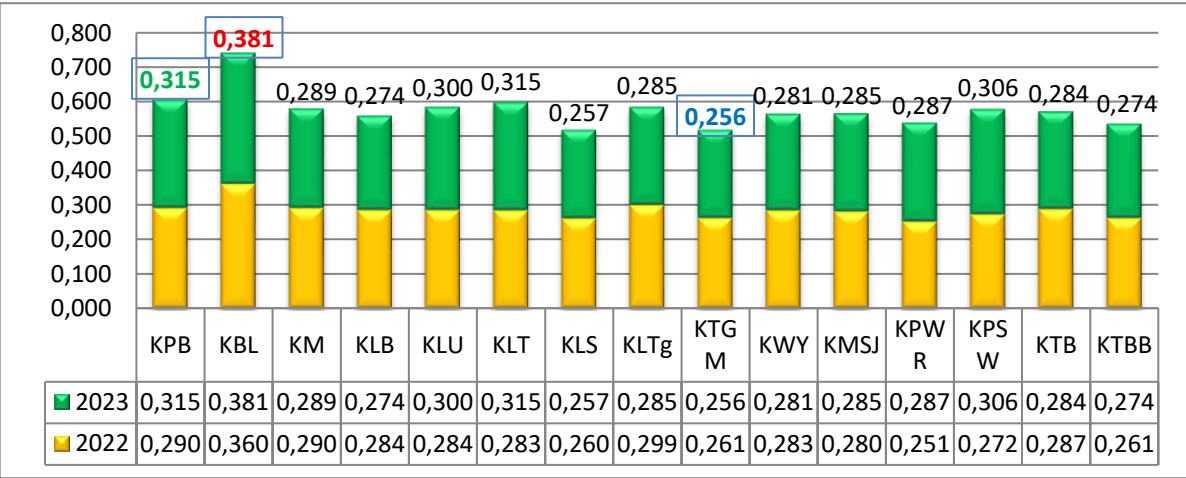


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

f) Indeks Gini

Capaian gini rasio triwulan I tahun 2025 maupun tahun 2024 belum dipublikasi oleh BPS Provinsi Lampung sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2023. Rasio gini Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 tercatat sebesar 0,315 atau meningkat 0,015 point dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 0.290. Jika dibandingkan dengan Provinsi Lampung dengan nilai capaian 0,324 dan nasional yang berada pada angka 0.388 maka rasio gini Kabupaten Pesisir Barat masih lebih baik. Sementara jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, rasio gini Kabupaten Pesisir Barat berada diperingkat 13 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus memiliki rasio gini terendah di angka 0,256 dan Kota Bandar Lampung tertinggi di angka 0,381. Ketimpangan pendapatan di daerah lebih disebabkan pada kondisi struktur ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya merata. Jumlah penduduk miskin dan juga jumlah pengangguran turut mempengaruhi capaian ini.

Gambar 2.7 Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi target utama bagi Kepala Daerah selama kurun waktu periode RPJMD yang dibagi menjadi 5 (lima) tahun RKPD. Berikut target Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam RKPD Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian s.d. TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi I					
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing					
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,25	71,04*
Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saig Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2. Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,41	3,04*
Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	3. Terwujudnya Kesenjangan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,24	95,18
Misi II					
Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan					
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	45,05	44,68
	2. Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Daya Air Yang Sehat Dan Aman	Persen	43,50	45,41
	3. Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	57,50	43,66
	4. Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	74,53	76,45*

	5. Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana	Angka	180.24	188,85
Misi III Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan					
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.80-4,30	2,61*
	2. Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	33,57 – 34,15	35,641*
	3. Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	110,04	124,98
	4. Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Angka	0.30	0,315*
	5. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	13.04	12,64
Misi IV Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal					
Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	25.00	8,00
Misi V Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga					
Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	88.00	87,47*
	2. Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Huruf/ Predikat	B	B*
	3. Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas	Opini BPK	Huruf/ Predikat	WTP	WTP*
	4. Meningkatnya Pembangunan di Desa/Pekon	Indeks Desa Membangun	Angka	0.7000	0.6988*

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel diatas, beberapa data realisasi capaian sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum tersedia atau belum dirilis oleh instansi yang berwenang mengeluarkan data capaian, dalam hal ini BPS. Sehingga data-data capaian yang disajikan masih menggunakan data capaian pada tahun 2024 yang lalu. Namun demikian, berdasarkan pada data capaian tersebut dapat memberikan gambaran terhadap gambaran perkembangan dari capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025 mendatang.

Secara umum, sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dari 18 indikator kinerja utama terdapat beberapa sasaran pembangunan daerah telah mencapai target sasaran. Namun demikian, disisi lain beberapa sasaran juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Diperlukan komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai rangkaian pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah.

2.1.3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan pada evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025 juga didapatkan perhitungan terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan indikator pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan 40 Urusan Pemerintahan Daerah dan dilaksanakan oleh 39 Perangkat Daerah. Capaian IKD tersebut disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Aspek/Fokus/Urusan Pemerintahan Daerah/Indikator	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
I.I	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi			
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,80-4,30	2,61*
2	PDRB Perkapita	Juta Rupiah	33,57-34,15	35,62*
3	Indeks Gini	Angka	0,30-0,29	0,315*
4	Nilai Tukar Petani	Angka	110,04	124,98*
I.II	Fokus Kesejahteraan Sosial			
1	Indeks Pembangunan Mansia	Angka	71,25	71,04*
2	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	13,04	12,64*
3	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,12	8,70*
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,08	12.14*
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	63,79	73,75*
6	Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun)	Persen	1710	19,8*
7	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	4,80	4,60*
8	Jumlah Titik Kawasan Kumuh	Lokasi	55	61*
9	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,24	0
10	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Predikat	Nindya	0
11	Indeks Desa Membangun	Angka	0,6900	0
I.III	Fokus Seni Budaya dan Olahraga			
1	Persentase Kesenian Budaya yang dilestarikan	Persen	9,00	0
2	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi	Orang	8	0
I.IV	Fokus Reformasi Birokrasi			
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	0
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Angka	79,00	0
3	Nilai Sakip	Predikat	B	B
4	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif
II	ASPEK PELAYANAN UMUM			
II.I	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib			

A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
I	Pendidikan			
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	74,00	72,20
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	92,14	99,08
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	70,50	72,17
4	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan dasar	Persen	81,77	80,87
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	Persen	93,07	89,50
6	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	62,14	50,86
7	Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD	Persen	100	80,87
8	Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan SMP	Persen	95,66	71,17
9	Angka Putus Sekolah	Persen	0,21	0,074*
10	Angke Melek Huruf (AMH)	Persen	94,84	98,34*
11	Rasio Guru SD terhadap Siswa	Rasio	1 : 13	1 : 11*
12	Rasio Guru SMP terhadap Siswa	Rasio	1 : 13	1 : 8*
II	Kesehatan			
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kasus	9	14*
2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kasus	3	5*
3	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Kasus	200	0
4	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1:5.773	0
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	98,08*
6	Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	100*
7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	100	92,80*
8	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	54,55	0
9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	85,71	93,00
10	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	3	5*
11	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	9	14*
12	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	95,00	89,00*
13	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Persen	30,00	0.50*
14	Insidensi TB per 100.000 penduduk	Persen	18,15	38,08
15	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	Persen	23,80	31,67
16	<i>Treatment coverage</i> pada pasien TB	Persen	100	98,08
17	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	100	18,76
18	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Unit	11	100
19	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	Persen	100	66,70*
20	Persentase Sarana Produksi UKOT	Persen	100	47*
21	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk	Angka	1.37	15,91*
22	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	Angka	11.47	128,42*
23	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	Angka	12.47	235,64*
III	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	KM	674,08	460,10*

2	Rasio Rumah Tinggal Bersanitasi	Persen	75,00	96,37
3	Persenase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Alirasn Air Tidak Tersumbat	Persen	60,00	0
4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persen	43,50	45,41
5	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minuma yak, Perkotaan dan Perdesaan	Persen	43,50	45,41
6	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	78,50	96,37
7	Panjang jaringan irigasi primer kewenangan daerah yang dibangun	Km	50.00	42,29
8	Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi	Persen	68.00	63,21
9	Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun	Persen	12,00	7,08
10	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	Persen	80.00	67,00
11	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Persen	43,50	42,29
12	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persen	50,00	10,53
13	Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Peta Analog dan Peta Digital	Dok	1	1
14	Ketersediaan dokumen RDTR Kecamatan	Dok	1	-
IV	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana Sarana Umum	Persen	50.00	96,84
2	Persentase Rumah Susun Sewa Terpelihara	Persen	100	100
3	Persentase warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	11,33	12,92
5	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persen	100	100
6	Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	0.5	0.0
7	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana Umum	Persen	43,20	87,50
V	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persen	100	100
2	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	30
4	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	100	80,00
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	0,00
6	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	8,00

7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Persen	100	30,00
8	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	80,00
9	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah	Persen	100	0,00
VI	Sosial			
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	43,99	12,69
2	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	11,79	7,78
3	Persentase (%) Lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Persen	100	1,25
4	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	Persen	100	0
5	Persentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100
6	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	Persen	87,51	46,11*
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar			
I	Tenaga Kerja			
1	Persentase Sengketa Pengusaha -Pekerja Tahun yang Tertangani	Persen	100	100
2	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Komputer	Persen	0,50	0
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Persen	67,00	62,00*
4	Pesentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	0,018	0
II	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persen	1.34	89,00
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	0.047	59,00
2	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Tertangani	Persen	48,21	0,1
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	0.11	55,34*
5	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100
6	Cakupan Anak korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	Persen	100	100
7	Persentase ARG pada Belanja APBD	Persen	0.013	0.052*
8	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100
III	Pangan			
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor (Angka)	85,20	84.70*
2	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	28.000	26.833

3	Ketersedian Energi per kapita	(kkal/ kap/ hari)	2.400	2.248
4	Ketersedian Protein per kapita	(gr/kap/ hari)	63	63,40
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen	60.00	100
IV	Pertanahan			
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen	57.00	35,87
2	Persentase penerbitan Izin Lokasi	Persen	100	0*
3	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reformasi Agraria	Kepala Keluarga	5.000	0
4	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Ha	11,20	1,66*
V	Lingkungan Hidup			
1	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air	Angka	87.77	70*
2	Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara	Angka	58.74	93,12*
3	hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	77,18	78,60*
4	Penurunan EMisi GRK	Persen	11,50	
5	RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota yang Terintegrasi	Dokumen	9	
6	Persentase Ketersediaan Dokumen KLHS terhadap K/R/P	Persen	100	100
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	71,43*
8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	Persen	1	0
9	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	Persen	57,43	36
10	Persentase jumlah pengurangan timbulan sampah	Persen	6,00	5,00*
11	Persentase jumlah penanganan timbulan sampah	Persen	21,37	20,48*
12	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah	Persen	5.30	5*
VI	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
1	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	Persen	100	100*
2	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Status	Sudah	Sudah*
3	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Persen	100	97,60*
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persen	96.00	99,91
5	Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga (KK)	Persen	90.00	0*
6	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	60.00	87,73
VII	Pemberdayaan Masyarakat Desa			
1	Persentase PKK Aktif	Persen	100	100*
2	Persentase Posyandu Aktif	Persen	100	100*
3	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aktif	BUMDes	97	29

4	Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persen	100	100*
5	Persentase Desa/Pekon yang muatan RPJMDes-nya sesuai dengan RPJMD Kabupaten	Persen	100	90*
6	Persentase Desa Tertinggal	Persen	33,49	3,45*
7	Persentase Desa Mandiri	Persen	4,31	7,76*
VIII	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
1	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.13	2,43
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	76.77	75,80
3	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out KB)	Persen	12.00	18,50*
4	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persen	81.92	75,45*
5	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Angka	60,10	61,42*
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0.95	1,42
7	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	62,50	64,90
8	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	76.40	75,80
9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	7,00	3,80
10	Persentase masyarakat yang terjangkau program bangga kencana	Persen	70.00	0,00*
11	Angka Kelahiran Remaja umur 15-49 tahun (age spicific fertility rate /ASFR 15-19)	Angka	31	23,30
12	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	22.50	21,20
13	Persentase Bayi Umur Dua Tahun yang Stunting	Persen	18.00	16,10
14	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikuti BKB	Persen	31.00	83,66
IX	Perhubungan			
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Predikat	sangat baik	Baik*
2	Jumlah rekomendasi uji KIR angkutan umum	Jumlah	65	-
3	Persentase prasarana yang memenuhi standar dalam kondisi baik	Persen	90,00	50,00*
4	Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum	Persen	77.00	89,00*
5	Persentase sarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	50.00	65.00*
6	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	90.00	0,42*
7	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan Roda 4	Persen	20.00	100*
X	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase Informasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang Terpublikasi	Persen	95.00	90,00*
2	Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - government yang mendukung smart city dan layanan publik yang berfungsi baik	Persen	85.00	81,82*
3	Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik	Persen	95.00	90,00*
4	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	25.00	30,76*
5	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	Persen	70.00	75*

6	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	Persen	70.00	77,78*
XI	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
1	Jumlah UKM non BPR/LKM aktif	Jumlah	350	2.432
XII	Penanaman Modal			
1	Jumlah/nilai investasi PMA dan PMDN	Juta Rupiah (Rp)	398.652	277.186
2	Rasio daya serap tenaga kerja	Orang/ Per Usahaan	192	21*
3	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	21	4,71*
6	Rasio tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan	Persen	80.00	80,00*
7	Persentase terpenuhinya regulasi/kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta penerapan Online Single Submission (OSS)	Persen	100	100*
8	Persentase penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG)	Persen	100	1
9	Persentase penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman berakohol (SIUP MB)	Persen	80.00	2
10	Rasio jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100*
11	Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan	Laporan	5	5*
XIII	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persen	42	35
2	Persentase wirausaha muda	Persen	1.39	1,62
3	Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi	Persen	15,46	14,48
4	Atlet Berprestasi	Jumlah	25	32
5	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1.39	1,72
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	45,85	47,25
7	Jumlah Wirausahaan Muda Mandiri	Jumlah	170	155
8	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	7.10	7,00
XIV	Statistik			
1	Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik	Dok	2	1*
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100*
3	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100*
XV	Persandian			
1	Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik	Persen	100	100*
XVI	Kebudayaan			
1	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang DIrevitalisasi dan Inverisasi	Persen	100	100
XVII	Perpustakaan			
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Angka	0.07	0.043*
2	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	2.62	0.157*
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	Jumlah	186	894*
XVIII	Kearsipan			

1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	35.00	0,00*
2	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	55	262*
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	75.00	85,50*
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	90.00	43,60*
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
I	Kelautan dan Perikanan			
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	14.708	15.376*
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19.497	110*
3	Angka konsumsi ikan	Kg/kap/Th	42,50	39*
4	Cakupan bina kelompok nelayan	Jumlah	310	246*
II	Pariwisata			
1	Lama kunjungan Wisata	Hari	9	9*
2	Kontribusi PAD sektor pariwisata	Persen	3,18	9,29
3	Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik	Rupiah/Kunjungan	1.400.000	1.350.000*
5	Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara	Rupiah/Kunjungan	8.350.000	8,300,000*
6	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	501	292
7	Jumlah wisatawan domestic	Orang	614.788	73,622
8	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestic	Persen	23,00	24,85*
9	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	Persen	23.00	21,53*
10	Jumlah akomodasi pariwisata (hotel/losmen)	Jumlah	70	83
III	Pertanian			
1	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	Persen	88.00	99.00*
2	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persen	88.00	83,70*
3	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton/Tahun	113.136	59.439
4	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton/Tahun	36.689	31.491*
5	Jumlah Produksi Hewan Ternak	Ekor/Tahun	109.255	121.056*
IV	Perdagangan			
1	Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang	Persen	71.00	50
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	Persen	11.58	15,92*
V	Perindustrian			
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persen	42.00	40,00*
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	4,00	3.95*
3	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	Persen	25.00	20.00*

	pembangunan industri dalam yang ditetapkan dalam RPIK			
4	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	1.96	2,00*
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	75.00	85.00*
VI	Transmigrasi			
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina	Lokasi	1	1*
VII	Energi			
1	Rasio Elektrifikasi	Persen	85,00	
2	Persentase Desa Teraliri Listrik	Persen	100	98,27*
D	UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH			
I	Sekretariat Daerah			
2	Tingkat Layanan Administrasi Umum	Persen	100	100*
3	Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum Daerah yang Berkualitas	Persen	100	100*
II	Sekretariat DPRD			
1	Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan Program- Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia
2	Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang Terintegrasi dengan Program-Program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran	Status	Tersedia	Tersedia
3	Tersedianya Rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten	Status	Tersedia	Tersedia
E	UNSUR PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH			
I	Perencanaan			
1	RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia*
2	RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Status	Tersedia	Tersedia*
3	RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Status	Tersedia	Tersedia*
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	93,33*
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100*
6	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100*
7	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra)	Persen	100	100*
8	Persentase pencapaian target program pembangunan daerah	Persen	100	97,34*
II	Keuangan			
1	Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Perubahan RAPBD	Persen	100	100
2	Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah Daerah	Persen	100	100
3	Persentase ketercapaian target pendapatan daerah	Persen	97,39	22,43
4	Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah	Persen	4,62	3,32

5	Rasio belanja modal terhadap total belanja Daerah	Persen	31,78	4,10
III	Kepegawaian			
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	Persen	11,07	14,46*
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan	Persen	22.64	-
3	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	73,38	-
IV	Pendidikan dan pelatihan			
1	Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar Formasi Umum	Persen	100	-
V	Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase Implementasi Rencana kelitbangan	Persen	95,00	87,50*
2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persen	80.00	84,00*
3	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	100*
4	Persentase kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Persen	90.00	90.00*
F	UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH			
1	Inspektorat			
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persen	100	95,00
2	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan pada objek pemeriksaan	Persen	90,00	80,00
3	Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP	Persen	100	90,00
4	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Persen	100	75
G	UNSUR KEWILAYAHAN PEMERINTAH DAERAH			
1	Kecamatan			
1	Presentase Koordinasi Perencanaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta Pelayanan Administrasi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	100	99,00*
2	Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan/Pekon	Persen	85.00	85,00*
3	Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat) dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persen	100	80,00*
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
1	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	51,00	90,00
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	84.92	82,87
3	Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini terhadap Kerawanan Konflik Sosial	Persen	80.00	100
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
III,1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP
2	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	17,49	0
3	Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)	Pesen	6,55	0
4	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Terhadap PDRB	Persen	1,78	1
5	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	Persen	25	0

6	Persentase Koperasi Aktif	Persen	52,50	73
III.2	Fakus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur			
1	Indeks Kualitas Infrastruktur	Angka	55	0
2	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	42,50	44,68
3	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	Persen	43,50	45,41
4	Rasio Jaringan Irigasi	Persen	57,50	41.31
5	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW	Persen	56,20	56,20
6	Indeks Resiko Bencana	Angka	180,24	188,85*
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	74,53	76,45
III.3	Fokus Iklim Investasi			
1	Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS yang Tertangani	Persen	100	100
2	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	100
III.4	Fokus Sumber Daya Manusia			
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,41	3,04*
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	74,71	72,41*

Sumber : RKPD 2025 dan Dlolah, 2025

*Data Tahun 2024

Data capaian triwulan I tahun 2025 masih didominasi oleh data capaian 2024 karena ada bebrpa data yang belum dipublikasi oleh pihak yng berwenang dan penatapan data yang yang diukur pertahun. Pada aspek kesejahteraan masyarakat tercatat sebanyak 21 ndikator, aspek pelayanan umum terdri dari 226 indikator dan aspek daya saing daerah sebanyak 17 indikator. dari 264 indikator kinerja adarah di atas masih belum menunjukkan kinerja karena masih di triwulan I tahun 2025 dimana di triwulan tersebut masih dalam proses persiapan kegiatan sehingga belum mampu mendongkark capain indikator kinerja daerah Kabupaten Pesisir Barat. Indikator knerja daerah di atas merupakan indikator yang terdapat pada RPJMD Tahun 2021-2026.

2.1.4. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara, berikut pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan (6) Sosial.

Data yang disajikan merupakan data yang dihimpun melalui aplikasi e-SPM milik Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri hingga Triwulan I Tahun 2025. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah yang mengampu pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Berikut ditampilkan capaian SPM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

a) SPM Urusan Pendidikan

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator		Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	100	99,53*
			Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun		89,34
		Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Angka Literasi SD	100	58,61
			Angka Literasi SMP		73,65
			Angka Numerasi SD		53,19
			Angka Numerasi SMP		67,03
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan		100	5,51
		Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Berdasarkan hasil Asesmen Nasional		100	63,12
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	100	50,86

Sumber : Dinas P dan K, 2025

Tabel di atas menunjukkan capaian SPM pada urusan pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang secara total mencapai angka

51,26%. Keseluruhan angka capaian dari indikator pendidikan ini tentu saja menjadi catatan penting dalam proses peningkatan kualitas SDM dan pendidikan di daerah yang perlu melakukan akselerasi percepatan pencapaian target-target kinerja hingga selesainya tahun 2025. Permasalahan utama dari capaian SPM Pendidikan ini adalah belum optimalnya pelayanan pendidikan dikarenakan belum meratanya SDM Pendidikan secara proposional termasuk belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang perlu ditingkatkan lagi.

b) SPM Urusan Kesehatan

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	20,44
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	15,60
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	16,40
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	21,24
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	0
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	24,37
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	24,37

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	14,60
9	Pelayanan Kesehatan Penderita <i>Diabetes Melitus</i>	Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	18,27
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	90,55
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga <i>Tuberculosis</i>	Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	28,14
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia <i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	23,50

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara umum capaian masing-masing indikator SPM pada Kesehatan belum mampu mencapai target 25,00% sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Gambaran total capaian SPM baru mencapai 24,79%. Tentunya komitmen untuk peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat di semua sektor wajib menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan urusan pemerintahan kesehatan. Permasalahan utama dalam proses pencapaian SPM Kesehatan yang belum memenuhi target hingga Triwulan I Tahun 2025 (minimal 25%) adalah masih rendahnya keterbukaan dan kemauan dari masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Hal ini tentunya berbanding lurus dengan masih belum optimalnya proses sosialisasi oleh unit layanan kesehatan di masyarakat dan juga tingginya biaya masyarakat dalam menuju fasilitas kesehatan terdekat.

c) SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6 Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	s.d. TW II Tahun 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	0
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100	0

Sumber : Dinas PU dan PR, 2025

Untuk pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum belum ada *progress* hingga Triwulan I Tahun 2025. Hal ini masih dapat dimaklumi, dikarenakan pencapaian pekerjaan fisik baru akan selesai pada Triwulan IV. Namun demikian, usaha-usaha perbaikan kinerja dan peningkatan pendanaan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan utama dari pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat adalah pendanaan, dimana luasan daerah yang menjadi kewenangan tidak berbanding lurus dengan kemampuan daerah dalam membiayai seluruh pembangunan. Terlebih daerah lebih banyak mengandalkan pendanaan transfer untuk pembangunan infrastruktur.

d) SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.7 Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi	100	0

	Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	penyediaan rumah yang layak huni		
--	--	----------------------------------	--	--

Sumber : Dinas PR dan KP, 2025

Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian indikator Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota mencapai 100% sedangkan indikator Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masih nihil karena bersifat tentatif dan di tahun 2025 belum ada kebijakan yang berkaitan dengan indikator dimaksud. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian SMP Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah mencapai target 100% di triwulan I tahun 2025 ini.

- e) SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Capaian pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh (i) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta (ii) Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8 Pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100	0
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	0
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	8
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	30

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	80

Sumber : Satpol PP – Damkar dan BPBD, 2025

Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 baru mencapai target 23,60%. Pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan konsistensi dalam menjaga capaian indikator perlu terus diupayakan oleh Pemerintah Daerah terlebih Kabupaten Pesisir Barat berada pada daerah rawan bencana. Masih relatif minimnya kemampuan pendanaan kembali menjadi masalah utama dari pelaksanaan urusan Trantibumlinmas. Ditambah lagi dengan masih minimnya jumlah sarana dan prasarana kebencanaan dan terbatasnya jumlah SDM bila dibandingkan dengan luasan wilayah yang menjadi kewenangan.

f) SPM Urusan Sosial

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial hingga pada triwulan I Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 Pencapaian SPM Bidang Sosial sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target (%)	s.d. TW I Tahun 2025 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	2,05
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	8,21
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	0,55

4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	0
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Data pada pencapaian SPM Urusan Sosial hingga Triwulan I Tahun 2025 mencapai angka 22,16%. Permasalahan utama dari belum optimalnya pelayanan pada urusan sosial adalah pendanaan dan juga luasan daerah administratif yang menjadi kewenangan daerah serta masih minimnya jumlah SDM pelaksana urusan. Hal ini tentu saja wajib menjadi catatan bagi Dinas Sosial sebagai pengampu urusan dimaksud.

2.1.5. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Semester Triwulan I pada tahun 2025 ini bertujuan untuk:

- 1) Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025;
- 2) Memperoleh gambaran capaian target kinerja (*outcome* dan *output*) dari masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025, Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029;
- 3) Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I Tahun 2025;
- 4) Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD pada tahun-tahun berikutnya pada umumnya dan Perubahan RKPD Tahun 2025 pada khususnya.

Laporan evaluasi ini bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 202 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester anggaran (Januari-Maret Tahun 2025).

Berdasarkan data yang di dapat dari dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025, diperoleh jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang disajikan pada tabel berikut:

abel 2.10 Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Subkegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4	14	73
2	Dinas Kesehatan	5	20	111
3	Dinas PUPR	10	19	52
4	Dinas PRKP	5	15	21
5	BPBD	2	10	17
6	Satpolpp Damkar	3	11	20
7	Dinas Sosial	5	11	27
8	Dinas Transnakerin	7	16	22
9	Dinas PPPAKB	9	19	46
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8	11	36
11	Dinas Lingkungan Hidup	6	11	27
12	Dinas Dukcapil	5	11	23
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	4	10	28
14	Dinas Perhubungan	3	13	22
15	Dinas Kominfotiksan	5	12	35
16	Dinas Koperasi, UMK Perdagangan	6	13	26
17	DPMPTSP	5	11	21
18	Dinas Pora	3	13	32
19	Dinas Perikanan	5	11	30
20	Dinas Pariwisata	4	10	23
21	Sekretariat Daerah	5	24	63
22	Sekretariat DPRD	2	15	48
23	Bappelitbangda	4	15	43
24	BPKAD	3	13	43
25	Bapenda	2	7	17
26	BKPSDM	3	9	26
27	Inspektorat	2	11	34
28	Kesbangpol	6	10	15
Jumlah		131	365	979

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Laporan evaluasi ini bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2025 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu triwulan perencanaan dan anggaran (Maret 2025).

Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2025 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 yang terbagi atas kelompok urusan pemerintahan daerah yang terbagi kedalam 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan pemredikatan yang diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 91% ($91\% \leq 100\%$);
- 2) Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 76% sampai dengan 90% ($76\% \leq 90\%$);
- 3) Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 66% sampai dengan 75% ($66\% \leq 75\%$);
- 4) Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 51% sampai dengan 65% ($51\% \leq 65\%$); dan
- 5) Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% ($\leq 50\%$).

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut (dalam hal ini, secara umum asumsi pencapaian kinerja pada Triwulan I adalah 25%):

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;
- 2) Hasil Sedang, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup);
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah, Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut evaluasi hasil RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, sebagai berikut:

a) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2025, dilakukan melalui 2 program; 11 kegiatan; dan 48 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan nilai 10,40% dan realisasi anggaran 28,03%. Dengan demikian capaian kinerja pada urusan ini masih sangat rendah sehingga perlu percepatan pencapaian target kinerja.

Secara umum tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan, dikarenakan capaian kinerja rata-rata akan tinggi di semester II, begitu pula dengan realisasi keuangan telah sesuai angkas yang telah direncanakan. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (i) Melakukan peningkatan kompetensi SDM dan (ii) Percepatan proses administrasi dan perencanaan dengan tetap mematuhi dan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.

2) **Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan tahun 2025, dilakukan dengan 4 program; 17 kegiatan; dan 84 sub kegiatan oleh Dinas Kesehatan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah sebesar 8,90% dan realisasi keuangan sebesar 3,10%, dengan demikian capaian kinerja urusan kesehatan dalam kategori sangat rendah. Hal ini disebabkan output kegiatan ada pada triwulan I sehingga perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah percepatan pencapaian kinerja dengan optimal, terutama untuk kegiatan-kegiatan DAK.

3) **Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 10 program; 23 kegiatan; dan 49 sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 28,70% dengan realisasi keuangan sebesar 21,40%. Capaian kinerja urusan ini dikategorikan sangat rendah.

4) **Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program; 16 kegiatan; dan 33 sub kegiatan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Capaian kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 22,69% dengan realisasi anggaran 14,44%. Capaian kinerja triwulan I pada urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.

5) **Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dilaksanakan melalui 3 program; 10 kegiatan; dan 20 subkegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar adalah sebesar 15,80% dengan realisasi keuangan adalah 20,95%, dengan demikian kinerja urusan ini pada triwulan I tahun 2025 masuk dalam kriteria sangat rendah.

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui 2 program; 11 kegiatan; dan 35 subkegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah 15,19% dengan realisasi keuangan adalah 7,02%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.

6) **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial tahun 2025 dilakukan melalui 4 program; 12 kegiatan; dan 31 subkegiatan. Capaian kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Sosial sampai dengan triwulan I adalah 18,12% dengan realisasi keuangan 21,16%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.

b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) **Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program; 13 kegiatan; dan 24 sub kegiatan melalui Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja sampai dengan triwulan I adalah 15,22% dengan realisasi keuangan 19,10%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Mayoritas output kegiatan selesai di triwulan IV, maka menyebabkan capaian pada triwulan I rendah. Agar menjadi perhatian untuk percepatan pencapaian kinerja.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 program; 11 kegiatan; dan 15 sub kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan I adalah 25,00% dengan realisasi keuangan 5,06%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Dengan tingkat capaian tersebut, catatan ke depannya adalah percepatan pencapaian, karena output subkegiatan yang berupa laporan maupun dokumen yang akan selesai di triwulan IV.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 program; 12 kegiatan; dan 35 sub kegiatan. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pangan sampai dengan triwulan I adalah 21,97% dengan realisasi keuangan 17,96%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah sehingga diperlukan percepatan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas izin lokasi, sengketa tanah garapam, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subjek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*, tanah ulayat, tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 3 program; 3 kegiatan; dan 4 subkegiatan dengan capaian kinerja triwulan I 29,63% dengan realisasi keuangan 13,41%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah komitmen yang tinggi dari pimpinan dan semua aparatur untuk segera menyelesaikan kegiatan-kegiatan pada Urusan Pertanahan. Diharapkan semangat tersebut terus dijaga demi percepatan pencapaian kinerja. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah kondisi fiskal daerah yang berpengaruh pada capaian kinerja dan keuangan.

Keterbatasan kondisi fiskal daerah menyebabkan terhambatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran daerah. Kemungkinan tidak tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 7 program; 14 kegiatan; dan 38 sub kegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh

Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan I adalah 32,49% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 18,85%. Dengan demikian capaian target urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 program; 13 kegiatan; dan 33 subkegiatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan I adalah 15,03% dengan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 17,82%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk kategori sangat rendah.

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program; 10 kegiatan; dan 31 sub kegiatan. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon sampai dengan triwulan I adalah 9,81% dengan realisasi keuangan 7,57%. Pada triwulan I capaian kinerja masuk dalam kategori sangat rendah dan membutuhkan percepatan pencapaian target kinerja.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program; 14 kegiatan; dan 53 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan I adalah 12,88% dengan realisasi keuangan 10,39%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan oleh Dinas Perhubungan di tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 10 kegiatan; dan 24 subkegiatan. Capaian Kinerja Urusan Wajib Perhubungan sampai dengan triwulan I adalah 24,19% dengan realisasi keuangan 22,17%. Capaian ini masuk dalam kategori sangat rendah.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program; 8 kegiatan; dan 30 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan triwulan I adalah 14,47% dengan realisasi keuangan 17,93%. Dikarenakan capaian target masih dibawah 25% maka urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Faktor pendorong tingginya capaian kinerja adalah ketersediaan SDM sesuai dengan bidang atau kegiatan dilaksanakan, manajemen SDM yang efektif, rutinitas evaluasi triwulan/semester dan akhir tahun serta tingginya capaian sub kegiatan yang melebihi dari target capaiannya.

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 program; 10 kegiatan; dan 23 subkegiatan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Capaian kinerja Urusan

Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan I adalah 6,06% dengan realisasi keuangan 15,19%. Dengan demikian, maka urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Rencana tindak lanjutnya adalah memaksimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja, dikarenakan sebagian besar target kinerja akan selesai di semester II.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di tahun 2025 dilaksanakan melalui 6 program; 11 kegiatan; dan 25 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan I adalah 13,76% dan realisasi keuangan 11,06%. Capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Dibutuhkan percepatan dalam pencapaian target kinerja, karena sebagian besar keluaran kegiatan berupa laporan akan selesai di triwulan II.

Keterbatasan anggaran daerah pada proses penyusunan dokumen anggaran menyebabkan program dimaksud tidak dapat dianggarkan. Hal ini tentunya menyebabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta target capaian indikator kinerja daerah sedikit banyak terganggu. Kemungkinan tidak tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 program; 13 kegiatan; dan 32 subkegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga sampai dengan triwulan I adalah 14,43% dengan realisasi keuangan 18,56%. Diharapkan terus meningkatkan pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar lebih maksimal dalam pencapaian target yang ada, karena urusan ini capaian kinerjanya masuk dalam kategori sangat rendah.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program; 1 kegiatan; dan 2 sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik sampai dengan triwulan I adalah 0% dengan realisasi keuangan 13,01%. Dengan capaian nihil maka urusan ini masuk dalam capaian kinerja yang sangat rendah.

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan Urusan Persandian pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 2 subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian sampai dengan triwulan I adalah 17,63% dengan realisasi keuangan 8,43%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran adalah ketersediaan SDM sesuai dengan bidang atau kegiatan dilaksanakan, manajemen SDM yang efektif, rutinitas evaluasi triwulan/semester dan akhir tahun serta tingginya capaian sub kegiatan yang melebihi dari target capaiannya.

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 2 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sampai dengan triwulan I masih nihil bagi dari capaian kinerja maupun realisasi anggaran.

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan oleh Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I adalah Sangat Rendah dengan nilai 0,00% dengan realisasi 16,46%. Dengan capaian kinerja dengan kategori sangat rendah karena belum adanya capaian kinerja.

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan pada Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I adalah 16,67% dengan realisasi keuangan 0%. Dengan demikian kinerja urusan ini masuk kriteria sangat rendah. Rencana tindak lanjutnya adalah memaksimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja, dikarenakan sebagian besar target kinerja akan selesai di semester II.

c) Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program; 14 kegiatan; dan 36 subkegiatan oleh Dinas Perikanan. Capaian kinerja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan I adalah 23,05% dengan realisasi keuangan 18,65%. Dengan demikian kategori capaian kinerja urusan ini adalah sangat rendah..

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program; 12 kegiatan; dan 38 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata sampai dengan triwulan I adalah 9,05% dengan realisasi keuangan 7,41%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masih sangat rendah.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program; 10 kegiatan; dan 20 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan triwulan I adalah 14,15% dengan realisasi keuangan 17,96%. Capaian yang masih sangat rendah, dikarenakan keluaran kegiatan memang direncanakan dicapai pada semester II. Mengingat hal tersebut diharapkan optimal meningkatkan pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar lebih maksimal dalam pencapaian target yang ada.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan 3 program; 4 kegiatan; dan 7 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan sampai dengan triwulan I adalah nihil baik dari capaian kinerja maupun realisasi keuangan. Diperlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan seluruh aparatur dalam percepatan pencapaian target kinerja.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 5 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian yang diampu oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan triwulan I adalah nihil baik capaian kinerja maupun realisasi keuangan. Diperlukan percepatan capaian target di tahun 2025.

6) **Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian sampai dengan triwulan I adalah nihil baik capaian kinerja maupun realisasi keuangan. Keterbatasan anggaran merupakan alasan utama tidak dilaksanakan program. Kemungkinan tidak tercapainya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

d) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) **Sekretariat Daerah**

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program; 20 kegiatan; dan 74 subkegiatan. Capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I adalah 10,16% dengan realisasi keuangan 12,44%. Capaian sangat rendah ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang didapat outputnya di akhir tahun. Rencana tindak lanjutnya adalah mengoptimalkan pencapaian kinerja sehingga mampu maksimal mencapai target yang telah ditetapkan.

2) **Sekretariat DPRD**

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 15 kegiatan; dan 46 subkegiatan. Capaian kinerja Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan I 22,18% dengan realisasi keuangan 23,55%. Capaian tersebut telah sesuai dengan perencanaan pada kinerja dan keuangan di triwulan I.

e) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) **Perencanaan**

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program; 13 kegiatan; dan 49 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan sampai dengan triwulan I adalah 37,94% dengan realisasi keuangan 15,57%, dengan kriteria sangat rendah. Target kegiatan yang berupa dokumen di sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai penopang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, baru akan terealisasi di akhir tahun sehingga membawa dampak yang signifikan terhadap angka capaian kinerja di triwulan satu. Optimalisasi pencapaian target kinerja adalah tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan II.

2) **Keuangan**

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan 2 program; 8 kegiatan; dan 30 subkegiatan dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan I 23,67% dengan realisasi 12,53%. Kriteria sangat rendah pada urusan keuangan yang khusus mengelola pendapatan daerah ini. Sedangkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan 3 program; 13 kegiatan; dan 51 subkegiatan dengan Capaian kinerja 8,40% dengan realisasi keuangan 9,13% atau masuk dalam kategori sangat rendah. diperlukan komitmen pimpinan dalam menyelesaikan kegiatan, serta kedisiplinan aparatur yang ada. Akan tetapi keterbatasan SDM yang ada dianggap sebagai penghambat pencapaian kinerja. Dari permasalahan tersebut, disimpulkan rencana tindak lanjutnya adalah penguatan kompetensi aparatur serta selalu melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang rutin di evaluasi.

3) **Kepegawaian**

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 6 kegiatan; dan 30 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian sampai dengan triwulan I adalah 8,42% dengan realisasi keuangan 13,81% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penopang Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Kepegawaian harus meningkatkan pencapaian kinerja, mengingat target kinerja akan dicapai pada triwulan II.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan di Tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program, 2 kegiatan dan 2 subkegiatan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun capaian kinerja hingga triwulan I adalah 0% dan realisasi anggaran 32,05% dengan kategori Sangat Rendah. Capaian kinerja yang masih 0% dikarenakan diklat yang belum dilaksanakan karena menunggu jadwal dari Bandiklat Provinsi Lampung.

5) Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program; 3 kegiatan; dan 8 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan triwulan I adalah 0% dan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 6,05%. Capaian Kinerja sangat rendah dikarenakan output Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan adalah berupa Laporan akhir maupun dokumen Kajian.

f) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat

Penyelenggaraan Urusan Pengawasan pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program; 11 kegiatan; dan 35 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat sampai dengan triwulan I adalah 15,63% dengan realisasi keuangan 17,71% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Rendahnya capaian dikarenakan keluaran kegiatan yang baru akan selesai di triwulan IV.

g) Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program; 12 kegiatan; dan 32 subkegiatan. Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan I adalah 8,12% dengan realisasi keuangan 8,68% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Rencana tindak lanjutnya adalah mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian kinerja lebih optimal, karena sesuai perencanaan, target akan tercapai di triwulan IV.

Berikut rekapitulasi hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 berdasarkan urusan pemerintahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.11 Skala Nilai Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Bidang Urusan	Realisasi Capaian (%)		Predikat
		Kinerja	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pendidikan	10,40	28,03	SR

2	Kesehatan	8,90	3,10	SR
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	28,70	21,40	SR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	22,69	14,44	SR
5	Trantibumlinmas (Polpp)	15,8	20,95	SR
6	Trantibumlinmas (BPBD)	15,19	7,02	SR
7	Sosial	18,12	21,16	SR
8	Tenaga Kerja	15,22	19,10	SR
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25,00	5,06	SR
10	Pangan	21,97	17,96	SR
11	Pertanahan	29,63	13,41	SR
12	Lingkungan Hidup	32,49	18,85	SR
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15,03	17,82	SR
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	9,81	7,57	SR
15	Pengendalian Penduduk dan KB	12,88	10,39	SR
16	Perhubungan	24,19	22,17	SR
17	Komunikasi dan Informatika	14,47	17,93	SR
18	Koperasi dan UKM	6,06	15,19	SR
19	Penanaman Modal	13,76	11,06	SR
20	Kepemudaan dan Olahraga	14,43	18,56	SR
21	Statistik	0,00	13,01	SR
22	Persandian	17,63	8,43	SR
23	Kebudayaan	0,00	0,00	SR
24	Perpustakaan	0,00	16,46	SR
25	Kearsipan	16,67	0,00	SR
26	Perikanan	23,05	18,65	SR
27	Pariwisata	9,05	7,41	SR
28	Pertanian	14,15	17,96	SR
29	Perdagangan	0,00	0,00	SR
30	Perindustrian	0,00	0,00	SR
31	Trasmigrasi	0,00	0,00	SR

32	Sekretariat Daerah	10,16	12,44	SR
33	Sekretariat DPRD	22,18	23,55	SR
34	Perencanaan	37,94	15,57	SR
35	Keuangan (BPKAD)	8,40	9,13	SR
36	Keuangan (Bapenda)	23,67	12,53	SR
37	Kepegawaian	8,42	13,81	SR
38	Pendidikan dan Pelatihan	0,00	32,05	SR
39	Penelitian dan Pengembangan	0,00	6,05	SR
40	Pengawasan (Inspektorat)	15,63	17,71	SR
41	Kesbangpol	8,12	8,68	SR
Rata-Rata Capaian		13,90	13,28	SR

Sumber : Hasil Monev Bappelitbangda, 2025

Secara umum, capaian kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Bara masih rendah dimana capaian kinerja Perangkat daerah hanya mencapai 13,90% dengan realisasi anggaran di angka 13,28%. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah untuk dapat segera meningkatkan capaian kinerjanya. Meskipun tantangan efisiensi Pemerintah Pusat diharapkan tidak menjadi kendala yang berarti dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat melalui percepatan pelaksanaan program -program prioritas.

Selanjutnya untuk penjabaran secara lengkap dalam bentuk matrik evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah pada RKPD Tahun 2025 hingga triwulan I ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Pesisir Barat

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			917.896.897.515		791.224.770.692		209.493.914.209		58.729.440.328			0	849.954.211.020	#DIV/0!	93%	Dinas P & K	
	1.01	Bidang Urusan Pendidikan			917.896.897.515		791.224.770.692		209.493.914.209		58.729.440.328		28%		849.954.211.020		93%		
	1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	646.082.291.127	83,5%	645.936.891.127	95%	154.740.926.709	95%	44.310.458.363	100%	29%	1,7854	690.247.349.490	188%	107%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	32.877.747	100,0%	25.187.750	100%	12.400.000	0%	-	0%	0%	95%	25.187.750	95%	77%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.192.007	6 Dokumen	10.200.000	2 Dokumen	7.400.000	Dokumen	-	0%	0%	6 Dokumen	10.200.000	60%	142%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	10 Dokumen	25.685.740	6 Dokumen	14.987.750	2 Dokumen	5.000.000	Dokumen	-	0%	0%	6 Dokumen	14.987.750	60%	58%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	619.542.934.116	100%	359.590.708.695	100%	153.188.328.709	100%	44.040.094.648	100%	29%	2	403.630.803.343	200%	65%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	70 Bulan	619.514.679.802	42 Bulan	359.574.208.695	14 Bulan	153.182.828.709	4 Bulan	44.040.094.648	29%	29%	46	403.614.303.343	66%	65%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun	5 Dokumen	12.842.870	3 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	2.500.000	Dokumen	-	0%	0%	3	7.500.000	60%	58%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	10 Dokumen	10.274.296	6 Dokumen	6.000.000	2 Dokumen	2.000.000	Dokumen	-	0%	0%	6	6.000.000	60%	58%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.02.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	5.137.148	3 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	1.000.000	0	-	0%	0%	3	3.000.000	60%	58%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pendataan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	200.000.000	100%	19.138.500	100%	40.000.000	0%	-	0%	0%	100%	19.138.500	100%	10%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.03.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	19.138.500	1 Dokumen	40.000.000	0	-	0%	0%	1	19.138.500	50%	10%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	2 Urusan	22.609.336.607	2 Urusan	9.117.624.350	2 Urusan	512.500.000	Urusan	222.000.000	0%	43%	100%	9.339.624.350	50%	41%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.05.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket	60.000.000			60 Paket	60.000.000	Paket	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.05.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000	Dokumen	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.05.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000			1 Dokumen	50.000.000	Dokumen	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.05.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	5 Tahun	22.449.336.607	3 Tahun	9.117.624.350	1 Tahun	352.500.000	Tahun	222.000.000	0%	63%	3	9.339.624.350	60%	42%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	2.211.322.715	100%	1.597.715.100	100%	533.516.000	0%	17.768.550	0%	3%	100%	1.615.483.650	100%	73%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	5 Paket	8.424.923	3 Paket	5.280.000	1 Paket	2.000.000	Paket	-	0%	0%	3	5.280.000	60%	63%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.500.000	Paket	0	1 Paket	9.500.000	Paket	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Propaganda , Pameran dan Publikasi	5 Kali	436.657.577	3 Kali	256.375.000	3 Kali	85.000.000	Kali	-	0%	0%	3	256.375.000	60%	59%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang cetak dan Pengadaan Serta terpenuhinya Kebutuhan Alat tulis kantor Rutin	60 Bulan	354.298.821	36 Bulan	286.947.100	12 Bulan	96.016.000	Bulan	-	0%	0%	36	286.947.100	60%	81%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60 Bulan	61.645.776	36 Bulan	67.000.000	12 Bulan	30.000.000	Bulan	-	0%	0%	36	67.000.000	60%	109%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan minum Kantor	55 Bulan	56.508.628	33 Bulan	33.000.000	11 Bulan	11.000.000	Bulan	-	0%	0%	33	33.000.000	60%	58%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah	60 Bulan	1.284.286.991	36 Bulan	949.113.000	12 Bulan	300.000.000	3 Bulan	17.768.550	25%	6%	39	966.881.550	65%	75%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	612.700.000	100%	435.700.000	100%	169.000.000		-	0%	0%	100%	435.700.000	100%	71%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.07.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	80.000.000	2 Unit	72.000.000					0%	0%	2	72.000.000	100%	90%	Dinas P & K	
	1.01.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	532.700.000	14 Unit	363.700.000	29 Unit	169.000.000	Unit	-	0%	0%	14	363.700.000	33%	68%	Dinas P & K	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	430.914.246	100%	484.358.497		204.542.000		25.595.165	0%	13%	1	509.953.662	100%	118%	Dinas P & K	
1.01.01.2.08.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 Bulan	110.962.396	36 Bulan	96.732.497	12 Bulan	42.000.000	3 Bulan	3.595.165	25%	9%	39	100.327.662	65%	90%	Dinas P & K	
1.01.01.2.08.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Berfungsikan Kantor	Tersedianya Sewa Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas	60 Bulan	292.817.434	36 Bulan	371.000.000	12 Bulan	157.000.000	3 Bulan	22.000.000	25%	14%	39	393.000.000	65%	134%	Dinas P & K	
1.01.01.2.08.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Kebersihan Kantor	60 Bulan	27.134.416	36 Bulan	16.626.000	12 Bulan	5.542.000	Bulan	-	0%	0%	36	16.626.000	60%	61%	Dinas P & K	
1.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	442.205.697	100%	522.848.975	100%	80.640.000	0%	5.000.000	0%	6%	1	527.848.975	100%	119%	Dinas P & K	
1.01.01.2.09.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	60 Bulan	436.657.577	36 Bulan	237.806.975	12 Bulan	69.900.000	3 Bulan	5.000.000	25%	7%	39	242.806.975	65%	56%	Dinas P & K	
1.01.01.2.09.003		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	60 Bulan	5.548.120	36 Bulan	285.042.000	12 Bulan	10.740.000	Bulan	-	0%	0%	36	285.042.000	60%	5138%	Dinas P & K	
1.01.02		Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan	100%	271.814.606.387	64,08%	145.287.879.565	100%	54.752.987.500	100%	14.418.981.965	100%	26%	1,6408	159.706.861.530	164%	59%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 12 Tahun	99,66%	158.674.060.308	99,53%	78.708.848.069	99,59%	37.238.499.200	99,53%	9.314.469.880	99,53%	25%	1,9906	88.023.317.949	200%	55%	Dinas P & K	
			SKOR NUMERASI SD	58,99		53,19		56,09		53,19		53,19		106,38	-	180%	#DIV/0!	Dinas P & K	
			SKOR LITERASI SD	63,61		58,61		61,11		58,61		58,61		117,22	-	#VALUE!	#DIV/0!	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.000		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	840.000.000			4 Ruang	840.000.000	Ruang	17.608.485	0%	2%	0	17.608.485	0%	2%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.000		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	250.000.000			1 Ruang	250.000.000	Ruang	8.684.085	0%	3%	0	8.684.085	0%	3%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.000		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit	2.592.000.000			14 Unit	2.592.000.000	Unit	89.379.420	0%	3%	0	89.379.420	0%	3%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.000		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	920.000.000			4 Unit	920.000.000	Unit	31.960.785	0%	3%	0	31.960.785	0%	3%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.003		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	360.000.000			3 Ruang	360.000.000	Ruang	12.569.640	0%	3%	0	12.569.640	0%	3%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.003		Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	600.000.000			3 Unit	600.000.000	Unit	20.845.800	0%	3%	0	20.845.800	0%	3%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.003		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	2 Paket	220.000.000			2 Paket	220.000.000	Paket	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.001		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya perlengkapan Siswa SD	17.963 Siswa	929.585.250	17.963 Siswa	929.585.250		-		-	0%	0%	17.963 Siswa	929.585.250	100%	100%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.002		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan	20 Kali	556.782.452	4 Kali	133.218.000		-		-	0%	0%	4 Kali	133.218.000	20%	24%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.002		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	#####	302.550.700			#####	302.550.700	Peserta Didik		0%	0%	#####	-	100%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.002		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	489 Orang	5.627.744.500			489 Orang	5.627.744.500	489 Orang	425.200.000	100%	8%	489	425.200.000	100%	8%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.002		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	190 Orang	17.551.855.000	130 Orang	14.497.484.150	60 Orang	260.000.000	Orang		0%	0%	130	14.497.484.150	68%	83%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.002		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	127 Sekolah	96.895.261.687	127 Sekolah	32.847.548.688	127 Sekolah	18.013.522.000	127 Sekolah	8.695.011.000	100%	48%	127 Sekolah	41.542.559.688	100%	43%		
1.01.02.2.01.003		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	87.210.000			30 Orang	87.210.000	Orang		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.003		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	160.000.000			60 Orang	160.000.000	Orang		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.003		Koordinasi Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SD	Terlaksananya Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SD	8 Kali	450.000.000	2 Kali	159.723.670	1 Kali	125.000.000	Kali		0%	0%	2	159.723.670	25%	35%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.003		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	15 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	36.432.200	1 Dokumen	70.000.000	Dokumen		0%	0%	5	36.432.200	33%	24%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.004		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	#####	75.000.000			#####	75.000.000	Komunitas		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.004		Memberikan layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	87.544.000			1 Kegiatan	87.544.000	Kegiatan		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.01.02.2.01.004		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab	25 Unit	23.750.598.720	84 Unit	30.104.856.111	3 Unit	380.000.000	Unit	13.210.665	0%	3%	84	30.118.066.776	336%	127%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.005		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	58 Ruang	5.910.000.000			58 Ruang	5.910.000.000	Ruang		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.01.005		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta yang tersedia	2 Paket	357.928.000			2 Paket	357.928.000	Paket		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 – 15 Tahun	92,39%	97.663.289.249	89,34%	57.645.377.141	90,87%	13.455.762.300	89,34%	3.970.062.855	98%	89,34%	90,87%	61.615.439.996	90,87%	90,87%	Dinas P & K	
			SKOR NUMERASI SMP	70,03		67,03		68,53		67,03		98%	67,03	68,53		68,53	68,53%		
			SKOR LITERASI SMP	75,85		73,65		74,75		73,65		99%	73,65	74,75		74,75	74,75%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.00	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dibangun	25 Unit	45.341.727.818	37 Ruang	22.829.560.897	2 Unit	450.000.000	Unit	15.702.060	0%	3%	37	22.845.262.957	148%	50%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.001		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	1.950.000.000			17 Ruang	1.950.000.000	Ruang	69.493.770	0%	4%	0	69.493.770	0%	4%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.001		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	128.100.000			1 Ruang	128.100.000	Ruang	4.624.000	0%	4%	0	4.624.000	0%	4%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.002		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	103.895.300			1 Paket	103.895.300	Paket		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.002		Pengadaan Perlengkapan Siswa	Tersedianya perlengkapan Siswa SMP	6.366 Paket	329.337.000	6.365 Siswa	372.437.000					0%	0%	6365	372.437.000	100%	113%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.003		Pengembangan Karir Pendidik dan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah	#####	13.048.500.000	422 Siswa	10.288.500.000	#####	1.935.000.000	Peserta Didik		0%	0%	422	10.288.500.000	84%	79%		
1.01.02.2.02.003		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Kegiatan	20 Kali	485.169.369	4 Kali	96.840.000					0%	0%	4	96.840.000	20%	20%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.003		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	#####	102.403.000			#####	102.403.000	Peserta Didik		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.004		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	120 Orang	420.000.000	80 Orang	231.437.889	20 Orang	100.000.000	Orang	6.035.025	0%	6%	80	237.472.914	67%	57%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.004		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	38 Sekolah	34.432.796.762	38 Sekolah	23.514.311.300	38 Sekolah	8.020.504.000	38 Sekolah	3.870.252.000	100%	48%	38 Sekolah	27.384.563.300	100%	80%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.004		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	220 Orang	80.000.000			220 Orang	80.000.000	Orang		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.004		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30 Orang	80.108.000			30 Orang	80.108.000	Orang		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.005		Koordinasi Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SMP	Terlaksananya Perencanaan supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SMP	4 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	135.682.795	1 Dokumen	200.000.000	Dokumen		0%	0%	2	135.682.795	50%	30%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.005		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	48.739.200					0%	0%	2	48.739.200	50%	32%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.005		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	#####	61.452.000			#####	61.452.000	Komunitas		0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.006		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	390.000.000	40 Orang	127.868.060	#####	134.500.000	Komunitas		0%	0%	40	127.868.060	33%	33%	Dinas P & K	
1.01.02.2.02.006		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	109.800.000			1 Ruang	109.800.000	Ruang	3.956.000	0%	4%	0	3.956.000	0%	4%	Dinas P & K	
1.01.02.2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	56,39%	14.222.309.384	50,66%	8.058.150.055	53,52%	3.764.246.000	50,66%	1.024.709.230	50,66%	50,66%	1,0132	9.082.859.285	50,66%	50,66%	Dinas P & K	
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	41,44%		28,05%		33,68%		28,05%		28,05%	28,05%	0,561	-	28,05%	28,05%	Dinas P & K	
1.01.02.2.03.000		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dibangun	10 Unit	1.487.617.261	8 Unit	1.697.934.000	1 Unit	60.000.000	Unit	2.160.000	0%	4%	8	1.700.094.000	80%	114%	Dinas P & K	
1.01.02.2.03.001		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Tersedianya perlengkapan Peserta Disik PAUD	6.600 Paket	161.568.000	6.600 Paket	161.568.000					0%	0%	6600	161.568.000	100%	100%	Dinas P & K	
1.01.02.2.03.001		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Naik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	110 Orang	324.437.760	80 Orang	205.317.760	30 Orang	119.120.000	Orang	-	0%	0%	80	205.317.760	73%	63%	Dinas P & K	
1.01.02.2.03.003		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	25 PAUD	2.095.805.000	PAUD		25 PAUD	50.000.000	PAUD	5.846.100	0%	12%	0	5.846.100	0%	0%	Dinas P & K	
1.01.02.2.03.003		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	119 PAUD	9.195.372.363	119 PAUD	5.706.529.700	117 PAUD	2.095.805.000	117 PAUD	1.002.902.500	100%	48%	23600,00%	6.709.432.200	198%	73%	Dinas P & K	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.03.001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	20 Orang	92.644.000			20 Orang	92.644.000	Orang	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.002	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	32 Orang	94.865.000			32 Orang	94.865.000	Orang	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.003	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4 Dokumen	450.000.000	1 Dokumen	161.912.995	1 Dokumen	30.734.000	Dokumen	-	0%	0%	1	161.912.995	25%	36%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.004	Sosialisasi dan Advokasi Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	4 Kali	320.000.000	3 Kali	124.887.600	1 Dokumen	172.948.000	Dokumen	-	0%	0%	3	124.887.600	75%	39%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.005	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas	172.948.000			5 Komunitas	60.788.000	Komunitas	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.006	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	60.788.000			2 Ruang	400.000.000	Ruang	13.800.630	0%	3%	0	13.800.630	0%	23%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.007	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	#####	400.000.000			#####	244.372.000	Peserta Didik	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.008	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	30 Orang	244.372.000			30 Orang	192.970.000	Orang	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.03.009	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik PAUD yang tersedia	3 Paket	150.000.000			3 Paket	150.000.000	Paket	-	0%	0%	0	-	0%	0%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	6%	1.254.947.446	5,51%	875.504.300	5,76%	294.480.000	5,51%	109.740.000	5,51	37%	5,51	985.244.300	5,51	79%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.04.001	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2 PKBM	1.224.947.446	2 PKBM	875.504.300	2 PKBM	264.480.000	PKBM	109.740.000	0%	41%	2 PKBM	985.244.300	100%	80%	Dinas P & K	
	1.01.02.2.04.002	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	2 Paket	30.000.000,00	Paket	0	2 Paket	30.000.000	Paket	-	0%	..	0	-	0%	0	Dinas P & K	
	1.1.02	KESEHATAN		99	Rp 478.611.922.511	96	Rp 88.500.862.366	98	Rp 105.678.138.818	8	Rp 3.263.945.375	8,0	3,1	8	Rp 3.263.945.375	8	1	Dinkes	
1	1.1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan (%) Kesehatan	95	Rp 170.847.842.320	90	Rp 32.971.544.349	90	Rp 31.420.623.600	21	Rp 2.621.903.686	22,9	8,3	21	Rp 2.621.903.686	22	2	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kesehatan (%) Kesehatan (%)	95	Rp 189.918.439	90	Rp 70.243.992	90	Rp 112.164.400	29	Rp 30.304.600	31,8	27,0	29	Rp 30.304.600	30	16	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 40.311.411	2	Rp 11.623.992	2	Rp 42.025.000	1	Rp 10.040.600	50,0	23,9	1	Rp 10.040.600	20	25	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Rp 10.000.000	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	100,0	100,0					Dinkes	
	1.1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Rp 10.000.000	0	Rp -	1	Rp 5.000.000	0	Rp -	0,0	0,0					Dinkes	
	1.1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	Rp 25.322.308	1	Rp 17.934.000	1	Rp 14.195.000	1	Rp 9.429.000	100,0	66,4	1	Rp 9.429.000	20	37	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Rp 28.390.000	1	Rp 19.542.000	1	Rp 14.195.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Rp 10.000.000	4	Rp 5.000.000	4	Rp 5.000.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Rp 65.894.720	1	Rp 16.144.000	1	Rp 26.749.400	1	Rp 5.835.000	50,0	21,8	1	Rp 5.835.000	3	9	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Pada Dinas Kesehatan (%) Kesehatan (%)	95	Rp 166.635.424.996	90	Rp 28.030.102.801	90	Rp 30.432.623.600	20	Rp 2.428.086.047	22,2	8,0	20	Rp 2.428.086.047	21	1	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	Rp 166.607.567.926	14	Rp 28.018.206.851	14	Rp 30.420.623.600	4	2.428.086.047	28,6	8,0	4	Rp 2.428.086.047	6	1	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp 12.663.687	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10	Rp 10.128.922	2	Rp 3.912.800	2	Rp 4.000.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 5.064.461	1	Rp 2.983.150	1	Rp 3.000.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	95	Rp 577.951.271	95	Rp 140.455.000	0	Rp -	0	Rp -	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut yang disediakan	100	Rp -	100	Rp 91.875.000	0	Rp -	0	Rp 0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Rp -	0	#DIV/0!	Dinkes	
	1.1.02.01.2.05.0009	Pendidikan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Rp 577.951.271	18	Rp 48.580.000	0	Rp -	0	Rp 0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	95	Rp 2.057.547.614	90	Rp 611.585.031	90	Rp 450.215.600	26	Rp 85.070.909	28,8	18,9	26	Rp 85.070.909	27	4	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Rp 30.613.000	1	Rp 6.122.600	1	Rp 6.122.600	1	Rp 3.146.300	50,0	51,4	1	Rp 3.146.300	10	10	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp 26.013.000	12	Rp 10.399.000	1	Rp 8.671.000	1	Rp 4.537.000	50,0	52,3	1	Rp 4.537.000	17	17	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Rp 126.611.536	1	Rp 48.869.335	1	Rp 44.636.760	0	Rp 11.309.503	40,0	25,3	0	Rp 11.309.503	8	9	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Rp 265.617.500	1	Rp 57.662.500	1	Rp 53.123.500	1	Rp 17.611.500	50,0	33,2	1	Rp 17.611.500	10	7	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	5	Rp 179.700.000	1	Rp 34.500.000	1	Rp 36.300.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5	Rp 61.588.000	1	Rp 15.388.000	1	Rp 15.400.000	0	Rp 1.000.000	0,0	6,5	0	Rp 1.000.000	0	2	Dinkes	
	1.1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp 1.367.404.578	12	Rp 438.643.596	2	Rp 285.961.740	0	Rp 47.466.606	20,0	16,6	0	Rp 47.466.606	3	3	Dinkes	
	1.1.02.01.2.07	Pengadaan milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jumlah pengadaan mebel penunjang urusan pemerintah Daerah	100	Rp 346.000.000	100	Rp 3.695.730.000	100	Rp 82.000.000	0	Rp 35.500.000	0,0	43,3		Rp 35.500.000		10	Dinkes	
	1.1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	Rp 126.000.000	1	Rp 42.000.000	1	Rp 42.000.000	0	Rp 10.500.000	0,0	25,0	0	Rp 10.500.000	0	8	Dinkes	
	1.1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Rp 220.000.000	1	Rp 25.000.000	2	Rp 40.000.000	0	Rp 25.000.000	0,0	62,5	0	Rp 25.000.000	0	11	Dinkes	
	1.1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	95	Rp 484.320.000	90	Rp 146.137.525	90	Rp 108.720.000	27	Rp 18.942.130	30,0	17,4	27	Rp 18.942.130	28	4	Dinkes	
	1.1.02.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Rp 12.000.003	1	Rp 50.400.000	1	Rp 12.000.000	0	Rp 2.000.000	40,0	16,7	0	Rp 2.000.000	13	17	Dinkes	
	1.1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan (bulan)	5	Rp 480.000.000	1	Rp 95.017.525	1	Rp 96.000.000	1	Rp 16.942.130	50,0	17,6	1	Rp 16.942.130	10	4	Dinkes	
	1.1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor (bulan)	5	Rp 4.320.000	1	Rp 720.000	1	Rp 720.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	Rp 1.092.359.288	87	Rp 277.290.000	90	Rp 234.900.000	24	Rp 24.000.000	27,0	10,2	24	Rp 24.000.000	26	2	Dinkes	
	1.1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Rp 40.800.000	7	Rp 20.800.000	7	Rp 13.600.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara (unit)	35	Rp 907.000.000	7	Rp 162.100.000	7	Rp 181.400.000	1	Rp 8.000.000	14,3	4,4	1	Rp 8.000.000	3	1	Dinkes	
	1.1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor (%)	100	Rp 185.359.288	70	Rp 51.500.000	73	Rp 27.000.000	22	Rp 8.000.000	30,1	29,6	22	Rp 8.000.000	22	4	Dinkes	
	1.1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Rp 38.700.000	3	Rp 42.890.000	2	Rp 12.900.000	1	Rp 8.000.000	50,0	62,0	1	Rp 8.000.000	11	21	Dinkes	
	1.1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (%)	100	Rp 282.734.134.676	92	Rp 50.734.572.481	100	Rp 69.734.403.918	8	Rp 634.637.689	8,4	0,9	8	Rp 634.637.689	8	0	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 50.288.662.296	84	Rp 10.253.604.978	100	Rp 19.971.019.800	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Sarana fasilitas kesehatan yang Di bangun (%)	3	Rp 6.511.373.447	1	Rp 2.961.258.389	13	Rp 5.633.187.400	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhabilitasi dan dipelihara	10	Rp 15.023.616.000	8	Rp 2.601.095.695	5	Rp 3.755.904.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana fasilitas kesehatan yang dipelihara (%)	1	Rp 8.179.926.700	1	Rp 783.538.330	5	Rp 1.950.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2	Rp 1.200.000.000	0	Rp -	3	Rp 600.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan alat penunjang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan (%)	4	Rp 19.373.746.149	1	Rp 1.985.744.790	11	Rp 963.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	11	Rp 153.003.000	11	Rp 51.244.800	11	Rp 51.001.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11	Rp 38.738.197.809	11	Rp 1.466.760.304	11	Rp 6.726.651.400	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2000	Rp 140.000.000	0	Rp -	1000	Rp 70.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	3500	Rp 160.000.000	1000	Rp 379.975.670	1200	Rp 80.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	12	Rp 423.828.000	12	Rp 23.987.000	12	Rp 141.276.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 229.846.066.982	94	Rp 40.080.220.451	100	Rp 49.404.749.118	0	Rp 624.801.689	0,1	1,3	0	Rp 624.801.689	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3860	Rp 200.000.000	3200	Rp 98.785.500	3021	Rp 120.600.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (BOK Puskesmas)	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas	12	Rp 874.692.000	12	Rp 437.346.000	12	Rp 953.964.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah peserta pelatihan penurunan AKI dan AKB dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) (DAK Non Fisik) (RTK / Kasus)	20	Rp 6.729.853.902	3000	Rp 370.785.685	2780	Rp 86.085.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2990	Rp 300.000.000	2000	Rp 38.904.800	2672	Rp 100.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap, Imunisasi Lanjutan, dan Investigasi KIPI (%)	100	Rp 347.769.201	14000	Rp 48.500.000	10754	Rp 50.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19820	Rp 165.000.000	17000	Rp 18.017.500	18085	Rp 55.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (BOK Puskesmas)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 2.013.000.000	12	Rp 479.692.000	12	Rp 671.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	115900	Rp 182.508.000	101000	Rp 16.884.210	74090	Rp 60.836.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15800	Rp 388.856.400	12000	Rp 24.911.600	8552	Rp 129.618.800	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20900	Rp 274.296.000	15800	Rp 35.633.500	21270	Rp 91.432.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	980	Rp 129.696.000	890	Rp 233.371.484	947	Rp 43.232.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah peserta pelatihan (petugas)	165	Rp 161.042.543	236	Rp 43.764.700	275	Rp 47.535.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK Puskesmas)	Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGI berat di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 211.904.000	0	Rp -	12	Rp 105.952.800	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3000	Rp 300.000.000	1900	Rp 802.554.850	2182	Rp 150.000.000	209	Rp 8.792.000	9,6	5,9	209	Rp 8.792.000	7	3	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (BOK Puskesmas)	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 365.310.000	12	Rp 60.530.000	12	Rp 121.770.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3800	Rp 300.000.000	3200	Rp 47.437.300	2630	Rp 100.000.000	250	Rp 8.601.200	9,5	8,6	250	Rp 8.601.200	7	3	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4	Rp 20.000.000	0	Rp -	1	Rp 10.000.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	365	Rp 1.987.110.075	2	Rp 17.669.000	1	Rp 20.000.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kasus Gizi Buruk, Balita KEP, Bumil KEK, Bumil Anemia Berat Ditemukan Serta Di Tanggulangi (kasus)	75	Rp 664.351.634	2	Rp 107.498.514	1	Rp 153.823.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (BOK Puskesmas)	Jumlah Kasus Gizi Buruk, Balita KEP, Bumil KEK, Bumil Anemia Berat Ditemukan Serta Di Tanggulangi (kasus) di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 6.832.005.000	12	Rp 2.042.582.500	12	Rp 2.277.335.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	Rp 335.788.000	1	Rp 4.246.150	2	Rp 83.947.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 263.850.000	0	Rp -	12	Rp 87.950.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa dengan rumah yang memiliki Jamban Sendiri (Pekon)	100	Rp 1.565.926.625	1	Rp 322.758.650	2	Rp 173.836.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (BOK Puskesmas)	Jumlah desa dengan rumah yang memiliki Jamban Sendiri (Pekon) di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 406.980.000	12	Rp 135.660.000	12	Rp 122.890.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Media Promosi Kesehatan yang di gunakan (unit media)	4	Rp 820.846.530	1	Rp 315.057.600	4	Rp 366.975.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	3	Rp 75.000.000	1	Rp 19.370.500	1	Rp 25.000.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sampel yang menjadi locus wabah/ KLB (%)	100	Rp 270.954.530	1	Rp 137.091.400	3	Rp 152.465.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan (BOK Puskesmas)	Sampel yang menjadi locus wabah/ KLB di wilayah kerja puskesmas (%)	12	Rp 702.270.000	12	Rp 182.805.000	12	Rp 234.090.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja	2	Rp 33.348.000	0	Rp -	33	Rp 16.674.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK BOK Puskesmas)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di wilayah kerja	12	Rp 118.314.000	0	Rp -	12	Rp 59.157.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	70	Rp 82.146.000	78200	Rp 13.250.000	70	Rp 27.382.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Penderita Penyakit Menular Bersumber Hewan, Penyakit Menular Lainnya dan PTM (%)	100	Rp 1.402.965.481	86	Rp 832.425.722	3	Rp 269.335.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (BOK Puskesmas)	Jumlah Penderita Penyakit Menular Bersumber Hewan, Penyakit Menular Lainnya dan PTM (%) di wilayah kerja Puskesmas	12	Rp 3.747.480.000	12	Rp 1.511.296.000	12	Rp 1.249.160.000	0	Rp 0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Peserta PBI, Peserta Monev kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan	60	Rp 108.458.870.432	12	Rp 8.717.913.214	12	Rp 10.000.000.000	3	19.285.600	25,0	0,2	3	Rp 19.285.600	5	0	Dinkes	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN Puskesmas)	Tersedianya dana pelayanan kesehatan kapitasi dan Non kapitasi di Puskesmas (%)	100	Rp 7.488.079.462	12	Rp 12.690.424.778	12	Rp 17.140.766.320	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (RSUD)	Tersedianya dana pelayanan kesehatan INA - CBGs Rumah Sakit (%)	100	Rp 3.815.238.885	12	Rp 2.994.185.173	12	Rp 2.464.896.818	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	10000	Rp 44.760.000	0	Rp -	44	Rp 22.380.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional Yang Didistribusikan	1	Rp 250.800.000	1	Rp 6.000.000	2	Rp 83.600.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah biaya operasional RS (%)	100	Rp 27.525.422.080	85	Rp 3.700.199.716	12	Rp 4.454.454.380	3	575.393.703	25,0	12,9	3	Rp 575.393.703	3	2	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah biaya Operasional Puskesmas	11	Rp 38.596.290.908	11	Rp 162.269.412	14	Rp 2.800.500.000	1	3.691.600	7,1	0,1	1	Rp 3.691.600	9	0	Dinkes	
		Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK Puskesmas)	Jumlah biaya Operasional Puskesmas dan manajemen Puskesmas	12	Rp 5.446.825.671	12	Rp 1.815.608.557	12	Rp 2.246.384.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah lokasi pendistribusian obat (fasyankes)	12	Rp 510.556.789	12	Rp 9.188.900	12	Rp 383.659.000	2	5.422.386	16,7	1,4	2	Rp 5.422.386	17	1	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah RSUD dan Puskesmas yang akan dilakukan akreditasi/Reakreditasi (Fasyankes)	30	Rp 6.239.984.829	11	Rp 12.475.000	11	Rp 50.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3	Rp 58.720.800	1	Rp 19.573.600	1	Rp 25.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah kasus Wabah (dokumen)	5	Rp 211.945.205	1	Rp 23.453.200	1	Rp 25.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Rp 420.000.000	1	Rp 19.973.250	1	Rp 140.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12	Rp 150.000.000	12	Rp 38.850.000	70	Rp 50.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12	Rp 150.000.000	12	Rp 9.680.000	75	Rp 50.000.000	20	3.615.200	26,7	7,2	20	Rp 3.615.200	167	2	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria	500	Rp 150.000.000	235	Rp 36.799.786	75	Rp 50.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria (BOK Puskesmas)	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria di Wilayah Kerja Puskesmas	12	Rp 36.180.000	0	Rp -	12	Rp 12.060.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	5	Rp 204.015.000	0	Rp -	2	Rp 68.005.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (BOK Puskesmas)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	12	Rp 513.939.000	12	Rp 256.969.500	12	Rp 262.599.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	2	Rp 200.000.000	0	Rp -	1	Rp 100.000.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	4	Rp 215.202.400	1	Rp 107.601.200	4	Rp 395.315.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (BOK Puskesmas)	Jumlah kegiatan Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	12	Rp 43.740.000	12	Rp 847.435.000	12	Rp 21.870.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usia (BOK Puskesmas)	Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas	12	Rp 458.430.000	0	Rp -	12	Rp 229.215.000	0	0	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	2	Rp 124.000.000	0	Rp -	1	Rp 62.000.000	0	4.628.000	30,0	7,5	0	Rp 4.628.000	15	4	Dinkes	
	1.1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	2	Rp 100.000.000	0	Rp -	1	Rp 50.000.000	0	5.321.200	30,0	10,6	0	Rp 5.321.200	15	5	Dinkes	
	1.1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi (%)	100	Rp 2.599.405.398	100	Rp 400.747.052	100	Rp 308.635.000	33	Rp 9.836.000	33,3	3,2	33	Rp 9.836.000	33	0	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Tersedianya Data Kesehatan Secara Terintegrasi di Tingkat Puskesmas dan Pustu Berdasarkan Aplikasi (dokumen)	50	Rp 2.599.405.398	10	Rp 327.487.052	3	Rp 308.635.000	1	Rp 9.836.000	33,3	3,2	1	Rp 9.836.000	2	0	Dinkes	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 120.000.000	0	Rp -	100	Rp 50.000.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.02.02.2.04.003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	12	Rp 120.000.000	0	Rp -	11	Rp 50.000.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (%)	100	Rp 24.624.814.815	96	Rp 4.359.719.000	100	Rp 4.050.534.900	10	Rp 7.404.000	10,1	0,2	10	Rp 7.404.000	10	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 230.566.071	96	Rp 49.514.100	100	Rp 61.500.900	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.01.0001	Pengedalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Perizinan Tenaga Kesehatan yang diperiksa (Dokumen)	1175	Rp 230.566.071	225	Rp 24.584.100	1	Rp 36.500.900	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	2	Rp 50.000.000	1	Rp 24.930.000	1	Rp 25.000.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 24.394.248.744	100	Rp 3.326.176.850	100	Rp 3.422.330.000	18	Rp 4.936.000	17,9	0,1	18	Rp 4.936.000	18	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.02.001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPNI dan IBI)	4	Rp 6.499.000.000	2	Rp 40.000.000	12	Rp 3.249.500.000	0	Rp -	0,0	0,0	0				Dinkes	
	1.1.02.03.2.02.002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta penyediaan tenaga kontrak (Dokumen)	5	Rp 24.029.704.237	1	Rp 3.167.318.750	100	Rp 30.336.000	20	Rp 2.468.000	20,0	8,1	20	Rp 2.468.000	400	0	Dinkes	
	1.1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Tersedianya Dana Hibah Untuk Organisasi PPNI, IBI dan YJI (organisasi)	5	Rp 364.544.507	1	Rp 118.858.100	1	Rp 142.494.000	0	Rp 2.468.000	20,0	1,7	0	Rp 2.468.000	4	1	Dinkes	
	1.1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 308.550.470	92	Rp 984.028.050	100	Rp 566.704.000	13	Rp 2.468.000	12,5	33,2	13	Rp 2.468.000	13	1	Dinkes	
	1.1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Petugas Kesehatan Dan Kader Dalam Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Screening Hipotiroid Kongenital (SHK), dan Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi (SKPG) (orang)	15	Rp 308.550.470	12	Rp 984.028.050	160	Rp 566.704.000	20	Rp 2.468.000	12,5	0,44%	20	Rp 2.468.000	133	1	Dinkes	
	1.1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat Pengawasan dan Tindaklanjutan terhadap Perizinan Usaha (%)	100	Rp 88.630.700	100	Rp 48.630.700	100	Rp 137.428.200	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (%)	100	Rp 88.630.700	100	Rp 48.630.700	100	Rp 20.000.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4	Rp 88.630.700	1	Rp 48.630.700	1	Rp 20.000.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	Rp 88.522.000	0	Rp -	100	Rp 44.261.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2	Rp 88.522.000	0	Rp -	1	Rp 44.261.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	Rp 74.200.000	0	Rp -	100	Rp 37.100.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2	Rp 74.200.000	0	Rp -	1	Rp 37.100.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri RumahTangga	Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri RumahTangga	100	Rp 72.134.400	0	Rp -	100	Rp 36.067.200	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2	Rp 72.134.400	0	Rp -	1	Rp 36.067.200	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)	100	Rp 316.500.000	100	Rp 386.395.836	100	Rp 335.148.200	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	Rp 235.232.000	100	Rp 33.400.000	100	Rp 58.808.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Rapat Koordinasi Bidang Kesmas)	4	Rp 235.232.000	1	Rp 33.400.000	1	Rp 58.808.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (%)	100	Rp 316.500.000	100	Rp 82.336.136	100	Rp 105.500.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	4	Rp 316.500.000	1	Rp 82.336.136	1	Rp 105.500.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah/Kota (%)	100	Rp 598.787.800	100	Rp 270.659.700	100	Rp 170.840.200	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
	1.1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Advokasi, Koordinasi dan BinteK Kelompok Kerja Operasional Posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan Mitra Dalam Pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu Dalam Transformasi Layanan Primer	4	Rp 345.068.800	1	Rp 43.174.700	1	Rp 86.267.200	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (BOK Puskesmas)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di wilayah Kerja Puskesmas	12	Rp 253.719.000	12	Rp 227.485.000	12	Rp 84.573.000	0	Rp -	0,0	0,0	0	Rp -	0	0	Dinkes	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
A	01:03:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 27.806.086.122	90	Rp 26.002.369.153	92,5	Rp 6.217.184.400	81	Rp 1.709.490.241	87,6	27,5		Rp 37.331.376.511		134,26	DPUPR	
	1.03.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 117.184.869	90	Rp 56.117.390	92,5	Rp 44.000.000	81	Rp 5.000.000	87,6	11,4		Rp 109.597.390		93,53	DPUPR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Rp 61.410.000	3	Rp 55.899.950	2	Rp 13.000.000	2	Rp -	100,0	0,0	5	Rp 55.899.950	100	91,03	DPUPR	
	1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah	5	Rp 20.000.000	3	Rp -	1	Rp 4.000.000	-	Rp -	-	0,0	3	Rp -	60	0,00	DPUPR	
	1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah	5	Rp 20.000.000	3	Rp -	1	Rp 4.000.000	-	Rp -	-	0,0	3	Rp -	60	0,00	DPUPR	
	1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	3	Rp -	1	Rp 5.000.000	1	Rp 5.000.000	100,0	100,0	4	Rp 5.000.000	80	20,00	DPUPR	
	1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan Perangkat Daerah	5	Rp 25.000.000	3	Rp -	1	Rp 5.000.000	-	Rp -	-	0,0	3	Rp -	60	0,00	DPUPR	
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Rp 55.774.869	3	Rp 48.697.440	1	Rp 13.000.000	1	Rp -	100,0	0,0	4	Rp 48.697.440	80	87,31	DPUPR	
	1.03.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 16.304.908.808	90	Rp 21.085.172.756	92,5	Rp 2.852.320.400	73	Rp 748.215.098	78,9	26,2	Rp 24.118.286.130		147,92	DPUPR		
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	Rp 16.237.752.708	42	Rp 23.311.471.032	14	Rp 2.838.820.400	3	Rp 742.215.098,0	21,4	26,1	45	Rp 24.053.686.130	64,2857143	148,13	DPUPR	
	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp 30.525.500	3	Rp 26.500.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 6.000.000	100,0	100,0	4	Rp 32.500.000	80	106,47	DPUPR	
	1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Rp 24.420.400	8	Rp 21.400.000	2	Rp 5.000.000	-	Rp -	-	0,0	8	Rp 21.400.000	80	87,63	DPUPR	
	1.03.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 12.210.200	3	Rp 10.700.000	1	Rp 2.500.000	-	Rp -	-	0,0	3	Rp 10.700.000	60	87,63	DPUPR	
	1.03.01.2.03	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 759.763.234	90	Rp 378.503.500	92,5	Rp 10.000.000	0	Rp 3.491.600	-	34,9	Rp 391.276.200		51,50	DPUPR		
	1.03.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	60	Rp 759.763.234	36	Rp 387.784.600	1	Rp 10.000.000	1	Rp 3.491.600	100,0	34,9	37	Rp 391.276.200	61,6666667	51,50	DPUPR	
	1.03.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 864.761.160	90	Rp 385.150.000	92,5	Rp 254.500.000	90	Rp -	97,3	0,0	Rp 692.650.000		80,10	DPUPR		
	1.03.01.2.05.05	Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	186	Rp 364.761.160	93	Rp 253.503.500	103	Rp 54.500.000	-	Rp -	-	0,0	93	Rp 253.503.500	50	69,50	DPUPR	
	1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	60	Rp 500.000.000	36	Rp 692.650.000	20	Rp 200.000.000	-	Rp -	-	0,0	36	Rp 692.650.000	60	138,53	DPUPR	
	1.03.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 2.441.304.251	90	Rp 3.577.680.982	92,5	Rp 1.636.914.000	90	Rp 641.556.543	97,3	39,2	Rp 6.220.837.906		254,82	DPUPR		
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat	60	Rp 49.634.463	36	Rp 133.926.000	14	Rp 56.070.000	-	Rp -	-	0,0	36	Rp 133.926.000	60	269,82	DPUPR	
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	60	Rp 488.844.374	36	Rp 475.317.024	46	Rp 126.488.000	13	Rp 34.576.200	28,3	27,3	49	Rp 509.893.224	81,6666667	104,31	DPUPR	
	1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga	60	Rp 145.000.000	-	Rp -	10	Rp 72.500.000	2	Rp 17.000.000	20,0	23,4	2	Rp 17.000.000	3,33333333	11,72	DPUPR	
	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	60	Rp 604.510.000	36	Rp 241.309.860	1	Rp 35.000.000	1	Rp -	100,0	0,0	37	Rp 241.309.860	61,6666667	39,92	DPUPR	
	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	60	Rp 553.315.414	36	Rp 742.512.280	8	Rp 148.856.000	8	Rp 45.673.200	100,0	30,7	44	Rp 788.185.480	73,3333333	142,45	DPUPR	
	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	Rp 150.000.000	36	Rp 1.473.412.000	2	Rp 600.000.000	1	Rp 421.500.000	50,0	70,3	37	Rp 1.894.912.000	61,6666667	1263,27	DPUPR	
	1.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	60	Rp 176.000.000	-	Rp -	12	Rp 88.000.000	3	Rp 7.320.000	25,0		3	Rp 7.320.000	5	4,16	DPUPR	
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	Rp 595.000.000	36	Rp 2.646.730.199	2	Rp 510.000.000	-	Rp 115.487.143	-	22,6	36	Rp 2.762.217.342	60	464,24	DPUPR	
	1.03.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 2.379.421.008	90	Rp 1.483.370.880	92,5	Rp 740.500.000	43	Rp 177.095.000	46,5	23,9	Rp 2.278.325.335		95,75	DPUPR		
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	Rp 427.357.000	36	Rp 607.812.455	4	Rp 327.000.000	1	Rp 22.174.000	25,0	6,8	37	Rp 629.986.455	61,6666667	147,41	DPUPR	
	1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60	Rp 1.582.516.200	36	Rp 816.400.000	3	Rp 143.200.000	2	Rp 114.400.000	66,7	79,9	38	Rp 930.800.000	63,3333333	58,82	DPUPR	
	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	Rp 369.547.808	36	Rp 677.017.880	5	Rp 270.300.000	1	Rp 40.521.000	20,0	15,0	37	Rp 717.538.880	61,6666667	194,17	DPUPR	
	1.03.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95	Rp 3.534.265.700	90	Rp 2.510.188.963	92,5	Rp 678.950.000	88	Rp 134.132.000	95,1	19,8	Rp 3.520.403.550		99,61	DPUPR		
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	60	Rp 1.813.214.700	36	Rp 1.901.886.321	9	Rp 296.950.000	4	Rp 67.700.000	44,4	22,8	40	Rp 1.969.586.321	66,6666667	108,62	DPUPR	
	1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar	60	Rp 1.660.000.000	36	Rp 1.484.385.229	12	Rp 162.000.000	3	Rp 57.222.000	25,0	35,3	39	Rp 1.541.607.229	65	92,87	DPUPR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	60	Rp 40.000.000	-	Rp -	2	Rp 20.000.000	-	Rp -	-	0,0	-	Rp -	0	0,00	DPUPR	
	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	60	Rp 400.000.000	-	Rp -	1	Rp 200.000.000	-	Rp 9.210.000	-	4,6	-	Rp 9.210.000	0	2,30	DPUPR	
B	01:03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	Rp 45.269.103.738	35	Rp 34.410.397.814	45	Rp 5.462.261.436	30	Rp 2.117.860.006	66,7	38,8		Rp 27.649.262.297		61,08	DPUPR	
	1.03.02.2.01	PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	Rp 22.634.551.869	30	Rp 30.842.403.231	45	Rp 2.749.665.546	30	Rp 1.363.790.612	66,7	49,6		Rp 15.678.467.241		69,27	DPUPR	
	1.03.02.2.01.10 093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah Sungai yang di Normalisasi/Restorasi	5	Rp 6.105.100.000	1	Rp 42.740.000	3	Rp 533.625.940	-	Rp 45.419.300	-	8,5	1	Rp 88.159.300	20	1,44	DPUPR	
	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Tersedianya Prasarana Pengaman Pantai	45	Rp 10.424.351.869	24	Rp 14.360.095.929	16	Rp 2.216.039.606	8	Rp 1.318.371.312	50,0	59,5	32	Rp 15.678.467.241	71,111111	150,40	DPUPR	
	1.03.02.2.02	PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DIBAWAH 100 Ha DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah	50	Rp 22.634.551.869	30	Rp 3.567.994.583	45	Rp 2.712.595.890	30	Rp 754.069.394	66,7	27,8		Rp 11.970.795.056		52,89	DPUPR	
	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya Jaringan Irigasi Yang Mantap	20	Rp 13.476.901.869	20	Rp 11.216.725.662	26	Rp 2.712.595.890	7	Rp 754.069.394	26,9	27,8	27	Rp 11.970.795.056	20	88,82	DPUPR	
C	01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	45	Rp 11.898.748.636	40,0	Rp 7.715.071.525	43,0	Rp 5.814.390.600	37,5	Rp 175.398.000	87,2	3,0		Rp 6.891.940.960		57,92	DPUPR	
	1.03.03.2.01	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman	45	Rp 11.898.748.636	37,5	Rp 7.715.071.525	43,0	Rp 5.814.390.600	37,5	Rp 175.398.000	87,2	3,0		Rp 6.891.940.960		57,92	DPUPR	
	1.03.03.2.01.00 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Jaringan Perpipaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Minum	3.850	Rp 10.000.000.000	1.049	Rp 6.716.542.960	300	Rp 5.814.390.600	-	Rp 175.398.000	-	3,0	1.049	Rp 6.891.940.960	27,2467532	68,92	DPUPR	
D	01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	80	Rp 10.257.421.636	68,87	Rp 8.592.207.740	75	Rp 4.649.379.000	63,3	Rp 296.725.500	84,4	6,4		Rp 7.649.907.750		74,58	DPUPR	
	1.03.05.2.01	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	80	Rp 10.257.421.636	63,3	Rp 8.592.207.740	75	Rp 4.649.379.000	63,3	Rp 296.725.500	84,4	6,4		Rp 7.649.907.750		74,58	DPUPR	
	1.03.05.2.01.00 25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik(SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Tersedianya Sistem Pengolahan Air Limbah dan MCK	1.500	Rp 7.850.848.716	611	Rp 7.353.182.250	275	Rp 4.649.379.000	-	Rp 296.725.500	-	6,4	611	Rp 7.649.907.750	40,7333333	97,44	DPUPR	
E	01:03:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	45	Rp 13.686.151.479	30	Rp 4.118.696.050	35	Rp 3.493.844.988	25	Rp 1.210.906.405	71,4	34,7		Rp 8.132.130.906		59,42	DPUPR	
	1.03.06.2.01	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan	45	Rp 13.686.151.479		Rp 4.118.696.050	35	Rp 3.493.844.988	25	Rp 1.210.906.405	71,4	34,7		Rp 8.132.130.906		59,42	DPUPR	
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Drainase Untuk Mengalirkan Genangan Air	113	Rp 13.686.151.479	51	Rp 6.921.224.501	31	Rp 3.493.844.988	10	Rp 1.210.906.405	32,3	34,7	61	Rp 8.132.130.906	53,9823009	59,42	DPUPR	
F	01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	90	Rp 513.119.588.315	60	Rp 367.407.490.094	70	Rp 62.220.366.696	55	Rp 841.208.545	78,6	1,4		Rp 183.208.500		0,04	DPUPR	
	1.03.08.2.01	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap	90	Rp 513.119.588.315	55	Rp 367.407.490.094	70	Rp 62.220.366.696	55	Rp 841.208.545	78,6	1,4		Rp 183.208.500		0,04	DPUPR	
	1.03.08.2.01.00 21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian danPembongkaran Bangunan Gedung untuk KepentinganStrategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan Gedung Pemerintah	90	Rp 513.119.588.316	70	Rp 381.539.285.836	10	Rp 62.070.366.696	7	Rp 808.000.045	70,0	1,3	77	Rp 382.347.285.881	85,5555556	74,51	DPUPR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung	150	Rp 750.000.000	16	Rp 150.000.000	30	Rp 150.000.000	-	Rp 33.208.500	-	22,1	16	Rp 183.208.500	10,6666667	24,43	DPUPR	
G	01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,5	Rp 19.191.194.876	5,00	Rp 1.721.219.150	5,00	Rp 96.087.000	4,7	Rp -	94,0	0,0		Rp 2.629.252.750		13,70	DPUPR	
	1.03.09.2.01	PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5,5	Rp 19.191.194.876	4,70	Rp 1.721.219.150	5,00	Rp 96.087.000	4,70	Rp -	94,0	0,0		Rp 2.629.252.750		13,70	DPUPR	
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan CagarBudaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem PerkotaanNasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	15	Rp 16.791.194.876	9	Rp 2.629.252.750	1	Rp 96.087.000	-	Rp -	-	0,0	9	Rp 2.629.252.750	60	15,66	DPUPR	
H	01:03:10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	43	Rp 67.037.660.955	41,5	Rp 272.326.616.493	42,0	Rp 59.173.066.712	41	Rp 10.972.770.493	97,6	18,5		Rp 297.780.130.789		444,20	DPUPR	
	1.03.10.2.01	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kemantapan Jalan	43	Rp 67.037.660.955	41	Rp 294.095.942.736	42,0	Rp 59.173.066.712	41	Rp 10.972.770.493	97,6	18,5		Rp 297.780.130.789		444,20	DPUPR	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan	5	Rp 4.273.570.000	34	Rp 6.629.754.704	16	Rp 1.882.591.913	16	Rp 870.009.120	100,0	46,2	50	Rp 7.499.763.824	1000	175,49	DPUPR	
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Untuk Transportasi Masyarakat	32	Rp 11.891.280.954	10	Rp 27.998.295.006	1	Rp 3.489.582.295	0	Rp 1.900.291.876	-	54,5	10	Rp 29.898.586.882	31,5625	251,43	DPUPR	
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap	50	Rp 12.500.000.000	140	Rp 259.467.893.026	12	Rp 38.544.251.962	0	Rp 913.887.057	-	2,4	140	Rp 260.381.780.083	280	2083,05	DPUPR	
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tersedianya Ruas Jalan Dalam Kondisi Mantap	50	Rp 12.500.000.000	46	Rp 74.527.951.102	5	Rp 14.485.379.135	0	Rp 7.288.582.440	-	50,3	46	Rp 81.816.533.542	91,4	654,53	DPUPR	
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Tersedianya Jembatan Untuk transportasi Masyarakat	17	Rp 11.022.300.000	6	Rp 1.439.997.000	2	Rp 43.929.513		Rp -	-	0,0	6	Rp 1.439.997.000	35,2941176	13,06	DPUPR	
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Tersedianya Jembatan Untuk transportasi Masyarakat	19	Rp 11.500.000.000	11	Rp 9.976.919.646	5	Rp 177.331.894	2	Rp -	40,0	0,0	13	Rp 9.976.919.646	68,4210526	86,76	DPUPR	
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya dokumen survey kondisi jalan / jembatan	10	Rp 2.750.000.000	-	Rp -	2	Rp 550.000.000	0	Rp -	-	0,0	-	Rp -	0	0,00	DPUPR	
I	01:03:11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Konstruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 2.473.753.067	28	Rp 10.367.829.196	35,0	Rp 745.926.000	20	Rp 133.728.250	57,1	17,9	20	Rp 1.971.882.880	40	79,71	DPUPR	
	1.03.11.2.01	PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Konstruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 1.225.000.000	20	Rp 1.004.161.720	35,0	Rp 300.000.000	20	Rp -	57,1	0,0	20	Rp 390.956.000	40	31,91	DPUPR	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tersedianya tenaga kerja yang terlatih	170	Rp 670.000.000	80	Rp 390.956.000	41	Rp 300.000.000	-	Rp -	-	0,0	80	Rp 390.956.000	47,0588235	58,35	DPUPR	
	1.03.11.2.02	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Konstruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 1.225.000.000	20	Rp 1.004.161.720	35,0	Rp 279.926.000	20	Rp 92.979.000	57,1	33,2	20	Rp 730.250.780	40	59,61	DPUPR	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Basic Price/Satuan Harga	5	Rp 590.000.000	9	Rp 637.271.780	2	Rp 279.926.000	-	Rp 92.979.000	-	33,2	9	Rp 730.250.780	180	123,77	DPUPR	
	1.03.11.2.04	PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa Konstruksi yang Handal dan dapat Diandalkan	50	Rp 668.753.066	20	Rp 7.525.512.846	35,0	Rp 166.000.000	20	Rp 40.749.250	57,1	24,5	20	Rp 1.241.632.100	40	185,66	DPUPR	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pekerjaan Fisik Kabupaten	60	Rp 668.753.066	36	Rp 1.200.882.850	12	Rp 166.000.000	3	Rp 40.749.250	25,0	24,5	39	Rp 1.241.632.100	65	185,66	DPUPR	
J	01:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 1.641.374.395	25	Rp 7.757.804.740	30	Rp 1.688.818.270	20	Rp 689.407.341	66,7	40,8	20	#REF!	40	#REF!	DPUPR	
	1.03.12.2.01	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RTRR) KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410.343.597	20	Rp 254.063.140	30	Rp 1.576.448.820	0	Rp 660.114.741	-	41,9	-	Rp 914.177.881	0	222,78	DPUPR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.03.12.2.01.003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1	Rp 500.000.000	-	Rp -	1	Rp 121.594.200	-	Rp 36.761.950	-	30,2	-	Rp 36.761.950	0	7,35	DPUPR	
	1.03.12.2.01.011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1	Rp 2.000.000.000	-	Rp -	1	Rp 1.438.966.370	-	Rp 623.352.791	-	43,3	-	Rp 623.352.791	0	31,17	DPUPR	
	1.03.12.2.01.013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	500	Rp 410.343.597	670	Rp 269.510.390	75	Rp 15.888.250	75	Rp -	100,0	0,0	745	Rp 269.510.390	149	65,68	DPUPR	
	1.03.12.2.03	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410.343.603	20	Rp 4.915.571.849	30	Rp 36.947.200	20	Rp 19.192.600	66,7	51,9		Rp 4.934.764.449		1202,59	DPUPR	
	1.03.12.2.03.004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Kajian dan Peta Potensi Wilayah Tata Guna Lahan	5	Rp 410.343.597	9	Rp 4.915.571.849	1	Rp 36.947.200	-	Rp 19.192.600	-	51,9	9	Rp 4.934.764.449	180	1202,59	DPUPR	
	1.03.12.2.04	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog	50	Rp 410.343.597	20	Rp 745.805.091	30	Rp 75.422.250	20	Rp 10.100.000	66,7	13,4	20	Rp 755.905.091		184,21	DPUPR	
	1.03.12.2.04.009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Optimal Kinerja Dalam Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Pesisir Barat	60	Rp 205.171.802	36	Rp 745.805.091	12	Rp 75.422.250	3	Rp 10.100.000	25,0	13,4	39	Rp 755.905.091	65	368,43	DPUPR	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
1	1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	95,00	20.160.733.730,00	90,00	3.734.039.425,00	2,50	2.477.667.700,00	0,62	483.019.914,00	24,68	19,49	90,62	4.217.059.339,00	0,95	0,21	DPRKP	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95,00	22.500.000,00	90,00	14.042.560,00	2,50	12.400.000,00	0,63	-	25,00	-	90,63	14.042.560,00	0,95	0,62	DPRKP	
	1.04.01.2.01.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,00	5.000.000,00	6,00	9.118.460,00	2,00	7.400.000,00	0,50	-	25,00	-	6,50	9.118.460,00	0,65	1,82	DPRKP	
	1.04.01.2.01.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,00	17.500.000,00	12,00	4.924.100,00	4,00	5.000.000,00	1,00	-	25,00	-	13,00	4.924.100,00	0,65	0,28	DPRKP	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan tepat Waktu	95,00	17.152.477.730,00	90,00	2.704.281.591,00	2,50	1.923.827.700,00	0,67	400.376.614,00	26,79	20,81	90,67	3.104.658.205,00	0,95	0,18	DPRKP	
	1.04.01.2.02.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70,00	17.119.977.730,00	42,00	2.692.557.991,00	14,00	1.918.327.700,00	4,00	400.376.614,00	28,57	20,87	46,00	3.092.934.605,00	0,66	0,18	DPRKP	
	1.04.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5,00	10.000.000,00	3,00	4.486.500,00	1,00	2.500.000,00	0,25	-	25,00	-	3,25	4.486.500,00	0,65	0,45	DPRKP	
	1.04.01.2.02.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60,00	17.500.000,00	36,00	5.443.100,00	12,00	2.000.000,00	3,00	-	25,00	-	39,00	5.443.100,00	0,65	0,31	DPRKP	
	1.04.01.2.02.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6,00	5.000.000,00	4,00	1.794.000,00	1,00	1.000.000,00	0,25	-	25,00	-	4,25	1.794.000,00	0,71	0,36	DPRKP	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	95,00	100.000.000,00	90,00	20.000.000,00	2,50	20.000.000,00	0,63	-	-	-	90,63	20.000.000,00	0,95	0,20	DPRKP	
	1.04.01.2.05.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60,00	100.000.000,00	12,00	20.000.000,00	4,00	20.000.000,00	1,00	-	-	-	13,00	20.000.000,00	0,22	0,20	DPRKP	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	95,00	1.402.000.000,00	90,00	717.907.024,00	2,50	312.313.000,00	0,61	31.033.300,00	24,52	9,94	90,61	748.940.324,00	0,95	0,53	DPRKP	
	1.04.01.2.06.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60,00	50.000.000,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	0,20	-	DPRKP	
	1.04.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5,00	125.000.000,00	3,00	49.550.000,00	1,00	25.000.000,00	0,25	-	25,00	-	3,25	49.550.000,00	0,65	0,40	DPRKP	
	1.04.01.2.06.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	60,00	250.000.000,00	36,00	103.289.300,00	12,00	47.751.000,00	3,00	3.692.000,00	25,00	7,73	39,00	106.981.300,00	0,65	0,43	DPRKP	
	1.04.01.2.06.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	720,00	72.000.000,00	432,00	28.800.000,00	120,00	12.000.000,00	30,00	2.000.000,00	25,00	16,67	462,00	30.800.000,00	0,64	0,43	DPRKP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04.01.2.06.000	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	55,00	55.000.000,00	22,00	11.000.000,00	11,00	11.000.000,00	2,00	-	-	-	24,00	11.000.000,00	0,44	0,20	DPRKP	
	1.04.01.2.06.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,00	850.000.000,00	36,00	525.267.724,00	12,00	216.562.000,00	3,00	25.341.300,00	25,00	11,70	39,00	550.609.024,00	0,65	0,65	DPRKP	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja	95,00	287.756.000,00	90,00	20.000.000,00	2,50	69.000.000,00	0,63	-	-	-	90,63	20.000.000,00	0,95	0,07	DPRKP	
	1.04.01.2.07.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60,00	287.756.000,00	4,00	20.000.000,00	9,00	69.000.000,00	2,25	-	-	-	6,25	20.000.000,00	0,10	0,07	DPRKP	
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	95,00	621.000.000,00	90,00	122.038.000,00	2,50	62.117.000,00	0,58	22.000.000,00	23,21	35,42	90,58	144.038.000,00	0,95	0,23	DPRKP	
	1.04.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60,00	156.000.000,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	0,20	-	DPRKP	
	1.04.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15,00	415.000.000,00	7,00	114.000.000,00	2,00	57.000.000,00	0,25	22.000.000,00	12,50	38,60	7,25	136.000.000,00	0,48	0,33	DPRKP	
	1.04.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60,00	50.000.000,00	24,00	8.038.000,00	12,00	5.117.000,00	3,00	-	-	-	27,00	8.038.000,00	0,45	0,16	DPRKP	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	95,00	575.000.000,00	90,00	135.770.250,00	2,50	78.010.000,00	0,58	29.610.000,00	23,21	37,96	90,58	165.380.250,00	0,95	0,29	DPRKP	
	1.04.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10,00	320.000.000,00	6,00	124.700.250,00	2,00	62.500.000,00	0,25	27.400.000,00	12,50	43,84	6,25	152.100.250,00	0,63	0,48	DPRKP	
	1.04.01.2.09.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	60,00	5.000.000,00	12,00	-	-	-	-	-	-	-	12,00	-	0,20	-	DPRKP	
	1.04.01.2.09.001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	80,00	250.000.000,00	28,00	11.070.000,00	12,00	15.510.000,00	3,00	2.210.000,00	25,00	14,25	31,00	13.280.000,00	0,39	0,05	DPRKP	
2	1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni	90,00	1.815.327.122,00	88,00	521.203.620,00	0,67	193.910.000,00	0,17	21.633.533,00	25,00	11,16	88,17	542.837.153,00	0,98	0,30	DPRKP	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kb/Kota	12,00	60.140.914,00	5,00	48.790.300,00	-	-	-	-	-	-	5,00	48.790.300,00	0,42	0,81	DPRKP	
	1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	12,00	60.140.914,00	5,00	48.790.300,00	-	-	-	-	-	-	5,00	48.790.300,00	0,42	0,81	DPRKP	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau relokasi Program Kab/Kota	90,00	877.593.104,00	5,00	64.683.500,00	5,00	43.605.000,00	1,25	-	25,00	-	6,25	64.683.500,00	0,07	0,07	DPRKP	
	1.04.02.2.03.001	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	30,00	438.796.552,00	5,00	64.683.500,00	5,00	43.605.000,00	1,25	-	25,00	-	6,25	64.683.500,00	0,21	0,15	DPRKP	
	1.04.02.2.03.004	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terbangun	60,00	438.796.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pengelolaan Rumah Susun	60,00	438.796.552,00	22,00	60.069.400,00	12,00	100.000.000,00	3,00	11.983.933,00	25,00	11,98	25,00	72.053.333,00	0,42	0,16	DPRKP	
	1.04.02.2.05.001	Facilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	60,00	438.796.552,00	22,00	60.069.400,00	12,00	100.000.000,00	3,00	11.983.933,00	25,00	11,98	25,00	72.053.333,00	0,42	0,16	DPRKP	
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Cakupan Penerbitan Izin Site Plan	60,00	438.796.552,00	51,00	347.660.420,00	12,00	50.305.000,00	3,00	9.649.600,00	25,00	19,18	54,00	357.310.020,00	0,90	0,81	DPRKP	
	1.04.02.2.06.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	60,00	438.796.552,00	51,00	347.660.420,00	12,00	50.305.000,00	3,00	9.649.600,00	25,00	19,18	54,00	357.310.020,00	0,90	0,81	DPRKP	
3	1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni	50,00	1.277.073.636,00	42,50	544.790.666,00	3,75	350.000.000,00	0,94	8.979.600,00	25,00	2,57	43,44	553.770.266,00	0,87	0,43	DPRKP	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	18,00	851.382.424,00	5,00	452.942.739,00	-	-	-	-	-	-	5,00	452.942.739,00	0,28	0,53	DPRKP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.04.03.2.02.00 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	6,00	425.691.212,00	1,00	8.873.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	8.873.000,00	0,17	0,02	DPRKP	
	1.04.03.2.02.00 00	Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang tersusun/terreview/ terlegalisasi	6,00	425.691.212,00	3,00	294.955.250,00	-	-	-	-	-	-	3,00	294.955.250,00	0,50	0,69	DPRKP	
	1.04.03.2.02.00 14	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang terehabilitasi	6,00	425.691.212,00	1,00	149.114.489,00	-	-	-	-	-	-	1,00	149.114.489,00	0,17	0,35	DPRKP	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	2,00	425.691.212,00	1,00	91.847.927,00	4,00	350.000.000,00	1,00	8.979.600,00	0,25	0,03	2,00	100.827.527,00	1,00	0,24	DPRKP	
	1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan	2,00	425.691.212,00	1,00	91.847.927,00	4,00	350.000.000,00	1,00	8.979.600,00	0,25	0,03	2,00	100.827.527,00	1,00	0,24	DPRKP	
4	1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman yang tertata	60,00	425.691.212,00	50,00	334.920.850,00	5,00	381.090.000,00	1,25	10.461.000,00	25,00	2,75	51,25	345.381.850,00	0,85	0,81	DPRKP	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	21,00	425.691.212,00	13,00	334.920.850,00	15,00	381.090.000,00	3,75	10.461.000,00	25,00	2,75	16,75	345.381.850,00	0,80	0,81	DPRKP	
	1.04.04.2.01.00 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Layak Huni Untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha yang diperbaiki	21,00	425.691.212,00	13,00	334.920.850,00	15,00	381.090.000,00	3,75	10.461.000,00	25,00	2,75	16,75	345.381.850,00	0,80	0,81	DPRKP	
5	1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	60,00	5.984.406.692,00	45,00	1.650.875.362,00	5,00	250.660.000,00	1,25	3.512.000,00	25,00	1,40	46,25	1.654.387.362,00	0,77	0,28	DPRKP	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah dilengkapi PSU	48,00	5.984.406.692,00	13,00	1.650.875.362,00	3,00	250.660.000,00	0,75	3.512.000,00	25,00	1,40	13,75	1.654.387.362,00	0,29	0,28	DPRKP	
	1.04.05.2.01.00 00	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan PSU yang menunjang Fungsi Hunian	17,00	5.034.872.948,00	13,00	1.650.875.362,00	1,00	130.000.000,00	0,25	3.512.000,00	25,00	2,70	13,25	1.654.387.362,00	0,78	0,33	DPRKP	
	1.04.05.2.01.00 00	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang dilaksanakan Perbaikan	7,00	949.533.744,00	-	-	2,00	120.660.000,00	0,50	-	25,00	-	0,50	-	0,07	-	DPRKP	
	SATPOPP & DAMKAR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		95%	29.502.726.806	100	4.529.171.360	100	5.644.695.300	100	1.182.332.959	100%	21%	458%	5.412.577.743	18%	#####	SATPOLPP & DAMKAR	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	13.784.305.238	100	2.387.856.466	100	2.798.075.800	100	598.402.655	100%	21%	383%	2.291.170.748	17%	#####	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	10.000.000	100	1.954.500	100	2.000.000	100	-	100%	0%	#DIV/0!	1.954.500	20%	1.954.500	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.01 000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	5	10.000.000	0	1.954.500	1	2.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	1.954.500	20%	1.954.500	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	9.589.778.136	100	1.857.310.251	100	2.156.860.800	100	520.818.830	100%	24%	317%	1.651.428.411	17%	#####	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.02 000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedia gaji dan tunjangan asn	70	9.569.018.936	14	1.853.884.051	14	2.153.960.800	4	520.818.830	29%	24%	317%	1.651.428.411	17%	#####	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.02 000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	11.500.000	0	2.432.600	1	1.900.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	1.651.428.411	14360%	#####	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.02 000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	9.259.200	0	993.600	1	1.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	1.651.428.411	17836%	#####	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	674.000.000	100	-	100	300.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	80.486.877	12%	80.486.877	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.05 02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	350.000.000	1	-	1	300.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	80.486.877	23%	80.486.877	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.05 02	Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	4	324.000.000	1	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	80.486.877	25%	80.486.877	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	917.856.273	100	160.572.400	100	76.515.000	100	12.663.000	100%	17%	1956%	247.666.460	27%	247.666.460	SATPOLPP & DAMKAR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 05 01 2.06 000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	17.000.000	0	1.986.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	13.156.900	77%	13.156.900	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48	216.035.459	12	13.156.900	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	13.156.900	6%	13.156.900	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia bahan logistik pameran	5	125.000.000	1	22.750.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25.000.000	20%	25.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak ,penggandaan dan alat tulis kantor	60	87.820.814	12	25.874.000	12	26.515.000	3	5.259.000	25%	20%	296%	15.557.000	18%	15.557.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	63.000.000	0	5.500.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	96.976.280	154%	96.976.280	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.06 000	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja SPPD Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	409.000.000	12	91.305.500	12	50.000.000	3	7.404.000	25%	15%	1310%	96.976.280	24%	96.976.280	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	98.670.829	100	5.000.000	100	-	100	-	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	38.000.000	39%	38.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.07 000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	60.670.829	0	5.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	38.000.000	63%	38.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Belanja Modal Alat Musik	60	38.000.000	12	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	38.000.000	100%	38.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	717.000.000	100	115.604.315	100	117.700.000	100	31.420.825	100%	27%	334%	105.094.000	15%	105.094.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08 000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedia sewa gedung kantor, sewa rumah dinas dan sewa mobil dinas sekretaris	60	58.000.000	12	6.795.315	12	8.700.000	3	2.180.825	25%	25%	4700%	102.500.000	177%	102.500.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08 000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	630.000.000	12	107.000.000	12	107.000.000	3	29.000.000	25%	27%	4%	1.297.000	0%	1.297.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.08 000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	peralatan kebersihan dan iuran kebersihan kantordan sewa mobil dinas sekretaris	60	29.000.000	12	1.809.000	12	2.000.000	3	240.000	25%	12%	540%	1.297.000	4%	1.297.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1.777.000.000	100	247.415.000	100	145.000.000	100	33.500.000	100%	23%	503%	168.495.000	9%	168.495.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.09 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	60	720.000.000	12	-	12	45.000.000	3	18.000.000	25%	40%	912%	164.145.000	23%	164.145.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.09 000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	60	1.045.000.000	12	244.415.000	12	142.000.000	3	33.500.000	25%	24%	490%	164.145.000	16%	164.145.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 01 2.09 000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	12.000.000	12	3.000.000	1	3.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	4.350.000	36%	4.350.000	SATPOLPP & DAMKAR	
																		SATPOLPP & DAMKAR	
	2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	12.056.732.707	100	1.522.571.200	100	1.286.959.500	100	399.786.600	100%	31%	638%	2.552.205.200	21%	#####	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan	100	11.063.750.899	100	1.439.818.300	100	1.194.675.000	100	353.860.000	100%	30%	673%	2.381.044.400	22%	#####	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	220.000.000	0	172.607.800	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.180.657.200	537%	#####	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	40	68.000.000	8	7.840.000	8	11.280.000	3	5.040.000	38%	45%	258%	13.000.000	19%	13.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)	Terlaksana Piket Pengamanan Kantor /rumah dinas, pengawalan pejabat vvp dan pengamanan trantibum	60	10.407.000.000	12	1.254.370.500	12	1.172.425.000	3	348.820.000	25%	30%	338%	1.180.657.200	11%	#####	SATPOLPP & DAMKAR	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1 05 02 2.01 0016	Penindakan Atas Gangguan Keterterraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Keterterraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	60	82.400.000	0	-	12	5.970.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	1.180.657.200	1433%	#####	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksana pengamanan Idul fitri dan Natal Tahun Baru	48	234.600.000	8	-	0	-	0	-	0%	0%	#DIV/0!	15.000.000	6%	15.000.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Tersedia ganti rugi atas dampak penegakan perda dan perkada	5	30.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	4.730.000	16%	4.730.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.01 0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keteterraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Keteterraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	8	21.750.899	0	-	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	4.730.000	22%	4.730.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	682.600.000	100	75.150.900	100	83.134.500	100	45.926.600	100%	55%	353%	162.037.800	24%	81.018.900	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.02 001	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Kepala Daerah	pengawasan dan monitoring atas penegakan perda	6	192.600.000	12	-	12	7.982.600	0	-	0%	0%	#DIV/0!	81.018.900	42%	9.123.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.02 001	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	pengawasan dan monitoring atas penegakan perda	60	490.000.000	12	75.150.900	12	75.151.900	3	45.926.600	25%	61%	176%	81.018.900	17%	9.123.000	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase gangguan tribum yang terselesaikan	100	310.381.808	100	7.602.000	100	9.150.000	100	-	100%	0%	#DIV/0!	9.123.000	3%		SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 02 2.03 001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	terlaksana operasional dan kesekretariatan PPNS	60	310.381.808	12	7.602.000	12	9.150.000	0	-	0%	0%	#DIV/0!	9.123.000	3%	569.201.795	SATPOLPP & DAMKAR	
																	569.201.795	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	100	3.661.688.861	100	618.743.694	100	1.559.660.000	100	184.143.704	100%	12%	309%	569.201.795	16%	569.201.795	SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	100	3.661.688.861	12	618.743.694	100	1.559.660.000	100	184.143.704	100%	12%	309%	569.201.795	16%		SATPOLPP & DAMKAR	
	1 05 04 2.01 001	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	terlaksana operasional pemadaman kebakaran	60	3.661.688.861	12	618.743.694	12	1.559.660.000	3	184.143.704	25%	12%	309%	569.201.795	16%		SATPOLPP & DAMKAR	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	95%	8.740.310.409	79%	2.460.610.306	100%	2.913.251.700	20%	596.254.205	20%	20%	100%	3.056.864.511	105%	35%	BPBD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu	15	31.697.123	100%	14.908.390	100%	15.135.000	0%	-	0%	0%	100%	14.908.390	7%	47%	BPBD	
	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	7.500.000	2	7.291.800	2	7.321.000	0	-	0%	0%	2	7.291.800	20%	97%	BPBD	
	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	3.700.000	1	692.320	1	707.500	0	-	0%	0%	1	692.320	20%	19%	BPBD	
	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	3.700.000	1	693.320	1	707.500	0	-	0%	0%	1	693.320	20%	19%	BPBD	
	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	3.700.000	1	698.550	1	699.500	0	-	0%	0%	1	698.550	20%	19%	BPBD	
	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	3.500.000	1	690.800	1	699.500	0	-	0%	0%	1	690.800	20%	20%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	9.597.123	10	4.841.600	2	5.000.000	0	-	0%	0%	10	4.841.600	100%	50%	BPBD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Peraturan yang Ada	100%	5.592.364.628	80%	1.842.693.763	100%	2.374.122.700	20%	472.008.947	20%	20%	100%	2.314.702.710	100%	41%	BPBD	
	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	5.578.664.628	14	1.837.313.263	14	2.368.622.700	4	472.008.947	29%	20%	18	2.309.322.210	26%	41%	BPBD	
	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	5.000.000	1	2.428.200	1	2.500.000	0	-	0%	0%	1	2.428.200	20%	49%	BPBD	
	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	80	3.700.000	18	1.976.300	18	2.000.000	0	-	0%	0%	18	1.976.300	23%	53%	BPBD	
	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.000.000	1	976.000	1	1.000.000	0	-	0%	0%	1	976.000	20%	20%	BPBD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	50.000.000	98%	19.660.000	100%	25.000.000	0%	-	0%	0%	98%	19.660.000	98%	39%	BPBD	
	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14	50.000.000	3	19.660.000	12	25.000.000	0	-	0%	0%	3	19.660.000	21%	39%	BPBD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu	60	884.000.000	98%	213.648.569	100%	193.799.000	4%	8.333.000	4%	4%	102%	221.981.569	2%	25%	BPBD	
	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	54.000.000	12	12.437.750	1	13.299.000	0	-	47%	0%	12	12.437.750	20%	23%	BPBD	
	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	75.000.000	12	13.353.000	1	12.500.000	0	-	31%	0%	12	13.353.000	20%	18%	BPBD	
	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50	60.000.000	12	12.000.000	10	12.000.000	2	2.000.000	33%	17%	14	14.000.000	28%	23%	BPBD	
	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	55.000.000	11	11.000.000	11	11.000.000	0	-	0%	0%	11	11.000.000	20%	20%	BPBD	
	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	640.000.000	12	164.857.819	12	145.000.000	2	6.333.000	17%	4%	14	171.190.819	23%	27%	BPBD	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	611.898.658	88%	212.398.700	100%	160.515.000	64%	103.347.170	64%	64%	152%	315.745.870	152%	52%	BPBD	
	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	83.844.000	12	11.884.076	12	18.600.000	3	2.667.170	25%	14%	15	14.551.246	25%	17%	BPBD	
	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	460.000.000	3	132.000.000	3	132.000.000	3	100.500.000	100%	76%	6	232.500.000	10%	51%	BPBD	
	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	68.054.658	12	68.514.624	12	9.915.000	3	180.000	2%	2%	15	68.694.624	25%	101%	BPBD	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	100%	1.570.350.000	88%	157.300.884	100%	144.680.000	9%	12.565.088	9%	9%	97%	169.865.972	97%	11%	BPBD	
	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	272.500.000	1	32.625.884	12	35.850.000	3	5.050.088	45%	14%	4	37.675.972	400%	14%	BPBD	
	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	1.143.600.000	14	111.925.000	14	91.500.000	3	7.060.000	22%	8%	17	118.985.000	121%	10%	BPBD	
	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	154.250.000	4	12.750.000	4	17.330.000	1	455.000	25%	3%	5	13.205.000	8%	9%	BPBD	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penanggulangan bencana daerah	100%	2.301.001.800	97%	656.283.514	100%	1.050.371.000	5%	51.882.000	5%	5%	102%	708.165.514	102%	31%	BPBD	
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	321.948.200	100%	48.911.700	100%	184.611.000	0%	-	0%	0%	100%	48.911.700	0%	15%	BPBD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	15	321.948.200	3	48.911.700	2	184.611.000	0	-	0%	0%	3	48.911.700	20%	15%	BPBD	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	922.350.400	96%	274.382.119	100%	510.800.000	8%	40.620.000	8%	8%	104%	315.002.119	104%	34%	BPBD	
	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	25	722.350.400	2	274.382.119	2	310.800.000	0	40.620.000	0%	13%	2	315.002.119	8%	44%	BPBD	
	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab/Kota	Jumlah paket bahan material	60	200.000.000	0	-	1	200.000.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%	BPBD	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1.056.703.200	92%	332.989.695	100%	260.000.000	4%	11.262.000	4%	4%	97%	344.251.695	97%	33%	BPBD	
	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15	460.890.000	10	284.718.400	10	250.000.000	3	10.350.000	30%	4%	13	295.068.400	87%	64%	BPBD	
	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60	595.813.200	10	48.271.295	10	10.000.000	2	912.000	20%	9%	12	49.183.295	20%	8%	BPBD	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	627.498.400	0%	203.428.375	100%	94.960.000	12%	11.840.000	12%	12%	12%	215.268.375	12%	34%	BPBD	
	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	60	627.498.400	1	203.428.375	1	94.960.000	0	11.840.000	0%	12%	1	215.268.375	2%	34%	BPBD	
	1.06	Sosial																	
	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.366.724.768	100%	2.551.004.186	100%	2.762.693.000	22%	718.805.082	22%	26,02	84%	1.746.851.956	84%	16,85	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	32.000.000	100%	12.400.000	100%	12.400.000	50%	5.125.000	50%	41,33	100%	6.400.000	100%	20,00	Dinas Sosial	
1	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	7.000.000	2	7.400.000	2	7.400.000	1	3.794.000	50%	51,27	100%	1.400.000	10%	20,00	Dinas Sosial	
2	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	25.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	1	1.331.000	50%	26,62	100%	5.000.000	10%	20,00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	8.703.221.754	100%	1.882.065.819	100%	2.208.417.800	18%	496.543.001	18%	22,48	79%	1.242.275.690	79%	14,27	Dinas Sosial	
3	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	8.675.721.754	14	1.876.565.819	14	2.202.917.800	3	496.543.001	21%	22,54	79%	1.236.775.690	1%	14,26	Dinas Sosial	
4	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	-	0%	-	100%	2.500.000	20%	20,00	Dinas Sosial	
5	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan semester	5	10.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	-	0%	-	100%	2.000.000	20%	20,00	Dinas Sosial	
6	1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	0%	-	100%	1.000.000	20%	20,00	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100%	372.001.014	100%	420.421.577	100%	276.705.200	23%	85.136.000	23%	30,77	100%	226.103.761	100%	60,78	Dinas Sosial	
7	1.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	125.000.000	1	24.687.000	1	25.000.000	0	-	0%	-	0%	24.987.600	0%	19,99	Dinas Sosial	
8	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	187.001.014	12	88.374.200	12	68.705.200	3	15.316.000	25%	22,29	100%	38.229.250	2%	20,44	Dinas Sosial	
9	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah SKHU	60	60.000.000	12	26.400.000	12	12.000.000	3	3.000.000	25%	25,00	100%	12.000.000	2%	20,00	Dinas Sosial	
10	1.06.01.2.06.08	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	55.000.000	11	10.980.000	11	11.000.000	2	2.000.000	18%	18,18	100%	11.000.000	2%	20,00	Dinas Sosial	
11	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	845.000.000	12	269.980.377	12	160.000.000	3	64.820.000	25%	40,51	100%	139.886.911	2%	16,55	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	453.000.000	0%	-	100%	30.000.000	0%	-	0%	-	100%	15.000.000	100%	3,31	Dinas Sosial	
12	1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	58	453.000.000	0	-	3	30.000.000	0	-	0%	-	100%	15.000.000	2%	3,31	Dinas Sosial	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100%	924.225.000	100%	94.659.790	100%	110.120.000	25%	75.944.081	25%	68,96	100%	173.481.986	100%	18,77	Dinas Sosial	
13	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	120.000.000	12	1.939.790	12	2.400.000	3	264.081	25%	11,00	100%	13.780.986	2%	11,48	Dinas Sosial	
14	1.06.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	60	785.000.000	12	92.000.000	12	107.000.000	3	75.500.000	25%	70,56	100%	157.000.000	2%	20,00	Dinas Sosial	
15	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	19.225.000	12	720.000	12	720.000	3	180.000	25%	25,00	100%	2.701.000	2%	14,05	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100%	806.502.000	100%	141.457.000	100%	125.050.000	17%	56.057.000	17%	44,83	100%	83.590.519	100%	10,36	Dinas Sosial	
16	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10	398.792.000	2	63.608.000	2	58.800.000	0	28.577.000	0%	48,60	100%	53.420.519	10%	13,40	Dinas Sosial	
17	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan	20	335.960.000	4	68.499.000	4	56.500.000	2	27.115.000	50%	47,99	100%	22.420.000	5%	6,67	Dinas Sosial	
18	1.06.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	71.750.000	12	9.350.000	12	9.750.000	1	365.000	8%	3,74	100%	7.750.000	2%	10,80	Dinas Sosial	
	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Terdatanya Potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	100%	1.553.029.692	100%	91.964.250	100%	40.340.000	17%	6.740.000	17%	16,71	100%	191.212.500	100%	12,31	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas bagi PSKS	100%	1.553.029.692	100%	91.964.250	100%	40.340.000	17%	6.740.000	17%	16,71	100%	191.212.500	100%	12,31	Dinas Sosial	
19	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya operasional TKSK dan PSM	645	1.553.029.692	12	91.964.250	12	40.340.000	2	6.740.000	17%	16,71	100%	191.212.500	0%	12,31	Dinas Sosial	
	1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial	100%	16.681.151.000	91%	959.838.950	100%	694.659.800	11%	11.616.500	11%	1,67	56%	2.422.045.000	56%	14,52	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.0	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan	100%	473.315.000	100%	221.799.100	100%	115.000.000	0%	9.013.500	0%	7,84	100%	54.290.000	100%	11,47	Dinas Sosial	
20	1.06.02.2.04.2.0	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan nya diluar panti	130	216.870.000	190	119.650.750	95	61.599.200	0	2.137.500	0%	3,47	100%	20.571.000	1%	9,49	Dinas Sosial	
21	1.06.02.2.04.2.0	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	285	256.445.000	30	62.303.750	10	28.000.800	0	3.336.000	0%	11,91	100%	33.719.000	0%	13,15	Dinas Sosial	
22	1.06.02.2.04.2.0	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah ODGI yang dilayani dengan Bimbingan Sosial	50	180.000.000	25	39.844.600	25	25.400.000	0	3.540.000	0%	13,94	97%	9.696.000	2%	5,39	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.04.2.0	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/Aids dan Nafza di Luar Panti sosial	Persentase PMKS yang tertangani	100%	16.207.836.000	82%	738.039.850	100%	579.659.800	22%	2.603.000	22%	0,45	56%	2.367.755.000	56%	14,61	Dinas Sosial	
23	1.06.02.2.04.2.0	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah pelayanan data	5000	1.520.836.000	1000	113.039.850	1000	69.659.800	246	2.603.000	25%	3,74	100%	102.235.000	0%	6,72	Dinas Sosial	
24	1.06.02.2.04.2.1	Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Pelaksanaan	tersedianya bantuan sosial	6235	14.687.000.000	609	625.000.000	110	510.000.000	0	-	0%	-	54%	2.265.520.000	0%	15,43	Dinas Sosial	
	1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah	100%	2.118.183.115	100%	279.610.150	100%	158.865.400	42%	36.640.200	42%	23,06	97%	188.003.620	97%	8,88	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran dan data terpadu penanggulangan kemiskinan	100%	2.118.183.115	100%	279.610.150	100%	158.865.400	42%	36.640.200	42%	23,06	97%	188.003.620	97%	8,88	Dinas Sosial	
25	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota yang Didata	5	1.281.805.382	1	214.781.300	10457	105.224.800	4367	24.134.500	42%	22,94	100%	107.895.000	20%	8,42	Dinas Sosial	
26	1.06.05.2.02.01	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	60	836.377.733	12	64.828.850	6	53.640.600	2	12.505.700	33%	23,31	93%	80.108.620	2%	9,58	Dinas Sosial	
	1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan pemenuhan pasca Bencana	100%	573.625.420	100%	79.494.800	100%	56.359.400	25%	10.384.300	25%	18,43	100%	41.687.000	100%	7,27	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	100%	573.625.420	100%	79.494.800	100%	56.359.400	25%	10.384.300	25%	18,43	100%	41.687.000	100%	7,27	Dinas Sosial	
27	1.06.06.2.02.02	koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Meningkatnya Fungsi Taruna Siaga Bencana	60	573.625.420	12	74.494.800	12	56.359.400	3	10.384.300	25%	18,43	100%	41.687.000	2%	7,27	Dinas Sosial	
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		100%	#REF!	91%	2.682.002.179	95%	2.646.744.500	11%	505.604.021,00	12	19,10	11%	505.604.021	11%	#REF!	Distransnake rprin	-
2	07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	12.551.964.488	91%	2.135.951.801	95%	2.439.044.500	11%	505.604.021	12	20,73	11%	505.604.021	11%	4,03	Distransnake rprin	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	07	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	50.750.000	100%	12.400.000	100%	12.400.000	0%	3.698.000	0	30	0%	3.698.000	0%	18	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	10	20.750.000	2	7.400.000	2	7.400.000	0	3.698.000	0	50	0	3.698.000	0	17,82	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	30.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.546.754.500	100%	1.549.351.647	100%	1.976.715.500	29%	430.284.221	29	21,77	29%	430.284.221	29%	6	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	70	7.492.254.500	14	1.543.851.647	14	1.971.215.500	5	430.284.221	36	21,83	5	430.284.221	7	5,74	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	19.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran	5	18.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	5	16.500.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100%	130.000.000	0%	321.360.019	100%	20.000.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	12	130.000.000	0	-	3	20.000.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.277.434.124	100%	321.360.019	100%	233.229.000	22%	23.871.800	22	10,24	22%	23.871.800	22%	12	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	60	36.630.181	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya pameran	5	168.000.000	1	25.000.000	0	-	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor, penggandaan dan barang cetak	60	154.803.943	12	40.218.860	12	40.229.000	4	10.151.000	33,3	25,23	4	10.151.000	7	6,56	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	50	114.000.000	10	12.000.000	10	12.000.000	2	2.000.000	20	17	2	2.000.000	4	1,75	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman	55	82.000.000	11	11.000.000	11	11.000.000	2	2.000.000	18	18	2	2.000.000	4	2,44	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi	60	722.000.000	12	233.141.159	12	170.000.000	2	9.720.800	16,7	5,72	2	9.720.800	3	1,35	Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	140.000.000	100%	99.760.000	100%	57.500.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	20	140.000.000	8	99.760.000	4	57.500.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	666.736.194	100%	77.000.000	100%	72.000.000	50%	32.000.000	50	44,44	50%	32.000.000	50%	6	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembiayaan listrik, telpon dan internet	60	112.700.194	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pembiayaan sewa kantor, sewa rumah dinas dan sewa kendaraan dinas	60	524.000.000	12	67.000.000	12	67.000.000	12	32.000.000	100	48	12	32.000.000	20	6,11	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	60	30.036.000	12	10.000.000	12	5.000.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100%	471.250.000	100%	76.080.135	100%	67.200.000	7%	15.750.000	7	23,44	7%	15.750.000	7%	4	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya pembiayaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pembiayaan pajak kendaraan dinas	10	365.000.000	2	64.830.135	2	61.200.000	1	15.750.000	50	25,74	1	15.750.000	10	4,32	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60	51.250.000	12	11.250.000	12	6.000.000	0	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	07	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	55.000.000	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	0	Distransnake rprin	-	
2	07	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	125	1.218.599.860	0%	-	2,41	144.125.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-	
2	07	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Cakupan Pemenuhan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125	1.218.599.860	0	-	25	144.125.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-	
2	07	Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	125	1.218.599.860	0	-	25	144.125.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-	
2	07	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Pemenuhan Penempatan Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Tingkat Partisipasi Kerja	75,51	1.273.705.033	72,55%	-	128.343.900	74,71%	63.575.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemerataan tenaga kerja	75,51	848.705.033	72,55%	-	53.103.800	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terpenuhinya Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	75,51	848.705.033	72,55%	-	53.103.800	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
2	07	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Cakupan Pemenuhan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	75,51	425.000.000	72,55%	-	75.240.100	74,71%	63.575.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
2	07	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terpenuhinya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online untuk Pencari Kerja	75,51	425.000.000	72,55%	-	75.240.100	74,71%	63.575.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-
2	07	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	80%	802.093.538	0%	-	60%	-	0%	-	0	0	0	-	0%	-	Distransnake rprin	-	
2	07	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80%	423.747.266	0%	-	0%	-	0%	-	0	0	0	-	0%	0	Distransnake rprin	-	
2	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terpenuhinya Jumlah persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, struktur, skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	80%	423.747.266	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0%	0	Distransnake rprin	-	
2	07	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	80%	378.346.272	0%	-	65%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	Distransnake rprin	-	
2	07	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya jumlah angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	80%	189.173.136	0%	-	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	-	
2	07	Sub Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terpenuhinya Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80%	189.173.136	0%	-	65%	-	0%	-	0	0	0%	-	0	0	Distransnake rprin	-	
	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks pembangunan gender	95,71		75	1.044.637.500		1.009.268.000		51.064.700	#DIV/0!	5,06%	74,76	#REF!	0,7811096	#REF!	DP3AKB		
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responship Gender	100	1.202.266.128	33	428.805.000		323.875.000		0	#DIV/0!	0,00%	33	88.805.000	0,33	430,15%	DP3AKB		
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan Peserta dalam Penyusunan GAP/GBS (Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement) di Kabupaten Pesisir Barat (Kali)	100	20.645.000	25	88.805.000	25	88.875.000	0	-	0	0,00%	25	88.805.000	0,25	430,15%	DP3AKB		
	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPR	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan kabupaten/Kota	125	20.645.000	25	88.805.000	25	88.875.000	0	0	0	0,00%	25	0	0,2	0,00%	DP3AKB		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Keterampilan dan Perekonomian 15 Kelompok Usaha Kepala Rumah Tangga Perempuan di Kabupaten Pesisir Barat	100	1.098.075.000	8			235.000.000			#DIV/0!	0,00%	8	340.000.000	0,08	30,96%	DP3AKB	
	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan Kabupaten/Kota	15	1.098.075.000	8	340.000.000	2	235.000.000	0	0	0	0,00%	8	112.353.000	0,53333333	16,15%	DP3AKB	
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan	100	695.818.390		112.353.000		96.181.000		9.623.100	#DIV/0!	10,01%	0	28.352.600	0	20,29%	DP3AKB	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	100	139.719.063	100	18729500		96.181.000		9.623.100	#DIV/0!	10,01%	100	28.352.600	1	137,33%	DP3AKB	
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang Terlayani dan Mendapatkan Pendampingan	10	20.645.000	7	18.729.500	5	27.161.000	3	9.623.100	60	35,43%	10	103.246.600	1	14,84%	DP3AKB	
	2.08.03.2.02.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Data Serta Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan TPPO	100	695.818.390	100	93.623.500	104	69.020.000	0	-	0	0,00%	100	52.670.000	1	4,05%	DP3AKB	
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	100	1.300.826.171	100	52.670.000		77.880.000		35.384.600	#DIV/0!	45,43%	100	35.384.600	1	#DIV/0!	DP3AKB	
	2.08.04.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	0	0	0		77.880.000		35.384.600	#DIV/0!	45,43%	0	35.384.600	0	3,22%	DP3AKB	
	2.08.04.2.01.03	Pengembangan kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	15	1.098.075.000	0	-	4	77.880.000	2	35.384.600	50	45,43%	2	164.125.600	0,13333333	7,23%	DP3AKB	
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak	100	2.268.917.864	33,33	128.741.000		170.000.000		0	#DIV/0!	0,00%	#VALUE!	128.741.000	#VALUE!	27,06%	DP3AKB	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan tentang Pemenuhan Hak Anak Menuju Kabupaten Layak Anak	100	475.765.000	100	128.741.000		170.000.000		-	#DIV/0!	0,00%	100	128.741.000	1	39,09%	DP3AKB	
	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang mendapatkan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	800	329.355.000	150	128.741.000	800	170.000.000	740	128.741.000	92,5	75,73%	890	450.809.500	1,1125	40,80%	DP3AKB	
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	100	1.104.849.994	49	322.068.500		334.470.000		6.057.000	#DIV/0!	1,81%	49	136.042.000	0,49	61,76%	DP3AKB	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersampainya Informasi tentang Kekerasan Terhadap Anak	100	220.273.845	100	129.985.000		101.491.000		-	#DIV/0!	0,00%	100	129.985.000	1	99,99%	DP3AKB	
	2.08.07.2.01.04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program kegiatan pencegahan KTA	100	130.000.000	100	129.985.000	100	101.491.000	0	-	0	0,00%	100	192.083.500	1	51,73%	DP3AKB	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Anak yang Terlayani	100	371.316.257	100	192.083.500		232.979.000		6.057.000	#DIV/0!	2,60%	100	30.791.000	1	102,64%	DP3AKB	
	2.08.07.2.02.05	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	120	Rp30.000.000,00	40	24.734.000	40	30.000.000	0	-	0	0,00%	40	167.349.500	0,33333333	45,07%	DP3AKB	
	2.08.07.2.02.06	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah Anak yang Menjadi Pemdamping Pengaduan Pada Tingkat Pekon dan Kelurahan	560	371.316.257	40	167.349.500	40	202.979.000	9	6.057.000	22,5	2,98%	49	#REF!	0,0875	#REF!	DP3AKB	
Pangan																			
I.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	37.893.763.478	92,5	15.500.659.883	92,5	6.037.265.700	19,5	1.269.282.252	21%	21%	20	16.769.942.135	4%	44%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3.27.01.2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	45.788.250	100	24.900.000	100	13.400.000	0	-	0%	0%	0	24.900.000	0%	54%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	15.262.750	6	12.900.000	2	8.400.000	0		0%	0%	6	12.900.000	60%	85%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	30.525.500	5	12.000.000	1	5.000.000	0		0%	0%	5	12.000.000	50%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	3.27.01.2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (Persen)	100	33.422.204.878	100	13.349.401.796	100	5.217.765.700	19	967.269.783	19%	19%	19	14.316.671.579	4%	43%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	70	33.388.626.828	42	13.332.401.796	14	5.212.265.700	4	967.269.783	29%	19%	46	14.299.671.579	66%	43%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	15.262.750	3	7.000.000	1	2.500.000	0		0%	0%	3	7.000.000	60%	46%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
c.	3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	10	12.210.200	6	6.500.000	2	2.000.000	0		0%	0%	6	6.500.000	60%	53%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
d.	3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6.105.100	3	3.500.000	1	1.000.000	0		0%	0%	3	3.500.000	60%	57%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	3.27.01.2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	2.202.720.080	100	1.204.468.240	100	335.450.000	26	86.332.200	26%	26%	26	1.290.800.440	5%	59%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	10.989.180	2	3.570.000	1	-	1	-	100%	#DIV/0!	3	3.570.000	60%	32%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
c.	3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas Kantor	10	244.204.000	4	75.000.000	1	25.000.000	0		0%	0%	4	75.000.000	40%	31%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
d.	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	280.834.600	36	116.388.400	12	31.450.000	3	9.613.000	25%	31%	39	126.001.400	65%	45%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
e.	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	60	73.261.200	36	36.000.000	12	12.000.000	3	2.300.000	25%	19%	39	38.300.000	65%	52%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
f.	3.27.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	67.156.100	33	43.970.000	11	22.000.000	2	4.000.000	18%	18%	35	47.970.000	64%	71%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
g.	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor	60	1.526.275.000	36	929.539.840	12	245.000.000	3	70.419.200	25%	29%	39	999.959.040	65%	66%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	3.27.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor	100	105.000.000	100	14.950.000	100	59.500.000	0	-	0%	0%	0	14.950.000	0%	14%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	105.000.000	1	14.950.000	1	59.500.000	0	-	0%	0%	1	14.950.000	8%	14%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4	3.27.01.2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100	959.912.800	100	421.954.247	100	228.400.000	69	156.680.269	69%	69%	69	578.634.516	14%	60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	146.522.400	36	142.174.247	12	44.400.000	3	8.220.269	25%	19%	39	150.394.516	65%	103%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	3.27.01.2.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan Kantor yang Disediakan Sewa Kantor, Rumah Dinas, Gudang Pertanian dan Kendaraan Operasional dinas	60	788.970.000	24	274.000.000	12	182.000.000	3	147.000.000	25%	81%	27	421.000.000	45%	53%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
c.	3.27.01.2.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	24.420.400	36	5.780.000	12	2.000.000	3	1.460.000	25%	73%	39	7.240.000	65%	30%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
5	3.27.01.2.09	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1.158.137.470	100	484.985.600	100	182.750.000	32	59.000.000	32%	32%	32	543.985.600	6%	47%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	235.046.350	36	121.307.000	12	52.500.000	3	23.500.000	25%	45%	39	144.807.000	65%	62%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143	923.091.120	86	363.678.600	29	130.250.000	8	35.500.000	28%	27%	94	399.178.600	66%	43%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
B.	2.09	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR (PANGAN)	Nilai Tukar Petani	102,3	2.392.123.899	124,98	831.438.850	99,77	272.000.000	0	10.576.950	0%	4%	0,0	842.015.800	0%	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
I.	2.09.03	PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	140.000	1.029.479.624	83.009	322.535.775	28.000	190.680.000	9.810	2.530.000	35%	1%	9810	325.065.775	1%	32%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	2.09.03.2.01	Kegiatan : Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	85,4	732.983.000	88,34	262.734.550	85,1	158.080.000	0	2.530.000	0%	2%	0	265.264.550	0%	36%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	16	150.600.000	1	51.289.400	1	50.000.000	0	2.530.000	0%	5%	1	53.819.400	6%	36%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.01.08	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	5		0	-	1	77.875.000	0	-	0%	0%	0	-	0%	#DIV/0!	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.01.12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	5	296.496.624	3	96.152.900	1	30.205.000	0	-	0%	0%	3	96.152.900	60%	32%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.01.16	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	5	296.496.624	2	72.113.650	1	-	1	-	100%	#DIV/0!	3	72.113.650	60%	24%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Buku Neraca Bahan Makanan	5	296.496.624	2	72.113.650	1	24.050.000	1	24.039.250	100%	100%	3	96.152.900	60%	32%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	2.09.03.2.02	Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase penguatan cadangan pangan pemerintah (%)	100	296.496.624	87,7	70.833.225	20	11.047.000	20	11.032.000	100%	100%	20	81.865.225	4%	28%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.02.03	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang Terpelihara Tersedianya Biaya Rekonsiliasi Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	53	296.496.624	34	11.032.000	34	11.047.000	34	11.032.000	100%	100%	68	22.064.000	128%	7%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6*8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	2.09.03.2.04	Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	87,90	296.496.624	87,6	59.801.225	87,8	32.600.000	0	-	0%	0%	0	59.801.225	0%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8	3.663.060.000	4	719.270.404	2	-	0	-	0%	#DIV/0!	4	719.270.404	50%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	2.09.03.2.04.03	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan pemantauan konsumsi pangan	5	242.784.000	3	59.801.225	1	32.600.000	0		0%	0%	3	59.801.225	60%	25%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
II.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	5	982.082.275	16,95	374.444.725	6	36.920.000	0	-	0%	0%	0	374.444.725	0%	38%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	2.09.04.2.01	Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan Dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan Informasi Dearah Rawan Pangan	100	219.478.345	100	115.011.800	100	36.920.000	0	-	0%	0%	0	115.011.800	0%	52%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Terupdatanya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5	219.478.345	3	115.011.800	1	36.920.000	0		0%	0%	3	115.011.800	60%	52%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	2.09.04.2.02	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan	4	762.603.930	1	259.432.925	1	-	1	-	100%	#DIV/0!	1	259.432.925	25%	34%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penanganan Kerawanan Pangan	15	762.603.930	4	259.432.925	2	-	2	-	100%	#DIV/0!	6	259.432.925	40%	34%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
III.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan	60,00	380.562.000	100	134.458.350	60	44.400.000	12	8.046.950	20%	18%	12	142.505.300	4%	37%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	2.09.05.2.01	Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100,00	380.562.000	100	134.458.350	100	44.400.000	19	8.046.950	19%	18%	19	142.505.300	4%	37%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.05.2.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	232.050.000	2	46.680.000	1	-	0	-	0%	#DIV/0!	2	46.680.000	40%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
c.	2.09.05.2.01.07	Penyediaan Sarana Pengujian Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	5	148.512.000	3	57.838.350	1	31.622.000	0	6.748.950	0%	21%	3	64.587.300	60%	43%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	2.09.05.2.01.09	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4	278.460.000	1	29.940.000	1	12.778.000	0	1.298.000	0%	10%	1	31.238.000	25%	11%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																		
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																		DPRKP
6	2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	60,00	502.795.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	60,00	502.795.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP	
	2.10.04.2.01.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,00	502.795.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPRKP	
																		DPRKP	
7	2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Cakupan Penyelesaian Kerugian (Ha)	11,50	33.123.112.050,00	11,00	13.059.426.900,00	-	-	-	-	-	-	11,00	13.059.426.900,00	0,96	0,39	DPRKP	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Luas Tanah yang disediakan bagi pembangun untuk kepentingan umum dan lainnya (Ha)	11,00	33.123.112.050,00	8,70	13.059.426.900,00	-	-	-	-	-	-	8,70	13.059.426.900,00	0,79	0,39	DPRKP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.10.05.2.01.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Ha)	11	33.123.112.050,00	8,70	13.059.426.900,00	-	-	-	-	-	-	8,70	13.059.426.900,00	0,79	0,39	DPRKP	
																		DPRKP	
8	2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong	9,50	1.752.548.326,00	2,90	618.973.300,00	2,95	120.000.000,00	0,87	16.094.800,00	29,63	13,41	3,77	635.068.100,00	0,40	0,36	DPRKP	
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	9,50	1.752.548.326,00	2,90	618.973.300,00	2,95	120.000.000,00	0,87	16.094.800,00	29,63	13,41	3,77	635.068.100,00	0,40	0,36	DPRKP	
	2.10.08.2.02.01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Sertifikat Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang diinventarisasi	659,00	1.752.548.326,00	378,00	618.973.300,00	297,00	120.000.000,00	88,00	16.094.800,00	29,63	13,41	466,00	635.068.100,00	0,71	0,36	DPRKP	
	2.11	Lingkungan Hidup																	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 16.960.069.162	99%	Rp 2.990.686.138	100%	Rp 3.076.962.000	21%	Rp 654.700.147	21%	21,28%	60%	Rp 3.645.386.285	60%	21%	DLH	
	2.11.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	Rp 56.200.728	98%	Rp 12.173.350	100%	Rp 11.756.000	74%	Rp 8.739.200	74%	74,34%	86%	Rp 20.912.550	86%	37%	DLH	
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	10 dokumen	Rp 11.339.530	2 dokumen	Rp 4.009.000	2 dokumen	Rp 4.057.500	2	Rp 4.057.500	100%	100,00%	6 dokumen	Rp 8.066.500	60%	71%	DLH	
	2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	5 dokumen	Rp 13.275.805	1 dokumen	Rp 2.019.350	1 dokumen	Rp 2.072.600	1	Rp 2.072.600	100%	100,00%	1 dokumen	Rp 4.091.950	20%	31%	DLH	
	2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	Rp 2.147.742	1 dokumen	Rp 657.000	0	Rp -	0	Rp -	0%	0,00%	1 dokumen	Rp 657.000	20%	31%	DLH	
	2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 dokumen	Rp 3.200.885	1 dokumen	Rp 619.000	1 dokumen	Rp 626.000	0	Rp -	0%	0,00%	1 dokumen	Rp 619.000	20%	19%	DLH	
	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 laporan	Rp 26.236.766	2 laporan	Rp 4.869.000	2 laporan	Rp 4.999.900	1	Rp 2.609.100	50%	52,18%	6 laporan	Rp 7.478.100	60%	29%	DLH	
	2.11.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Rp 11.236.162.462	99%	Rp 1.668.362.094	100%	Rp 2.151.986.000	20%	Rp 436.126.788	20%	20,27%	60%	Rp 2.104.488.882	60%	18,73%	DLH	
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	70 bulan	Rp 11.207.302.020	14 bulan	Rp 1.661.970.594	14 bulan	Rp 2.145.516.000	4	Rp 432.138.188	29%	20,14%	42 bulan	Rp 2.094.108.782	60%	19%	DLH	
	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	5 laporan	Rp 13.118.383	1 laporan	Rp 2.470.850	1 laporan	Rp 2.470.600	0	Rp -	0%	0,00%	3 laporan	Rp 2.470.850	60%	19%	DLH	
	2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Tersedianya laporan keuangan semesteran	90 laporan	Rp 10.494.706	18 laporan	Rp 2.925.850	18 laporan	Rp 2.999.600	3	Rp 2.990.300	17%	99,69%	54 laporam	Rp 5.916.150	60%	56%	DLH	
	2.11.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	5 laporan	Rp 5.247.353	1 laporan	Rp 994.800	1 laporan	Rp 999.800	1	Rp 998.800	100%	99,90%	3 laporan	Rp 1.993.600	60%	38%	DLH	
	2.11.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan sarana dan prsarana pendukung kinerja	100%	Rp 1.363.991.719	99%	Rp 301.138.534	100%	Rp 239.760.000	15%	Rp 37.043.400	15%	15,45%	57%	Rp 338.181.934	57%	25%	DLH	
	2.11.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk pameran	6 kali	Rp 131.183.828	1 kali	Rp 25.000.000	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	#DIV/0!	3 kali	Rp 25.000.000	50%	19%	DLH	
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya alat tulis kantor dan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	Rp 141.358.445	12 bulan	Rp 70.582.000	12 bulan	Rp 60.995.100	3	Rp 27.576.000	25%	45,21%	36 bulan	Rp 98.158.000	60%	69%	DLH	
	2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya informasi media massa	50 SKHU	Rp 62.968.237	10 SKHU	Rp 12.000.000	10 SKHU	Rp 12.000.000	3	Rp 3.000.000	30%	25,00%	30 SKHU	Rp 15.000.000	60%	24%	DLH	
	2.11.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	55 bulan	Rp 57.720.884	11 bulan	Rp 11.000.000	11 bulan	Rp 11.000.000	2	Rp 2.000.000	18%	18,18%	33 bulan	Rp 13.000.000	60%	23%	DLH	
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah dan dalam daerah	60 bulan	Rp 970.760.325	12 bulan	Rp 182.556.534	12 bulan	Rp 155.764.900	3	Rp 4.467.400	25%	2,87%	36 bulan	Rp 187.023.934	60%	19%	DLH	
	2.11.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Sarana Pendukung Kinerja	100%	Rp 1.400.000.000	76%	Rp 202.277.000	100%	Rp 6.446.000	99%	Rp 6.400.000	99%	99,29%	88%	Rp 208.677.000	88%	15%	DLH	
	2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Mesin dan Mesin Lainnya	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	25 unit	Rp 1.400.000.000	5 unit	Rp 202.277.000	5 unit	Rp 6.446.000	5	Rp 6.400.000	100%	99,29%	5 unit	Rp 208.677.000	20%	15%	DLH	
	2.11.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan layanan pendukung	100%	Rp 645.996.394	100%	Rp 75.556.000	100%	Rp 65.554.000	46%	Rp 29.983.000	46%	45,74%	73%	Rp 105.539.000	73%	16%	DLH	
	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sewa gedung kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas	20 unit	Rp 600.821.931	4 unit	Rp 67.000.000	4 unit	Rp 57.000.000	2	Rp 25.500.000	50%	44,74%	8 unit	Rp 92.500.000	40%	15%	DLH	
	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	Meningkatkan Kebersihan Kantor	60 bulan	Rp 45.174.463	12 bulan	Rp 8.556.000	12 bulan	Rp 8.554.000	3	Rp 4.483.000	25%	52,41%	26 bulan	Rp 13.039.000	43%	29%	DLH	
	2.11.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik	100%	Rp 2.947.648.136	99%	Rp 731.179.160	100%	Rp 601.460.000	23%	Rp 136.407.759	23%	22,68%	61%	Rp 867.586.919	61%	29%	DLH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	10 unit	Rp 264.466.597	2 unit	Rp 52.414.500	2 unit	Rp 55.450.000	1	Rp 15.587.500	50%	28,11%	6 unit	Rp 68.002.000	60%	26%	DLH	
	2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	65 unit	Rp 1.970.800.881	13 unit	Rp 510.144.660	13 unit	Rp 387.310.000	4	Rp 82.070.259	31%	21,19%	39 unit	Rp 592.214.919	60%	30%	DLH	
	2.11.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya jasa pemeliharaan alat besar	5 unit	Rp 598.219.244	1 unit	Rp 162.700.000	1 unit	Rp 158.700.000	0	Rp 38.750.000	0%	24,42%	3 unit	Rp 201.450.000	60%	34%	DLH	
	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	60 bulan	Rp 61.687.883	12 bulan	Rp 5.920.000	12 bulan	Rp -	0	Rp -	0%	#DIV/0!	36 bulan	Rp 5.920.000	60%	10%	DLH	
	2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	60 bulan	Rp 52.473.531				Rp -	0	Rp -		#DIV/0!	24 bulan	Rp -	40%	0%	DLH	
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	3 dokumen	Rp 2.482.702.500	1 dokumen	Rp 370.416.300	1 dokumen	Rp 445.000.000	7%	Rp 32.372.500	100%	7,27%	2 dokumen	Rp 402.788.800	67%	16%	DLH	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Tersedianya Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	4 dokumen	Rp 2.482.702.500	1 dokumen	Rp 370.416.300	1 dokumen	Rp 445.000.000	0	Rp 32.372.500	0%	7,27%	2 dokumen	Rp 402.788.800	67%	16%	DLH	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73.54 angka	Rp 1.834.747.681	81,25 angka	Rp 99.147.800	81,25 angka	Rp 25.000.000	2%	Rp 500.000	100%	2,00%	76 angka	Rp 99.647.800	104%	5%	DLH	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	cakupan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	100%	Rp 1.540.161.331	99%	Rp 49.573.900	100%	Rp 25.000.000	0,02	Rp 500.000	2%	2,00%	51%	Rp 50.073.900	51%	3%	DLH	
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	jumlah dokumen Hasil Pengukuran IKA, IKD, dan IKTL	15 dokumen	Rp 1.540.161.331	3 dokumen	Rp 49.573.900	3 dokumen	Rp 25.000.000	0	Rp 500.000	0%	2,00%	9 dokumen	Rp 50.073.900	60%	3%	DLH	
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio RTH persatuan luas wilayah	100%	Rp 1.171.341.873	99%	Rp 341.446.100	100%	Rp 328.554.000	26%	Rp 86.478.790	26%	26,32%	63%	Rp 427.924.890	63%	37%	DLH	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Rasio RTH persatuan luas wilayah	100%	Rp 1.171.341.873	99%	Rp 341.446.100	100%	Rp 328.554.000	26%	Rp 86.478.790	26%	26,32%	63%	Rp 427.924.890	63%	37%	DLH	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rasio RTH persatuan luas wilayah	100%	Rp 1.171.341.873	99%	Rp 341.446.100	100%	Rp 328.554.000	26%	Rp 86.478.790	26%	26,32%	63%	Rp 427.924.890	63%	37%	DLH	
	2.11.11.06	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Cakupan pengendalian terhadap izin lingkungan, PPLH dan PUU LH	100%	Rp 701.672.538	99%	Rp 69.809.125	100%	Rp 35.000.000	16%	Rp 5.729.750	100%	16,37%	58%	Rp 75.538.875	58%	11%	DLH	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100%	Rp 521.365.376	99%	Rp 69.809.125	100%	Rp 35.000.000	16%	Rp 5.729.750	16%	16,37%	58%	Rp 75.538.875	58%	14%	DLH	
	2.11.06.2.01.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	Rp 521.365.376	99%	Rp 69.809.125	100%	Rp 35.000.000	16%	Rp 5.729.750	16%	16,37%	58%	Rp 75.538.875	58%	14%	DLH	
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	60%	Rp 10.782.132.298	94%	Rp 1.921.453.750	100%	Rp 1.902.400.000	17%	Rp 316.145.400	17%	16,62%	56%	Rp 2.237.599.150	93%	21%	DLH	
	2.11.11.2.01	PENGELOLAAN SAMPAH	Persentase jumlah sampah yang tertangani	23%	Rp 7.721.499.000	94%	Rp 1.921.453.750	100%	Rp 1.902.400.000	17%	Rp 316.145.400	17%	16,62%	56%	Rp 2.237.599.150	241%	29%	DLH	
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan sampah	60 bulan	Rp 7.721.499.000	12 bulan	Rp 1.921.453.750	12 bulan	Rp 1.902.400.000	3	Rp 316.145.400	25%	16,62%	36 bulan	Rp 2.237.599.150	60%	29%		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL		2	21.991.840.957	155.491	2.945.865.518	57.733	3.425.810.700	549	610.578.259	0,95%	17,82%	156.040	3.556.443.777	7802000%	16,17%	Disdukcapil	
I	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	1	20.976.177.110	136	2.510.854.671	134	2.946.272.000	43	603.219.759	32,09%	20,47%	179	3.114.074.430	17900%	14,85%	Disdukcapil	
I	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	30	92.101.450	4	12.216.250	4	12.400.000	1	2.520.000	25,00%	20,32%	5	14.736.250	17%	16,00%	Disdukcapil	
1	2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	10	73.002.750	2	7.327.750	2	7.400.000	1	2.520.000	50,00%	34,05%	3	9.847.750	30%	13,49%	Disdukcapil	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	19.098.700	2	4.888.500	2	5.000.000	0	-	0,00%	0,00%	2	4.888.500	10%	25,60%	Disdukcapil	
II	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	1	14.994.521.638	21	1.703.059.379	21	2.231.310.700	15	496.097.554	71,43%	22,23%	36	2.199.156.933	3600%	14,67%	Disdukcapil	
1	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	60	14.950.038.188	15	1.697.653.979	15	2.225.810.700	15	496.097.554	100,00%	22,29%	30	2.193.751.533	50%	14,67%	Disdukcapil	
2	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	20.256.000	1	2.493.250	1	2.500.000	0	-	0,00%	0,00%	1	2.493.250	20%	12,31%	Disdukcapil	
3	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan keuangan bulanan, laporan triwulan dan laporan semester	20	16.125.800	4	1.915.600	4	2.000.000	0	-	0,00%	0,00%	4	1.915.600	20%	11,88%	Disdukcapil	
4	2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	10	8.101.650	1	996.550	1	1.000.000	0	-	0,00%	0,00%	1	996.550	10%	12,30%	Disdukcapil	
III	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	1	2.459.632.565	58	330.517.965	57	242.415.100	11	13.975.100	19,30%	5,76%	69	344.493.065	6900%	14,01%	Disdukcapil	
1	2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	56.329.800	12	3.744.000	12	3.745.000	0	-	0,00%	0,00%	12	3.744.000	20%	6,65%	Disdukcapil	
3	2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak, penggandaan dan kebutuhan ATK	60	437.167.950	12	37.703.950	12	40.670.100	3	3.232.500	25,00%	7,95%	15	40.936.450	25%	9,36%	Disdukcapil	
4	2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media cetak	60	97.261.200	10	12.000.000	10	12.000.000	2	2.600.000	20,00%	21,67%	12	14.600.000	20%	15,01%	Disdukcapil	
5	2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	88.689.100	11	10.533.000	11	11.000.000	3	1.950.000	27,27%	17,73%	14	12.483.000	25%	14,08%	Disdukcapil	
6	2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1.578.307.015	12	242.287.015	12	175.000.000	3	6.192.600	25,00%	3,54%	15	248.479.615	25%	15,74%	Disdukcapil	
V	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	1	1.923.226.977	36	174.867.077	36	299.396.200	9	69.705.105	25,00%	23,28%	45	244.572.182	4500%	12,72%	Disdukcapil	
1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	551.586.477	12	78.104.077	12	48.166.200	3	2.525.105	25,00%	5,24%	15	80.629.182	25%	14,62%	Disdukcapil	
2	2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas	60	1.008.557.900	12	92.000.000	12	247.000.000	3	67.000.000	25,00%	27,13%	15	159.000.000	25%	15,77%	Disdukcapil	
3	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	60	363.082.600	12	4.763.000	12	4.230.000	3	180.000	25,00%	4,26%	15	4.943.000	25%	1,36%	Disdukcapil	
VI	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	1	1.316.894.480	16	185.394.000	16	160.750.000	7	20.922.000	43,75%	13,02%	23	206.316.000	2300%	15,67%	Disdukcapil	
1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	60	459.844.580	2	63.380.000	2	58.000.000	2	12.000.000	100,00%	20,69%	4	75.380.000	7%	16,39%	Disdukcapil	
2	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60	384.034.600	2	59.900.000	2	47.300.000	2	7.650.000	100,00%	16,17%	4	67.550.000	7%	17,59%	Disdukcapil	
3	2	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	60	473.015.300	12	62.114.000	12	55.450.000	3	1.272.000	25,00%	2,29%	15	63.386.000	25%	13,40%	Disdukcapil	
II	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan	1	910.816.930	105.304	303.676.930	57.500	287.000.000	500	1.500.000	0,87%	0,52%	105.804	305.176.930	10580400%	33,51%	Disdukcapil	
I	2	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	358.305.030	50.000	49.505.030	2000	35.000.000	500	1.500.000	25,00%	4,29%	50.500	51.005.030	5050000%	14,24%	Disdukcapil	
1	2	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	4	358.305.030	50.000	49.505.030	2000	35.000.000	500	1.500.000	25,00%	4,29%	50.500	51.005.030	12625000%	14,24%	Disdukcapil	
II	2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk	5.305	414.283.500	5.304	183.043.500	5500	180.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5.304	183.043.500	100%	44,18%	Disdukcapil	
1	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk	5.305	414.283.500	5.304	183.043.500	5500	180.000.000	0	-	0,00%	0,00%	5.304	183.043.500	100%	44,18%	Disdukcapil	
III	2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk	50.001	138.228.400	50.000	71.128.400	50000	72.000.000	0	-	0,00%	0,00%	50.000	71.128.400	100%	51,46%	Disdukcapil	
1	2	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	100.000	138.228.400	50.000	71.128.400	50000	72.000.000	0	-	0,00%	0,00%	50.000	71.128.400	50%	51,46%	Disdukcapil	
III	2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	50.001	130.816.787	50.000	45.549.787	12	64.538.700	3	2.955.000	25,00%	4,58%	50.003	48.504.787	100%	37,08%	Disdukcapil	
1	2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pencatatan Sipil	50.001	85.719.787	50.000	45.549.787	12	64.538.700	3	2.955.000	25,00%	4,58%	50.003	48.504.787	100%	56,59%	Disdukcapil	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Pribadi Kependudukan dan Pencatatan Pribadi Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	50.001	85.719.787	50.000	45.549.787	12	64.538.700	3	2.955.000	25,00%	4,58%	50.003	48.504.787	100%	56,59%	Disdukcapil	
IV	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	1	135.925.070	1	44.275.070	12	64.000.000	3	1.807.500	25,00%	2,82%	4	46.082.570	400%	33,90%	Disdukcapil	
I	2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	100.925.070	1	44.275.070	12	64.000.000	3	1.807.500	25,00%	2,82%	4	46.082.570	200%	45,66%	Disdukcapil	
1	2	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	17	100.925.070	1	44.275.070	12	64.000.000	3	1.807.500	25,00%	2,82%	4	46.082.570	24%	45,66%	Disdukcapil	
V	2	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun	51	87.105.060	50	41.509.060	75	64.000.000	0	1.096.000	0,00%	1,71%	50	42.605.060	98%	48,91%	Disdukcapil	
I	2	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan	51	87.105.060	50	41.509.060	75	64.000.000	0	1.096.000	0,00%	1,71%	50	42.605.060	98%	48,91%	Disdukcapil	
1	2	Penyediaan Data kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	125	87.105.060	50	41.509.060	75	64.000.000	0	1.096.000	0,00%	1,71%	50	42.605.060	40%	48,91%	Disdukcapil	
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																			
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN N/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp 14.913.405.801	80%	Rp 1.873.955.580	100	Rp 2.730.041.436	25	Rp 442.622.769	24,7%	16,21	25,51	2.316.578.349	25,51	16%	DPMP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Rp 39.072.640	100%	Rp 12.400.000	100	Rp 12.400.000	31	Rp 3.046.400	30,7%	24,57	31,73	15.446.400	31,73	40%	DPMP	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja	10	Rp 8.547.140	1	Rp 7.400.000	2	Rp 7.400.000	-	Rp 2.491.800	0,0%	33,67	1,00	9.891.800	10,00	116%	DPMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	120	Rp 30.525.500	1	Rp 5.000.050	2	Rp 5.000.000	-	Rp 554.600	0,0%	11,09	1,00	5.554.650	0,83	18%	DPMP	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	Rp 11.645.604.626	100	Rp 1.331.147.506	100	Rp 2.076.479.200	23	Rp 315.332.513	23,0%	15,19	122,96	1.646.480.019	122,96	14%	DPMP	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	Rp 11.612.026.576	14	Rp 1.325.647.406	14	Rp 2.067.979.200	4	Rp 315.010.513	28,6%	15,23	18,00	1.640.657.919	25,71	14%	DPMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	Rp 15.262.750	1	Rp 2.500.000	1	Rp 5.000.000	-		0,0%	-	1,00	2.500.000	20,00	16%	DPMP	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri wulan/Se mest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	Rp 12.210.200	2	Rp 2.000.100	2	Rp 2.500.000	-	Rp 322.000	0,0%	12,88	2,00	2.322.100	20,00	19%	DPMP	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 6.105.100	1	Rp 1.000.000	1	Rp 1.000.000	-		0,0%	-	1,00	1.000.000	20,00	16%	DPMP	
		Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	tersedianya jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan tugas dan fungsi	4	Rp 80.000.000		Rp 18.000.000	100	Rp 20.000.000	-	Rp -	0,0%	-	0,00	18.000.000	0,00	23%	DPMP	
		pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	4	Rp 80.000.000		Rp 18.000.000	4	Rp 20.000.000	-	Rp -	0,0%	-	0,00	18.000.000	0,00	23%	DPMP	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	Rp 1.589.141.661	100%	Rp 361.524.524	100	Rp 327.884.436	25	Rp 29.178.856	24,7%	8,90	25,72	390.703.380	25,72	25%	DPMP	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	Rp 19.878.206	12	Rp 4.034.000	12	Rp 4.333.736	-	Rp 2.000.000	0,0%	46,15	12,00	6.034.000	20,00	30%	DPMP	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	Rp 152.627.500	1	Rp 25.000.000	1	Rp 25.000.000	-	Rp -	0,0%	-	1,00	25.000.000	20,00	16%	DPMP	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK dan barang cetakan	60	Rp 158.379.725	12	Rp 41.490.550	12	Rp 35.550.700	3	Rp 4.500.000	25,0%	12,66	15,00	45.990.550	25,00	29%	DPMP	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah SKHU	50	Rp 73.261.200	12	Rp 12.000.000	10	Rp 12.000.000	3	Rp 2.000.000	30,0%	16,67	15,00	14.000.000	30,00	19%	DPMP	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	Rp 67.156.100	11	Rp 11.000.000	11	Rp 11.000.000	3	Rp 2.000.000	27,3%	18,18	14,00	13.000.000	25,45	19%	DPMP	
		Penyelengar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	Rp 1.117.838.930	12	Rp 267.999.974	12	Rp 240.000.000	3	Rp 18.678.856	25,0%	7,78	15,00	286.678.830	25,00	26%	DPMP	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100	Rp 304.500.000	100%	Rp 11.500.000	100	Rp 76.980.000	-	Rp -	0,0%	-	1,00	11.500.000	1,00	4%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	26	Rp 304.500.000	2	Rp 11.500.000	6	Rp 76.980.000	-	Rp -	0,0%	-	2,00	11.500.000	7,69	4%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	Rp 884.225.240	100%	Rp 69.251.000	100	Rp 135.050.600	70	Rp 89.365.000	70,3%	66,17	71,30	158.616.000	71,30	18%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	Rp 197.805.240	12	Rp 203.000	12	Rp 1.800.000	-		0,0%	-	12,00	203.000	20,00	0%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapn Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	15	Rp 641.035.500	12	Rp 59.000.000	12	Rp 122.000.000	3	Rp 87.000.000	25,0%	71,31	15,00	146.000.000	100,00	23%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	Rp 45.384.500	12	Rp 10.048.000	12	Rp 11.250.600	3	Rp 2.365.000	25,0%	21,02	15,00	12.413.000	25,00	27%	DPMP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	Rp 450.861.635	100%	Rp 70.132.500	100	Rp 81.247.200	22	Rp 5.700.000	22,1%	7,02	23,13	75.832.500	23,13	17%	DPMP	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	10	Rp 359.895.645	2	Rp 59.112.500	2	Rp 70.050.000	-	Rp 5.700.000	0,0%	8,14	2,00	64.812.500	20,00	18%	DPMP	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	Rp 90.965.990	12	Rp 11.020.000	1	Rp 11.197.200	-		0,0%	-	12,00	11.020.000	20,00	12%	DPMP	
2	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Peningkatan status Desa	80%	Rp 6.240.000.000	79	Rp 353.825.750	69	Rp 955.024.484	0	Rp 1.025.000	0,2%	0,11	79,11	354.850.750	9888,42	6%	DPMP	
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Maju	100	Rp 6.240.000.000	100	Rp 353.825.750	100	Rp 955.024.484	0	Rp 1.025.000	0,1%	0,11	100,11	354.850.750	100,11	6%	DPMP	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Pekon	5	Rp 6.240.000.000	1	Rp 353.825.750	1	Rp 955.024.484	0	Rp 1.025.000	10,7%	0,11	1,11	354.850.750	22,15	6%	DPMP	
3	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	100	Rp 10.166.272.680	100%	Rp 1.740.163.649	100	Rp 1.499.373.660	28	Rp 30.250.000	28,3%	2,02	29,27	1.770.413.649	29,27	17%	DPMP	
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Cakupan Pekon Tertib Administrasi	100	Rp 10.166.272.680	100	Rp 1.740.163.649	100	Rp 1.499.373.660	-	Rp 30.250.000	0,0%	2,02	100,00	1.770.413.649	100,00	17%	DPMP	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi yang Diberikan	60	Rp 7.048.568.680	12	Rp 1.331.659.434	12	Rp 1.127.972.060	-		0,0%	-	12,00	1.331.659.434	20,00	19%	DPMP	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Pekon	580	Rp 1.029.254.000	116	Rp 190.604.690	116	Rp 93.400.000	25	Rp 15.550.000	21,6%	16,65	141,00	206.154.690	24,31	20%	DPMP	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah pekon	580	Rp 696.150.000		Rp 113.064.850	116	Rp 160.001.600	25	Rp 14.700.000	21,6%	9,19	25,00	127.764.850	4,31	18%	DPMP	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa	Jumlah BUMDES	137	Rp 1.392.300.000		Rp 104.834.675	27	Rp 70.000.000	-		0,0%	-	0,00	104.834.675	0,00	8%	DPMP	
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian perangkat desa	Jumlah Desa	116	Rp 60.000.000				Rp 48.000.000	-				0,00	-	0,00	0%	DPMP	
4	Meningkatnya Pembangunan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	Rp 12.379.295.430	100	Rp 2.232.689.192	100	Rp 1.551.638.500	7	Rp 35.971.800	6,7%	2,32	106,66	2.268.660.992	106,66	18%	DPMP	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100	Rp 12.379.295.430	100	Rp 2.232.689.192	100	Rp 1.551.638.500	7	Rp 35.971.800	6,7%	2,32	106,66	2.268.660.992	106,66	18%	DPMP	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader Posyandu yang dibina	4500	Rp 6.933.300.000	900	Rp 1.425.347.350	900	Rp 1.196.638.500	-		0,0%	-	900,00	1.425.347.350	20,00	21%	DPMP	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan	60	Rp 5.445.995.430	12	Rp 807.341.842	12	Rp 355.000.000	3	Rp 35.971.800	25,0%	10,13	15,00	843.313.642	25,00	15%	DPMP	
2.14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TERLAKSANANYA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	100	6.572.678.547	100	7.263.360.573		8.098.622.300		841.310.125	#DIV/0!	10,39%	100	4.342.737.168	1	150,83%	DP3AKB	
02.14.01		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100	2.879.252.220	100	3.501.427.043		4.169.081.300		819.354.125	#DIV/0!	19,65%	100	840.478.125	1	844,74%	DP3AKB	
2.14.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu		99.496.000		21.124.000		19.262.000		11.633.000	#DIV/0!	60,39%	0	19.033.000	#DIV/0!	101,24%	DP3AKB	
2.14.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	12	18.800.000	2	7.400.000	2	7.400.000	1	4.771.000	50	64,47%	3	8.202.000	0,25	49,94%	DP3AKB	
2.14.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4	16.424.000	1	3.431.000	1	3.431.000	1	3.431.000	100	100,00%	2	3.431.000	0,5	20,89%	DP3AKB	
2.14.01.2.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	16.424.000	0	0	0	0	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	3.431.000	0	20,89%	DP3AKB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	4	16.424.000	1	3.431.000	1	3.431.000	1	3.431.000	100	100,00%	2	6.862.000	0,5	41,78%	DP3AKB	
	2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	16.424.000	1	3.431.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	3.431.000	0,25	22,87%	DP3AKB	
	2.14.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	12	15.000.000	2	3.431.000	2	5.000.000	0	-	0	0,00%	2	2.995.264.293	0,16666667	37,91%	DP3AKB	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan keuangan Tepat Waktu	100	7.901.554.294	100	2.995.264.293		3.603.198.300		781.400.025	#DIV/0!	21,69%	100	3.771.164.318	1	47,82%	DP3AKB	
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	84	7.886.501.744	14	2.989.764.293	28	3.597.698.300	4	781.400.025	14,2857143	21,72%	18	783.900.025	0,21428571	9051,70%	DP3AKB	
	2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	6	8.660.250	1	2.500.000	1	2.500.000	0	-	0	0,00%	1	2.000.000	0,16666667	68,30%	DP3AKB	
	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	108	2.928.200	18	2.000.000	18	2.000.000		-	0	0,00%	18	1.000.000	0,16666667	28,87%	DP3AKB	
	2.14.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	3.464.100	1	1.000.000	1	1.000.000		-	0	0,00%	1	395.410.334	0,16666667	57,14%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	691.975.401	100	395.410.334	100	290.640.000	0	11.195.100	0	3,85%	100	14.890.100	1	99,86%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	100	14.910.823	9	3.695.000	9	4.225.000	2	1.280.000	22,2222222	30,30%	11	26.280.000	0,11	42,66%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	6	61.602.500	1	25.000.000	1	25.000.000	0	-	0	0,00%	1	24.472.000	0,16666667	20,11%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK	72	121.699.653	10	24.472.000	2	38.415.000	0	-	0	0,00%	10	12.000.000	0,13888889	40,58%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah SKHU	60	29.569.200	12	12.000.000	12	12.000.000	2	2.000.000	16,6666667	16,67%	14	13.000.000	0,23333333	34,12%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	66	38.105.100	11	11.000.000	12	11.000.000	2	2.000.000	16,6666667	18,18%	13	160.207.500	0,1969697	37,60%	DP3AKB	
	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	72	426.088.125	6	158.207.500	6	200.000.000	1	5.915.100	16,6666667	2,96%	7	95.415.100	0,09722222	12,98%	DP3AKB	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	790.179.360	100	89.500.000		24.500.000		-	#DIV/0!	0,00%	100	89.500.000	1	47,76%	DP3AKB	
	2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	100	187.383.020	3	89.500.000	3	24.500.000	0	-	0	0,00%	3	84.130.250	0,03	15,68%	DP3AKB	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pemerintahan Daerah	100	536.553.320	100	84.130.250		87.381.000		9.126.000	#DIV/0!	10,44%	100	17.875.250	1	26,98%	DP3AKB	
	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	72	66.243.020	5	8.749.250	5	12.000.000	1	1.150.000	20	9,58%	6	73.150.000	0,08333333	16,10%	DP3AKB	
	2.14.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	28	454.222.700	3	72.000.000	3	72.000.000	1	7.000.000	33,3333333	9,72%	4	10.381.000	0,14285714	64,53%	DP3AKB	
	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	72	16.087.600	12	3.381.000	12	3.381.000	3	976.000	25	28,87%	15	167.510.000	0,20833333	25,80%	DP3AKB	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	100	649.226.910	100	166.534.000		144.100.000		6.000.000	#DIV/0!	4,16%	100	169.294.000	1	27,90%	DP3AKB	
	2.14.01.2.09.01	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan	28	606.728.210	15	163.294.000	15	137.100.000	1	5.000.000	6,66666667	3,65%	16	8.240.000	0,57142857	19,39%	DP3AKB	
	2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	72	42.498.700	8	3.240.000	8	7.000.000	1	1.000.000	12,5	14,29%	9	245.303.350	0,125	38,82%	DP3AKB	
	02.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk	0,92	631.826.399		244.303.350		176.400.000		0	#DIV/0!	0,00%	0	219.326.000	0	#DIV/0!	DP3AKB	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Indikator Program bangsa Kencana Dalam Kebijakan Pembangunan	100	-	100	219.326.000		176.400.000			#DIV/0!	0,00%	100	85.200.000	1	655,38%	DP3AKB	
	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	11	13.000.000	11	85.200.000	11	86.400.000	0	0	0	0,00%	11	1.192.250.000	1	9935,42%	DP3AKB	
	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelohan dan Pelaporan Data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	11	12.000.000	11	1.192.250.000	11	90.000.000	0	0	0	0,00%	11	2.259.778.000	1	10,22%	DP3AKB	
	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate	2,10	22.104.832.046	2,15	2.259.778.000		1.624.741.000		21.956.000	#DIV/0!	1,35%	2,15	845.019.350	1,02380952	31,29%	DP3AKB	
1	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK	100	2.700.311.022	86,3	823.063.350		821.265.000		10.956.000	#DIV/0!	1,33%	86,3	325.956.000	0,863	359,06%	DP3AKB	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.01.10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai penyuluhan Bangsa kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10	90.780.438	10	315.000.000	10	474.192.000	0	0	0	0,00%	10	159.384.000	1	258,73%	DP3AKB	
	2.14.03.2.01.11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Opeasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya	66	61.602.500	11	159.384.000	11	110.000.000	1	10.956.000	9,09090909	9,96%	12	106.291.800	0,18181818	32,80%	DP3AKB	
	2.14.03.2.01.12	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa kencana (Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang	66	324.064.024	11	95.335.800	11	80.073.000	0	0	0	0,00%	11	33.300.000	0,16666667	5,89%	DP3AKB	
	2.14.03.2.01.13	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang KKBPK	3300	565.839.560	11	33.300.000	11	60.000.000	0	0	0	0,00%	11	140.820.950	0,00333333	9,52%	DP3AKB	
	2.14.03.2.01.14	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan avokasi program bangsa kencana (pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga berencana	12	1.479.460.500	11	140.820.950	4	97.000.000	0	0	0	0,00%	11	613.245.300	0,91666667	19,67%	DP3AKB	
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat tentang program Keluarga Berencana untuk Pelayanan KB yang Berkualitas serta Pencatatan dan pelaporan From F2KB dari Faskes atau klinik	12	3.118.346.500	12	613.245.300	13	638.876.000	0	-	0	0,00%	12	5.700.000	1	12,66%	DP3AKB	
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terwujudnya Pendistribusian Alkon Ke Fasilitas Kesehatan	12	45.006.140	12	5.700.000	13	11.700.000	0	0	0	0,00%	12	506.617.000	1	37,68%	DP3AKB	
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP)	11	1.344.430.300	11	506.617.000	11	517.826.000	0	0	0	0,00%	11	11.300.000	1	0,70%	DP3AKB	
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Meningkatnya pengetahuan Masyarakat tentang Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	3300	1.623.313.000	11	11.300.000	3	19.350.000	0	0	0	0,00%	11	89.628.300	0,00333333	431,67%	DP3AKB	
	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Dukungan Operasional KB Bergerak	1720	20.763.060	4	89.628.300	4	90.000.000	0	0	0	0,00%	4	444.750.000	0,00232558	524,26%	DP3AKB	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kader dan Kelompok Kerja (POKJA) yang Terbentuk dan Terbina di Kampung KB	100	84.834.000	65,2	444.750.000	164.600.000	11.000.000	#DIV/0!	6,68%	65,2	14.750.000	0,652	#DIV/0!	DP3AKB			
	2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	28	0	1	3.750.000	3	164.600.000	1	11.000.000	33,3333333	6,68%	2	11.000.000	0,07142857	0,87%	DP3AKB	
	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga	64	1.257.852.180			2.128.400.000	0	#DIV/0!	0,00%	0	339.647.680	0	16,55%	DP3AKB			
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Forum Generasi Berencana, Kelompok BKB-HI, Forum Asosiasi Kelompok UPPKS dan Kader Poktan PKB dan PPKBD yang Mendapatkan pembinaan tentang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga serta Tim pendamping Keluarga yang Mendapatkan Biaya Operasional	100	2.052.250.326	80	339.647.680	1.044.000.000	-	#DIV/0!	0,00%	80	0	0,8	0,00%	DP3AKB			

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.14.04.2.01.18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	11	360.000.000	0		10	100.000.000	0	0	0	0,00%	0	59.363.500	0	83,29%	DP3AKB	
	2.14.04.2.01.26	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok UPPKA yang Di Bentuk	66	71.272.000	22	59.363.500	0	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	22	918.204.500	0,33333333	99,89%	DP3AKB	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pekon, kecamatan yang mengikuti lomba kesra, serta kader perempuan yang mendapat pembinaan P3KSS dan GSI	100	919.200.000	100	918.204.500		1.084.400.000			#DIV/0!	0,00%	100	40.000.000	1	100,00%	DP3AKB	
	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, BKB, BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	100	40.000.000	100	40.000.000	145	165.000.000	0	0	0	0,00%	100	402.000.000	1	100,00%	DP3AKB	
	2.14.04.2.02.05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Kader pendamping keluarga yang mendapatkan Operasional	402	402.000.000	402	402.000.000	402	402.000.000	0	0	0	0,00%	402	476.204.500	1	99,79%	DP3AKB	
	2.14.04.2.02.06	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah tim pendamping keluarga yang mendapatkan Operasional	134	477.200.000	134	476.204.500	134	517.400.000	0	0	0	0,00%	134	#REF!	1	#REF!	DP3AKB	
	2.14.03.2.04.06	Penyediaan Biaya Oprasional bagi Kelompok Kegiatan Kegiatan Ketahanan dan Kesejatreraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan Usah Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kketahanan dan Kesejatreraan Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan Usah Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			0	-	118	994.000.000	0	0	0	0,00%	0	#REF!	#DIV/0!	#REF!	DP3AKB	muncul ditahun 2025 di tahun 2024 tidak ada
	2.15	Bidang Urusan Perhubungan		100	Rp 13.974.052.400	100	Rp 9.980.064.439	100	Rp 4.835.110.700	28	Rp 1.072.102.717	28	22	28	Rp 11.052.167.156	28	79	Dishub	
1	2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan	100	Rp 9.459.501.000	100	Rp 4.847.235.902	100	Rp 3.348.415.700	44	Rp 791.454.735	44	24	44	Rp 5.638.690.637	44	60	Dishub	
	2.15.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	Rp 32.000.000	100	Rp 17.526.500	100	Rp 12.400.000	66,6666667	Rp 2.675.000	67	22	67	Rp 20.201.500	67	63	Dishub	
	2.15.01.2.01.00 01	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Rp 7.000.000	5	Rp 7.557.350	2	Rp 7.400.000	1	Rp 1.649.000	50	22	20	Rp 9.206.350	200	132	Dishub	
	2.15.01.2.01.00 06	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Rp 25.000.000	5	Rp 9.969.150	1	Rp 5.000.000	1	Rp 1.026.000	100	21	20	Rp 10.995.150	200	44	Dishub	
	2.15.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 6.781.956.000	100	Rp 3.745.534.748	100	Rp 2.690.610.700	10,3448276	Rp 684.675.265	10	25	10	Rp 4.430.210.013	10	65	Dishub	
	2.15.01.2.02.00 01	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65	Rp 6.754.456.000	28	Rp 3.734.545.898	14	Rp 2.685.110.700	3	Rp 684.675.265	21	25	11	Rp 4.419.221.163	16	65	Dishub	
	2.15.01.2.02.00 05	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	Rp 12.500.000	4	Rp 4.988.950	1	Rp 2.500.000	0	Rp -	0	0	0	Rp 4.988.950	0	40	Dishub	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.15.01.2.02.007	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10	Rp 10.000.000	5	Rp 3.999.900	12	Rp 2.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp 3.999.900	0	40	Dishub	
	2.15.01.2.02.008	Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	Rp 5.000.000	4	Rp 1.999.950	2	Rp 1.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp 1.999.950	0	40	Dishub	
	2.15.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	100	Rp 1.500.000.000	8	Rp 44.914.625	2	Rp 129.440.000	0	Rp -	0	0	0	Rp 44.914.625	0	3	Dishub	
	2.15.01.2.05.009	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai	66	Rp 1.500.000.000	1	Rp 44.914.625	2	Rp 129.440.000	0	Rp -	0	0	0	Rp 44.914.625	0	3	Dishub	
	2.15.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 523.045.000	100	Rp 659.629.154	100	Rp 254.625.000	22	Rp 56.530.350	22	22	22	Rp 716.159.504	22	137	Dishub	
	2.15.01.2.06.001	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Rp 5.000.000	24	Rp 9.998.250	12	Rp 6.026.000	3	Rp 1.853.000	25	31	13	Rp 11.851.250	21	237	Dishub	
	2.15.01.2.06.004	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Rp 125.000.000	25	Rp 61.551.000	1	Rp 25.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp 61.551.000	0	49	Dishub	
	2.15.01.2.06.005	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Rp 125.045.000	24	Rp 88.733.750	12	Rp 48.599.000	3	Rp 5.914.250	25	12	13	Rp 94.648.000	21	76	Dishub	
	2.15.01.2.06.006	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50	Rp 60.000.000	25	Rp 41.100.000	17	Rp 34.000.000	3	Rp 6.200.000	18	18	12	Rp 47.300.000	24	79	Dishub	
	2.15.01.2.06.008	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	55	Rp 55.000.000	15	Rp 15.000.000	11	Rp 11.000.000	2	Rp 2.000.000	18	18	13	Rp 17.000.000	24	31	Dishub	
	2.15.01.2.06.009	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Rp 153.000.000	24	Rp 443.246.154	12	Rp 130.000.000	3	Rp 40.563.100	25	31	13	Rp 483.809.254	21	316	Dishub	
	2.15.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 27.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	
	2.15.01.2.07.006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Rp -	0	Rp -	3	Rp 27.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	
	2.15.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan	100	Rp 400.000.000	100	Rp 213.103.840	100	Rp 146.340.000	25	Rp 37.774.120	25	26	25	Rp 250.877.960	25	63	Dishub	
	2.15.01.2.08.002	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya pembiayaan listrik, telepon dan internet	60	Rp 90.000.000	24	Rp 45.018.440	12	Rp 29.600.000	3	Rp 5.965.120	25	20	13	Rp 50.983.560	21	57	Dishub	
	2.15.01.2.08.003	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pembiayaan sewa kantor, sewa rumah dinas dan sewa kendaraan dinas	5	Rp 285.000.000	15	Rp 138.876.000	12	Rp 92.000.000	3	Rp 25.500.000	25	28	20	Rp 164.376.000	400	58	Dishub	
	2.15.01.2.08.004	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	60	Rp 25.000.000	24	Rp 29.209.400	12	Rp 24.740.000	3	Rp 6.309.000	25	26	13	Rp 35.518.400	21	142	Dishub	
	2.15.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan	100	Rp 222.500.000	100	Rp 166.527.035	100	Rp 88.000.000	100	Rp 9.800.000	100	11	100	Rp 176.327.035	100	79	Dishub	
	2.15.01.2.09.001	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0	Rp -	3	Rp 71.522.972	3	Rp 88.000.000	3	Rp 9.800.000	100	11	100	Rp 81.322.972	0	0	Dishub	Pergantian Subkegiatan
	2.15.01.2.09.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25	Rp 210.000.000	5	Rp 60.265.863	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	Rp 60.265.863	0	29	Dishub	Dihapuskan
	2.15.01.2.09.009	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Rp 12.500.000	3	Rp 34.738.200	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	Rp 34.738.200	0	278	Dishub	Dihapuskan
2	2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100	Rp 3.970.001.400	100	Rp 4.707.697.187	100	Rp 1.454.295.000	14	Rp 276.647.982	14	19	14	Rp 4.984.345.169	14	126	Dishub	
	2.15.02.2.02	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	Rp 3.572.100.000	100	Rp 2.111.397.426	100	Rp 950.000.000	0	Rp 203.001.732	0	21	0	Rp 2.314.399.158	0	65	Dishub	
	2.15.02.2.02.002	Subkegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Tersedia di Jalan Kabupaten/Kota	100	Rp 3.572.100.000	20	Rp 987.100.228	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	Rp 987.100.228	0	28	Dishub	Pergantian Subkegiatan

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.15.02.2.02.004	Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekangan Jalan	Jumlah Perlekangan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara/Jumlah Pembayaran PIJ	0	Rp -	20	Rp 1.124.297.198	20	Rp 950.000.000	0	Rp 203.001.732	0	21	0	Rp 1.327.298.930	0	0	Dishub	Pergantian Subkegiatan
	2.15.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 200.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	
	2.15.02.2.03.0011	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 200.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	Ditambahkan
	2.15.02.2.06	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100	Rp 85.000.000	100	Rp 528.913.146	100	Rp 169.430.000	16,2162162	Rp 40.246.250	16	24	16	Rp 569.159.396	16	670	Dishub	
	2.15.02.2.06.004	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	0	Rp -	0	Rp -	12	Rp 20.925.000	3	Rp 2.000.000	25	10	0	Rp 2.000.000	0	0	Dishub	Ditambahkan
	2.15.02.2.06.0014	Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	0	Rp -	0	Rp -	1	Rp 11.800.000	0	Rp -	0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	Ditambahkan
	2.15.02.2.06.0015	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	0	Rp -	0	Rp -	12	Rp 13.000.000	0	Rp -	0	0	0	Rp -	0	0	Dishub	Ditambahkan
	2.15.02.2.06.0017	Subkegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	15	Rp 85.000.000	24	Rp 528.913.146	12	Rp 123.705.000	3	Rp 38.246.250	25	31	13	Rp 567.159.396	83	667	Dishub	
	2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp 312.901.400	100	Rp 477.566.965	100	Rp 134.865.000	25	Rp 33.400.000	25	25	25	Rp 510.966.965	25	163	Dishub	
	2.15.02.2.09.0002	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	35	Rp 312.901.400	24	Rp 477.566.965	12	Rp 134.865.000	3	Rp 33.400.000	25	25	13	Rp 510.966.965	36	163	Dishub	
	2.15.02.2.16	Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Rp -	100	Rp 1.589.819.650	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	Rp 1.589.819.650	0	0	Dishub	Dihapuskan
	2.15.02.2.16.0003	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	Rp -	15	Rp 1.589.819.650	0	Rp -	0	Rp -	0	0	0	Rp 1.589.819.650	0	0	Dishub	Dihapuskan
3	2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Cakupan Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	100	Rp 544.550.000	100	Rp 425.131.350	100	Rp 32.400.000	25	Rp 4.000.000	25	12	25	Rp 429.131.350	25	79	Dishub	
	2.15.03.2.06	Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	100	Rp 544.550.000	100	Rp 425.131.350	100	Rp 32.400.000	25	Rp 4.000.000	25	12	25	Rp 429.131.350	25	79	Dishub	
	2.15.03.2.06.0004	Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	25	Rp 544.550.000	24	Rp 425.131.350	12	Rp 32.400.000	3	Rp 4.000.000	25	12	13	Rp 429.131.350	50	79	Dishub	
	2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika			33.126.583.959		6.221.045.717		4.357.840.863		781.567.478	14,66%	17,93%		6.388.007.093		19,28%	Diskominfotik	
	2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	95,00%	19.708.590.987	100,00%	3.936.234.041	90,00%	2.661.577.013	49,49%	566.024.698	15,82%	21,27%	23,80%	3.611.095.139	18,32%	18,32%	Diskominfotik	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95,00%	34.233.341	100,00%	12.400.000	100,00%	12.400.000	25%	2.569.000	25,00%	20,72%	25,00%	14.969.000	25,00%	43,73%	Diskominfotik	
1	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	10	7.488.543	2	7.400.000	2	7.400.000	1	2.569.000	50,00%	34,72%	3	9.969.000	30,00%	133,12%	Diskominfotik	
2	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	10	26.744.798	2	5.000.000	2	5.000.000			0,00%	0,00%	2	5.000.000	20,00%	18,70%	Diskominfotik	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat	95,00%	9.117.721.557	100,00%	1.198.842.998	100,00%	1.513.012.500	23,90%	362.312.623	7,14%	23,95%	21,43%	1.561.155.621	21,43%	17,12%	Diskominfotik	
3	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ bulan)	70	9.088.302.279	14	1.193.342.998	14	1.507.512.500	4	362.312.623	28,57%	24,03%	18	1.555.655.621	25,71%	17,12%	Diskominfotik	
4	2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	5	13.372.399	1	2.500.000	1	2.500.000			0,00%	0,00%	1	2.500.000	20,00%	18,70%	Diskominfotik	
5	2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	10	10.697.919	2	2.000.000	2	2.000.000			0,00%	0,00%	2	2.000.000	20,00%	18,70%	Diskominfotik	
6	2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (laporan)	5	5.348.960	1	1.000.000	1	1.000.000			0,00%	0,00%	1	1.000.000	20,00%	18,70%	Diskominfotik	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	95%	9.970.925.012	100,00%	1.543.661.443	100,00%	949.108.513	15,53%	169.246.075	21,09%	17,83%	24,22%	1.748.407.518	23,06%	17,54%	Diskominfotik	
7	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	877.229.377	2	67.000.000	3	67.000.000	1	35.500.000	33,33%	52,99%	3	102.500.000	30,00%	11,68%	Diskominfotik	
8	2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	133.723.990	1	25.000.000	1	25.000.000			0,00%	0,00%	1	25.000.000	20,00%	18,70%	Diskominfotik	
9	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	1.617.133.844	12	321.227.000	4	237.164.600	1	68.948.400	25,00%	29,07%	13	390.175.400	21,67%	24,13%	Diskominfotik	
10	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	6.588.634.495	12	693.960.000	12	345.000.000	3	11.330.000	25,00%	3,28%	15	705.290.000	25,00%	10,70%	Diskominfotik	
11	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	55	58.838.556	11	33.000.000	11	33.000.000	2	6.000.000	18,18%	18,18%	13	39.000.000	23,64%	66,28%	Diskominfotik	
12	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	60	695.364.750	12	403.474.443	12	241.943.913	3	82.967.675	25,00%	34,29%	15	486.442.118	25,00%	69,95%	Diskominfotik	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Dan Prasarana Pendukung Kinerja	95%		79%	160.160.000	95%	85.500.000	100%	-	0,00%	0,00%	180%	160.160.000	6,62%	7,34%	Diskominfotik	
13	2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	2.182.942.513	27	160.160.000	24	85.500.000			0,00%	0,00%	27	160.160.000	180,00%	7,34%	Diskominfotik	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	95,00%	26.744.798	100,00%	1.088.779.600	90,00%	5.556.000	96,00%	897.000	25,00%	16,14%	25,00%	2.853.000	25,00%	10,67%	Diskominfotik	
14	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					1.086.823.600	0,00%										Diskominfotik	
15	2.16.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	60	26.744.798	12	1.956.000	12	5.556.000	3	897.000	25,00%	16,14%	15	2.853.000	25,00%	10,67%	Diskominfotik	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik	95,00%	558.966.279	100%	92.550.000	90,00%	96.000.000	87,00%	31.000.000	16,67%	32,29%	23,33%	123.550.000	23,33%	22,00%	Diskominfotik	
16	2.16.01.2.09.01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	60	290.181.059	12	51.500.000	12	52.500.000	3	12.000.000	25,00%	22,86%	15	63.500.000	25,00%	21,88%	Diskominfotik	
17	2.16.01.2.09.02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	60	177.852.907	12	35.050.000	12	37.500.000	3	19.000.000	25,00%	50,67%	15	54.050.000	25,00%	30,39%	Diskominfotik	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
18	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	60	90.932.313	12	6.000.000	12	6.000.000			0,00%	0,00%	12	6.000.000	20,00%	6,50%	Diskominfotik	
	2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik	85,00%	13.417.992.972	100%	2.284.811.676	80,00%	1.446.963.150	90,00%	207.092.780	15,00%	14,31%	21,25%	2.491.904.456	18,57%	18,57%	Diskominfotik	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang Menerima Informasi Publik dari Saluran Resmi Pemerintahan Daerah	85,00%	13.417.992.972	100%	2.284.811.676	80,00%	1.446.963.150	90,00%	207.092.780	15,00%	14,31%	21,25%	2.491.904.456	2956,25%	18,57%	Diskominfotik	
19	2.16.02.2.01.01	Relasi Media	Jumlah Aktifitas Relasi Media yang Memenuhi Kriteria (Laporan)	500	7.445.308.907	0	1.670.502.000	100	779.528.150	25	111.974.000	25,00%	14,36%	25	1.782.476.000	5,00%	23,94%	Diskominfotik	
20	2.16.02.2.01.01	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik yang berkembang dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	60	860.150.000	100,00%	170.900.314	1	287.400.000	0,00%	8.200.000	0,00%	2,85%	50,00%	179.100.314	20,00%	20,82%	Diskominfotik	
21	2.16.02.2.01.01	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	500	309.867.265	100,00%	15.895.000	12	5.677.000	3	500.000	25,00%	8,81%	200,00%	16.395.000	80,00%	5,29%	Diskominfotik	
22	2.16.02.2.01.02	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah Daerah yang Dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria /juknis (media)	100,00%	3.019.594.232	100%	16.157.191	1	6.800.000			0,00%	0,00%	100,00%	16.157.191	25,00%	0,54%	Diskominfotik	
23	2.16.02.2.01.02	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	100,00%	1.783.072.568	114	411.357.171	12	367.558.000	3	86.418.780	25,00%	23,51%	117	497.775.951	11700,00%	27,92%	Diskominfotik	
	2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	85,00%		100%	-	80,00%	249.300.700	0,00%	8.450.000	13,16%	3,39%	21,33%	285.007.498	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskominfotik	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Informasi Digital di Lingkup Pemerintah Daerah	82,50%	-	0%	-	82,50%	27.195.000	0,00%	-	0,00%	0,00%	-	0,00%			Diskominfotik	
24	2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah danPengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa					2	27.195.000			0,00%	0,00%		-			Diskominfotik	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Pemerintah Secara Digital	80,00%	-	100%	-	80,00%	222.105.700	0,00%	8.450.000	13,16%	3,80%	21,33%	285.007.498	#DIV/0!	#DIV/0!	Diskominfotik	
19	2.16.03.2.02.18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan					2	50.364.700			0,00%	0,00%					Diskominfotik	
20	2.16.03.2.02.20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur danpeta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah					2	136.143.000	0	5.950.000	0,00%	4,37%					Diskominfotik	
21	2.16.03.2.02.15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda					2	35.598.000	0	2.500.000	0,00%	7,02%					Diskominfotik	
22	2.16.03.2.02.29	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan					4	10.459.000	0		0,00%	0,00%					Diskominfotik	
23	2.16.03.2.02.24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	5	181.039.750		34.962.850	23	41.147.900	10	18.660.107	43,48%	45,35%					Diskominfotik	
24	2.16.03.2.02.13	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	60	109.135.521	12	263.810.770	12	144.006.500	3	89.795.593	25,00%	62,36%					Diskominfotik	
25	2.16.03.2.02.25	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan /atau Portal Data Nasional	60	109.135.521	12	173.889.647	6	13.735.000			0,00%	0,00%	12	173.889.647	20,00%	159,33%	Diskominfotik	
26	2.16.03.2.02.21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	25	395.000.000	5	78.125.250	2	10.983.000	1	5.130.000	50,00%	46,71%	6	83.255.250	24,00%	21,08%	Diskominfotik	
27	2.16.03.2.02.30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	5	355.020.000	1	27.862.601	2	784.000.000			0,00%	0,00%	1	27.862.601	20,00%	7,85%	Diskominfotik	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6*8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	5.681.919.887	92,5	2.420.031.400	92,5	320.723.414	100	13,25	75	6.002.643.301	78,9473684	0	Diskop ukm perdagangan	
9		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	29.556.300	92,5	12.400.000	92,5	-	100	0,00	75	29.556.300	78,9473684	0	Diskop ukm perdagangan	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	10	0	8	14.557.500	2	7.400.000	0	-	0	0	8	14.557.500	80	0	Diskop ukm perdagangan	
10		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	0	36	14.998.800	12	5.000.000	0	-	0	0	36	14.998.800	60	0	Diskop ukm perdagangan	
11		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	3.994.985.124	92,5	1.933.626.400,00	92,5	320.723.414,00	100	16,59	75	4.315.708.538,00	78,95	0	Diskop ukm perdagangan	
12		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	0	36	3.976.992.624	12	1.926.626.400	4	320.723.414	33,3333333	16,65	36	4.297.716.038	60	0	Diskop ukm perdagangan	
13		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	60	0	48	7.500.000	12	2.500.000	0	-	0	0	48	7.500.000	80	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17.01.2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	60	0	48	6.499.500	12	2.500.000	0	-	0	0	48	6.499.500	80	0	Diskop ukm perdagangan	
14		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	60	0	24	3.993.000	12	2.000.000	0	-	0	0	24	3.993.000	40	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.08	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	41.752.000	92,5	10.000.000,00	92,5	0,00	100	0	75	41.752.000,00	78,9473684	0	Diskop ukm perdagangan	
15		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	60	0	36	41.752.000	12	10.000.000	0	0	0	0	36	41.752.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
16		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	890.949.982	92,5	215.005.000,00	92,5	0,00	100	0,00	75	890.949.982,00	78,9473684	0	Diskop ukm perdagangan	
17		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor	60	0	36	6.228.000	12	2.000.000	0	-	0	0	36	6.228.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 01 . 2.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Keikutsertaan pada Krui Fair	4	0	2	75.000.000	1	25.000.000	0	-	0	0	2	75.000.000	50	0	Diskop ukm perdagangan	
18		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Barang Cetak dan Penggandaan	60	0	36	119.034.040	12	38.005.000	0	-	0	0,00	36	119.034.040	60	0	Diskop ukm perdagangan	
19		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	0	36	56.900.000	12	34.000.000	0	-	0	0,00	36	56.900.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 03	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum Kantor	55	0	33	32.747.000	11	11.000.000	0	-	0	0	33	32.747.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 03 . 2.01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Luar Daerah	60	0	36	601.040.942	12	105.000.000	0	-	0	0,00	36	601.040.942	60	0	Diskop ukm perdagangan	
20		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	95	0	75	5.800.000	92,5	16.000.000	92,5	-	100		75	5.800.000	78,9473684	0	Diskop ukm perdagangan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.17 . 05	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	0	1	5.800.000	2	16.000.000	0	-	0		1	5.800.000	20	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 05 . 2.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	292.689.386	92,5	71.500.000	92,5	-	100	0,00	75	292.689.386	78,95	0	Diskop ukm perdagangan	
21		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	60	0	36	54.061.386	12	12.000.000	0	-	0	0,00	36	54.061.386	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 07	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya biaya Sewa Gedung Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas	60	0	36	228.500.000	12	57.000.000	0	-	0	0,00	36	228.500.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.17 . 07 . 2.01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya Kebersihan Kantor	60	0	36	10.128.000	12	2.500.000	0	-	0	0,00	36	10.128.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
22		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	95	0	75	426.187.095	92,5	161.500.000,00	92,5	0,00	100	0,00	75	426.187.095,00	78,95	0	Diskop ukm perdagangan	
23		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	60	0	36	358.687.095	12	157.000.000	0	-	0	0,00	36	358.687.095	60	0	Diskop ukm perdagangan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	60	0	36	67.500.000	12	4.500.000	0	-	0	0,00	36	67.500.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18	Program Pengawasan dan Pemeriksaan	Persentase Koperasi Aktif	55	0	50	322.982.000	52,5	91.500.000	52,5	-	100	0,00	50	322.982.000	90,91	0	Diskop ukm	
1		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Aktif	55	0	50	322.982.000	52,5	91.500.000	52,5	-	100	0,00	50	322.982.000	90,91	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Koperasi Aktif	55	0	33	322.982.000	11	91.500.000	0	-	0	0,00	33	322.982.000	60,00	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.01.00 01	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten	60	0	45	1.098.455.700	55	70.557.000	55	-	100	0,00	45	1.098.455.700	75	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.01.00 06	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten	60		45	1.098.455.700	55	70.557.000	55	-	100	0,00	45	1.098.455.700	75	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.02	Peningkatan Pemahaman dan	Terlaksananya Pelatihan Tentang	20	0	10	1.098.455.700	2	70.557.000	0	-	0	0,00	10	1.098.455.700	50	0	Diskop ukm	
	2.18.01.2.02.00 01	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	2,29	0	0,95	2.307.011.571	2,08	318.910.000	2,08	120.000.000	100	37,63	1,0	2.427.011.571	41,48	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.02.00 05	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	2,29	0	0,95	2.307.011.571	2,08	318.910.000	2,1	120.000.000	100	37,63	1,0	2.427.011.571	41,48	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.02.00 07	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Tersedianya Hibah dan Bantuan Sosial	5	0	3	2.307.011.571	1	120.000.000	1	120.000.000	100	100,00	4	2.427.011.571	80	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18.01.2.02.00 08	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Penyelenggaraan Pekan Festival UMKM	25	0	15	86.032.000	5	198.910.000	0	-	0	0,00	15	86.032.000	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																	
1	2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Dokumen	100%	14.412.914.145	88,34%	2.163.922.263	100%	2.584.560.400	17,43%	450.360.638	17,43%	17%	105,77%	2.614.282.901	105,77%	18%	DPMPSTP	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan	100%	66.327.101	98,81%	12.252.450	100%	12.400.000	0,00%	-	0,00%	0%	98,81%	12.252.450	98,81%	18%	DPMPSTP	
	2.18.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	39.582.302	2	7.317.500	2	7.400.000	0	-	0,00%	0%	2	7.317.500	20,00%	18%	DPMPSTP	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	26.744.799	2	4.934.950	2	5.000.000	0	-	0,00%	0%	2	4.934.950	20,00%	18%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketertiban administrasi Keuangan	100%	10.068.414.084	84,17%	1.483.573.126	100%	2.090.060.400	16,64%	347.777.238	16,64%	17%	100,81%	1.831.350.364	100,81%	18%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	10.037.368.720	14	1.478.105.626	14	2.084.560.400	3	347.777.238	21%	17%	17	1.825.882.864	24,29%	18%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	13.372.400	1	2.487.800	1	2.500.000	0	-	0,00%	0%	1	2.487.800	20,00%	19%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	90	12.324.004	18	1.988.700	18	2.000.000	0	-	0,00%	0%	18	1.988.700	20,00%	16%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.348.961	5	991.000	1	1.000.000	0	-	0,00%	0%	5	991.000	100,00%	19%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Terciptanya peningkatan SDM yang Berdaya saling	100%	125.000.000	99,00%	99.000.000	100%	15.000.000	0,00%	-	0,00%	0%	99,00%	99.000.000	99,00%	79%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	10	125.000.000	10	99.000.000	5	15.000.000	0	-	0,00%	0%	10	99.000.000	100,00%	79%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perangkat daerah	100%	3.008.490.247	99,69%	419.776.437	100%	319.400.000	17,40%	55.583.400	17%	17%	117,09%	475.359.837	117,09%	16%		
	2.18.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	133.723.991	1	24.700.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	24.700.000	20,00%	18%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	344.708.354	12	30.325.500	12	26.400.000	0	-	0%	0%	12	30.325.500	20,00%	9%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.00 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU yang Disediakan	50	64.187.516	10	12.000.000	10	12.000.000	0	-	0,00%	0%	10	12.000.000	20,00%	19%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.00 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	55	58.838.557	11	11.000.000	11	11.000.000	0	-	0%	0%	11	11.000.000	20,00%	19%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	2.407.031.828	12	341.750.937	12	270.000.000	3	55.583.400	25,00%	21%	15	397.334.337	25,00%	17%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	53.489.597	89,90%	17.800.000	100%	-	0,00%	-	0,00%	0%	89,90%	17.800.000	89,90%	33%		
	2.18.01.2.07.00 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang Disediakan	5	53.489.597	2	17.800.000	0	-	0	-	0,00%	0%	2	17.800.000	40,00%	33%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100%	588.658.357	99%	57.250.000	100%	72.000.000	56%	40.500.000	56%	56%	155,25%	97.750.000	155,25%	17%		
	2.18.01.2.08.00 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	572.338.680	2	57.000.000	2	72.000.000	1	40.500.000	50,00%	56%	3	97.500.000	20,00%	17%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	16.319.677	2	250.000	0	-	0	-	0%	0%	2	250.000	3,33%	2%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	100%	342.065.969	98,00%	74.270.250	100%	75.700.000	9%	6.500.000	8,59%	9%	106,59%	80.770.250	106,59%	24%		
	2.18.01.2.09.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60	330.833.153	24	72.425.000	12	73.100.000	3	6.500.000	25,00%	9%	27	78.925.000	45,00%	24%	DPMPTSP	
	2.18.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	11.232.816	4	1.845.250	4	2.600.000	0	-	0,00%	0%	4	1.845.250	20,00%	16%	DPMPTSP	
	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA	30%	3.814.576.076	98,00%	1.471.976.300	100%	1.499.742.000	0%	-	0,00%	0%	98,00%	1.471.976.300	323,97%	39%		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Presentase Nilai Investasi	50%	3.814.576.076	98,00%	1.471.976.300	100%	125.485.000	0%	-	0,00%	0%	98,00%	1.471.976.300	196,00%	39%		
	2.18.03.2.01.00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	10	3.814.576.076	2	1.471.976.300	2	125.485.000	0	-	0,00%	0%	2	1.471.976.300	20,00%	39%	DPMPTSP	
	2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN	85%	1.045.534.510	98,00%	1.031.073.575	100%	175.000.000	15%	27.096.000	15,48%	15%	113,48%	1.058.169.575	133,59%	101%		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Izin yang Diterbitkan	6.105	1.045.534.510	98,00%	1.031.073.575	100%	175.000.000	15%	27.096.000	15,48%	15%	113,48%	1.058.169.575	0,02%	101%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.18.04.2.01.00.06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	3000	655.240.457	4486	961.555.550	600	130.000.000	476	23.926.000	79,33%	18%	4962	985.481.550	165,40%	150%	DPMPTSP	
	2.18.04.2.01.00.07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50	390.294.053	5	69.518.025	10	45.000.000	2	3.170.000	0,2	7%	7	72.688.025	14,00%	19%	DPMPTSP	
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan	80%	3.529.074.244	84,68%	435.157.500	100%	74.515.000	9,77%	7.281.000	9,77%	10%	94,45%	442.438.500	118,06%	13%		
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan	15	3.529.074.244	84,68%	435.157.500	100%	74.515.000	9,77%	7.281.000	9,77%	10%	94,45%	442.438.500	6,30%	13%	DPMPTSP	
	2.18.05.2.01.00.04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	60	925.357.921	6	65.021.950	0	-	0	-	0,00%	0%	6	65.021.950	10,00%	7%	DPMPTSP	
	2.18.05.2.01.00.05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	945	1.637.560.006	400	248.536.000	0	-	0	-	0,00%	0%	400	248.536.000	42,33%	15%	DPMPTSP	
	2.18.05.2.01.00.06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60	966.156.317	40	121.599.550	12	74.515.000	7	7.281.000	58,33%	10%	47	128.880.550	78,33%	13%	DPMPTSP	
	2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan	5	1.604.711.994	94,93%	118.659.500	100%	125.000.000	13,02%	16.272.000	13,02%	13%	107,95%	134.931.500	21,59%	8%		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	5	1.604.711.994	94,93%	118.659.500	100%	125.000.000	13,02%	16.272.000	13,02%	13%	107,95%	134.931.500	21,59%	8%		
	2.18.06.2.01.00.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	5	1.604.711.994	5	118.659.500	1	125.000.000	0	16.272.000	0,00%	13%	5	134.931.500	100,00%	8%	DPMPTSP	
Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga																			
1		Program Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	21.402.978.270	100%	4.443.728.018	90%	4.913.555.311	90%	912.174.078	19%	19%		5.355.902.096		25%	Dispora	
2	2.13.2.13.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		95%	32.000.000	100%	6.400.000,00	100%	6.400.000,00	100%	-	0%	0%		6.400.000			Dispora	
3	2.13.2.13.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perizinan	Jumlah dokumen renja	19	7.000.000	4	1.400.000,00	4	1.400.000	0	-	0%	0%		1.400.000		20%	Dispora	
4	2.13.2.13.01.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen RKA- SKPD	24	25.000.000	4	5.000.000,00	4	5.000.000	0	-	0%	0%		5.000.000		20%	Dispora	
5	2.13.2.13.01.01	Administrasi Keuangan Perangkat daerah		85%	9.168.301.000	100%	1.492.415.768,00	90%	1.983.707.761,00	60%	389.397.490,00	67%	20%		1.881.813.258			Dispora	
6	2.13.2.13.01.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan	65	9.082.580.000	8	1.469.692.468,00	13	1.960.783.761	3	389.397.490,00	23%	20%		1.859.089.958		20%	Dispora	
7	2.13.2.13.01.01	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	Jumlah alat tulis kantor	72	57.221.000	12	17.223.300,00	13	17.424.000	0	-	0%	0%		17.223.300		30%	Dispora	
8	2.13.2.13.01.01	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan SKPD	5	12.500.000	1	2.500.000,00	1	2.500.000	0	-	0%	0%		2.500.000		20%	Dispora	
9	2.13.2.13.01.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulnan/triwulan	Jumlah laporan keuangan bulnan/triwulan	12	10.000.000	2	2.000.000,00	2	2.000.000	0	-	0%	0%		2.000.000		20%	Dispora	
10	2.13.2.13.01.01	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Program	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran skpd	6	6.000.000	1	1.000.000,00	1	1.000.000	0	-	0%	0%		1.000.000		17%	Dispora	
11	2.13.2.13.01.01	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	50.000.000	0%	-	100%	50.000.000	100%	-	100%	0%		-		0%	Dispora	
12	2.13.2.13.01.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Bimtek/Bimtek/Kursus/Pelatihan	Persentase Jumlah aparaturnya SDM yang mengikuti Diklat/Bimtek/Kursus/Pelatihan	5	50.000.000		49.830.000,00	1	50.000.000	0	-	0%	0%		49.830.000		100%	Dispora	
13	2.13.2.13.01.01	Administrasi umum Perangkat Daerah		90%	1.059.924.000	100%	472.151.650,00	80%	472.698.600	80%	110.504.700,00	100%	23%		582.656.350			Dispora	
14	2.13.2.13.01.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan	Jumlah komponen listrik	6	25.020.000	1	5.004.000,00	1	5.004.000	0	-	0%	0%		5.004.000		20%	Dispora	
15	2.13.2.13.01.01	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah aktifitas	10	75.000.000	1	25.000.000,00	1	25.000.000	0	-	0%	0%		-			Dispora	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16	2.13.2.13.01.01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan kantor	72	61.000.000	-	60.550.000,00	8	61.000.000	0	-	0%	0%		60.550.000		99%	Dispora	
17	2.13.2.13.01.01	Penyediaan Barang cetakan dan Penggaa	Jumlah ATK	72	72.255.000	12	32.393.800,00	12	32.418.800	3	5.920.000,00	25%	18%		38.313.800		53%	Dispora	
17	2.13.2.13.01.01	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan	Jumlah SKHU	60	60.000.000	12	12.000.000,00	12	12.000.000	0	-	0%	0%		12.000.000		20%	Dispora	
18	2.13.2.13.01.01	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah layanan jasa penyediaan makan dan minum	120	55.000.000	12	24.000.000,00	12	24.000.000	3	8.000.000,00	25%	33%		32.000.000		58%	Dispora	
19	2.13.2.13.01.01	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan ko	Jumlah koordinasi diluar kantor	72	783.904.000	12	345.597.650,00	12	345.694.600	3	102.504.700,00	25%	30%		448.102.350		57%	Dispora	
21	2.13.2.13.01.01	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	591.740.000	100%	72.748.000,00	90%	76.748.000	60%	29.000.000,00	38%	38%		101.748.000		17%	Dispora	
22	2.13.2.13.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	Jumlah pembayaran tagihan	72	78.000.000	12	-	14	4.000.000	0	-	0%	0%		-		0%	Dispora	
23	2.13.2.13.01.01	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	Jumlah bangunan dan kendaraan dinas	72	485.000.000	12	67.000.000	12	67.000.000	3	29.000.000	25%	43%		96.000.000		20%	Dispora	
24	2.13.2.13.01.01	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tagihan	72	28.740.000	12	5.748.000	12	5.748.000	0	-	0%	0%		5.748.000		20%	Dispora	
26	2.13.2.13.01.01	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		95%	432.610.000	100%	106.250.000,00	90%	112.100.000	60%	29.500.000,00	26%	26%		135.750.000		31%	Dispora	
27	2.13.2.13.01.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya per	Jumlah kendaraan	72	273.500.000	12	59.250.000	12	61.600.000	3	27.000.000	25%	44%		86.250.000		32%	Dispora	
28	2.13.2.13.01.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya per	Jumlah pajak	72	10.750.000	-	-	12	3.500.000	0	-	0%	0%		-		0%	Dispora	
29	2.13.2.13.01.01	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainny	Jumlah peralatan dan mesin	72	93.360.000	12	27.000.000	12	27.000.000	3	2.500.000	25%	9%		29.500.000		32%	Dispora	
30	2.13.2.13.01.01	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kanto	Jumlah sarana dan prasarana kantor	72	25.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	0	-	0%	0%		10.000.000		40%	Dispora	
31	2.13.2.13.01.01	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan pr	Jumlah sarana dan prasarana kantor	72	30.000.000		10.000.000	12	10.000.000	0	-	0%	0%		10.000.000		33%	Dispora	
33	B	Program Pengembangan Kapasitas Daya	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan (persen)	60%	4.224.500.000		649.902.950,00	50%	651.396.950	50%	130.565.000,00				780.467.950			Dispora	
35	2.13.2.13.01.01	Penyadaraan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terha		60%	4.224.500.000	100%		50%	296.396.950	50%		0%	35%		-			Dispora	
36	2.13.2.13.01.01	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggara	Jumlah pemuda pelopor	15	316.900.000	12	166.997.150	14	167.498.550	6	58.100.000	43%	35%		225.097.150		71%	Dispora	Kendala nya karena kualitas pendidik an dan pengetah uan masih rendah
37	2.13.2.13.01.01	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggara	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	12	282.600.000	12	127.905.800	20	128.898.400	5	20.000.000	25%	16%		147.905.800		52%	Dispora	Kendala nya karena kurangnya dukunga n dari lingkunga n dan pemerint ah setempat dalam meningkat kan kegiatan kewiraus ahaan
38	2.13.2.13.01.01	Peningkatan Kepemimpinan , kepolopora	Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan,perdamaian,dan lingkungan hidup	28	3.625.000.000	8	-	16	-	#DIV/0!	#DIV/0!				-		0%	Dispora	Tidak ada faktor penghamb at
39	2.13.2.13.01.01	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggara	Jumlah pemuda kader yang dikirim ke provinsi	20	350.000.000	0	174.533.350	20	174.809.450	8	52.465.000	40%	30%		226.998.350			Dispora	
40	2.13.2.13.01.01	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab / k		60%	1.242.700.000	100%		50%	355.000.000	50%		100%	0%		-			Dispora	
41	2.13.2.13.01.01	Peningkatan kapasitas pemuda dan organ	Persentase organisasi kepemudaan yang memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan	30	1.242.700.000	12	355.000.000	16	355.000.000	0	-	0%	0%		355.000.000		29%	Dispora	
44	C	Program Pengembangan Kapasitas Daya	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan (persen)	60%	4.601.203.270		1.408.776.300,00	45%	1.560.504.000	45%	223.206.888,00				1.631.983.188			Dispora	
47	2.13.2.13.01.01	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan		60%	745.000.000	100%		100%	90.000.000	100%		100%	0%		-			Dispora	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
48	2.13.2.13.01.01.	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	60	745.000.000	12	89.310.000	20	90.000.000	20	80.172.800	100%	89%		169.482.800		23%	Dispora	Faktor penghambat minimnya jumlah sarana dan prasarana olahraga di setiap kecamatan
51	2.13.2.13.01.01.	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab / kota		40%	822.856.900	100%		100%	105.000.000	100%		100%	0%		-			Dispora	
52	2.13.2.13.01.01.	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi daerah	Persentase penyelenggaraan kejuaraan/perlombaan olahraga skala kabupaten yang di fasilitasi pemerintah	10	822.856.900	4	104.913.250	10	105.000.000	2	16.110.000	20%	15%		121.023.250		15%	Dispora	Faktor penghambat di sebabkan tidak semua cabang olahraga dapat mengikuti perlombaan event kejuaraan olahraga yang di selenggarakan oleh pemerintah
54	2.13.2.13.01.01.	Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi		80%	776.429.770	100%		100%	352.000.000	100%		100%	0%		-			Dispora	
55	2.13.2.13.01.01.	Pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi	Persentase olahragawan andalan yang di bina	60	776.429.770	12	351.831.050	14	352.000.000	5	115.000.000	36%	33%		466.831.050		60%	Dispora	Faktor Penghambat kurangnya penghargaan terhadap atlet yg berprestasi
57	2.13.2.13.01.01.	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga		60%	1.805.000.000	100%		100%	845.000.000	100%		0%	0%		-			Dispora	
58	2.13.2.13.01.01.	Pengembangan organisasi keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi keolahragaan	20	1.805.000.000	12	695.000.000	15	845.000.000	0	-	0%	0%		695.000.000		39%	Dispora	
60	2.13.2.13.01.01.	Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi		60%	451.916.600	100%		100%	168.504.000	100%		0%	7%		-			Dispora	
61	2.13.2.13.01.01.	Penyelenggaraan, pengembangan dan pe	Jumlah perlombaan olahraga massal	6	451.916.600	12	167.722.000	12	168.504.000	3	11.924.088	25%	7%		179.646.088		40%	Dispora	
	2.20.02	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (dokumen)	10	308.234.965	1	39.787.704	1	41.045.000		5.341.500	0,00%	13,01%	0,2	45.129.204	2,00%	14,64%	Diskominfot	
	2.20.02.2.01	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan Pengelolaan Data Statistik Sektoral (dokumen)	10	308.234.965	1	39.787.704	1	41.045.000		5.341.500	0,00%	13,01%	0,2	45.129.204	2,00%	14,64%	Diskominfot	
28	2.20.02.2.01.11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari pembina sata statistik	5	308.234.965	1	39.787.704	1	41.045.000	0	5.341.500	0,00%	13,01%	1	45.129.204	20,00%	14,64%	Diskominfot	
	2.21.02	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik (persen)	100,00%	743.418.036	100,00%	172.156.114	100,00%	108.168.000		10.540.500	17,63%	9,74%	67,63%	182.696.614	67,63%	24,58%	Diskominfot	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Persentase Layanan Keamanan Informasi Daerah (persen)	100,00%	347.500.000	100,00%	69.868.742	100,00%	38.460.000		1.500.000	10,26%	3,90%	110,26%	71.368.742	110,26%	20,54%	Diskominfotik	
29	2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	39	347.500.000	39	69.868.742	39	38.460.000	4	1.500.000	10,26%	3,90%	43	71.368.742	110,26%	20,54%	Diskominfotik	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100,00%	395.918.036	100,00%	102.287.372	100,00%	69.708.000		9.040.500	25,00%	12,97%	25,00%	111.327.872	25,00%	28,12%	Diskominfotik	
30	2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	60	395.918.036	12	102.287.372	12	69.708.000	3	9.040.500	25,00%	12,97%	15	111.327.872	25,00%	28,12%	Diskominfotik	
	2.22	Bidang Urusan Kebudayaan																	
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang terlibat pertunjukan seni	30%	583.374.437	25%	344.690.835	27%	600.000.000	25%	-	25%	0%	25	344.690.835	8333%	59%	Disdik	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten kota	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	81%	583.374.437	79,59%	344.690.835	80,00%	600.000.000	79,59%	-	79,59%	0%	1,5918	344.690.835	79,59%	59%	Disdik	
	2.22.02.2.02.000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	50 Kali	483.374.437	4 Kali	344.690.835	4 Kali	500.000.000	Kali	-	0%	0%	4	344.690.835	8%	71%	Disdik	
	2.22.02.2.02.000	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	#####	100.000.000	#####	#####	#####	100.000.000	#####	-	0%	0%	16	-	100%	0%	Disdik	
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Invetarisasi	20,00%	483.374.437	4,55%	117.692.590	9,09%	100.000.000	4,55%	-	4,55%	0%	4,55%	117.692.590	22,73%	24%	Disdik	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /kota	Jumlah Objek Budaya Terdaftar	5 Objek	483.374.437	1,0 Objek	117.692.590	1 Objek	100.000.000	Objek	-	0%	0%	1	117.692.590	20%	24%	Disdik	
	2.22.05.2.01.000	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	5 Objek	483.374.437	1,0 Objek	117.692.590	1 Obyek	100.000.000	Obyek	-	0%	0%	1	117.692.590	20%	24%	Disdik	
	4	URUSAN PERPUSTAKAAN																	
96	04:01:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	100%	340.152.661	100%	9.666.000,00	100%	145.000.000	0%	23.867.000,00	0%	15%	100%	33.533.000	#DIV/0!	10%	Sekretariat Daerah	
97	4.01.02.2.02	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/kota		100%	340.152.661	100%	4.872.000,00	100%	40.000.000	0%	12.029.000,00	0%	30%	100%	16.901.000	20%	5%	Sekretariat Daerah	
98	'4.01.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan	Terlaksanannya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Harga Nasional Perpustakaan	2	81.090.380	1 kegiatan	0,00	1,00	18.000.000	0 kegiatan	5.986.000,00	0%	33%	2 kegiatan	5.986.000	20%	7%	Sekretariat Daerah	
99	'4.01.02.1.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksanannya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	2	259.062.281	1 kegiatan	4.872.000,00	1,00	22.000.000	0 kegiatan	6.043.000,00	0%	27%	2 kegiatan	10.915.000	20%	4%	Sekretariat Daerah	
100		Pembudayaan Gemar Membaca	Terlaksanannya Pembudayaan Gemar Membaca	5		100%	4.794.000,00	1,00	105.000.000	0%	11.838.000,00	0%	0%	100%	16.632.000	20%	100%	Sekretariat Daerah	
101		Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	terlaksanannya Pengembangan dan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	2	87.732.700	1 kegiatan	4.794.000,00	1,00	105.000.000	0 kegiatan	11.838.000,00	0%	11%	2 kegiatan	16.632.000	40%	19%	Sekretariat Daerah	
		URUSAN KEARSIPAN																	
92	4.01.24.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	100%	69.344.013	100%	3.431.700,00	100%	48.938.000	13%	0,00	13%	0%	50%	3.431.700	40%	5%	Sekretariat Daerah	
93	4.01.24.2.24	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengelolaan Arsip	100%	46.229.342	100%	3.431.700,00	100%	33.856.000	13%	0,00	13%	0%	100%	3.431.700	40%	7%	Sekretariat Daerah	
94	4.01.24.2.24.01	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksanannya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	24	23.114.671	12,00	3.431.700,00	12,00	8.387.000	0,00	0,00	0%	0%	24,00	3.431.700	40%	15%	Sekretariat Daerah	
95	4.01.24.2.24.02	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	Terlaksanannya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	24	23.114.671	12,00	0,00	12,00	10.387.000	3,00	0,00	25%	0%	24,00	0	40%	0%	Sekretariat Daerah	
	4.01.24.2.24.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	100%	17.000.000	100%	0,00	12,00	15.082.000	3,00	0,00	25%	0%					Sekretariat Daerah	
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaMelalui JIKN	Terlaksanannya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota	24	17.000.000	12,00	0,00	12,00	15.082.000	3,00	0,00	25%	0%	24,00	0	40%	0%	Sekretariat Daerah	
	3.25	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan			Rp 5.766.584.781		Rp 2.108.082.454		Rp 3.257.659.600		Rp 608.035.763		19%	0	Rp 2.716.118.217		47%	Dinas Perikanan	
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	Rp 3.723.081.806	59%	Rp 829.745.194	90%	Rp 2.901.659.600	31%	Rp 567.818.963	34%	20%	0,9	Rp 1.397.564.157	95%	38%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93%	Rp 7.475.225	100%	Rp 6.464.000	100%	Rp 12.400.000	100%	Rp 12.400.000	100%	100%	200%	Rp 18.864.000	215%	252%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja	2	Rp 1.727.878	2	Rp 1.414.000	2	Rp 7.400.000	2	Rp 7.400.000	100%	100%	4	Rp 8.814.000	200%	510%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya RKA SKPD	2	Rp 5.747.347	2	Rp 5.050.000	2	Rp 5.000.000	2	Rp 5.000.000	100%	100%	4	Rp 10.050.000	200%	175%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 2.524.381.337	100%	Rp 531.830.104	100%	Rp 2.265.937.100	100%	Rp 465.960.718	100%	21%	2	Rp 997.790.822	200%	40%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	14	Rp 2.512.903.339	14	Rp 527.305.104	14	Rp 2.257.659.600	4	Rp 463.183.218	29%	21%	18	Rp 990.488.322	129%	39%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	1	Rp 3.085.446	1	Rp 2.525.000	1	Rp 2.777.500	1	Rp 2.777.500	100%	100%	2	Rp 5.302.500	200%	172%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	Rp 4.072.856	2	Rp -	1	Rp 2.500.000	0	Rp -	0%	0%	2	Rp -	100%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2	Rp 2.468.398	2	Rp 2.000.000	2	Rp 2.000.000	0	Rp -	0%	0%	2	Rp 2.000.000	100%	81%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	2	Rp 1.851.298	2	Rp -	2	Rp 1.000.000	0	Rp -	0%	0%	2	Rp -	100%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhiya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	93%	Rp 9.063.956	100%	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0%	-	1	Rp -	108%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Laporan Retribusi Daerah Dinas Perikana	4	Rp 9.063.956	4	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0%	-	4	Rp -	100%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	2	Rp 64.587.081	100%	Rp -	100%	Rp 50.000.000	0	Rp -	0%	0%	1	Rp -	50%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah SMD Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	2	Rp 64.587.081	3	Rp -	2	Rp 50.000.000	0	Rp -	0%	0%	3	Rp -	150%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Kantor	95%	Rp 454.728.163	100%	Rp 127.140.800	100%	Rp 306.687.500	100%	Rp 41.635.200	100%	14%	2	Rp 168.776.000	211%	37%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	12	Rp 4.912.111	12	Rp 4.019.800	12	Rp 4.407.000	3	Rp 4.407.000	25%	100%	15	Rp 8.426.800	125%	172%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhiya Pembiayaan Advetorial dan Pameran	12	Rp 30.854.970	12	Rp 25.000.000	12	Rp 21.000.000	3	Rp -	25%	0%	15	Rp 25.000.000	125%	81%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya Barang Cetak dan Biaya Fotocopy	12	Rp 39.434.628	12	Rp 13.536.000	12	Rp 20.559.600	3	Rp 3.360.000	25%	16%	15	Rp 16.896.000	125%	43%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhiya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Rp 13.597.280	1	Rp 6.000.000	1	Rp 12.000.000	0	Rp 2.000.000	0%	17%	1	Rp 8.000.000	8%	59%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhiya Kebutuhan Makan dan Minum Kunjungan Tamu	11	Rp 12.464.174	11	Rp 5.000.000	11	Rp 11.000.000	2	Rp 2.000.000	18%	18%	13	Rp 7.000.000	118%	56%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiya Pembiayaan Rapat dan Konsultasi Luar Daerah	12	Rp 353.465.000	12	Rp 73.585.000	12	Rp 237.720.900	3	Rp 29.868.200	25%	13%	15	Rp 103.453.200	125%	29%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya Pemenuhan Sarana dan Prasarana SDM	95%	Rp 115.551.472	100%	Rp 45.410.000	0%	Rp -	0%	Rp -	0%	0%	1	Rp 45.410.000	105%	39%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhiya Perlengkapan Kantor	3	Rp 46.457.374	3	Rp 5.410.000	0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	3	Rp 5.410.000	100%	12%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhiya Perlengkapan Kantor	3	Rp 69.094.098	3	Rp 40.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	3	Rp 40.000.000	100%	58%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	Rp 80.731.894	90%	Rp 45.175.290	100%	Rp 98.555.000	100%	Rp 28.108.045	100%	29%	1,9	Rp 73.283.335	200%	91%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya pembayaran Rekening Listrik dan Telepon	12	Rp 16.996.600	12	Rp 7.187.290	12	Rp 21.600.000	3	Rp 2.741.045	25%	13%	15	Rp 9.928.335	125%	58%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Pembiayaan Sewa Rumah Dinas	12	Rp 57.564.300	12	Rp 36.000.000	12	Rp 57.000.000	3	Rp 22.000.000	25%	39%	15	Rp 58.000.000	125%	101%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhiya Pembiayaan Kebersihan Kantor	12	Rp 6.170.994	12	Rp 1.988.000	12	Rp 19.955.000	3	Rp 3.367.000	25%	17%	15	Rp 5.355.000	125%	87%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	Rp 466.562.678	100%	Rp 73.725.000	90%	Rp 168.080.000	100%	Rp 19.715.000	111%	12%	2	Rp 93.440.000	211%	20%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhiya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Rp 23.795.240	12	Rp 12.000.000	12	Rp 21.400.000	3	Rp 3.000.000	25%	14%	15	Rp 15.000.000	125%	63%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	12	Rp 343.962.041	12	Rp 37.450.000	12	Rp 97.350.000	3	Rp 11.205.000	25%	12%	15	Rp 48.655.000	125%	14%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Rp 33.727.287	12	Rp 15.000.000	12	Rp 20.000.000	3	Rp -	25%	0%	15	Rp 15.000.000	125%	44%	Dinas Perikanan	
	3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan Kantor	12	Rp 65.078.110	12	Rp 9.275.000	12	Rp 29.330.000	3	Rp 5.510.000	25%	19%	15	Rp 14.785.000	125%	23%	Dinas Perikanan	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	15002	Rp 681.771.344	13559	Rp 528.612.160	14136	Rp 75.000.000	13559	Rp -	96%	0%	27118	Rp 528.612.160	181%	78%	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di Danau Sungai Waduk atau Genangan Air Lainnya (Ton)	15002	Rp 466.885.612	13559	Rp 449.067.400	14708	Rp 75.000.000	13559	Rp -	92%	0%	27118	Rp 449.067.400	181%	96%	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Terpenuhinya Data Penangkapan Ikan	11	Rp 41.432.120	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Terpenuhinya Prasarana Usaha Penangkapan Ikan	10	Rp 209.757.947	25	Rp 253.487.400	9	Rp 75.000.000	0	Rp -	0%	0%	25	Rp 253.487.400	250%	121%	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Terpenuhinya Sarana Usaha Penangkapan Ikan	16	Rp 215.695.545	28	Rp 195.580.000	0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	28	Rp 195.580.000	175%	91%	Dinas Perikanan	
17	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	360	Rp 214.885.732	0,95	Rp 79.544.760	0	Rp -	212	Rp -	0%	0%	212,95	Rp 79.544.760	59%	37%	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-	Dinas Perikanan	
	3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Kelompok	360	Rp 214.885.732	212	Rp 79.544.760	0	Rp -	0	Rp -	0%	0%	212	Rp 79.544.760	59%	37%	Dinas Perikanan	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	228,059	Rp 659.317.768	0,32	Rp 347.096.200	215	Rp 131.000.000	214	Rp 27.244.000	100%	21%	214,32	Rp 374.340.200	94%	57%	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Meningkatnya Kemampuan Pembudidaya Ikan	70	Rp 186.461.944	0	Rp 21.402.000	215	Rp 81.000.000	214	Rp 2.580.000	100%	3%	214	Rp 23.982.000	306%	13%	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Meningkatnya Kemampuan Pembudidaya Ikan (Orang)	70	Rp 65.162.938	20	Rp 13.583.000	55	Rp 81.000.000	0	Rp 2.580.000	0%	3%	20	Rp 16.163.000	29%	25%	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terfasilitasinya Kegiatan Pembentukan Kelompok Perikanan (Kelompok)	12	Rp 121.299.006	2	Rp 7.819.000	5	Rp -	0	Rp -	0%	0%	2	Rp 7.819.000	17%	6%	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Sarana Prasarana Perikanan	100%	Rp 472.855.824	71%	Rp 325.694.200	15	Rp 50.000.000	26	Rp 24.664.000	173%	49%	26,71	Rp 350.358.200	2671%	74%	Dinas Perikanan	
	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan	14	Rp 472.855.824	26	Rp 325.694.200	15	Rp 50.000.000	7	Rp 24.664.000	47%	49%	33	Rp 350.358.200	236%	74%	Dinas Perikanan	
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	0,033	Rp 178.899.154	0,032	Rp 44.528.000	0,032	Rp 75.000.000	0,032	Rp 12.972.800	100%	17%	0,064	Rp 57.500.800	194%	32%	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawo, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)	1	Rp 178.899.154	1	Rp 44.528.000	1	Rp 75.000.000	1	Rp 12.972.800	100%	17%	2	Rp 57.500.800	200%	32%	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01.04	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)	1	Rp 89.449.577	26	Rp 13.850.000	1	Rp 13.850.000	0	Rp -	0%	0%	26	Rp -	2600%	0%	Dinas Perikanan	
	3.25.05.2.01.07	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota	Terawasinya Sumberdaya Perikanan (Dokumen)	1	Rp 89.449.577	1	Rp 44.528.000	1	Rp 61.150.000	0	Rp 12.972.800	0%	-	1	Rp 57.500.800	100%	64%	Dinas Perikanan	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	43,35	Rp 523.514.709	39,47	Rp 358.100.900	40,85	Rp 75.000.000	0	Rp -	0%	0%	39,47	Rp 358.100.900	91%	68%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Unit Usaha)	100%	Rp 115.798.935	100%	Rp 34.877.500	100%	Rp -	100%	Rp -	100%	0%	2	Rp 34.877.500	200%	30%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terselenggaranya Kegiatan Gelar Produk dan Pemasaran Hasil Perikanan (Jenis) dan Kecil	1	Rp 115.798.935	3	Rp 34.877.500	3	Rp -	0	Rp -	0%	0%	3	Rp 34.877.500	300%	30%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedia Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	43%	Rp 407.715.774	0	Rp 323.223.400	40,85	Rp 75.000.000	0	Rp -	0%	0%	0	Rp 323.223.400	0%	79%	Dinas Perikanan	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan (AKI)	43,35	Rp 183.352.196	40,85	Rp 323.223.400	40,85	Rp -	0	Rp -	0%	0%	40,85	Rp 323.223.400	94%	176%	Dinas Perikanan	
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan	93	Rp 224.363.578		Rp -	-	Rp 75.000.000	0	Rp -	-	-	0	Rp -	0%	0%	Dinas Perikanan	
	03.26	PARIWISATA																	
	03.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	92.5%	19.667.084.576,00	90	3.659.450.751,00	92,5	3.391.105.600,00	9,25	505.964.717,00	10,00	14,92	9,25	505.964.717,00	#VALUE!	2,57	DINAS PARIWISATA	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	125.352.535,00	100	18.468.000,00	100	18.468.000,00	0,00	-	0	-	0,00	-	0	0,00	DINAS PARIWISATA	
	2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	10	56.765.460,00	2	7.400.000,00	2	7.400.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5	43.587.075,00	1	6.068.000,00	1	6.068.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	25.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	11.554.712.975,00	100	1.962.346.465,00	100	2.413.013.600,00	7	430.503.995,00	6,52	17,84	6,52	430.503.995,00	652,17	3,73	DINAS PARIWISATA	
	2.02.01	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	84	11.356.939.465,00	14	1.946.963.465,00	14	2.397.105.600,00	3	430.503.995,00	21,43	17,96	3,00	430.503.995,00	3,57	3,79	DINAS PARIWISATA	
	2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Layanan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	165.220.510,00	12	10.330.000,00	12	10.408.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	15.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	90	12.000.000,00	18	2.000.000,00	18	2.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.553.000,00	1	553.000,00	1	1.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100%	274.580.000,00	0	115.080.000,00	100	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Menikuti Peningkatan Kapasitas		274.580.000,00	0	115.080.000,00	5	50.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	#DIV/0!	-	DINAS PARIWISATA	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	2.476.571.207,00	100	602.215.162,00	100	384.254.000,00	12,5	19.328.400,00	12,50	5,03	12,50	19.328.400,00	1250	0,78	DINAS PARIWISATA	
	2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	18.618.000,00	1	4.041.000,00	1	2.500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK)	60	580.435.695,00	12	227.406.650,00	12	149.254.000,00	3	12.000.000,00	25,00	8,04	3,00	12.000.000,00	5,00	2,07	DINAS PARIWISATA	
	2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	65.800.000,00	12	5.800.000,00	12	12.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	117.650.000,00	11	15.900.000,00	11	5.500.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di Luar Kantor	60	1.694.067.512,00	12	349.067.512,00	12	215.000.000,00	3	7.328.400,00	25,00	3,41	3,00	7.328.400,00	5,00	0,43	DINAS PARIWISATA	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100	371.279.535,00	100	7.930.000,00	100	5.680.000,00	0,00	-	0,00	-	100,00	-	100	-	DINAS PARIWISATA	
	2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	18	371.279.535,00	7	7.930.000,00	5	5.680.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100	4.068.551.525,00	100	918.624.325,00	100	284.250.000,00	22,2222222	40.453.462,00	22,22	14,23	22,22	40.453.462,00	22,2222222	0,99	DINAS PARIWISATA	
	2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	803.896.325,00	12	52.096.325,00	12	141.000.000,00	3	8.453.462,00	25,00	6,00	3,00	8.453.462,00	5,00	1,05	DINAS PARIWISATA	
	2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan	60	542.000.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00	5	32.000.000,00	41,67	47,76	5,00	32.000.000,00	8,33	5,90	DINAS PARIWISATA	
	2.08.04	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	2.722.655.200,00	12	799.528.000,00	12	76.250.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik	100%	1.070.616.799,00	100	149.866.799,00	100	235.440.000,00	23,53	15.678.860,00	23,53	6,66	23,53	15.678.860,00	2352,94118	1,46	DINAS PARIWISATA	
	2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	26	586.601.799,00	4	77.101.799,00	5	135.220.000,00	1	15.678.860,00	20,00	11,60	1,00	15.678.860,00	3,85	2,67	DINAS PARIWISATA	
	2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya						50.220.000,00	0	-	-	-	0,00	-			DINAS PARIWISATA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	484.015.000,00	12	72.765.000,00	12	50.000.000,00	3	-	25,00	-	3,00	-	5,00	-	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	PAD Sektor Wisata (Milyar)	3,38%	1.995.685.050,00	2,58	85.233.050,00	2,78	600.000.000,00	2,78	74.100.000,00	100,00	12,35	2,78	74.100.000,00	8224,85	3,71	DINAS PARIWISATA	
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		15	1.995.685.050,00	3	85.233.050,00	3	600.000.000,00	3	74.100.000,00	100	12,35	3,00	74.100.000,00	20,00	3,71	DINAS PARIWISATA	
	2.03.0004	Pengadaan / Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Terpelihara	60	1.995.685.050,00	12	85.233.050,00	12	600.000.000,00	3	74.100.000,00	25,00	12,35	3,00	74.100.000,00	5,00	3,71	DINAS PARIWISATA	
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisata (Orang)	780748 Orang	3.439.315.000,00	119631	39.315.000,00	130000	146.000.000,00	147925	-	113,79	-	147925,00	-	123,65	-	DINAS PARIWISATA	
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	eningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawa	50	3.439.315.000,00	100	39.315.000,00	100	146.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	umlah Kerja Sama dan kemitraan Pariwisata	14	2.575.000.000,00	0	125.000.000,00	1	100.000.000,00	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.01.06	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Tersediannya Publikasi Pariwisata Pesisir Barat	150	3.439.315.000,00	0	39.315.000,00	1	46.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Fasilitas Pengembangan SDM Pariwisata	50%	1.877.239.500,00	0	497.239.500,00	20	160.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Desa Wisata		1.877.239.500,00	0	497.239.500,00	1	160.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Tersediannya Pelatihan peningkatan Mutu Produk	4	987.317.000,00	0	149.317.000,00	1	75.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
	2.01.09	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Tersediannya Pelatihan SDM Pariwisata yang Berdaya Saing	8	1.877.239.500,00	0	497.239.500,00	1	85.000.000,00	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	DINAS PARIWISATA	
		Urusan Pemerintah Bidang Pertanian																	
C.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	102,3	10.501.847.500	124,98	4.007.101.870	99,77	1.344.593.000	0	74.723.000	0%	6%	0	4.081.824.870	0%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
I.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani	102,3	3.663.480.000	124,98	1.366.057.700	99,77	328.137.000	0	19.493.000	0%	6%	0	1.385.550.700	0%	38%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	3.27.02.2.01	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	0,3	1.526.695.000	0,25	486.197.200	0,3	248.137.000	0	14.893.000	0%	6%	0	501.090.200	0%	33%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Laporan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	5	610.930.000	3	241.105.200	1	209.913.000	0	8.323.000	0%	4%	3	249.428.200	60%	41%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Laporan KP3 dan Pendampingan Sarana Pendukung Pertanian	10	915.765.000	6	245.092.000	2	38.224.000	1	6.570.000	50%	17%	7	251.662.000	70%	27%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian	0,5	2.136.785.000	0,57	879.860.500	0,5	80.000.000	0,029	4.600.000	6%	6%	0	884.460.500	1%	41%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah bibit komoditi perkebunan	81.000	2.747.295.000	23700	630.155.350	21700	432.500.000	21700	431.822.850	100%	100%	45400	1.061.978.200	56%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
c.	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Luasan Pengembangan Hortikultura	450	2.136.785.000	136	879.860.500	53	80.000.000	3	4.600.000	6%	6%	139	884.460.500	31%	41%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	3.27.02.2.06	Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak	3,00	2.339.938.000	3	403.867.300	3	405.160.000	3	403.867.300	100%	100%	3	807.734.600	20%	35%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih /Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	Jumlah Bibit Ternak	5.250	1.851.530.000	1655	403.867.300	1655	405.160.000	1655	403.867.300	100%	100%	3310	807.734.600	63%	44%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
II.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian	151.322	811.655.000	256.359	410.461.500	148.340	356.616.000	0	-	0%	0%	0	410.461.500	0%	51%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	3.27.03.2.01	Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan data, informasi dan kajian lingkup pertanian	100	811.655.000	100	410.461.500	100	356.616.000	0	-	0%	0%	0	410.461.500	0%	51%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5	361.665.000	2	392.953.500	2	330.000.000	0		0%	0%	2	392.953.500	40%	109%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.03.2.01.03	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	5	361.665.000	2	17.508.000	1	26.616.000	0		0%	0%	2	17.508.000	40%	5%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.03.2.01.03	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola	2	150.000.000	1	8.754.000	1	8.779.000	1	8.754.000	100%	100%	2	17.508.000	100%	12%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	3.27.03.2.02	Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun dan berkondisi baik	85	13.718.500.000	100	298.987.500	82	306.000.000	100	298.987.500	122%	98%	100	597.975.000	24%	4%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	14	3.090.500.000	2	298.987.500	2	306.000.000	2	298.987.500	100%	98%	4	597.975.000	29%	19%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
III.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	90	947.630.000	84,5	552.681.170	86	80.000.000	22	20.340.000	26%	25%	22	573.021.170	24%	60%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	90	755.900.000	84,5	405.726.170	86	48.775.000	0	-	0%	0%	0	405.726.170	0%	54%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.04.2.01.08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	5	755.900.000	3	405.726.170	1	48.775.000	0		0%	0%	3	405.726.170	60%	54%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular	15.000	755.900.000	7000	349.392.220	3000	98.947.000	3000	95.414.200	100%	96%	10000	444.806.420	67%	59%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	3.27.04.2.04	Kegiatan : Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	100	191.730.000	99	146.955.000	100	31.225.000	65	20.340.000	65%	65%	65	167.295.000	32%	87%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Sampel daging dan Produk Hewan	1.500	191.730.000	1.160	146.955.000	450	31.225.000	293	20.340.000	65%	65%	1453	167.295.000	97%	87%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
IV.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	90	1.409.905.000	99	277.729.000	86	75.000.000	5	5.370.000	6%	7%	5	283.099.000	6%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	3.27.05.2.01	Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penurunan persentase gangguan OPT/ Kegagalan panen pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	10	1.409.905.000	10	277.729.000	10	75.000.000	0,7	5.370.000	7%	7%	1	283.099.000	7%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gerakan Pengendalian OPT komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	75	1.409.905.000	20	277.729.000	6	75.000.000	1	5.370.000	17%	7%	21	283.099.000	28%	20%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
V.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	995	3.669.177.500	975	1.400.172.500	975	504.840.000	56	29.520.000	6%	6%	56	1.429.692.500	6%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
1	3.27.072.01	Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kualitas SDM Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian yang ditingkatkan	90	3.669.177.500	80	1.400.172.500	80	504.840.000	5	29.520.000	6%	6%	5	1.429.692.500	6%	39%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
a.	3.27.072.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11	2.136.785.000	11	997.777.500	11	181.680.000	1	13.710.000	9%	8%	11	1.011.487.500	100%	47%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	3.27.072.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditangkap Kapasitasnya	11	1.068.392.500	11	276.513.000	11	219.160.000	1	15.810.000	9%	7%	11	292.323.000	100%	27%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
b.	3.27.072.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11	464.000.000	11	125.882.000	11	104.000.000	0		0%	0%	11	125.882.000	100%	27%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
		URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
	3.30 . 03 . 2.01	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11,59	0	12,86	1.665.263.221	11,58	94.518.000,00	11,58	0,00	100	0,00	12,9	1.665.263.221,00	110,96	0	Diskop ukm perdagangan	
24		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	11,59	0	12,86	1.665.263.221	11,58	94.518.000,00	11,58	0,00	100	0,00	12,9	1.665.263.221,00	110,96	0	Diskop ukm perdagangan	
25		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Perdagangan	5	0	3	802.802.915	2	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	3	802.802.915	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	3.30 . 04	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya kegiatan pelayanan pasar	60	0	36	862.460.306	12	64.518.000	0	0,00	0	0,00	36	862.460.306	60	0	Diskop ukm perdagangan	
	3.30 . 04 . 2.01	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	60	757.236.700	60	76.110.000,00	60	0,00	100	0,00	60	757.236.700,00	85,7142857	0	Diskop ukm perdagangan	
26		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	60	67.219.500	60	46.110.000,00	60	0,00	100	0,00	60	67.219.500,00	85,7142857	0	Diskop ukm perdagangan	
	3.30 . 04 . 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Terlaksananya Monitoring dan Sosialisasi Distribusi BBM dan BBG	60	0	36	67.219.500	12	46.110.000	0	-	0	0,00	36	67.219.500	60	0	Diskop ukm perdagangan	
27		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok	70	0	30	690.017.200	40	30.000.000	40	-	100	0,00	30	690.017.200	42,86	0	Diskop ukm perdagangan	
	3.30.05	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring Evaluasi	260	0	156	690.017.200	52	30.000.000	0	-	0	0,00	156	690.017.200	60	0	Diskop ukm perdagangan	
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																	
3	31	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Pemenuhan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	45%	2.941.421.772	43%	231.986.472	40%	119.200.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distranssnake rprin	
3	31	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	45%	2.941.421.772	43%	231.986.472	40%	119.200.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distranssnake rprin	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3	31	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terpenuhinya Bina Kelompok Pengrajin	45%	980.473.924	43%	92.593.600	40%	-	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
3	31	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terpenuhinya Jumlah dan Spesifikasi Gedung Sentra IKM yang Terpelihara	45%	980.473.924	43%	139.392.872	40%	119.200.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
3	31	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terpenuhinya Bina Kelompok Pengrajin	45%	980.473.924	0%	-	0%	-	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
3	31	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pengelolaan kontribusi industri sektor industri pengolahan terhadap PDIB	4%	978.396.132	4%	56.047.700	4%	88.500.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
3	31	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk III	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis	6	978.396.132	1	56.047.700	1	88.500.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
3	31	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SII Nas	Terpenuhinya Website yang Dikelola Dengan Baik	6	978.396.132	1	56.047.700	1	88.500.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0	Distransnake rprin	
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
3	32	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Pemenuhan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	44,00%	503.420.314	41,95%	129.672.306	44,00%	120.000.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0%	Distransnake rprin	
3	32	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	44,00%	503.420.314	41,95%	129.672.306	44,00%	120.000.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0%	Distransnake rprin	
3	31	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi	Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Eks Transmigran	44,00%	503.420.314	41,95	129.672.306	44,00%	120.000.000	0%	-	0	0	0%	-	0%	0%	Distransnake rprin	
3	32	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina (Lokasi)	1	999.955.000	0	129.672.306	1	133.125.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0%	Distransnake rprin	
3	32	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1	999.955.000	0	129.672.306	1	133.125.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0%	Distransnake rprin	
3	31	Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Cakupan Pengembangan Daerah Transmigran	1	999.955.000	0	-	1	133.125.000	0	-	0	0	0%	-	0%	0%	Distransnake rprin	
04.01		Sekretariat Daerah																	
1	04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Persen)	100%	267.604.023.033	#VALUE!	5.855.152.253	100%	105.462.198.050	14%	13.807.306.582	14%	13%	137%	13.807.306.582	34%	8%	SEKRETARIAT DAERAH	
2	04.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	138.577.500	100%	3.202.500	100%	6.224.500	0%	0	0%	0%	0%	3.202.500	20%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
3	04.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	27.715.500	1 Dokumen	3.202.500,00	1,00	1.006.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	3.202.500	20%	12%	SEKRETARIAT DAERAH	
4	04.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	27.715.500	1 Dokumen	0,00	1,00	1.061.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
5	04.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	27.715.500	1 Dokumen	0,00	1,00	1.067.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
6	04.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	27.715.500	1 Dokumen	0,00	1,00	1.014.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
7	04.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2	27.715.500	1 Dokumen	0,00	1,00	1.047.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 Dokumen	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
	04.01.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat daerah	2	1.132.450	0 Dokumen	0,00	1,00	1.029.500,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	0 Dokumen	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
8	04.01.01.2.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan, Monev dan Pembuatan Laporan	100%	126.190.336.159	100%	3.841.338.553,00	100%	88.429.691.250	25%	11.129.927.043,00	25%	13%	100%	14.971.265.596	12%	12%	SEKRETARIAT DAERAH	
9	04.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	24	126.185.740.603	12,00	3.841.338.553,00	12,00	88.429.691.250,00	3,00	11.129.927.043,00	25%	13%	24,00	14.971.265.596	12%	12%	SEKRETARIAT DAERAH	
10	04.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	1.531.852	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
11	04.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	1.531.852	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
12	04.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	1.531.852	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	0%	0%		

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
13	04.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	3.014.815.500	100%	0,00	100%	100.000.000	25%	0,00	25%	0%	0%	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
14	04.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Belanja Premi Asuransi untuk Kendaraan Dinas	24	3.014.815.500	12,00	0,00	12,00	100.000.000,00	3,00	0,00	25%	0%	24,00	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
16	04.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100%	2.039.264.661	100%	0,00	100%	108.000.000	0%	108.000.000,00	0%	100%	30%	108.000.000	30%	30%	SEKRETARIAT DAERAH	
17	04.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	-	12,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0%	#DIV/0!	24,00	0	200%	200%	SEKRETARIAT DAERAH	
18	04.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	20	1.930.622.661	210 Stel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!	310 Stel	0	20%	20%	SEKRETARIAT DAERAH	
19	04.01.01.2.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24	108.642.000	12,00	0,00	12,00	108.000.000,00	12,00	108.000.000,00	0%	100%	24,00	108.000.000	20%	20%	SEKRETARIAT DAERAH	
20	04.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	5.806.463.871	100%	679.171.394,00	100%	920.165.000	17%	193.591.162,00	17%	21%	23%	872.762.556	23%	16%	SEKRETARIAT DAERAH	
21	04.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhihnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	24	80.514.586	12,00	21.010.500,00	12,00	26.150.000,00	3,00	7.845.000,00	25%	30%	24,00	28.855.500	25%	36%	SEKRETARIAT DAERAH	
22	04.01.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik	Terpenuhihnya Penyediaan Bahan Logistik	12	135.802.500	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	50%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
23	04.01.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24	188.846.792	12,00	22.051.900,00	12,00	71.430.000,00	3,00	26.451.550,00	25%	37%	24,00	48.503.450	50%	26%	SEKRETARIAT DAERAH	
24	04.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	24	458.088.993	12,00	6.092.100,00	12,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	6.092.100	50%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
25	04.01.01.2.06.05	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Pemda	24	2.770.371.000	12,00	401.370.000,00	12,00	490.585.000,00	3,00	84.393.000,00	25%	17%	24,00	485.763.000	50%	18%	SEKRETARIAT DAERAH	
26	04.01.01.2.07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	2.172.840.000	12,00	228.646.894,00	12,00	300.000.000,00	3,00	74.901.612,00	25%	25%	24,00	303.548.506	50%	14%	SEKRETARIAT DAERAH	
27	04.01.01.2.07.01	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	523.958.637	100%	0,00	100%	7.000.000	8%	0,00	8%	0%	25%	0	25%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
28	04.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas	12	21.000.000	12,00	0,00	12,00	7.000.000	0,00	0,00	25%	0%	24,00	0	0%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
30	04.01.01.2.07.02	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhihnya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	12	523.958.637	12,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	25%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
31	04.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhihnya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	12 0		12,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	25%	0	SEKRETARIAT DAERAH	
32	04.01.01.2.07.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	95.137.756.105	12 Bulan	413.270.745,00	12 Bulan	12.184.395.500	25%	1.924.669.192,00	25%	16%	12,00	2.337.939.937	25%	10%	SEKRETARIAT DAERAH	
33	04.01.01.2.07.06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhihnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24	3.618.821.725	12,00	304.780.745,00	12,00	1.410.000.000,00	3,00	403.009.192,00	25%	29%	24,00	707.789.937	25%	20%	SEKRETARIAT DAERAH	
34	04.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Volume Penyediaan Rumah Dinas, Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas	24	3.324.445.200	12,00	61.800.000,00	12,00	780.000.000,00	3,00	204.200.000,00	25%	26%	24,00	266.000.000	25%	8%	SEKRETARIAT DAERAH	
35	04.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Administrasi Keuangan Terlaksana dengan Baik	24	88.194.489.180	12,00	46.690.000,00	12,00	9.994.395.500,00	3,00	1.317.460.000,00	25%	13%	24,00	1.364.150.000	25%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
36	04.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11.161.335.870	100%	228.931.275,00	100%	1.273.400.000	25%	189.630.800,00	25%	15%	25%	418.562.075	25%	7%	SEKRETARIAT DAERAH	
37	04.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhihnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	24	6.094.816.200	12,00	116.656.005,00	12,00	666.800.000,00	3,00	92.359.800,00	25%	14%	24,00	209.015.805	25%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
38	04.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhihnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24	4.182.173.790	12,00	72.770.270,00	12,00	404.600.000,00	3,00	71.970.000,00	25%	18%	24,00	144.740.270	25%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
39	04.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24	851.753.280	12,00	38.085.000,00	12,00	102.000.000,00	3,00	22.500.000,00	25%	22%	24,00	60.585.000	25%	7%	SEKRETARIAT DAERAH	
40	04.01.01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24	32.592.600	12,00	1.420.000,00	12,00	100.000.000,00	3,00	2.801.000,00	25%	3%	24,00	4.221.000	25%	13%		
41	04.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100%	3.132.808.473	100%	119.269.245,00	100%	897.226.800	13%	97.221.720,00	13%	11%	27%	216.490.965	27%	7%	SEKRETARIAT DAERAH	
42	04.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terpenuhihnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	24	933.800.261	12,00	35.851.476,00	12,00	347.226.800,00	3,00	47.221.720,00	25%	14%	24,00	83.073.196	20%	9%	SEKRETARIAT DAERAH	
43	04.01.01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24	152.627.500	12,00	8.417.769,00	12,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	8.417.769	20%	6%	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
44	04.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	46	416.750.712	28 stel	0,00	28,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0%	0%	24,00	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
45	04.01.01.2.11.03	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	24	1.629.630.000	12,00	75.000.000,00	12,00	300.000.000,00	3,00	50.000.000,00	25%	17%	24,00	125.000.000	20%	8%	SEKRETARIAT DAERAH	
46	04.01.01.2.11.04	Fasilitas Kerumahaan Sekreteriat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi dalam Proses Fasilitas Kerumahaan Sekreteriat Daerah	100	8.190.206.400	100%	180.928.190,00	100%	1.064.064.000	25%	38.452.000,00	25%	4%	20%	219.380.190	20%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
47	04.01.01.2.11.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	24	3.788.573.600	12,00	89.704.950,00	12,00	586.280.000,00	3,00	14.260.000,00	25%	2%	24,00	103.964.950	20%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
48	04.01.01.2.11.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga wakil Kepala Daerah	24	2.783.635.100	12,00	68.364.950,00	12,00	432.280.000,00	3,00	12.760.000,00	25%	3%	24,00	81.124.950	20%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
49	04.01.01.2.12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekreteriat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekreteriat Daerah	24	1.617.997.700	12,00	22.858.290,00	12,00	45.504.000,00	3,00	11.432.000,00	25%	25%	24,00	34.290.290	20%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
50	04.01.01.2.12.01	Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	100%	3.462.708.437	100%	18.759.452,00	100%	124.788.000,00	5%	17.791.000,00	5%	14%	100%	36.550.452	100%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
51	04.01.01.2.12.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	1.025.483.733	50 Buku	9.403.452,00	1,00	54.930.000,00	0 Dokumen	10.727.000,00	0%	20%	100 Buku	20.130.452	20%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
52	04.01.01.2.12.03	Fasilitas Pelayan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitas Pelayan Publik dan Tata Laksana	2	1.720.717.570	50 buku	8.122.000,00	1,00	24.929.000,00	0 Laporan	3.988.000,00	0%	16%	100 buku	12.110.000	20%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
53	04.01.01.2.13	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	303.449.164	55 buku	1.234.000,00	1,00	24.929.000,00	0 Dokumen	3.076.000,00	0%	12%	105 buku	4.310.000	18%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
54	04.01.01.2.13.01	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	304.415.970	1 buku	0,00	1,00	10.000.000,00	0 Dokumen	0,00	0%	0%	2 buku	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
55	04.01.01.2.13.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	108.642.000	12,00	0,00	1,00	10.000.000,00	0,00	0,00	25%	0%	24,00	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
56	04.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	8.805.791.420	100%	370.280.899,00	100%	347.243.000	0%	108.023.665,00	0%	31%	100%	478.304.564	100%	5%	SEKRETARIAT DAERAH	
57	04.01.01.2.14.01	Fasilitas Keprotokolkan	Terlaksananya Fasilitas Keprotokolkan	24	3.928.276.348	1 kegiatan	135.746.516,00	12,00	171.189.000,00	3,00	15.187.790,00	0%	9%	2 kegiatan	150.934.306	20%	4%	SEKRETARIAT DAERAH	
58	04.01.01.2.14.02	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	24	3.074.057.872	1 kegiatan	209.019.383,00	12,00	165.354.000,00	3,00	92.835.875,00	0%	56%	2 kegiatan	301.855.258	20%	10%	SEKRETARIAT DAERAH	
59	04.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	24	1.803.457.200	1 kegiatan	25.515.000,00	12,00	10.700.000,00	0,00	0,00	0%	0%	2 kegiatan	25.515.000	20%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
60		Program Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	100%	41.401.178.118	100%	140.711.658,00	100%	6.850.944.000	1%	146.865.285,00	1%	6%	100%	287.576.943	18%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
61	04.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	4.361.017.533	100%	55.283.450,00	100%	1.230.278.000	1%	71.278.485,00	1%	6%	100%	126.561.935	15%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
62	04.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	2	2.810.533.230	26 Kegiatan	38.606.000,00	26,00	915.000.000,00	1 Kegiatan	68.480.085,00	4%	7%	52 Kegiatan	107.086.085	4%	4%	SEKRETARIAT DAERAH	
63	04.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	8	711.876.705	4 Laporan	11.193.600,00	4,00	219.259.000,00	0 Laporan	1.688.400,00	0%	1%	9 Laporan	12.882.000	20%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
64	04.01.02.2.01.03	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	40	838.607.598	20 buku	5.483.850,00	20,00	96.019.000,00	0 buku	1.110.000,00	0%	1%	40 buku	6.593.850	20%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
65	04.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	32.600.730.547	100%	25.000.000,00	100%	4.938.468.000	0%	0,00	0%	0%	100%	25.000.000	18%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
66	04.01.02.2.02.01	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	8	8.512.109.390	4 kegiatan	0,00	4,00	979.068.000,00	0 kegiatan	0,00	0%	0%	8 kegiatan	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
67	04.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	64	23.735.993.127	32 Kegiatan	25.000.000,00	32,00	3.959.400.000,00	0 Kegiatan	0,00	0%	0%	55 Kegiatan	25.000.000	14%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
68	04.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1	352.628.030	1 kegiatan	0,00	0,00	0,00	0 kegiatan	0,00	0%	0%	2 kegiatan	0	20%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
69	04.01.02.2.03	Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi hukum	100%	3.879.815.096	100%	54.427.658,00	100%	598.701.000	0%	71.799.600,00	0%	12%	100%	126.227.258	20%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
70	04.01.02.2.03.01	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	6	2.470.828.165	3 laporan	23.862.861,00	3,00	335.701.000,00	0 laporan	2.636.000,00	0%	1%	10 laporan	26.498.861	20%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
71	04.01.02.2.03.02	Fasilitas Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	2	949.194.433	150 peserta	28.116.297,00	1,00	243.000.000,00	0 peserta	69.163.600,00	0%	28%	300 peserta	97.279.897	20%	10%	SEKRETARIAT DAERAH	
72	04.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	2	459.792.498	2 dokumen	2.448.500,00	2,00	20.000.000,00	0 dokumen	0,00	0%	0%	4 dokumen	2.448.500	20%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
73	04.01.02.2.04	Fasilitas Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	559.614.942	100%	6.000.550,00	100%	83.497.000	0%	3.787.200,00	0%	5%	100%	9.787.750	20%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
74		Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	2	559.614.942	1 kegiatan	6.000.550,00	1,00	83.497.000,00	0 kegiatan	3.787.200,00	0%	5%	2 kegiatan	9.787.750	20%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
75	04.01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100%	19.500.780.772	100%	132.183.856,00	100%	489.075.500	6%	82.911.500,00	6%	17%	75%	215.095.356	0%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
76	04.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	100%	6.070.612.933	100%	6.977.500,00	100%	58.050.000	0%	1.994.000,00	0%	3%	100%	8.971.500	#REF!	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
78	04.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	5.237.569.979	1 kegiatan	6.977.500,00	1,00	47.750.000,00	0 kegiatan	1.994.000,00	0%	4%	2 kegiatan	8.971.500	40%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
79	04.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi KUR	2	833.042.954	1 kegiatan	0,00	1,00	10.300.000,00	0 kegiatan	0,00	0%	0%	2 kegiatan	0	40%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
80	04.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100%	8.211.236.235	100%	78.303.600,00	100%	236.792.500	0%	34.883.500,00	0%	15%	100%	113.187.100	40%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
81	04.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2	3.918.831.014	3 dokumen	17.418.000,00	1,00	22.358.500,00	0 dokumen	8.391.000,00	0%	38%	6 dokumen	25.809.000	40%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
82	04.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	6	2.769.632.234	3 dokumen	25.783.000,00	3,00	151.981.500,00	0 dokumen	25.292.500,00	0%	17%	6 dokumen	51.075.500	40%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
83	04.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	8	1.522.772.987	4 dokumen	35.102.600,00	4,00	62.452.500,00	0 dokumen	1.200.000,00	0%	2%	8 dokumen	36.302.600	40%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
84	04.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	4.190.624.569	100%	36.703.000,00	100%	167.819.000	0%	46.034.000,00	0%	27%	0%	82.737.000	0%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
85	04.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400	960.029.762	200 Paket	11.003.000,00	200,00	54.469.000,00	0 Paket	8.876.000,00	0%	16%	500 Paket	19.879.000	38%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
86	04.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	400	2.344.597.569	200 Paket	25.700.000,00	200,00	66.400.000,00	100 Paket	37.158.000,00	0%	56%	500 Paket	62.858.000	38%	3%	SEKRETARIAT DAERAH	
87	04.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	20	885.997.238	10 peserta	0,00	10,00	46.950.000,00	0 peserta	0,00	0%	0%	60 peserta	0	38%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
88	04.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	1.028.307.035	100%	10.199.756,00	100%	26.414.000	25%	0,00	25%	0%	100%	10.199.756	13%	1%	SEKRETARIAT DAERAH	
89	04.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	24	590.055.560	12,00	9.791.756,00	12,00	10.724.000,00	0,00	0,00	25%	0%	24,00	9.791.756	40%	2%	SEKRETARIAT DAERAH	
90	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	24	226.676.180	12,00	0,00	12,00	5.390.000	0,00	0,00	25%	0%	24,00	0	40%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
91	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	24	211.575.295	12,00	408.000,00	12,00	10.300.000	0,00	0,00	25%	0%	24,00	408.000	40%	0%	SEKRETARIAT DAERAH	
4.02		Sekretariat DPRD																	
1	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan penunjang kinerja perangkat daerah	90	91.353.318.455	18	19.708.488.811	100	18.270.663.691	17	4.118.552.994	17	23	17	4.118.552.994	19	5	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu.	100	62.000.000	20	12.400.000	100	12.400.000	50	5.722.000	50	46	20	5.722.000	20	9	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	37.000.000	2	7.400.000	2	7.400.000	1	3.399.000	50	46	1	3.399.000	10	9	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	10	25.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	1	2.323.000	50	46	1	2.323.000	10	9	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu	100	10.575.142.500	20	1.816.334.324	100	2.115.028.500	22	497.571.945	22	24	22	497.571.945	22	5	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan PNS	70	10.547.642.500	14	1.810.834.324	14	2.109.528.500	3	496.589.445	21	24	3	496.589.445	4	5	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	5	12.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	10	10.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	1	982.500	50	49	1	982.500	10	10	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	5	5.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparaturnya yang berkinerja baik	100	1.605.000.000	10	139.500.000	100	321.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	300	300.000.000	0	-	20	20.000.000	0	-							SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	30	1.505.000.000	3	139.500.000	6	301.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	11.040.392.000	18	2.245.394.200	100	2.208.078.400	19	348.523.250	19	16	19	348.523.250	19	3	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Intalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor	Tercapainya Kondisi Listrik yang baik di Kantor	30	162.945.000	6	32.598.132	6	32.589.000	1	1.953.000	17	6	1	1.953.000	3	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	30	175.360.000	6	21.443.000	6	35.072.000	0		0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Aktivitas	30	227.500.000	6	45.626.000	6	45.500.000	1	900.000	17	2	1	900.000	3	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan pengada	Jumlah ATK	60	1.429.837.000	6	288.025.050	6	285.967.400	1	42.580.250	17	15	1	42.580.250	2	3	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang - Undangan	Meningkatnya Informasi melalui bahan bacaan dan Perundang-undangan	30	4.250.000.000	6	999.700.000	6	850.000.000	2	243.000.000	33	29	2	243.000.000	7	6	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah layanan jasa penyediaan makanan dan minuman	55	2.544.750.000	11	348.536.000	11	508.950.000	3	45.600.000	27	9	3	45.600.000	5	2	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi di luar kantor	30	2.250.000.000	6	509.466.018	6	450.000.000	1	14.490.000	17	3	1	14.490.000	3	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan prasarana dan prasarana pendukung kinerja	100	1.758.400.000	18	159.640.000	100	351.680.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	30	852.550.000	5	113.240.000	6	170.510.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	30	905.850.000	6	46.400.000	6	181.170.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan pendukung	100	6.381.450.000	20	813.331.439	100	1.276.290.000	17	61.040.551	17	5	17	61.040.551	17	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan	30	2.259.000.000	6	308.388.639	6	451.800.000	1	33.223.551	17	7	1	33.223.551	3	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	30	495.000.000	6	99.000.000	6	99.000.000	1	22.000.000	17	22	1	22.000.000	3	4	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.04	Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	3.627.450.000	5	405.942.800	12	725.490.000	1	5.817.000	8	1	1	5.817.000	2	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik	100	5.094.215.265	15	587.382.438	100	1.018.843.053	23	33.700.000	23	3	23	33.700.000	23	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.01	Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan	35	1.082.000.000	6	186.909.130	7	216.400.000	6	28.200.000	86	13	6	28.200.000	17	3	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor	60	2.920.215.265	8	250.163.308	12	584.043.053	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor	60	1.092.000.000	9	150.310.000	12	218.400.000	1	5.500.000	8	3	1	5.500.000	2	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100	53.342.260.190	20	13.359.646.410	100	10.668.452.038	2	3.132.170.248	2	29	2	3.132.170.248	2	6	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	70	50.301.333.440	14	12.699.889.410	14	10.060.266.688	3	3.132.170.248	21	31	3	3.132.170.248	4	6	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	750	1.500.000.000	150	377.550.000	150	300.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD	125	1.540.926.750	25	282.207.000	25	308.185.350	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	1.494.458.500	20	574.860.000	100	298.891.700	53	39.825.000	53	13	53	39.825.000	53	3	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/kab/kota	300	332.104.000	60	39.815.000	60	66.420.800	60	-	100	0	60	-	20	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	300	1.162.354.500	60	535.045.000	60	232.470.900	3	39.825.000	5	17	3	39.825.000	1	3	SEKRETARIAT DPRD	
2	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPd) (Persen)	100	38.561.023.075	13	15.883.169.202	100	7.815.834.615	14	2.024.018.300	14	26	14	2.024.018.300	14	5	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan pembentukan perda dan peraturan DPRD yang sesuai regulasi	100	2.800.500.000	5	228.604.100	100	560.100.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6*8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPd).	20	81.677.250	0	-	4	16.335.450	0	-							SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPd).	20	2.800.500.000	1	228.604.100	4	560.100.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase layanan administrasi DPRD yang terpenuhi	100	2.159.865.000	20	431.391.000	100	431.973.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPd).	30	314.490.000	6	62.811.000	6	62.898.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPd).	30	314.490.000	6	62.811.000	6	62.898.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPd).	30	456.430.000	6	91.171.000	6	91.286.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPd).	30	456.430.000	6	91.178.000	6	91.286.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPd).	45	618.025.000	9	123.420.000	9	123.605.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPd)	100	518.150.000	4	20.676.000	100	103.630.000	60	61.529.000	60	59	60	61.529.000	60	12	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	50	103.630.000	10	20.676.000	10	20.726.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	50	103.630.000	0	-	10	20.726.000	10	20.524.000	100	99	10	20.524.000	20	20	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50	103.630.000	0	-	10	20.726.000	10	20.524.000	100	99	10	20.524.000	20	20	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50	103.630.000	0	-	10	20.726.000	10	20.481.000	100	99	10	20.481.000	20	20	SEKRETARIAT DPRD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	4.02.02.2.03.05	Pengawasan urusan pemerintahan bidang sumber daya alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	50	103.630.000	0	-	10	20.726.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase layanan peningkatan kapasitas DPRD	100	7.601.350.000	13	2.716.059.003	100	1.520.270.000	6	106.794.000	6	7	6	106.794.000	6	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	25	5.250.000.000	5	2.442.082.753	5	1.050.000.000	1	106.794.000	20	10	1	106.794.000	4	2	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	975.000.000	0	-	6	195.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	30	1.376.350.000	6	273.976.250	6	275.270.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan pikir yang terealisasi	100	4.585.763.750	18	976.139.500	100	917.152.750	3	26.035.000	3	3	3	26.035.000	3	1	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	180	1.150.000.000	32	278.177.500	36	230.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	5	135.763.750			1	27.152.750	1	26.035.000	100		1		20		SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	15	3.300.000.000	3	697.962.000	3	660.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD.	100	21.413.544.325	20	11.510.299.599	100	4.282.708.865	18	1.829.660.300	18	43	18	1.829.660.300	18	9	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	140	21.113.544.325	28	11.451.139.599	28	4.222.708.865	4	1.819.660.300	14	43	4	1.819.660.300	3	9	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Tersusunnya dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima (RPJM) maupun dokumen rencana Tahunan (RKPD).	60	300.000.000	12	59.160.000	12	60.000.000	3	10.000.000	25	17	3	10.000.000	5	3	SEKRETARIAT DPRD	
	05.01	Perencanaan		100%	50.575.576.691				5.852.139.800		910.923.688							Bappellitbangda	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	90%	18.959.936.687	90	7.389.928.474	90	3.920.420.800	#DIV/0!	707.337.678	#DIV/0!	18,04	#DIV/0!	707.337.678	#DIV/0!	3,7	Bappelitbang da	
	05.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100	183.013.000	100	57.386.600	100	24.900.000	50,00	18.120.000	50,00	72,77	50,00	18.120.000	50	9,90	Bappelitbang da	
	05.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen renja	10	31.310.000	4	8.050.600	2	7.400.000	1	5.500.000	50,00	74,32	1	5.500.000	10	17,57	Bappelitbang da	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA-SKPD	5	19.156.000	2	8.212.000	1	2.500.000	0,5	1.680.000	50,00	67,20	0,5	1.680.000	10	8,77	Bappelitbang da	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	5	18.524.000	2	8.212.000	1	2.500.000	0,5	1.680.000	50,00	67,20	0,5	1.680.000	10	9,07	Bappelitbang da	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA-SKPD	5	24.976.000	2	8.212.000	2	2.500.000	1	1.680.000	50,00	67,20	1	1.680.000	20	6,73	Bappelitbang da	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	5	24.800.000	2	8.212.000	1	2.500.000	0,5	1.680.000	50,00	67,20	0,5	1.680.000	10	6,77	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	40.122.000	4	8.304.000	1	5.000.000	0,5	4.100.000	50,00	82,00	0,5	4.100.000	5	10,22	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah Laporan LAKIP SKPD	5	24.125.000	2	8.184.000	1	2.500.000	0,5	1.800.000	50,00	72,00	0,5	1.800.000	10	7,46	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	13.718.695.570	100	4.347.553.156	100	3.048.639.800	60,29	551.320.478	60,29	18,08	60,2941176	551.320.478	60,2941176	4,02	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	13.626.433.570	28	4.319.479.956	14	3.043.139.800	4	547.030.478	28,57	17,98	4	547.030.478	5,71428571	4,01	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah Laporan SKPD	5	27.580.000	2	8.260.400	1	2.500.000	0	1.900.000	0,00	76,00	0	1.900.000	0	6,89	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.05.09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	jumlah Laporan Keungan Bulanan /Triwulan /Semester SKPD	90	37.412.000	36	11.668.400	18	2.000.000	16	1.830.000	88,89	91,50	16	1.830.000	17,7777778	4,89	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran SKPD	5	27.270.000	2	8.144.400	1	1.000.000	0,5	560.000	50,00	56,00	0,5	560.000	10	2,05	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik	100%	285.000.000	100	158.846.500	100	50.000.000	100	50.000.000	100,00	100,00	100	50.000.000	100	17,54	Bappelitbang da	
		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Seragam Olahraga	50	125.000.000	0	-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0		Bappelitbang da	
	5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	30	200.000.000	22	158.846.500	19	50.000.000	19	50.000.000	100,00	100,00	19	50.000.000	63,3333333	25,00	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja	100%	2.544.473.117	200	1.217.369.175	100	576.671.000	25,00	74.897.200	25,00	12,99	25	74.897.200	25	2,94	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Aktifitas	5	159.661.457	2	49.982.000	1	25.000.000	1	25.000.000	100,00	100,00	1	25.000.000	20	15,66	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah ATK	60	752.490.057	24	243.592.000	12	108.671.000	3	3.000.000	25,00	2,76	3	3.000.000	5	0,40	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah SKHU	60	428.484.421	24	180.000.000	12	132.000.000	3	9.000.000	25,00	6,82	3	9.000.000	5	2,10	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makan dan Minum	55	56.111.055	22	22.000.000	11	11.000.000	2	2.000.000	18,18	18,18	2	2.000.000	3,64	3,56	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Koordinasi Diluar Kantor	60	1.147.726.127	24	721.795.175	12	300.000.000	3	35.897.200	25,00	11,97	3	35.897.200	5	3,13	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana dan Pendukung kinerja	100%	34.000.000	200	830.518.000	100	75.000.000	100	0	100,00	0,00	100	-	10000	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah Aset Tetap	30	34.000.000	18	830.518.000	6	75.000.000	0	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pesentase Pemenuhan Layanan Pendukung	100%	1.424.995.000	200	475.000.000	100	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Bangunan Dan Kendaraan Dinas	34	1.250.000.000	8	475.000.000	0		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0,00	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Barang Milik Daerah Yang Dalam Kondisi Baik	100%	769.760.000	200	303.255.043	100	145.210.000	4,76	13.000.000	4,76	8,95	4,76190476	13.000.000	4,76190476	1,69	Bappelitbang da	
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan	25	709.110.000	10	292.235.043	5	133.850.000	1	13.000.000	20,00	9,71	1	13.000.000	4	1,83	Bappelitbang da	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin	20	60.650.000	6	11.020.000	16	11.360.000	0	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran	100%	15.939.179.519	200	2.488.188.812	100	1.239.361.000	100	124.754.810	100,00	10,07	100	124.754.810	100	0,78	Bappelitbang da	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01 . 02 . 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	8.736.127.618	200	1.582.433.500	100	982.659.000	21,43	119.754.810	21,43	12,19	21,4285714	119.754.810	21,4285714	1,37	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen LKPI Bupati Pertahun	5	1.058.427.934	6	294.353.600	1	41.664.000	0,5	15.950.000	50,00	38,28	0,5	15.950.000	10	1,51	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah	5	1.481.760.339	6	143.093.600	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPD Yang Dilaksanakan	5	1.643.589.723	2	407.542.300	2	287.997.000	0,5	57.493.010	25,00	19,96	0,5	57.493.010	10	3,50	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya LAKIP Kabupaten Pertahun	5	1.022.312.818	6	184.082.200	1	66.647.000	0,5	20.319.200	50,00	30,49	0,5	20.319.200	10	1,99	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedia nya Dokumen Perencanaan ; RKPD Yang Telah Ditetapkan Oleh Perkada	10	2.082.250.649	12	553.361.800	3	586.351.000	0	25.992.600	0,00	4,43	0	25.992.600	0	1,25	Bappelitbang da	
	5.01 . 02 . 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	100%	2.716.647.087	200	374.637.850	100	89.158.000	0	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedia nya Sistem Data dan Statistik Yang terintegrasi	5	1.101.851.769	6	221.517.800	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	5	785.820.840	6	153.120.050	39	89.158.000	0	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01 . 02 . 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	100%	2.821.433.199	200	531.117.462	100	167.544.000	0	5.000.000	0,00	2,98	0	5.000.000	0	0,18	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Usulan DAK	5	852.954.632	4	210.044.131	1	56.697.000	0	2.000.000	0,00	3,53	0	2.000.000	0	0,23	Bappelitbang da	
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan DAK Fisik dan Evaluasi RKPD, Evaluasi RENSTRA, Evaluasi RPJMD	10	1.968.478.567	13	321.073.331	2	110.847.000	0	3.000.000	0,00	2,71	0	3.000.000	0	0,15	Bappelitbang da	
	5.01 . 03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah Terhadap Program Prioritas Pusat	95%	15.676.460.485	190	2.479.028.476	85	692.358.000	85	78.831.200	100,00	11,39	85	78.831.200	8947,36842	0,50	Bappelitbang da	
	5.01 . 03 . 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata Rata capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	70%	8862167840	140	1.310.622.976	70	351.060.000	14	32.516.200	20,00	9,26	14	32.516.200	20	0,37	Bappelitbang da	
	5.01 .03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen RAD SDGS	5	858.792.804	5	208.613.100	1	84.642.000	0	10.425.200	0,00	12,32	0	10.425.200	0	1,21	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral PDT Dan Transmigrasi	60	856.065.700	72	205.006.004	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksana Penanggulangan Kemiskinan Daerah(LP2KD)	5	941.759.035	6	246.347.950	1	90.885.000	0	6.294.000	0,00	6,93	0	6.294.000	0	0,67	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen RAN HAM	5	718894403	6	189.902.800	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pelaksana RAD-PG	5	731.610.046	6	219.509.000	1	78.355.000	0	6.859.800	0,00	8,75	0	6.859.800	0	0,94	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Koordinasi Lintas Sektoral Pemerintahan dan Sosial Budaya	60	811.082.701	72	241.244.122	12	97.178.000	3	8.937.200	25,00	9,20	3	8.937.200	5	1,10	Bappelitbang da	
	5.01 . 03 . 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber daya Alam)	Rata Rata Capaian Kinerja Bidang Perekonomian SDA (Sumber daya Alam)	70%	1.438.901.548	140	429.614.400	70	69.175.000	0,00	5.534.000	0,00	8,00	0	5.534.000	0	0,38	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Updating Potensi ekonomi Daerah	5	719.882.879	6	214.765.400	1	69.175.000	0	5.534.000	0,00	8,00	0	5.534.000	0	0,77	Bappelitbang da	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Keoordinasi Lintas Sektorial Kerjasama Dunia Usaha dan Lembaga	60	719.018.669	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata Rata Capaian Kinerja Bidang Insfatraktur Dan Kewilayahan	70%	5.375.391.097	140	738.791.100	70	272.123.000	17,5	40.781.000	25,00	14,99	17,5	40.781.000	25	0,76	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Lintas Sektorial Program air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	60	1.027.066.230	72	262.917.800	12	101.624.000	3	15.072.600	25,00	14,83	3	15.072.600	5	1,47	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Koordinasi Bidang Pembangunan Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	60	877.630.047	72	259.392.900	12	101.421.000	3	19.519.600	25,00	19,25	3	19.519.600	5	2,22	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.03.05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4	400.000.000	0	-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-	0	0,00	Bappelitbang da	
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Keoordinasi Bidang Kewilayahan	60	761.455.947	72	216.480.400	12	69.078.000	3	6.188.800	25,00	8,96	3	6.188.800	5	0,81	Bappelitbang da	
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah																	
	5.02	URUSAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN		100	109.383.162.245	293	175.776.562.263	100	176.787.713.563	3	6.123.229.164	3	3	296	181.899.791.427	59	2	BPKAD	
A	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	90	20.962.141.305	186	12.419.967.732	440	18.014.956.337	11	2.268.384.701	3	13	197	14.688.352.433	219	70	BPKAD	
I	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja	100	67.000.000	13	14.988.950	21	15.500.000	-	-	-	-	13	14.988.950	13	22	BPKAD	
1	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja	5	10.000.000	1	1.934.650	1	2.000.000	-	0	-	-	1	1.934.650	20	19	BPKAD	
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	8	8.000.000	0	1.934.650	2	2.000.000	-	0	-	-	-	1.934.650	-	24	BPKAD	
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	8.000.000	0	1.934.650	2	2.000.000	-	0	-	-	-	1.934.650	-	24	BPKAD	
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	8	8.000.000	0	1.934.650	2	2.000.000	-	0	-	-	-	1.934.650	-	24	BPKAD	
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8	8.000.000	0	1.934.650	2	2.000.000	-	0	-	-	-	1.934.650	-	24	BPKAD	
2	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	60	25.000.000	12	3.381.050	12	3.500.000	-	0	-	-	12	3.381.050	20	14	BPKAD	
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	4	8.000.000	0	1.934.650	1	2.000.000	-	0	-	-	-	1.934.650	-	24	BPKAD	
II	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	10.407.848.167	18	10.407.848.167	100	16.559.588.337	3	2.096.238.701	3	13	21	12.504.086.868	21	120	BPKAD	
3	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji, Tunjangan PNS, Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Iuran Tapera ASN Kabupaten Pesisir Barat	70	10.403.348.517	14	10.403.348.517	14	16.554.588.337	3	2.096.238.701	21	13	17	12.499.587.218	24	120	BPKAD	
4	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	1.932.100	1	1.932.100	1	2.000.000	-	-	-	-	1	1.932.100	20	100	BPKAD	
5	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	1.961.000	2	1.961.000	2	2.000.000	-	-	-	-	2	1.961.000	20	100	BPKAD	
6	5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	606.550	1	606.550	1	1.000.000	-	-	-	-	1	606.550	20	100	BPKAD	
III	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik	100	1.200.000.000	23	399.280.000	100	100.000.000	-	-	-	-	23	399.280.000	23	33	BPKAD	
7	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas	126	1.200.000.000	23	399.280.000	25	100.000.000	-	-	-	-	23	399.280.000	18	33	BPKAD	
IV	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	100	6.138.000.000	48	1.026.668.215	100	808.330.000	4	69.973.000	4	9	52	1.096.641.215	52	18	BPKAD	
9	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	220.000.000	1	24.700.000	1	25.000.000	-	-	-	-	1	24.700.000	20	11	BPKAD	
10	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ATK, Barang Cetakan dan Penggandaan	60	2.500.000.000	12	494.393.200	12	326.796.000	3	27.449.000	25	8	15	521.842.200	25	21	BPKAD	
11	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	50	668.000.000	12	41.800.000	12	68.000.000	-	-	-	-	12	41.800.000	24	6	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
12	5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	1.250.000.000	11	166.150.000	11	188.534.000	1	42.524.000	9	23	12	208.674.000	22	17	BPKAD	
13	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1.500.000.000	12	299.625.015	12	200.000.000	-	-	-	-	12	299.625.015	20	20	BPKAD	
V	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan peralatan dan mesin	100	240.000.000	6	171.693.121	100	121.200.000	-	-	-	-	6	171.693.121	6	72	BPKAD	
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	240.000.000	6	171.693.121	8	121.200.000	-	-	-	-	6	171.693.121	55	72	BPKAD	
VI	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	100	2.074.380.000	65	264.756.550	100	236.230.000	3	76.208.000	3	32	68	340.964.550	68	16	BPKAD	
15	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1.915.000.000	5	198.000.000	7	228.000.000	-	72.000.000	-	32	5	270.000.000	17	14	BPKAD	
16	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	159.380.000	60	66.756.550	12	8.230.000	3	4.208.000	25	51	63	70.964.550	105	45	BPKAD	
VI	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	100	1.074.913.138	19	134.732.729	19	174.108.000	1	25.965.000	5	15	20	160.697.729	20	15	BPKAD	
17	5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	35	696.233.138	7	121.243.729	7	156.258.000	1	25.965.000	14	17	8	147.208.729	23	21	BPKAD	
19	5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	378.680.000	12	13.489.000	12	17.850.000	-	-	-	-	12	13.489.000	20	4	BPKAD	
B	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100	77.405.387.090	103	160.812.566.809	100	157.435.781.226	17	3.684.567.463	17	2	120	164.497.134.272	120	213	BPKAD	
I	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu	100	21.788.585.780	24	2.507.646.132	100	2.028.305.000	17	348.564.600	17	17	41	2.856.210.732	41	13	BPKAD	
20	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	10	2.456.983.671	2	287.800.689	2	214.640.000	-	58.175.000	-	27	2	345.975.689	20	14	BPKAD	
21	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	10	2.532.922.000	2	300.690.800	2	214.640.000	-	-	-	-	2	300.690.800	20	12	BPKAD	
22	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	552.150.300	1	42.321.100	1	43.110.000	-	-	-	-	1	42.321.100	20	8	BPKAD	
23	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	552.150.300	1	42.835.500	1	43.110.000	-	-	-	-	1	42.835.500	20	8	BPKAD	
24	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	1.084.959.009	1	42.959.400	1	43.195.000	1	39.355.000	100	91	2	82.314.400	40	8	BPKAD	
25	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPPA SKPD Kabupaten Pesisir Barat	5	1.116.925.000	1	42.372.300	1	43.195.000	-	-	-	-	1	42.372.300	20	4	BPKAD	
26	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen APBD Kabupaten Pesisir Barat	10	5.250.090.000	2	687.627.400	2	591.430.000	1	239.705.000	50	41	3	927.332.400	30	18	BPKAD	
27	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Barat	10	5.250.840.000	2	721.285.300	2	591.480.000	-	-	-	-	2	721.285.300	20	14	BPKAD	
28	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi Bidang Anggaran	10	2.991.565.500	12	339.753.643	2	243.505.000	-	11.329.600	-	5	12	351.083.243	120	12	BPKAD	
II	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100%	5.844.110.600	60	1.831.819.965	100	1.389.771.750	14	199.771.474	14	14	74	2.031.591.439	7.437	35	BPKAD	
29	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi Kasda, Rekap Dokumen SP2D dan Daftar Gaji Pemerintah Daerah	180	1.749.125.000	36	656.932.596	36	467.023.000	3	113.132.724	8	24	39	770.065.320	22	44	BPKAD	
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	8	290.110.000	0	126.261.550	2	72.527.500	-	9.278.750	-	13	-	135.540.300	-	47	BPKAD	
30	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Laporan Sinkronisasi Pendapatan Daerah	60	1.829.545.600	12	311.547.689	12	367.685.000	3	37.590.000	25	10	15	349.137.689	25	19	BPKAD	
31	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Laporan Konsinyering dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan	60	1.975.330.000	12	351.837.500	12	393.325.000	3	34.200.000	25	9	15	386.037.500	25	20	BPKAD	
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	280	356.845.000	0	385.240.630	70	89.211.250	-	5.570.000	-	6	-	390.810.630	-	110	BPKAD	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6*8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
III	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan tata kelola keuangan daerah sesuai aturan (Persen)	100	4.684.237.600	6	695.823.737	100	348.024.000	8	26.240.630	8	8	14	722.064.367	14	15	BPKAD	
32	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi APBD Per Semester	10	362.455.000	2	189.768.064	2	125.635.000	-	26.240.630	-	21	2	216.008.694	20	60	BPKAD	
33	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5	2.990.422.000	1	319.315.710	1	119.933.000	-	-	-	-	1	319.315.710	20	11	BPKAD	
34	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	10	1.180.175.000	2	186.739.963	2	102.456.000	2	-	100	-	4	186.739.963	40	16	BPKAD	
35	5.02.02.2.03.09	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	151.185.600	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	25	-	BPKAD	
IV	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah	100	45.088.453.110	13	155.603.149.925	100	153.533.705.476	2	3.109.990.759	2	2	15	158.713.140.684	15	352	BPKAD	
38	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Belanja Tak Terduga	60	33.500.000.000	12	355.000.000	12	9.000.000.000	-	-	-	-	12	355.000.000	20	1	BPKAD	
39	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Pesisir Barat	5	11.588.453.110	1	155.248.149.925	1	144.533.705.476	-	3.109.990.759	-	2	1	158.358.140.684	20	1.367	BPKAD	
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Cakupan penggunaan SIPD dalam keuangan daerah	100	543.900.000	0	174.127.050	100	135.975.000	-	-	-	-	-	174.127.050	-	32	BPKAD	
	5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	280	543.900.000	0	174.127.050	78	135.975.000	-	-	-	-	-	174.127.050	-	32	BPKAD	
C	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan tata kelola barang milik daerah sesuai aturan (Persen)	100	11.015.633.850	4	2.544.027.722	100	1.336.976.000	-	170.277.000	-	13	4	2.714.304.722	4	25	BPKAD	
I	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pencatatan aset daerah	100	11.015.633.850	4	2.544.027.722	100	1.336.976.000	-	170.277.000	-	13	4	2.714.304.722	4	25	BPKAD	
40	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021	5	3.171.618.800	1	220.773.587	1	193.581.000	-	8.195.000	-	4	1	228.968.587	20	7	BPKAD	
41	5.02.03.2.01.05	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat	5	320.087.200	1	733.604.651	1	351.033.800	-	54.716.000	-	-	1	788.320.651	20	246	BPKAD	
42	5.02.03.2.01.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen LBMD Pemerintah Daerah dan LBMD SKPD	10	4.068.690.000	2	219.599.922	2	166.258.000	-	13.330.000	-	8	2	232.929.922	20	6	BPKAD	
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	2.854.733.850	1	950.825.050	1	475.977.200	-	61.450.000	-	13	1	1.012.275.050	20	35	BPKAD	
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	600.504.000	0	419224512	1	150.126.000	-	32.586.000	-	22	-	451.810.512	-	75	BPKAD	
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	4.445.448.000	1	629.940.000	1	953.877.000	1	950.825.050	100	100	2	1.580.765.050	40	36	BPKAD	
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4	1.810.104.000	0	355679738	1	452.526.000	1	419.224.512	100	93	1	774.904.250	25	43	BPKAD	
Badan Pendapatan Daerah																			
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	19.956.686.371	88	13.027.341.515	90	4.447.407.100	23,26	557.071.145	26%	13%	23,26	13.584.412.660	26	68%	BAPENDA	
2		Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	74.777.320	90	38.701.260	90	12.400.000	45,00	5.020.800	50%	40%	45	43.722.060	50	58%	BAPENDA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKP s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKP s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja	10	38.516.600	2	22.806.570	2	7.400.000	1	3.324.000	50%	45%	1	26.130.570	0	68%	BAPENDA	
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisat Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	36.260.720	2	15.894.690	2	5.000.000	1	1.696.800	50%	34%	1	17.591.490	0	49%	BAPENDA	
5		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90%	13.029.251.080	90	4.931.360.216	90	2.272.907.100	20,00	359.246.095	22%	16%	20,00	5.290.606.311	22	41%	BAPENDA	
6		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan PNS	60	12.947.010.280	14	4.912.963.906	14	2.267.407.100	4	359.246.095	29%	16%	4	5.272.210.001	0	41%	BAPENDA	
7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	5	13.141.000	1	7.756.400	1	2.500.000	0	0	0%	0%	-	7.756.400	-	59%	BAPENDA	
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	10	12.181.000	2	6.872.400	2	2.000.000	0	0	0%	0%	-	6.872.400	-	56%	BAPENDA	
9		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	56.918.800	1	3.767.510	1	1.000.000	0	0	0%	0%	-	3.767.510	-	7%	BAPENDA	
10		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	495.000.000	90	125.000.000	90	100.000.000	0,00	-	0%	0%	-	125.000.000	-	25%	BAPENDA	
11		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	60	495.000.000	15	317.000.000	10	100.000.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
12		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	2.104.918.200	90	1.404.032.916	90	393.192.200	20,20	60.382.500	22%	15%	20,20	60.382.500	22	3%	BAPENDA	
13		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	38.100.000	12	7.620.000	0	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
14		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kegiatan Propaganda/Pameran	5	181.000.000	3	72.900.000	1	25.000.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
15		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	411.818.200	12	310.095.140	12	85.088.200	3	34.275.300	25%	40%	3	34.275.300	0	8%	BAPENDA	
16		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	100.000.000	10	34.980.000	12	12.000.000	3	2.000.000	25%	17%	3	2.000.000	0	2%	BAPENDA	
17		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	164.000.000	11	64.448.000	12	21.104.000	2	3.800.000	17%	18%	2	3.800.000	0	2%	BAPENDA	
18		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	1.210.000.000	12	913.989.776	12	250.000.000	3	20.307.200	25%	8%	3	20.307.200	0	2%	BAPENDA	
19		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	40	1.237.431.539	26	396.790.000	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	0%	BAPENDA	
20		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap	40	1.237.431.539	26	396.790.000	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	0%	BAPENDA	
21		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	1.611.420.000	84	656.406.682	90	182.540.000	22,50	50.100.000	25%	27%	22,50	50.100.000	25	3%	BAPENDA	
22		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	214.820.000	10	24.040.682	0	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
23		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1.342.500.000	6	617.500.000	12	180.000.000	3	49.000.000	25%	27%	3	49.000.000	0	4%	BAPENDA	
24		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	54.100.000	12	14.866.000	12	2.540.000	3	1.100.000	25%	43%	3	1.100.000	0	2%	BAPENDA	
25		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah	90%	1.403.888.232	83	485.138.780	90	139.650.000	47,65	16.500.000	53%	12%	47,65	16.500.000	53	1%	BAPENDA	
26		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	15	854.660.782	3	340.993.290	7	124.650.000	4	16.500.000	57%	13%	4	16.500.000	0	2%	BAPENDA	
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan Kantor	60	10.727.450	12	2.145.490	0	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
28		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	351.000.000	10	10.500.000	0	-	0	0	#DIV/0!	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
29		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60	150.000.000	12	15.000.000	0	-	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
30		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	60	37.500.000	12	116.500.000	10	15.000.000	5	0	50%	0%	5	15.000.000	0	40%	BAPENDA	
31		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	90%	7.285.650.960	83	4.989.911.661	90	1.346.717.800	7,50	65.821.750	8%	5%	7,50	65.821.750	8	1%	BAPENDA	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
32		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pendapatan TA selanjutnya, Terlaksananya Penyusunan Anggaran Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran Berjalan	90%	7.285.650.960	83	4.989.911.661	90	1.346.717.800	7,50	65.821.750	8%	5%	7,50	65.821.750	8	1%	BAPENDA	
33		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah	10	907.882.440	1	30.651.600	0	-	0	-	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
34		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	0%	-	0	400.283.156	0	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	0%	BAPENDA	
34		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0%	-	0	498.282.422	1	97.454.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
35		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen	5	894.590.000	1	913.830.696	1	108.430.000	0	17.302.250	0%	16%	-	17.302.250	-	2%	BAPENDA	
36		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Cakupan Pengelolaan Pajak Daerah	55	4.443.108.000	9	1.699.914.196	9	188.000.000	0	0	0%	0%	-	-	-	0%	BAPENDA	
37		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daerah	60	1.027.658.960	12	506.694.750	12	158.455.900	1	18.464.000	8%	12%	6	18.464.000	0	2%	BAPENDA	
38		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan	1	140.090.000	1	572.386.391	1	142.462.500	0	19.977.000	0%	14%	-	19.977.000	-	14%	BAPENDA	
39		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	60	780.204.000	12	367.868.450	12	651.915.400	2	10.078.500	17%	2%	2	10.078.500	0	1%	BAPENDA	
1		Kepegawaian																	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah	95,00	12.730.162.338	90,00	16.492.055.124	90,00	2.448.897.000	16,19	432.926.390	16,19	17,68	16,19	432.926.390	16,19	3,40		
	5.03 . 01 . 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95,00	47.000.000	90,00	81.776.200	90,00	14.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5.03 . 01 . 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	22.000.000	40	36.877.600	2	7.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	8	7.000.000	-	1.500.000	2	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	8	7.000.000	-	499.950	2	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	25.000.000	32	44.898.600	4	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	95,00	9.176.561.900	90,00	12.188.262.718	90,00	2.096.608.000	14,81	398.435.809	14,81	19,00	14,81	398.435.809	14,81	4,34		
	5.03 . 01 . 2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	9.137.416.400	98	12.134.224.418	14	2.091.108.000	4	398.435.809	28,57	19,05	4	398.435.809	5,71	4,36	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	16.423.000	8	22.438.500	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10	13.602.500	16	17.958.100	12	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.02	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10	9.120.000	10	13.641.700	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95,00	1.974.977.370	90,00	2.719.993.027	90,00	160.469.000	21,74	18.707.700	21,74	11,66	21,74	18.707.700	21,74	0,95		
	5.03 . 01 . 2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	125.000.000	6	150.247.000	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	293.560.070	85	406.379.100	12	40.469.000	3	8.731.700	25,00	21,58	3	8.731.700	5,00	2,97	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60	79.261.200	94	105.600.000	10	12.000.000	2	3.000.000	20,00	25,00	2	3.000.000	3,33	3,78	BKPSDM	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.03 . 01 . 2.06	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	55	67.156.100	89	94.400.000	11	11.000.000	2	2.000.000	18,18	18,18	2	2.000.000	3,64	2,98	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	1.410.000.000	96	1.963.366.927	12	72.000.000	3	4.976.000	25,00	6,91	3	4.976.000	5,00	0,35	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa	95,00	1.080.602.700	90,00	1.145.500.000	90,00	132.000.000	25,00	15.000.000	25,00	11,36	25,00	15.000.000	25,00	1,39		
	5.03 . 01 . 2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	1.080.602.700	85	1.145.500.000	12	132.000.000	3	15.000.000	25,00	11,36	3	15.000.000	5,00	1,39	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	95,00	451.020.368	90,00	356.523.179	90,00	45.420.000	-	782.881	-	1,72	-	782.881	-	0,17		
	5.03 . 01 . 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	336.391.010	8	322.735.179	1	36.900.000	-	782.881	-	2,12	-	782.881	-	0,23	BKPSDM	
	5.03 . 01 . 2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	114.629.358	2	33.788.000	12	8.520.000	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	5.03 . 02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Manajemen Kepegawaian Daerah	13.376	12.595.706.700	18.821	7.416.622.974	1.019	1.177.025.000	687	67.910.400	67,42	5,77	687	67.910.400	5,14	0,54	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tercapainya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	7.511	7.957.872.600	9.319	4.227.948.466	9	583.818.600	-	39.379.000	-	6,75	-	39.379.000	-	0,49	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	6.681	6.176.707.800	8.034	2.903.345.467	2	431.835.700	-	26.569.000	-	6,15	-	26.569.000	-	0,43		
	5.03 . 02 . 2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	260	296.986.000	412	332.764.092	2	23.823.900	-	2.918.500	-	12,25	-	2.918.500	-	0,98		
	5.03 . 02 . 2.01.08	Facilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	60	363.392.000	49	205.374.531	1	42.211.000	-	2.531.000	-	6,00	-	2.531.000	-	0,70	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10	431.774.000	21	539.497.949	2	71.759.000	-	5.241.000	-	7,30	-	5.241.000	-	1,21	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	500	689.012.800	803	246.966.427	2	14.189.000	-	2.119.500	-	14,94	-	2.119.500	-	0,31	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya Mutasi dan Promosi ASN	30	2.266.740.000	30	830.223.040	3	424.814.000	-	7.881.400	-	1,86	-	7.881.400	-	0,35	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	30	2.266.740.000	30	830.223.040	3	424.814.000	-	7.881.400	-	1,86	-	7.881.400	-	0,35	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.835	2.371.094.100	9.472	2.358.451.468	1.007	168.392.400	687	20.650.000	68,22	12,26	687	20.650.000	11,77	0,87		
	5.03 . 02 . 2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	60	499.393.000	55	550.975.598	2	40.785.000	-	2.262.000	-	5,55	-	2.262.000	-	0,45	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Bagi Pegawai	5.750	1.446.611.000	9.378	1.612.611.365	1000	95.825.400	687	13.695.000	68,70	14,29	687	13.695.000	11,95	0,95	BKPSDM	
	5.03 . 02 . 2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25	425.090.100	39	194.864.505	5	31.782.000	-	4.693.000	-	14,77	-	4.693.000	-	1,10		
	5.04	Pendidikan dan Pelatihan																BKPSDM	
3	5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia	797	10.005.573.686	57	553.402.162	2	208.982.000	-	66.981.000	-	32,05	-	66.981.000	-	0,67	BKPSDM	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tercapainya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	797	10.005.573.686	57	553.402.162	2	208.982.000	-	66.981.000	-	32,05	-	66.981.000	-	0,67	BKPSDM	
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	797	10.005.573.686	57	553.402.162	2	208.982.000	-	66.981.000	-	32,05	-	66.981.000	-	0,67		
	5.05	Penelitian dan Pengembangan																	
	5.05 . 02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan inovasi Yang Ditetapkan Di Daerah	90	9.619.513.713	90	#REF!	90	#REF!	90%	#REF!	100,0%	#REF!	40,2	3.810.984.215	44,6666667	39,62	Bappelitbang da	
	5.05 . 02 . 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pengkajian Peraturan	80	4.717.513.713	80	2.569.217.534	80	346.000.000	0	36.365.600	100,00	96,76	80	2.423.382.900	100	51,37	Bappelitbang da	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	5	839.513.713	2	338.002.134	1	90.613.000	0	10.468.800	0,00	11,55	0	10.468.800	0	1,25	Bappelitbang da	
	5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	5	480.000.000	1	239.884.500	1	84.814.000	0	10.208.000	0,00	12,04	0	10.208.000	0	2,13	Bappelitbang da	
	5.05.02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	6	2.874.000.000	4	1.857.766.700	1	84.682.000	0	10.894.800	0,00	12,87	0	10.894.800	0	0,38	Bappelitbang da	
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	4	524.000.000	1	133.564.200	1	85.891.000	0	4.794.000	0,00	5,58	0	4.794.000	0	0,91	Bappelitbang da	
	5.05 . 02 . 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang di Fasilitasi Dalam Penerapan SIDA	100%	2.488.000.000	100,4	426.954.065	100	329.000.000	0	4.448.000	0,00	1,35	0	4.448.000	0	0,18	Bappelitbang da	
	5.05.02.2.02.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	4	863.000.000	2	426.954.065	1	329.000.000	0	4.448.000	0,00	1,35	0	4.448.000	0	0,52	Bappelitbang da	
	6.01	Bidang Urusan Inspektorat		100	-	62,50%	16.943.612.750	100	-	14%	#REF!	14%	#REF!	#VALUE!	#REF!	#VALUE!	#REF!		
	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92,5	31.369.633.625	63%	11.881.676.448	100	5.980.999.800	10%	1.202.033.083	10%	20%	#VALUE!	13.083.709.531	#VALUE!	42%		
	6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran. Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	37.510.956	60%	25.381.000	100	6.716.000	0	-	0	0%	225%	25.381.000	225%	68%		
	6.01.01.2.01	Sub Keg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	9.305.956	3	10.389.000	1	1.716.000	0	-	0%	0%	3	10.389.000	150%	112%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	28.205.000	3	14.992.000	1	5.000.000	0	-	0%	0%	3	14.992.000	300%	53%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	23.724.213.549	60%	8.681.643.579	100	4.778.667.300	7%	1.038.104.535	7%	22%	61%	9.719.748.114	61%	41%		
	6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji da Tunjangan ASN	70	23.693.560.355	42	8.665.446.129	14	4.773.167.300	4	1.038.104.535	29%	22%	46	9.703.550.664	66%	41%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	14.102.500	3	7.485.200	1	2.500.000	0	-	0%	0%	3	7.485.200	60%	53%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	10	10.909.694	6	5.863.250	2	2.000.000	0	-	0%	0%	6	5.863.250	60%	54%	Inspektorat	
	6.01.01.2.02.08	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	5.641.000	3	2.849.000	1	1.000.000	0	-	0%	0%	3	2.849.000	60%	51%	Inspektorat	
	6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	968.200.000	43%	177.136.938	100	100.000.000	0%	-	0	0%	#VALUE!	177.136.938	#VALUE!	18%		
	6.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60	968.200.000	36	148.624.000	12	100.000.000	0	-	0%	0%	36	148.624.000	60%	15%	Inspektorat	
	6.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	148.512.000	1	28.512.938	0	-	-	-	0%	0%	#VALUE!	28.512.938	#VALUE!	19%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	100%	2.450.206.661	60%	1.279.702.947	100	476.446.500	24%	46.796.548	24%	10%	65%	1.326.499.495	65%	54%		
	6.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik	60	31.583.959	36	10.306.000	12	5.599.000	3	1.059.000	25%	19%	39	11.365.000	65%	36%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi Perkantoran	60	618.218.009	36	342.481.300	12	122.347.500	3	26.528.500	25%	22%	39	369.009.800	65%	60%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6*8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhihnya Langganan 10 Buah Surat Kabar	60	67.692.000	36	36.000.000	12	12.000.000	3	3.000.000	25%	25%	39	39.000.000	65%	58%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum tamu	55	124.102.000	33	66.000.000	11	22.000.000	2	2.000.000	18%	9%	35	68.000.000	64%	55%	Inspektorat	
	6.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah	60	1.608.610.693	36	824.915.647	12	314.500.000	3	14.209.048	25%	5%	39	839.124.695	65%	52%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	741.450.167	81%	405.301.500	100	190.830.000	0%	-	0%	0%	81%	405.301.500	81%	55%		
	6.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya barang penunjang urusan perkantoran	18	147.600.000	6	24.800.000	0	5.430.000	0	-	0%	0%	6	24.800.000	33%	17%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sarana Komputer/laptop/notebook, printer dan proyektor	90	565.000.167	98	351.651.500	44	185.400.000	0	-	0%	0%	98	351.651.500	109%	62%	Inspektorat	
	6.01.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Secara Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	12	28.850.000	12	28.850.000	0	-	0	-	0%	0%	12	28.850.000	100%	100%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.708.629.142	68%	896.026.100	100	285.040.000	25%	102.698.000	25%	36%	71%	998.724.100	71%	58%		
	6.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhihnya Kebutuhan Belanja Jasa Telpon/internet, Sumber Daya Air dan Listrik	12	16.800.000	10	14.768.100	0	-	0	-	0%	0%	10	14.768.100	83%	88%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kantor/ Rumah Dinas dan Tersedianya Kendaraan Dinas Oprasional	60	1.644.095.000	36	806.500.000	12	255.000.000	3	97.500.000	25%	38%	39	904.000.000	65%	55%	Inspektorat	
	6.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	60	47.734.142	36	74.758.000	12	30.040.000	3	5.198.000	25%	17%	39	79.956.000	65%	168%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	1.739.423.150	68%	416.484.384	100	143.300.000	17%	14.434.000	17%	10%	70%	430.918.384	70%	25%		
	6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpelihara Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan terbayarnya pajak kendaraan	60	224.511.800	36	133.165.000	12	39.800.000	0	-	0%	0%	36	133.165.000	60%	59%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan dan terbayarnya kendaraan dinas milik daerah di inspektorat	60	1.422.428.500	36	248.319.384	12	96.400.000	3	3.434.000	25%	4%	39	251.753.384	65%	18%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya secara rutin peralatan dan mesin	48	87.482.850	24	30.000.000	12	7.100.000	3	11.000.000	25%	155%	27	41.000.000	56%	47%	Inspektorat	
	6.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya Secara Rutin/ Berkala Gedung Kantor	12	5.000.000	12	5.000.000	0	-	0	-	0%	0%	12	5.000.000	100%	100%	Inspektorat	
	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundangundangan	100	8.720.033.728	50%	3.574.239.977	100	1.274.112.000	20%	143.598.800	20%	11%	53%	3.717.838.777	53%	43%		
	6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Internal	100	6.892.284.283	52%	2.670.922.227	100	870.162.000	21%	100.377.700	21%	12%	56%	2.771.299.927	56%	40%		
	6.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan hasil pengawasan kinerja (internal berkala 70 LHP dan Evaluasi LPPD 1 Laporan hasil)	355	723.121.934	167	420.485.850	31	170.000.000	3	12.655.700	10%	7%	170	433.141.550	48%	60%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	tersusunnya laporan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Kas opname 60 LHP dan Monev dana BOS 30 LHP)	420	720.898.895	260	444.458.300	118	145.960.000	45	54.885.400	38%	38%	305	499.343.700	73%	69%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	tersusunnya laporan hasil reviu laporan kinerja	20	312.360.559	8	168.192.600	3	53.960.000	1	2.710.000	33%	5%	9	170.902.600	45%	55%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	tersusunnya laporan hasil reviu keuangan (Reviu LKPD 1 Laporan dan reviu penyerapan PBJ 4 laporan)	40	469.584.253	18	267.907.400	12	84.100.000	5	-	42%	0%	23	267.907.400	58%	57%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.05	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	tersusunannya laporan hasil pengawasan dana desa/pekon	580	852.874.927	272	441.998.949	42	139.932.000	0	-	0%	0%	272	441.998.949	47%	52%	Inspektorat	
	6.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	terjalinnnya kerjasama pengawasan dengan pihak APH dalam rangka pencegahan dan pembrantasan praktik pungutan liar	60	2.337.785.011	36	264.479.850	12	69.710.000	0	-	0%	0%	36	264.479.850	60%	11%	Inspektorat	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6.01.02.2.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut	60	1.475.658.704	36	663.399.278	12	206.500.000	3	30.126.600	25%	15%	39	693.525.878	65%	47%	Inspektorat	
	6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100	1.827.749.445	48%	903.317.750	100	403.950.000	19%	43.221.100	19%	11%	50%	946.538.850	50%	52%		
	6.01.02.2.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	60	402.282.995	36	313.596.050	4	148.800.000	1	8.600.000	25%	6%	37	322.196.050	62%	80%	Inspektorat	
	6.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	tersusunnya laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (penanganan kasus pengaduan masyarakat)	135	1.425.466.450	49	589.721.700	25	255.150.000	3	34.621.100	12%	14%	52	624.342.800	39%	44%	Inspektorat	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Peraturan perundang-undangan	100	2.578.851.896	75%	1.487.696.325	100	#REF!	13%	#REF!	13%	#REF!	78%	#REF!	78%	#REF!		
	6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasann yang Disusun	100	293.707.580	58%	181.986.929	100	123.737.000	0%	4.932.200	0%	4%	60%	186.919.129	60%	64%		
	6.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	60	293.707.580	24	109.063.657	12	74.580.000	3	4.932.200	25%	0%	27	113.995.857	45%	39%	Inspektorat	
	6.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	terlaksananya perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan	48	162.435.000	36	72.923.272	12	49.157.000	0	-	0%	0%	36	72.923.272	75%	45%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi	100	2.285.144.316	93%	1.305.709.396	100	#REF!	25%	#REF!	25%	#REF!	97%	#REF!	97%	#REF!		
	6.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	60	1.643.972.516	36	787.124.696	12	190.480.000	3	6.000.000	25%	3%	39	793.124.696	65%	48%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	terlaksananya kegiatan pendampingan, asistensi, dan verifikasi, serta penilaian reformasi birokrasi	12	331.000.000	24	157.459.900	12	41.257.000	0	-	0%	0%	24	157.459.900	200%	48%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	60	310.171.800	36	413.944.800	12	121.024.000	3	14.950.000	25%	12%	39	428.894.800	65%	138%	Inspektorat	
	6.01.03.2.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	48	216.224.190	24	72.390.400	12	41.557.500	3	5.500.000	25%	13%	27	77.890.400	56%	36%	Inspektorat	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5.504.306.760		477.876.531									
1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	95%	14.023.279.669	64%	5.615.835.979	90%	2.622.120.100	12%	477.876.531	14%	18%	47%	6.002.616.510	49%	43%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	95%	23.936.042	60%	17.222.900	90%	12.400.000	0%	0	0%	0%	50%	17.222.900	53%	72%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10	12.274.042	6	10.149.950	2	7.400.000	0		0%	0%	6	10.149.950	60%	83%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	10	11.662.000	6	7.072.950	2	5.000.000	0		0%	0%	6	7.072.950	60%	61%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	95%	7.868.833.516	60%	3.191.011.875	90%	1.727.120.100	22%	347.876.585	25%	20%	49%	3.538.888.460	51%	45%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS	70	7.839.733.516	42	3.181.266.225	14	1.722.120.100	4	347.876.585	29%	20%	46	3.529.142.810	66%	45%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	5	12.800.000	3	3.872.600	1	2.000.000	0		0%	0%	3	3.872.600	60%	30%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	10	10.300.000	6	3.865.450	2	2.000.000	0		0%	0%	6	3.865.450	60%	38%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	6.000.000	3	2.007.600	1	1.000.000	0		0%	0%	3	2.007.600	60%	33%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	95%	2.005.673.663	62%	744.022.710	90%	344.920.000	8%	52.038.595	9%	15%	47%	796.061.305	50%	40%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	60	58.792.000	36	6.489.000	12	5.295.000	0		0%	0%	36	6.489.000	60%	11%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Aktivitas	5	283.560.000	3	80.950.000	1	72.700.000	0		0%	0%	3	80.950.000	60%	29%	BANKESBAN GPOL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK	60	436.297.100	36	102.378.980	12	40.925.000	1	3.942.050	8%	10%	37	106.321.030	62%	24%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKHU	60	120.000.000	36	72.000.000	12	44.000.000	0		0%	0%	36	72.000.000	60%	60%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman	55	275.000.000	33	66.000.000	11	22.000.000	0		0%	0%	33	66.000.000	60%	24%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi di luar kantor	60	832.024.563	36	416.204.730	12	160.000.000	3	48.096.545	25%	30%	39	464.301.275	65%	56%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	95%	99.500.000	83%	91.096.000	90%	0	0%	0	0%	0%	33%	91.096.000	35%	92%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin	18	99.500.000	15	91.096.000	0	0	0	0	0%	0%	15	91.096.000	83%	92%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung	95%	3.106.413.543	60%	1.293.883.919	90%	440.180.000	17%	57.961.351	19%	13%	51%	1.351.845.270	53%	44%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Tagihan	60	1.718.376.000	36	640.267.919	12	208.800.000	3	3.961.351	25%	2%	39	644.229.270	65%	37%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas	30	1.310.540.000	18	645.000.000	6	224.000.000	2	54.000.000	33%	24%	20	699.000.000	67%	53%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan	60	77.497.543	36	8.616.000	12	7.380.000	0		0%	0%	36	8.616.000	60%	11%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik	95%	1.018.422.905	60%	278.598.575	90%	97.500.000	27%	20.000.000	30%	21%	49%	298.598.575	52%	29%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	15	498.459.750	9	213.748.575	3	78.500.000	1	18.000.000	33%	23%	10	231.748.575	67%	46%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor	60	519.963.155	36	64.850.000	12	19.000.000	3	2.000.000	25%	11%	39	66.850.000	65%	13%	BANKESBAN GPOL	
2	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER BANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat	53%	1.900.009.468	50%	858.237.256	46%	800.000.000	0	0	0%	0%	42%	858.237.256	79%	45%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan pemantapan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	53%	1.900.009.468	50%	858.237.256	46%	800.000.000	0%	0	0%	0%	42%	858.237.256	79%	45%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	jumlah rakor	12	500.009.468	6	858.237.256	2	100.000.000	0		0%	0%	6	858.237.256	50%	172%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.02.2.02.08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	72	1.400.000.000	0	0	36	700.000.000	0		0%	0%	0	0	0%	0%	BANKESBAN GPOL	
3	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Kabupaten Pesisir Barat	84,92%	34.700.771.342	52%	1.534.670.930	84,92%	482.186.660	0%	0	0%	0%	35%	1.534.670.930	42%	4%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik	84,92%	34.700.771.342	52%	1.534.670.930	84,92%	482.186.660	0%	0	0%	0%	35%	1.534.670.930	42%	4%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	jumlah Partai politik yang mendapat kursi di pemilihan legislatif tahun 2019	45	33.534.227.768	27	1.017.094.562	9	382.186.660	0		0%	0%	27	1.017.094.562	60%	3%	BANKESBAN GPOL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6+8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah fasilitasi kegiatan	7	442.404.549	3	401.876.650	2	100.000.000	0		0%	0%	3	401.876.650	43%	91%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	jumlah laporan	10	724.139.025	2	115.699.718	0	0	0	0	0%	0%	2	115.699.718	20%	16%	BANKESBAN GPOL	
4	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	persentase organisasi masyarakat yang aktif di Kabupaten Pesisir Barat	77,5%	6.562.559.479	37%	32.293.083.502	75%	1.250.000.000	0%	0	0%	0%	27%	32.293.083.502	35%	492%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	77,5%	6.562.559.479	37%	32.293.083.502	75%	1.250.000.000	0%	0	0%	0%	27%	32.293.083.502	35%	492%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah organisasi masyarakat yang mendapatkan hibah tahun 2022	105	6.165.970.743	38	32.220.000.000	5	1.150.000.000	0		0%	0%	38	32.220.000.000	36%	523%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	jumlah rakor	10	396.588.736	4	73.083.502	2	100.000.000	0	0	0%	0%	4	73.083.502	40%	18%	BANKESBAN GPOL	
5	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	74,86%	365.066.280	27%	118.990.000	74,2%	100.000.000	0%	0	0%	0%	20%	159.286.200	27%	44%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan pelaksanaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	74,86%	365.066.280	27%	118.990.000	74,2%	100.000.000	0%	0	0%	0%	20%	159.286.200	27%	44%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah kegiatan	5	365.066.280	3	118.990.000	2	100.000.000	0		0%	0%	3	118.990.000	60%	33%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah rakor	10	365.066.280	1	40.296.200	0	0	0	0	0%	0%	1	40.296.200	10%	11%	BANKESBAN GPOL	
6	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase koordinasi dan peran lembaga dan elemen masyarakat dalam pencegahan terjadinya konflik sosial di Kabupaten Pesisir Barat	74,86%	946.432.754	52%	360.711.049	74,2%	250.000.000	0%	0	0%	0%	40%	454.047.299	53%	48%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase koordinasi, pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	74,86%	946.432.754	52%	360.711.049	74,2%	250.000.000	0%	0	0%	0%	40%	454.047.299	53%	48%	BANKESBAN GPOL	

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9= 8/7*100%)		(10= 6*8)		(11=10/5*100%)		(12)	(13)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kegiatan	5	298.109.862	3	93.336.250	2	100.000.000	0		0%	0%	3	93.336.250	60%	31%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah rakor	10	527.441.400	6	272.331.449	2	150.000.000	0	-	0%	0%	6	272.331.449	60%	52%	BANKESBAN GPOL	
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah laporan	10	418.991.354	4	88.379.600	0	0	0	0	0%	0%	4	88.379.600	40%	21%	BANKESBAN GPOL	

2.2. Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan pembangunan pada hampir seluruh aspek kehidupan bermasyarakat sesuai dengan kewenangan daerah dengan target dan capaian yang secara umum mengarah kepada perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. Walaupun secara umum Kabupaten Pesisir Barat masih perlu melakukan akselerasi perbaikan kinerja pada seluruh sektor pembangunan. Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025 dengan tetap mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 11 Februari 2025 nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- 1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- 2) rogram Makan Bergizi Gratis (MBG);
- 3) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- 4) Pengendalian Inflasi di daerah;
- 5) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- 6) Dukungan swasembada pangan; dan
- 7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan demikian makan permasalahan pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025 diperlukan harmonisasi agar permasalahan dan isu pembangunan nasional selarasa dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Pesisir Barat. Dimana permasalahan dan isu pembangunan nasional dengan Kabupaten Pesisir Barat tidak jauh berbeda sehingga Kabupaten Pesisir Barat dapat terintegrasi dan memberikan dukungan terhadap pembangunan nasional.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi :

- 1) Sektor Kesehatan, dimana angka harapan hidup Kabupaten Pesisir Barat tercatat di angka 73,93 tahun atau peringkat ke-14 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan seperti Fasilitas kesehatan yang kurang memadai: Kabupaten Pesisir Barat mungkin memiliki jumlah rumah sakit, puskesmas, atau tenaga medis yang terbatas dibandingkan kabupaten lain. Kemudian Jarak tempuh yang jauh: Beberapa wilayah di Pesisir Barat bersifat terpencil, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan cepat.
- 2) Sektor Pendidikan, dimana harapan lama sekolah Kabupaten Pesisir Barat tercatat di angka 12,16 tahun atau peringkat 14 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Akses ke Fasilitas Pendidikan yang Terbatas yang meliputi Sekolah dan tenaga pendidik berkualitas yang tidak merata, banyak sekolah (terutama di daerah pesisir/pedalaman) kekurangan ruang kelas, guru, atau fasilitas dasar seperti perpustakaan/lab. Kemudian transportasi Sulit: Wilayah geografis Pesisir Barat yang terdiri dari pantai, pegunungan, dan desa terisolasi menyulitkan anak-anak untuk bersekolah secara rutin. Selain itu persepsi tentang pentingnya pendidikan beberapa komunitas, terutama di daerah nelayan atau

- petani tradisional, pendidikan formal dianggap kurang penting dibandingkan bekerja membantu keluarga.
- 3) Sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat mengalami penurunan cukup signifikan dimana tahun 2023 tercatat di angka 3,42% turun 23,68% menjadi 2,61% di tahun 2024. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat tercatat paling rendah dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan sektor unggulan sebesar 29,86 milyar rupiah dari 1.404,17 di tahun 2023 menjadi 1.374,78 milyar rupiah, selain itu sektor industri pengolahan juga mengalami penurunan 7,47 milyar rupiah dari 128,09 milyar rupiah di tahun 2023 menjadi 120,62 milyar rupiah di tahun 2024. Sementara sektor unggulan pariwisata belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat. Peningkatan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum memberikan tambahan kontribusi 4,61 milyar rupiah dari tahun 2023 yang tercatat di angka 70,96 milyar rupiah menjadi 75,57 milyar rupiah. Hal ini menjadi catatan Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2025 dengan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, pengembangan pariwisata, dukungan terhadap pelaku UMKM dan infrastruktur daerah khususnya infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan investasi. Iklim investasi akan mendorong investor untuk menempatkan investasinya di Kabupaten Pesisir Barat, hal ini diharapkan mampu mewujudkan investasi yang efektif dan efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
 - 4) Pelayanan publik, Kementerian PANRB memuliskan bahwa indeks pelayanan public Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 tercatat di angka 2,92 dengan predikat cukup, predikat ini menunjukkan bahwa Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, unit belum memperhatikan pengembangan kapasitas SDM, sarana prasarana belum memadai, media SIPP, konsultasi dan pengaduan serta inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan. Hal ini menjadi catatan bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong pelayanan public berkualitas dan berintegritas dengan digitalisasi pelayanan public, pengembangan SDM dan peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan public.
 - 5) Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat menurut BPS tahun 2024 tercatat di angka 12,64% atau peringkat ke-13 dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan perikanan menciptakan lapangan pekerjaan informal yang tidak bersifat keberlanjutan, rendahnya lapangan kerja formal mempengaruhi pendapatan Masyarakat, selain itu rendahnya kualitas infrastruktur sehingga aksesibilitas dan konektivitas terhadap akses pasar yang menghambat distribusi barang khususnya di daerah yang terisolir.

2.2.1. Permasalahan Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan pada pengendalian dan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 yang telah dipaparkan di atas serta penelaahan atas laporan evaluasi Renja oleh perangkat daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, menghasilkan beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Penyesuaian dokumen Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025 -2029 dengan RPJMD Tahun 2021-2026 terhadap RKPD Tahun 2025 dengan dokumen APBD/DPA Perangkat Daerah TA 2025, ditemukan beberapa perubahan prioritas pembangunan mengalami penyesuaian capaian target kinerja, kemudian

- kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat mengakibatkan program yang telah direncanakan akan dilaksanakan di Tahun 2025 dikarenakan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah atau penyesuaian prioritas perangkat daerah;
- 2) Adanya keterlambatan dan/atau kesalahan pada proses penyampaian laporan pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 oleh beberapa perangkat daerah sehingga mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan evaluasi RKPD sampai dengan Triulan I Tahun 2025;
 - 3) Pada sebagian Perangkat Daerah sering terjadi penggantian aparatur yang mengerjakan laporan evaluasi dan monev Renja, sehingga mempengaruhi ketepatan, validitas data serta pemahaman terhadap proses bisnis penyusunan laporan;
 - 4) Kurangnya SDM yang berkompeten di bidang pengelolaan perencanaan dan pengendalian serta penyusunan anggaran pada tataran daerah dan perangkat daerah;

2.2.2. **Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024**

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat yang dihadapi daerah sampai dengan Triwulan I pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Permasalahan
(1)	(2)	(3)
I	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan	Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan; Masih rendahnya kualitas tenaga pendidikan; Kondisi Sarana dan Prasarana yang belum optimal; Pencapaian SPM di bidang pendidikan belum optimal; Kesadaran Masyarakat belum memadai
2	Kesehatan	Belum Optimalnya kualitas pelayanan kesehatan; Rasio tenaga Kesehatan per penduduk masih belum ideal; Belum Terpenuhinya 9 Jenis Profesi Tenaga Kesehatan; Belum meratanya distribusi tenaga Kesehatan; Pencapaian SPM di bidang kesehatan belum optimal; Kesadaran Masyarakat terhadap kesehatan belum memadai

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah jalan dalam kondisi baik yang belum memadai; Pembangunan jaringan jalan, jembatan dan drainase belum dilakukan secara integratif; Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik yang belum memadai; Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang belum ideal dibandingkan dengan jumlah pegawai; Jumlah sarana dan prasarana fasilitas umum yang belum memadai; Belum optimalnya pengendalian penataan ruang daerah; Pencapaian SPM di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang belum optimal;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Masih rendahnya jumlah jaringan air minum dari sumber air ke rumah tangga dan hunian; Masih rendahnya jaringan limbah rumah tangga dan hunian; Masih rendahnya jaringan sanitasi rumah tangga dan hunian; Jumlah jaringan jalan lingkungan dalam kondisi baik yang belum memadai; Pencapaian SPM di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman belum optimal;
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Masih rendahnya budaya dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan peraturan daerah; Kabupaten Pesisir Barat sebagai daerah yang rawan bencana: tsunami, gempa, banjir, angin kencang, tanah longsor; Masih minimnya sarana dan prasarana mitigasi dan pasca bencana;
6	Sosial	Angka kemiskinan daerah yang tinggi dibandingkan dengan Provinsi Lampung; Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tinggi; Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat termajinalkan; Masih rendahnya fasilitas umum yang ramah untuk kaum difabel; Pencapaian SPM di bidang sosial belum optimal;
II	Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	

1	Tenaga Kerja	Kurangnya lapangan kerja yang ada di daerah disebabkan kurangnya kebijakan yang mendukung investasi; Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dengan skill khusus untuk menciptakan masyarakat wirausaha yang mandiri;
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Masih kurangnya pemberdayaan perempuan dalam keluarga hingga pembangunan; Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat; Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dan masyarakat;
3	Pangan	Belum banyaknya diversifikasi produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat; Belum optimalnya ketersediaan pangan di lingkungan keluarga; Masih terjadi kenaikan harga bahan pokok pada hari-hari tertentu disebabkan oleh inflasi daerah
4	Pertanahan	Masih terjadi kasus-kasus konflik pertanahan atau sengketa kepemilikan lahan daerah dengan taman nasional hutan bukit barisan selatan; Masih rendahnya jumlah aset tanah milik pemerintah daerah untuk pembangunan.
5	Lingkungan Hidup	Belum optimalnya pengendalian/ pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan; Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah masyarakat;
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum optimalnya kualitas pelayanan pencatatan sipil; Belum optimalnya kuantitas pelayanan pencatatan sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa dan daerah; Belum optimalnya kualitasnya aparatur pekon;
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Belum optimalnya persiapan daerah dalam menghadapi bonus demografi daerah; Belum optimalnya penyuluhan terkait Keluarga Berencana di masyarakat;
9	Perhubungan	Minimnya jumlah sarana dan prasarana perhubungan daerah; Belum tersusunnya moda transportasi di daerah dengan baik;

10	Komunikasi dan Informatika	Masih minimnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika daerah; Masih rendahnya kualitas dan kuantitas manajemen informatika; Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan jumlah BTS;
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal; Belum optimalnya pembinaan terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah; Masih sulitnya usaha kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan; Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku koperasi, usaha kecil dan menengah;
12	Penanaman Modal	Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Barat; Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
13	Kepemudaan dan Olah Raga	Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan; Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet daerah; Keterbatasan jumlah sarana prasarana olahraga;
14	Statistik	Masih sulitnya melakukan penghitungan data statistik di daerah oleh Perangkat Daerah; Masih terbatasnya ketersediaan data sectoral
15	Persandian	Belum optimalnya kegiatan persandian daerah; Belum adanya sarana dan prasarana persandian; Belum adanya SDM yang menguasai;
16	Kebudayaan	Masih belum ditetapkannya cagar budaya daerah; Masih belum optimalnya pengembangan budaya daerah sebagai salah satu atraksi wisata daerah;
17	Perpustakaan	Masih belum adanya Perpustakaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat; Masih belum adanya manajemen pengembangan dan pengelolaan perpustakaan; Belum ada pustakawan daerah; Masih sedikitnya jumlah koleksi judul buku; Masih rendahnya minat baca masyarakat;

18	Kearsipan	Masih belum adanya Gedung Arsip Daerah Kabupaten Pesisir Barat; Masih belum adanya manajemen pengembangan dan pengelolaan kearsipan; Belum ada arsiparis daerah;
III	Urusan Pilihan	
1	Kelautan dan Perikanan	Masih rendahnya produktivitas perikanan tangkap; Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya; Jumlah sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya perikanan yang sedikit; Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;
2	Pariwisata	Masih belum memadai sarana dan prasarana serta akomodasi di lokasi wisata; Masih terbatasnya lokasi tujuan wisata di daerah; Masih belum adanya industri pendukung pariwisata;
3	Pertanian	Masih rendahnya produktivitas pertanian; Masih rendahnya produktivitas perkebunan; Masih rendahnya produktivitas peternakan; Masih adanya alih fungsi lahan pertanian; Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi;
4	Perdagangan	Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional; Masih belum optimalnya pengawasan pasar;
5	Perindustrian	Masih rendahnya minat dan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan industri kecil dan menengah sebagai penggerak ekonomi lokal; Belum optimalnya pembinaan terhadap industri daerah Masih sulitnya industri kecil menengah dalam mengakses bantuan modal dari pihak perbankan; Masih relatif minimnya pengembangan dan pelatihan softskill dan hardskill pelaku industri kecil;
6	Transmigrasi	Masih relatif belum berkembang secara signifikan kehidupan masyarakat transmigran; Masih belum optimalnya pembinaan masyarakat transmigran dalam pengembangan produk pertanian dan perkebunan dan peternakan;
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	

1	Sekretariat Daerah	Belum Optimalnya proses pelayanan terhadap kepala daerah; Belum optimalnya proses pengkoordinasian antar perangkat daerah
2	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya proses pelayanan kepada DPRD
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
1	Perencanaan	Masih belum optimalnya proses perencanaan daerah; Masih lemahnya pengendalian dan koordinasi dengan Perangkat Daerah; Masih belum optimalnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pengendalian;
2	Keuangan	Masih belum optimalnya pembinaan dan pengendalian dalam proses penataan usaha keuangan daerah; Masih belum optimalnya pendataan aset daerah; Masih rendahnya nilai pajak daerah terhadap Pendapatan Daerah; Masih rendahnya nilai retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah;
3	Kepegawaian	Belum optimalnya pembinaan dan pendataan pegawai; Belum optimalnya merit sistem dalam proses jenjang karir jabatan;
4	Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya sistem pendidikan dan pelatihan bagi PNS di daerah; Masih minimnya jumlah PNS yang mendapatkan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan;
5	Penelitian dan Pengembangan	Masih minimnya jumlah kajian penelitian dan pengembangan daerah sebagai materi teknis perencanaan daerah; Belum optimalnya hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
VI	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	
1	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Masih belum optimalnya proses pembinaan terhadap pegawai daerah; Masih belum optimalnya proses reviu dan pengendalian terhadap dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan; Masih belum optimalnya pelaksanaan manajemen pengawasan;
VII	Unsur Kewilayahan	

1	Kecamatan	Masih belum meratanya sarana dan prasana di tingkat kecamatan; Masih belum adanya sistem pelayanan bagi masyarakat yang terintegrasi
VIII	Unsur Pemerintahan Umum	
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Masih belum optimalnya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat; Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum;

2.2.3. Rekomendasi

Sebagai langkah perbaikan kinerja pada periode mendatang, khususnya pada proses penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD dan/atau Renja Perangkat Daerah diperlukan rekomendasi perbaikan berdasarkan pada capaian kinerja serta permasalahan-permasalahan yang telah disajikan sebelumnya, antara lain:

- 1) Perlunya menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran Renja Perangkat Daerah dengan RKPD, hingga nantinya pada dokumen penganggaran daerah dan perangkat daerah terjalin sinergitas;
- 2) Perlunya dilakukan perubahan target sasaran indikator makro daerah yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2025 untuk dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2025, hal ini berdasarkan pada realisasi capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 (dalam hal ini data yang tersedia sampai dengan tahun 2024 yang dinilai memberikan gambaran capaian hingga akhir tahun 2025) dengan tetap memperhatikan kondisi daerah;
- 3) Dalam penetapan target kinerja yang akan dicapai pada setiap program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat daerah agar memperhatikan satuan *output* pada dokumen perencanaan tahunan maupun lima tahunan dan juga Renja Perangkat Daerah maupun Renstra Perangkat Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah berikut turunannya dan/atau pembaharuannya. Termasuk penentuan *output* yang terukur dan saling terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lainnya;
- 4) Asumsi dan proyeksi pendapatan daerah baik berupa transfer pusat, pendapatan asli daerah dan sumber pendapatan lainnya yang mempengaruhi perhitungan penerimaan daerah pada periode mendatang sebaiknya dapat diukur secermat mungkin dengan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dapat lebih akurat, efektif dan efisien;
- 5) Penyusunan, penataan dan/atau penambahan belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah untuk percepatan pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan;
- 6) Sebagai salah satu bagian dalam siklus manajemen perencanaan dan penganggaran, tahap pengendalian evaluasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan agar terwujud satu kesatuan manajemen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program-program pembangunan yang efektif dan efisien dengan tujuan akhir terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III
KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Pesisir Barat dan kebijakan Keuangan Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 ini memberi gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Pesisir Barat serta pengaruh perekonomian regional (Provinsi Lampung) dan nasional. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikannya secara efektif dan efisien dengan pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan perencanaan anggaran berbasis kinerja yang ingin dicapai oleh Kabupaten Pesisir Barat ini disusun dalam suatu kondisi perekonomian daerah yang masih berkembang sehingga perencanaan pembangunan yang terencana, tersusun dan akuntabel.

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di suatu daerah merupakan salah satu indikator dalam menilai pencapaian kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan hal ini adalah sebagai fasilitator dan juga regulator dalam memberikan kemudahan dan kepastian bagi pelaku ekonomi untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonominya. Secara substansial pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya terencana dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kemampuan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya ekonomi secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan seluas-luasnya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah yang terencana diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien, partisipatif, terbuka dan akuntabel dalam rangka reformasi birokrasi.

3.1.1 Perkembangan Kinerja Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

3.1.1.1 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan alat kontrol dan evaluasi dalam penilaian hasil pembangunan yang pada akhirnya akan menentukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah tersebut. PDRB nominal (harga berlaku) dan PDRB riil (harga konstan), masing-masing mempunyai peran masing-masing. Seperti halnya dalam PDB (Produk Domestik Bruto), PDRB mempunyai tiga pendekatan dalam menghitungnya yaitu pendekatan produksi atau lebih dikenal dengan PDRB Sektorial atau PDRB menurut Lapangan Usaha, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Menurut data BPS di tahun 2024 PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat tercatat di angka 6.138,24 (milyar rupiah) atau naik 403,68 (milyar rupiah) dari tahun 2023 PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat tercatat di angka 5.734,56 (dalam milyar rupiah) kemudian naik 389,19 (milyar rupiah) dari tahun 2022 yang tercatat 5.345,37 (milyar rupiah). PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan *time series* digambarkan sebagai berikut, tahun 2022 PDRB ADHB naik 453,33 (milyar

rupiah), tahun 2021 PDRB ADHB tercatat 4.892,04 (milyar rupiah) atau mengalami kenaikan 214,50 (milyar rupiah), tahun 2020 PDRB ADHB tercatat 4.677,54 atau turun 9,85 (milyar rupiah) dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 4.687,39 (milyar rupiah). Selanjutnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) tahun 2020 berada pada angka 3.069,60 atau turun 36,5 (dalam milyar rupiah) dari tahun 2019 yang tercatat di angka 3.106,10 (dalam milyar rupiah). Tahun 2021 tercatat di angka 3.132,70 (dalam milyar rupiah) atau naik 63,10 (dalam milyar rupiah), tahun 2022 sebesar 3.221,10 (dalam milyar rupiah) atau naik 88,4 (dalam milyar rupiah), tahun 2023 tercatat sebesar 3.331,4 atau naik sebesar 110,30 (dalam milyar rupiah) dan tahun 2024 tercatat di angka 3.418,39 (milyar rupiah)

Pada tahun 2025 ini PDRB ADHB diproyeksi dapat meningkat menjadi 6.352,74 s.d 6.503,42 (milyar rupiah). Sementara itu untuk PDRB ADHK diproyeksikan pada tahun 2025 ini dapat tetap meningkat menjadi 3.481,49 s.d 3.5035,59 (milyar rupiah). Proyeksi ini berkaca dari perhitungan selama kurun waktu 2020-2024 dimana perkembangan PDRB ADHB yang masih mampu berkembang 4,59% - 7,04% pertahunnya semnetara PDRB ADHB diproyeksi akan tumbuh 2,67% - 3,48%. Optimalisasi sektor unggulan daerah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan yang positif dengan didukung perbaikan perekonomian global, nasional dan regional.

Tabel 3.1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Pesisir Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (miliar rupiah)

PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ADHB	4.677,54	4.892,04	5.345,37	5.734,56	6.138,24
ADHK	3.069,60	3.132,70	3.221,10	3.331.40	3.418,39

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Data untuk PDRB ADHB untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Lampung, yang mana Ekonomi Provinsi Lampung berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2024 mencapai 121.701,75 (milyar rupiah) dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 69,560,58 (milyar rupiah). Dimana kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh1,2% dan sektor industry pengolahan tumbuh 1,61%.

3.1.1.2 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha

PDRB harga berlaku suatu daerah digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah daerah tersebut. Dalam konteks PDRB yang sangat familiar (menurut lapangan usaha), sumber-sumber ekonomi/sektor-sektor/lapangan usaha tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) kategori. Besar kecilnya PDRB dalam 17 (tujuh belas) kategori tersebut di atas sangat mungkin dipengaruhi oleh kondisi geografis, ketersediaan SDA, Infrastruktur, SDM yang memadai dan lain sebagainya. 17 kategori tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa Lainnya.

Walaupun kondisi laju pertumbuhan berfluktuasi, namun dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tidak ada kecenderungan pergeseran peran masing-masing sector sebagai penyumbang pertumbuhan PDRB. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar PDRB, dengan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tetap menjadi primadona sebagai penyumbang PDRB. Persentase kontribusi sektor-sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selama 5 (lima) tahun terakhir cukup seimbang artinya dari nilai kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB.

Dari 9 (sembilan) sektor yang ada dalam komponen perhitungan PDRB, sektor Primer, kelompok Sektor Sekunder dan kelompok Sektor Tersier. Kelompok Sektor Primer terdiri dari 3 (tiga) sektor yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan (3) Konstruksi; kelompok sektor sekunder terdiri dari 5 (lima) sektor, yaitu: (1) Pertambangan dan Penggalian, (2) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (3) Industri Pengolahan, (4) Jasa Pendidikan dan (5) Real Estate. Sementara untuk sektor tersier terdiri dari 9 (sembilan) kelompok, yaitu: (1) Informasi dan Komunikasi, (2) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (4) Jasa Keuangan dan Asuransi, (5) Transportasi dan Pergudangan, (6) Jasa lainnya, (7) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (8) Pengadaan Listrik dan Gas dan (9) Jasa Perusahaan.

Pada tahun 2020 sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB ADHB tetap pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 49,13% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,58%. Kembali pada tahun 2021 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 48,72% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,95%. Tahun 2022, PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat disumbang sebesar 46,29% dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 14,71%. Tahun 2023 kontribusi sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan menurun menjadi 43,67%, peningkatan kontribusi terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Refarasi Mbdil dan Sepeda Motor sebesar 15,97% dan Sektor Kontruksi sebesar 8,37%. Terakhir tahun 2024 sektor pertanian kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 42,95%, kemudian sektor perdagangan besar dan kecil:reparasi kendaraan mobil dan sepeda motor berkontribusi 16,68% dan sektor kontruksi 8,07%.

Berdasarkan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha yang dipublikasi oleh BPS, Selama 5 (lima) tahun sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kontribusi di sektor lain. sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di tahun 2020 berkontribusi sebesar 12,58% atau meningkat 32,59% di tahun 2024 menjadi menjadi 16,68%. Penurunan sektor pertanian kehutanan dan perikanan menunjukkan adanya perubahn tren orientasi lpangan usaha dari agraris ke perdagangan,hal ini menunjukan bahwa sektor pariwisata sebagai sektor unggul secara perlahan menggeser sektor agraris. Untuk

mendukung perkembangan PDRB Kabupaten Pesisir Barat, Pemerintah Daerah diharapkan melakukan intervensi dengan kebijakan yang mendukung peningkatan investasi untuk membuka lapangan kerja.

Tabel 3.2 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (dalam %)

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	49,13	48,72	46,29	43,67	42,95
2	Pertambangan dan Penggalian	5,76	5,24	5,23	5,61	5,74
3	Industri Pengolahan	3,99	3,96	3,74	3,60	3,25
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	6,85	7,56	8,07	8,37	8,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,58	12,95	14,71	15,97	16,68
8	Transportasi dan Pergudangan	0,97	0,98	1,26	1,54	1,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,96	1,82	1,98	2,16	2,19
10	Informasi dan Komunikasi	2,30	2,39	2,29	2,31	2,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,39	1,44	1,38	1,34	1,33
12	Real Estate	3,62	3,60	3,62	3,71	3,76
13	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	5,15	5,17	5,30	5,38
15	Jasa Pendidikan	3,80	3,80	3,73	3,61	3,67
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,19	1,21	1,16	1,18	1,20
17	Jasa lainnya	1,01	0,96	1,15	1,45	1,61
	PDRB ADHB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Data untuk PDRB berdasarkan lapangan usaha untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 tidak tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data triwulan I Tahun 2025 dari Pemerintah

Provinsi Lampung. Perekonomian Provinsi Lampung triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp121.701,75 (milyar rupiah) dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp69.560,58 (milyar rupiah), dengan demikian triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen. Triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65 persen.

3.1.1.3 Struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Pengeluaran

PDRB menurut Pengeluaran digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi ekonomi suatu daerah melihat dari sisi pengeluaran dan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor perekonomian suatu daerah yang terdiri dari 7 (tujuh) komponen, sebagai berikut: (1) Konsumsi Rumah Tangga; (2) Konsumsi LNPRT; (3) Konsumsi Pemerintah; (4) PMTB; (5) Perubahan Inventori; (6) Ekspor; (7) Impor.

Berdasarkan pada data PDRB ADHB menurut Pengeluaran yang berfungsi untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan baik antar wilayah dan luar negeri. BPS mencatat bahwa PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut pengeluaran di tahun 2021 tercatat 4.892,04 (milyar rupiah) atau naik 214,50 (milyar rupiah) dari tahun 2020, dan di tahun 2022 tercatat mengalami kenaikan kembali sebesar 453,33 (milyar rupiah) dari 4.892,04 (milyar rupiah) ke 5.345,37, terakhir di tahun 2023 kembali mengalami kenaikan 389,19 (milyar rupiah) menjadi 5.734,56 (milyar rupiah). Terakhir tahun 2024 tercatat di angka 6.138,24 (milyar rupiah).

Sementara itu untuk data PDRB Kabupaten Pesisir Barat Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) menurut Pengeluaran pada tahun 2020 adalah sebesar 3.069,60 (milyar rupiah), di tahun 2021 mengalami kenaikan 63,10 (milyar rupiah) menjadi 3.132,70 kemudian di tahun 2022 kembali mengalami kenaikan sebesar 88,50 (milyar rupiah) menjadi 3.221,12, dan di tahun 2023 mengalami kenaikan kembali sebesar 110,23 (milyar rupiah) menjadi 3.331,35 (milyar rupiah). Terakhir tahun 2024 PDRB ADHK menurut pengeluaran tercatat di angka 3.418,39 (milyar rupiah) atau naik 87,04 (milyar rupiah).

Di tahun 2024, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar, yaitu 73,66% (ADHB) dan 74,16% (ADHK), kemudian PMBT dengan kontribusi 21,72% (ADHB) dan 22,24% (ADHK). Sementara untuk komponen lain dengan kontribusi terendah, yaitu net ekspor barang jasa yang tercatat minus -0,01% (ADHB) dan -2,13% (ADHK), kemudian perubahan inventori tercatat minus -0,11% (ADHB) dan -0,16% (ADHK).

Berikutnya disampaikan PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.3 PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.279,17	3.368,27	3.717,25	4.090,89	4.521,54
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	87,02	90,20	96,19	110,37	125,67
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintahan	146,50	149.45	147,23	152,01	165,39
4	PMTB	1.017,88	1.110,62	1.205,95	1.284,16	1.333,25
5	Perubahan Inventori	11,08	7,17	7,46	3,46	-6,74
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	135,88	166,34	171,36	93,67	-0,87
	Total PDRB	4.692,20	4.919,53	5.345,44	5.734,56	6.138,24

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Lebih lanjut, disajikan PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.4 PDRB ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 (milyar Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.195,72	2.206,39	2.310,06	2.432,56	2.569,43
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	51,90	52,63	53,55	59,30	66,43
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	96,10	96,69	93,89	94,95	100,61
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	670,11	702,02	732,58	752,69	760,16

5	Perubahan Inventori	14,61	4,29	4,40	2,49	-5,45
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	41,17	70,68	26,64	-10,64	-72,79
	PDRB	3.069,60	3.132,70	3.223,12	3.331,35	3.418,39

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Data untuk PDRB berdasarkan pengeluaran untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 belum tersedia, sehingga perkembangan daerah menggunakan data Triwulan I Tahun 2025 dari Pemerintah Provinsi Lampung, dimana dari sisi pengeluaran, jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,47% komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,96% sedangkan triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11% dimana komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,78%..

3.1.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 tercatat di angka 2,61% atau turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat di angka 3,42%. Merunut tiga tahun sebelumnya mengalami kenaikan dimana tahun 2022 tercatat di angka 2,82%, tahun 2021 di angka 2,06% dan di tahun 2020 di angka -1,18%.

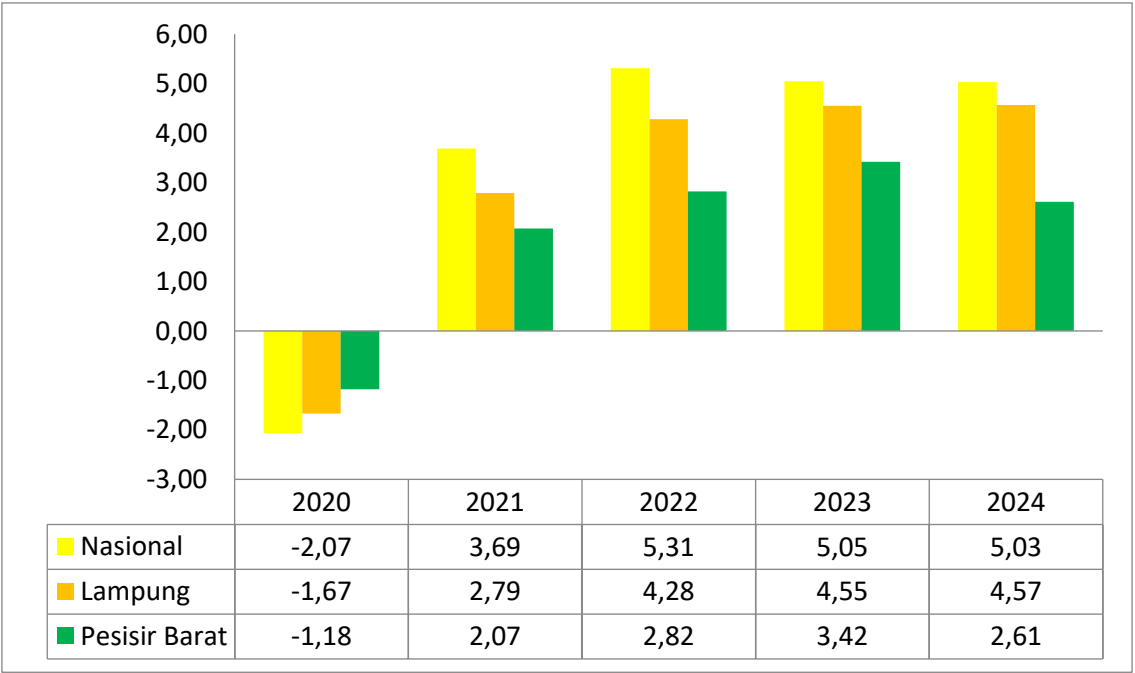
Pada sisi lapangan usaha, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan cukup dominan meskipun secara konsisten mengalami penurunan dari tahun 2020-2024, hal ini terjadi karena adanya sektor lain yang mengalami peningkatan kontribusi, yaitu sektor perdagangan besar kecil: reparasi kendaraan mobil dan sepeda motor yng secara konsisten mengalami peningkatan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat, kemudian sektor penyediaan akomodasi dan makan minum secara konsisten mengalami perningkatan kontribusi namun tidak cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan kegiatan ekonomi masyarakat dari sektor pertanian dan perikanan ke sektor UMKM, dimana sektor ini berkaitan erat dengan sektor unggulan Kabupaten Pesisir Barat, yaitu sektor pariwisata. Sedangkan menurut pengeluaran, perekonomian Kabupaten Pesisir Barat didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan Penambahan Modal Bruto Tetap (PMBT), sementara untuk ekspor dan perubahan inventori mengalami kontraksi d tahun 2024 ini.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat triwulan I tahun 2025 belum dipublikasi, sehinga masih mengacu pada pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan I 2025. Perekonomian Provinsi Lampung triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 121.701,75 (milyar rupiah) dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 69.560,58 (miyar rupiah), dengan demikian triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen sedangkan dari sisi pengeluaran komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,96%. Triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan

terdalam adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65 persen sedangkan dari sisi pengeluaran komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,78%.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat di tahun 2024 sebesar 2,61% tersebut masih berada jauh di bawah Provinsi Lampung yang mencatatkan nilai 4.57% dan nasional 5,03% atau selisih masing – masing sebesar 1,96 dan 2,42.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

3.1.1.5 Pendapatan Per Kapita

PDRB Perkapita tahun 2020 tercatat di angka 28,799 (juta rupiah). Tahun 2021 terjadi peningkatan 3,19% menjadi 29,718 (juta rupiah), tahun 2022 terjadi kembali peningkatan sebesar 7,58% menjadi 31,971 (juta rupiah) dan di tahun 2023 PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat sebesar 33,782 (juta rupiah) atau naik 5,66% . terakhir di tahun 2024 PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat tercatat naik 5,44% menjadi 35,621(juta rupiah).

PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020-2024 menunjukan perkembangan yang cukup baik, dimana peningkatan terjadi secara konsisten naik dikisaran 5,47%. Namun jika dibandingkan dengan PDRB Perkpaिता Provinsi Lampung masih cukup tertinggal jauh, dimana PDRB Provinsi Lampung tahun 2024 tercatat di angka 51,369 (jura rupiah), jika dibandingkan dengan 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung PDRB Kabupaten Pesisir Barat masih di atas PDRB Kabupaten Lampung Barat (31,347 jura rupiah), Kabupaten Tanggamus (31,620 jura rupiah) dan Kabupaten Pringsewu (35,551 juta rupiah). PDRB Perkpaिता tertinggi di Provinsi Lampung adalah Tulang Bawang (67,675 juta rupiah) dan Kota Bandar Lampung (65,758 jura rupiah).

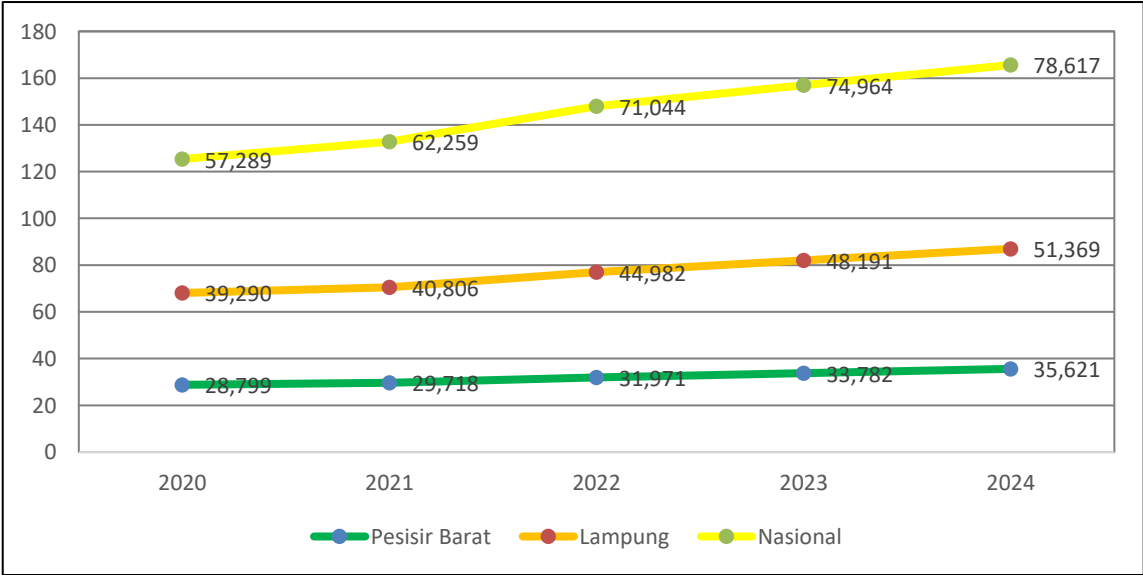
Tabel 3.5 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024

Tahun	PDRB Perkapita
(1)	(2)
2020	28.799
2021	29,718
2022	31,971
2023	33,782
2024	35,621

Sumber : BPS Kabupaten Pesisir Barat, 2025

PDRB Perkapita Kabupaten Pesisir Barat diharapkan dapat terus meningkat, dengan proyeksi kenaikan sekitar 5,47% atau berkisar antara 36.757 (juta rupiah) sampai dengan 37,569 (juta rupiah). Tentunya kenaikan PDRB Perkapita perlu didorong dengan pertumbuhan PDRB melalui optimalisasi lapangan usaha unggulan daerah dan peningkatan pengeluaran masyarakat serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Gambar 3.2 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024 (juta rupiah)



Sumber : BPS, 2025

3.1.1.7 Inflasi Daerah

Perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan dan juga penurunan. Rata-rata tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah itulah yang kita kenal dengan inflasi. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan inflasi regional, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Data inflasi Kabupaten Pesisir Barat masih menggunakan data inflasi Provinsi Lampung, dimana inflasi Provinsi Lampung secara *timeseries* tercatat di angka 2,00% (2020), 2,19% (2021), 5,51% (2022), 3,47% (2023) dan 1,57% (2024). Terakhir per Maret 2025 tercatat di angka 1,96%. Sementara berdasarkan pada Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Lampung Tahun 2020 tercatat di angka 106,36, tahun 2021 di angka 108,69, tahun 2022 di angka 114,68, tahun 2023 di angka 118,65, tahun 2024 di angka 108,43. Per Maret 2025 IHK Provinsi Lampung tercatat di angka 110,35. Laju pertumbuhan indeks harga konsumen menurut pengeluaran disumbang oleh sektor konsumsi rumah tangga, yaitu konsumsi makan, minum dan tembakau sebesar 6,41%, kemudian yang terendah adalah konsumsi untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya sebesar 0,37%.

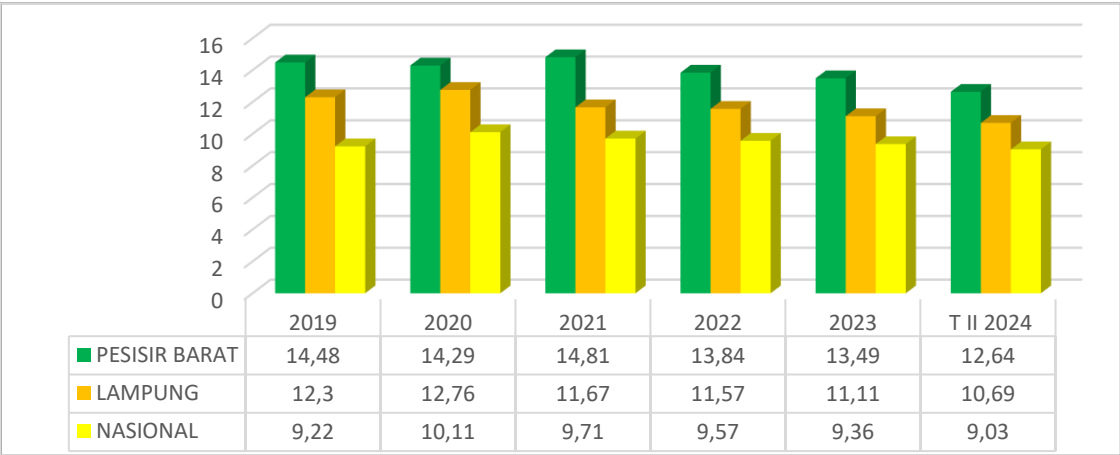
3.1.2. Perkembangan Kinerja Sosial Ekonomi Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan diimbangi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik antar penduduk dan antar wil ayah. Beberapa indikator dalam peningkatan kinerja sosial ekonomi daerah Kabupaten Pesisir Barat antara lain adalah Persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.1.2.1 Tingkat Kemiskinan

Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan terus menurun, hal ini sejalan dengan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan juga meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan pada data tahun-tahun sebelumnya, Data tingkat kemiskinan pada tahun 2020 berada pada angka 14,29% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22.241 jiwa. Pada tahun 2021, angka kemiskinan daerah Kabupaten Pesisir Barat sebesar 14.81% atau sebanyak 23.230 jiwa penduduk miskin daerah. kemudian di tahun 2022 tingkat kemiskinan sebesar 13,84% penduduk miskin di daerah atau sebanyak 21.500 orang. Capaian tahun 2023 tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 13,49% atau sebanyak 21,450 penduduk sementara di tahun 2024 tingkat kemiskinan turun menjadi 12,64%.

Gambar 3.3 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019-2024

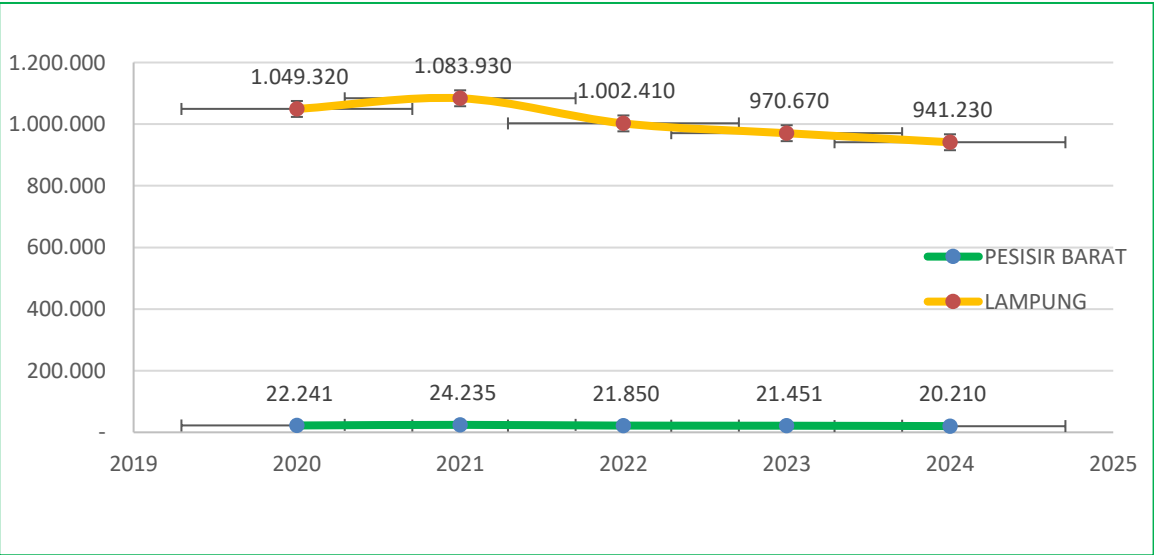


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

Data untuk Tingkat Kemiskinan dan jumlah penduduk miskin untuk Kabupaten Pesisir Barat sampai Tahun 2024 sebanyak 20.210 jiwa atau menurun 1.240 jiwa dari tahun 2023 yang mencapai 21.450. penurunan jumlah penduduk miskin secara regional di Provinsi Lampung juga mengalami penurunan dari 970,670 jiwa menjadi 941.230 jiwa atau turun sebanyak 29.440 jiwa dengan demikian

kontribusi penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung mencapai 4,21%.

Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024



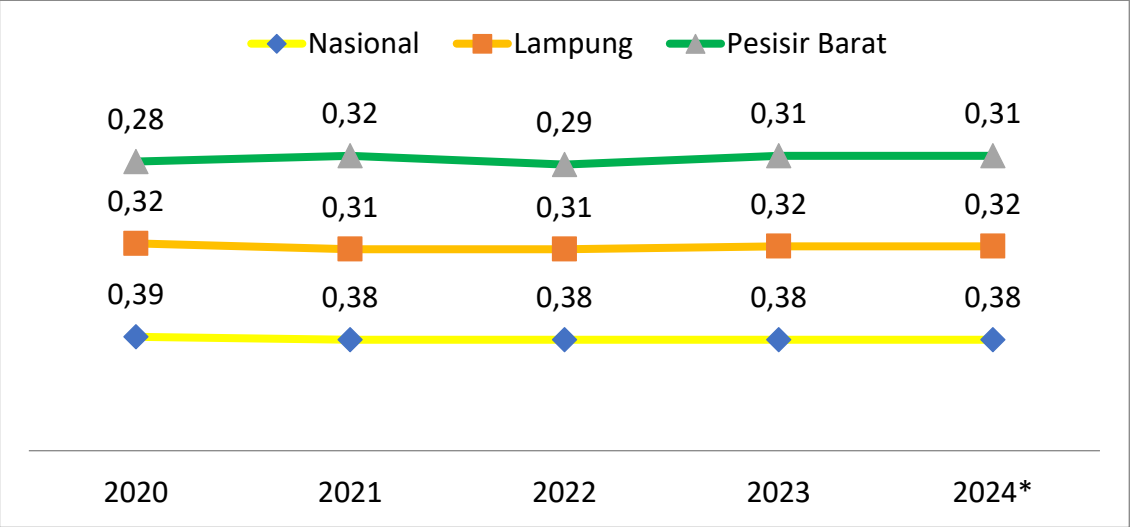
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

3.1.2.2 Indeks Gini

Rasio Gini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna. Perkembangan indeks gini (gini ratio) di Kabupaten Pesisir Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini terus mengalami perbaikan. Hal ini erat kaitannya dengan perkembangan PDRB Perkapita penduduk dan juga persebaran jumlah tenaga kerja. Kabupaten Pesisir Barat yang juga terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. 2020 berada pada angka 0,28. Pada tahun 2021 mengalami koreksi dan berada pada angka 0,32. Tahun 2022 ada perbaikan kinerja daerah, sehingga indeks gini turun menjadi 0,29. Sementara untuk tahun 2023 rasio gini berada pada angka 0,31 atau mengalami kenaikan ketimpangan sebesar 0,02 point. Tahun 2024 belum ada publikasi dari BPS sehingga masih menggunakan data tahun 2023.

Gini rasio Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2023 tercatat sebesar 0.31. Nilai tersebut masih lebih baik bila dibandingkan dengan capaian kinerja provinsi dan nasional dengan nilai Provinsi Lampung dengan nilai capaian 0.32 dan nasional yang berada pada angka 0.38.

Gambar 3.5 Indeks Gini Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

3.1.2.3 Distribusi dan Ketimpangan Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi di Kabupaten Pesisir Barat selain dapat dilihat dari nilai pertumbuhan ekonomi, nilai PDRB dan PDRB Perkapita juga perlu dilihat dari sisi sumbangan kontribusi PDRB daerah terhadap pembentukan total PDRB Provinsi Lampung. Pada tahun 2024, secara struktur PDRB Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah dengan kontributor terendah di Provinsi Lampung atau berada pada urutan 15 dengan kontribusi sebesar 1,26%. Kontribusi daerah walaupun stagnan pada tahun 2020-2024 dengan nilai 1,25-1,27% dan masih terus terendah.

Berikut adalah data kontribusi PDRB ADHB 15 Kabupaten/Kota terhadap total PDRB Provinsi Lampung:

Tabel 3.6 Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung terhadap Total PDRB Tahun 2020-2024 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Lampung Barat	1,99	1,99	1,99	2,00	2,03
2	Tanggamus	4,31	4,34	4,35	4,34	4,34
3	Lampung Selatan	12,36	12,33	12,37	12,35	12,36
4	Lampung Timur	11,35	11,65	11,94	11,71	11,65
5	Lampung Tengah	19,82	19,74	19,81	19,95	19,90
6	Lampung Utara	6,63	6,60	6,50	6,48	6,52
7	Way Kanan	3,90	3,89	3,88	3,87	3,94
8	Tulang Bawang	6,44	6,42	6,24	6,24	6,25
9	Pesawaran	4,52	4,47	4,47	4,48	4,44

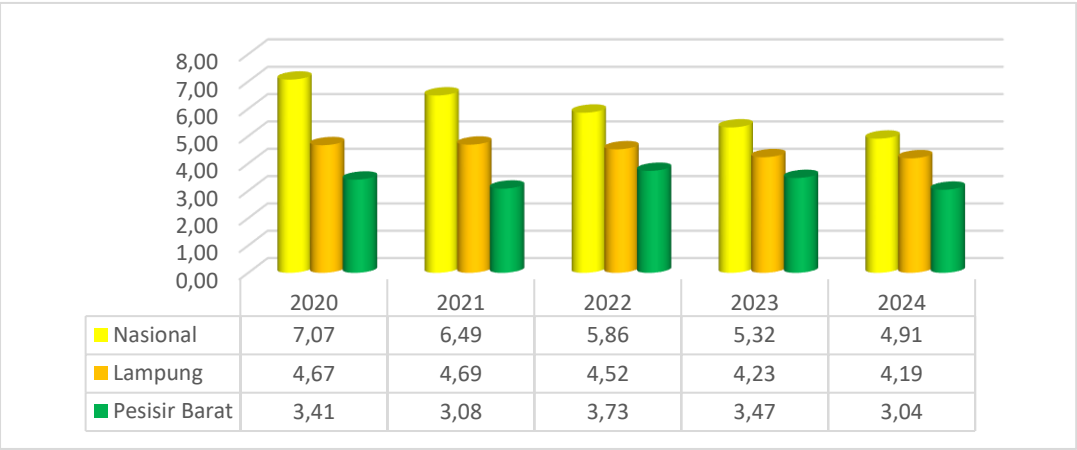
10	Pringsewu	3,11	3,10	3,08	3,10	3,09
11	Mesuji	2,90	2,89	2,87	2,87	2,90
12	Tulang Bawang Barat	3,19	3,18	3,18	3,19	3,20
13	Pesisir Barat	1,30	1,30	1,28	1,27	1,26
14	Bandar Lampung	16,42	16,34	16,31	16,41	16,37
15	Metro	1,75	1,75	1,74	1,74	1,74
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

3.1.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat mengalami kinerja perbaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. tahun 2020 tercatat di angka 3.41%. Tahun 2021 mengalami perbaikan menjadi 3,08%. Sementara tahun 2022 terkoreksi cukup signifikan yaitu sebesar 3.73%. capain kinerja indikator TPT di tahun 2023 mengalami perbaikan dengan angka 3,47% atau meningkat sebesar 0,26 point. Dan di tahun 2024 angka TPT Kabupaen Pesisir Barat sebesar 3,04%. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Pesisir Barat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan banyak lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakatnya sehingga jumlah pengangguran terbuka dapat terus ditekan dan diminimalisir.

Gambar 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

3.1.3 Kerangka Ekonomi Daerah sampai dengan akhir Tahun 2023

3.1.3.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Gubernur Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada di kisaran 4,8%-5,6%, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS antara Rp 15.300 sampai Rp 15.700 dan inflasi nasional diperkirakan antara 1,5%-3,5%. Lima risiko utama yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan inflasi di Indonesia termasuk

pertumbuhan ekonomi global yang melambat, harga komoditas yang bergejolak, suku bunga acuan Amerika Serikat yang tinggi, dolar AS yang kuat, serta inflasi global yang turun sangat lambat. Dalam menghadapi risiko-risiko ini, kondisi geopolitik global juga dianggap penting karena memiliki dampak terhadap arus modal asing dan stabilitas ekonomi Indonesia, sementara Bank Indonesia memperkirakan suku bunga acuan Amerika Serikat akan turun pada akhir tahun 2024 dan semester pertama tahun 2025.

3.1.3.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Regional

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung memprakirakan ekonomi Lampung 2025 tumbuh dalam kisaran 4,6 – 5,3%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh prospek permintaan domestik yang lebih baik, utamanya berlanjutnya pertumbuhan positif konsumsi rumah tangga, sejalan dengan kenaikan UMP sebesar 6,5% dan terjaganya optimisme konsumen. Mengawali 2025, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Provinsi Lampung pada Januari 2025 tercatat sebesar 140, tertinggi dibandingkan IKK periode Januari selama 5 tahun terakhir. Lebih lanjut, Bank Indonesia juga memprakirakan kinerja investasi swasta pada 2025 kembali bergulir seiring memudarnya ketidakpastian dunia usaha pasca puncak penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor Lampung diprakirakan tetap kuat, tetapi terdapat beberapa risiko perlambatan yang perlu diwaspadai. Merujuk outlook perekonomian dunia yang dirilis IMF pada Januari 2025, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Tiongkok dan India yang merupakan 3 (tiga) tujuan utama ekspor Lampung diproyeksikan belum optimal di tahun 2025.

Prospek peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung akan turut tercermin dari kinerjalapangan usaha (LU) utama. Perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diprakirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Lampung pada 2025, hal ini akan turut didukung oleh kebijakan yang ditempuh guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Di samping pengaruh positif normalisasi dampak El Nino, implementasi program intensifikasi pertanian melalui optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul dan dukungan akses terhadap pupuk bersubsidi berpotensi mendongkrak produksi tanaman pangan Lampung di 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hampir 25% dari PDRB Lampung 2024 disumbang oleh produksi LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sehingga pertumbuhan positif pada LU ini akan mampu memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung. Sementara itu, kinerja LU utama lainnya, yakni LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, serta LU Transportasi dan Pergudangan diprakirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif sejalan dengan prospek permintaan domestik yang lebih baik. Sementara itu, Bank Indonesia memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada 2025 turut didukung oleh inflasi yang terjaga dalam sasaran target $2,5 \pm 1\%$.

3.1.3.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih di dominasi oleh sektor agraris, yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Namun kontribusi sektor ini memiliki tren menurun pada periode 2020-2024 sehingga memunculkan sektor lain yang secara konsisten mengalami kenaikan, yaitu sektor perdagangan besar dan kecil; reparasi kendaraan mobil dan sepeda motor dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan sektor unggulan sebagai penopang ekonomi daerah di masa depan.

Sektor pertanian dan perikanan diarahkan sebagai penopang ketahanan pangan daerah sementara sektor pariwisata dapat menjadi penopang ekonomi daerah yang berkelanjutan. Namun terdapat beberapa tantangan Pemerintah Daerah dalam perannya sebagai pemangku kebijakan, yaitu :

- 1) Keterbatasan fiskal daerah, dimana ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer sedikit banyak mempengaruhi percepatan pembangunan daerah, hal ini dikarenakan belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, aksesibilitas dan konektivitas berkelanjutan perlu dipertimbangkan, akses air minum, air limbah, persampahan dan jalan sebaiknya diprioritaskan untuk ditigkatkan karena berkaitan langsung terhadap perekonomian daerah dan juga pengembangan sumber daya manusia.
- 3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial, bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan stimulan bagi masyarakat, baik dari sisi bantuan uang, sembako, dan atau modal usaha UMKM. Penciptaan lapangan pekerjaan di sektor riil (baik untuk pekerjaan penggunaan dana desa) juga diharapkan mampu menjadi solusi bagi usaha mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
- 4) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan tanpa melupakan dukungan dari sektor-sektor lainnya, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif merupakan tantangan yang cukup berat karena ini menyangkut beberapa peraturan baik tingkat pusat maupun daerah. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah daerah dengan menyikapi atas perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan di daerah, perbaikan pelayanan dan penyederhanaan birokrasi untuk proses investasi dan perizinannya melalui reformasi regulasi;
- 6) Menyediakan infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi;
- 7) Meningkatkan partisipasi swasta dan seluruh stakeholder melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;
- 8) Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar dan kawasan khusus PKL (pedagang kaki lima) secara memadai bagi pelaku

ekonomi dan masyarakat luas untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Pesisir Barat, disamping menciptakan lapangan kerja;

- 9) Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Pesisir Barat;
- 10) Memfasilitasi pengembangan koperasi diberbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Pesisir Barat sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama; dan
- 11) Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

Tantangan yang diproyeksikan tersebut di atas seyogyanya adalah hal yang hampir sama dirasakan oleh daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, melihat kondisi di lapangan berdasarkan pada kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang saat ini masih dalam fokus penguatan kelembagaan maka tantangan-tantangan tersebut akan terasa lebih berat. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tidak lagi bersifat teknis dari dalam daerah, namun lebih kepada kondisi eksternal.

Prospek dan perkembangan kondisi perekonomian makro Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2025 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2020-2024 walaupun dengan beberapa catatan. Sejalan dengan kecenderungan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan sebagai peranan dari sektor tersier seperti sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sektor jasa-jasa, serta sektor pertanian berpengaruh signifikan dalam perekonomian Kabupaten Pesisir Barat.

Dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian nasional dan regional Lampung, diestimasikan perekonomian daerah Pesisir Barat masih mampu berkembang dan bertumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun mungkin akan melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat lesunya pertumbuhan ekonomi secara global yang berimbas pada berbagai negara belahan dunia termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif utamanya dalam mengatasi eksisnya pada sektor riil dan imbasnya pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan (keluarga miskin dan kelompok marjinal).

Tahun 2025, dimana jumlah penduduk miskin dan kondisi kemiskinan daerah masih harus dikelola dengan proposional dan profesional dalam kaitannya menjadikan masyarakat marjinal sebagai subjek pembangunan dengan pemberdayaan. Tujuan jangka panjangnya adalah dengan menurunnya angka kemiskinan juga akan menurunkan beban pemerintah daerah dalam penganggaran hibah dan bantuan sosial. Sehingga pendanaan dapat dialihkan pada sektor lainny Agar proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2025 tidak jauh berbeda bahkan meningkat pada tahun 2024, maka perlu ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta peningkatan angka PDRB dari sektor-sektor. Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir

Barat. Diperlukan strategi regulasi dengan ditunjang dengan nilai investasi yang tinggi serta peningkatan angka PDRB dari sektor-sektor unggulan.

Prospek perekonomian Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun 2025 dipengaruhi antara lain:

- 1) Letak Kabupaten Pesisir Barat yang cukup strategis yang berada di perbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu memberikan peluang sebagai daerah penghubung sehingga bisa meningkatkan perekonomian dalam sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa-jasa lainnya;
- 2) Mulai menurunnya produktivitas pertanian dibarengi dengan kenaikan pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor pertambangan dan penggalian serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib;
- 3) Mulai berkembangnya jumlah sektor industri, khususnya industri skala kecil dan menengah (IKM) dan industri kreatif yang langsung bersentuhan dengan masyarakat diharapkan dapat menjadi pendorong dalam menopang perekonomian Kabupaten Pesisir Barat dimasa yang akan datang;
- 4) Sebagai daerah penunjang, peranan sektor tersier seperti sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Jasa Keuangan dan Asuransidan Jasa Lainnya diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan bpengaruh signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Pesisir Barat;
- 5) h.Target ekonomi makro Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - Target Pertumbuhan Ekonomi sebesar 2,65%-3,00%;
 - Target Tingkat Kemiskinan sebesar 12,50%-12,00%;
 - Target Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,03% – 3,00%;
 - Target PDRB Perkapita sebesar 36,757(juta rupiah) - 37,569 (juta rupiah);
 - Target IPM sebesar 71,25;
 - Target Rasio Gini sebesar 0,314-0,295;
 - Target Nilai Tukar Petani sebesar 125,00;

3.1.4 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2025

Berdasarkan pada perkembangan ekonomi daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, serta dengan melihat pada tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan akhir tahun 2025 serta dengan memperhatikan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, maka Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menetapkan ulang target-target sasaran makro pembangunan daerah untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Sasaran Makro Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Sasaran RKPD 2025	capaian sampai dengan Triwulan II	Sasaran Perubahan RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3.80- 4,30	2,61%*	2,65-3,00
2	Tingkat Kemiskinan Daerah	Persen	13,04	12,64%	12,50 – 12,00
3	TPT	Persen	2.41	3,04%*	3,03 – 3.00%
4	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rupiah	33,570-34,150	35,261*	36,757 – 37.569
5	IPM	Poin	71,25	71,04*	71,25
6	Rasio Gini	Poin	0,305 – 0,295	0,315*	0,314 – 0,295
7	NTP	Poin	110,,04	124,98	125,00

Sumber : Data Diolah, 2025

3.2 Kerangka Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dari daerah yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan; (vii) Unsur Kewilayahan; dan (viii) Unsur Pemerintahan Umum, kebijakan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan daerah sebagai instrumen penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah bersanding dengan perencanaan, penatausahaan serta pengendaliannya.

Dalam RKP Tahun 2025 Kebijakan Fiskal Pemerintah Pusat tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan antardaerah.

Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan cara optimalisasi pendapatan negara, peningkatan kualitas belanja negara lspending serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (innouatiue rtnancirlgl yang dikelola secara prudent dan kredibel

Guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan

anggaran keuangan untuk sisa pelaksanaan tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Barat diarahkan untuk:

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscal sustainability*), dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, disamping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara antara lain: (a) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit anggaran yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah; dan (b) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien serta akuntabel;
- 4) Memenuhi ketentuan *mandatory spending* sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
- 5) Mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2025.

Selanjutnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permenadagri No. 86 Tahun 2017, Perubahan RKPD dapat dilaksanakan dengan kondisi seperti hal-hal di bawah ini:

- 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SilPA) sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perkembangan kondisi fiskal daerah yang tidak sesuai dari rencana awal pada tahun 2025 untuk penyusunan RKPD Tahun 2025 serta dinamika pembangunan yang menyebabkan terjadi perubahan terhadap kerangka keuangan daerah, termasuk penggunaan dana SilPA Tahun Anggaran 2024 (dalam hal ini terdapat defisit SilPA antara target yang ditetapkan pada APBD TA 2025 dengan data realisasi audit BPK RI terhadap APBD TA 2024). Perubahan kerangka keuangan daerah menyebabkan terjadi perubahan program, kegiatan, sub kegiatan pada tahun 2025 ini. Berdasarkan pada kondisi tersebut, kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 terdiri dari kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Memperhatikan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan/Dana Transfer), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tetap memperhatikan

kemampuan masyarakat secara umum, sekaligus menjaga stabilitas dan kesinambungan fiskal daerah.

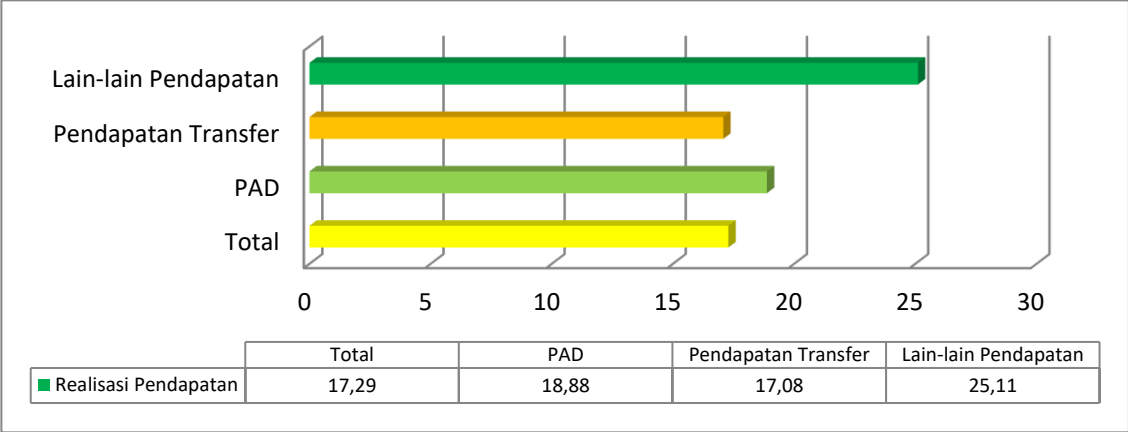
Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki, antara lain:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi (i) Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana dan pemeliharaan rutin bagi peningkatan pelayanan; (ii) Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, baik melalui sosialisasi serta iklan layanan menggunakan media komunikasi publik dan media sosial; (iii) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; (iv) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; (v) Meningkatkan sinergitas antar instansi yang berwenang dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah; (vi) Melakukan perbaharuan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (vii) Peningkatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan PAD;
- 2) Pendapatan Transfer yang meliputi (i) Memperbaharui berbagai variabel serta kebutuhan penghitungan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat; (ii) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah; (iii) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka persiapan usulan DAK; (iv) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk dana bagi hasil dari pemerintah provinsi; (v) Peningkatan tata kelola keuangan daerah serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan keuangan daerah;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang meliputi lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan, dikoordinasikan oleh daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun proyeksi kemampuan keuangan Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu pada komponen Pendapatan Pajak Daerah dan Lain-Lian Pendapatan yang Sah
- 2) Pendapatan Transfer Pusat mengalami penurunan akibat kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat
- 3) Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami peningkatan

Gambar 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun 2025



Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Hingga triwulan I Tahun Anggaran 2025 ini, Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 903.304.806.001 namun baru terealisasi Rp. 156.172.742.764. Beberapa Pos Pendapatan Daerah yang pencapaiannya masih sangat minim dan perlu dilakukan monitoring seperti PAD yang terealisasi sebesar 18,88% dengan capaian Rp. 7.144.555.703 dari target Rp. 37.846.769.641. kemudian pendapatan transfer hanya terrealisasi 17,08% dengan capaian Rp. 145.239.513.429 dari target Rp. 850.367.922.215 dan terakhir lain-lain pendapatan yang sah sudah terrealisasi sebesar 25,11% atau mencapai Rp. 3.788.673.632 dari target Rp. 15.090.114.145.

Berikut adalah uraian singkat realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025:

Tabel 3.8 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2025 (Rp.)	Realisasi Triwulan I TA 2025 (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	PENDAPATAN DAERAH	903.304.806.001	156.172.742.764.	17,29
4.1	Pendapatan Asli Daerah	37.846.769.641	7.144.555.703	18,88
4.2	Pendapatan Transfer	. 850.367.922.215	145.239.513.429	17,08
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	15.090.114.145	3.788.673.632	25,11

Sumber : Bapenda - BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Lebih lanjut, disajikan capaian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada APBD TA 2020 - 2024 sebagai pembanding, sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat APBD TA 2022 - 2024

Uraian	Realisasi		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Daerah	29.045.920.662,99	36.026.850.720,77	21.433.153.424,91
Pendapatan Transfer	740.715.628.670,00	732.671.743.170,00	760.213.161.279,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	16.305.429.876,00
JUMLAH PENDAPATAN	769.761.549.332,99	768.698.593.890,77	797.951.744.579,91

Sumber : Bapenda-BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Dari berbagai pertimbangan serta melihat gambaran atas realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah seperti yang telah diuraikan diatas serta analisis dan perkiraan dari sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan arah kebijakan keuangan daerah, maka proyeksi Pendapatan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)			
		RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)
4.	PENDAPATAN DAERAH	893.995.878.350	903.304.806.001	934.434.976.093	31.130.70.092
4.1	Pendapatan Asli Daerah	68.984.822.129	37.846.769.641	62.378.871.733	2.746.014.500
4.1.1	Pajak daerah	16.564.633.874	22.000.977.292	23.000.977.292	1.000.000.000
4.1.2	Retribusi Daerah	2.492.044.084	3.567.670.380	3.567.670.380	-
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.929.479.534	2.429.479.534	2.429.479.534	-
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	46.998.664.637	9.848.642.435	33.380.744.527	23.532.102.092
4.2	Pendapatan Transfer	809.920.942.076	850.367.922.215	856.965.990.215	6.598.068.000
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	691.370.634.000	741.238.956.000	674.837.024.000	- 66.401.932.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.550.308.076	109.128.966.215	182.128.966.215	73.000.000.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	15.090.114.145	15.090.114.145	15.090.114.145	-
4.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	15.090.114.145	15.090.114.145	15.090.114.145	-

Sumber : Bappelitbangda & BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2024

Belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah pada hakekatnya diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, pelayanan terhadap pembangunan infrastruktur, pelayanan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta perlindungan sosial.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait operasional perkantoran pada tahun yang bersangkutan. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah melalui belanja barang dan jasa dalam kaitannya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, belanja modal, dan belanja transfer kepada pemerintah desa.

Arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama kurun waktu RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan dengan mempertimbangkan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, akan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.* Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
- 2) *Prioritas.* Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur, energi dan pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;
- 3) *Tolok Ukur dan Target Kinerja.* Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah;
- 4) *Optimalisasi Belanja Daerah,* Belanja Daerah khususnya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja operasi dan belanja modal

disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta; dan

- 5) *Transparan dan Akuntabel*. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

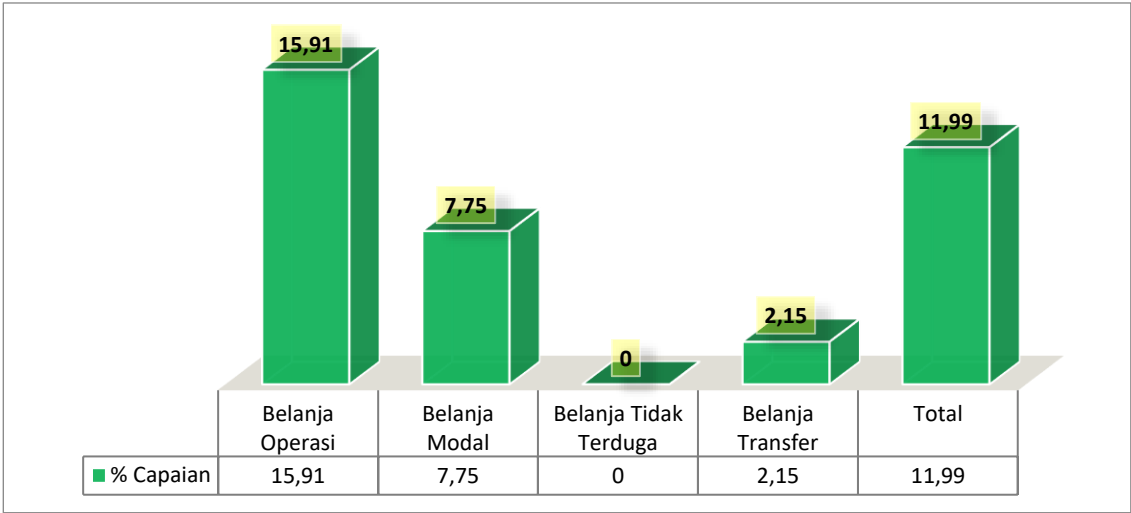
Berikutnya, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah kebijakan Belanja Daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat:

- a. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025 yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
- b. Belanja daerah dilakukan penyesuaian setelah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta pelaksanaan ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah terutama yang berkaitan dengan pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan. Belanja dalam rangka pemenuhan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawasan, unsur kewilayahan untuk kecamatan dan unsur pemerintahan umum;
- d. Belanja daerah diarahkan untuk pencapaian Visi, Misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan tetap memperhatikan capaian kinerja dan kerangka pendanaan serta dalam upaya mendukung pelaksanaan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung;
- e. Pengelolaan Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus

terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- f. Belanja pegawai digunakan untuk gaji dan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan turun dengan asumsi penyesuaian pada perhitungan ulang hingga Semester I;
- g. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran atau pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing perangkat daerah, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan turun dalam upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah;
- h. Belanja bantuan sosial digunakan untuk dalam rangka meningkatkan stimulus kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat marjinal dan diberikan melalui pendataan yang terukur, selektif tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi, pada perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan tetap
- i. Belanja hibah dilakukan secara selektif, sesuai kebutuhan, pemenuhan peraturan perundang-undangan, memenuhi unsur urgensi serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pada perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan naik;
- j. Belanja modal diarahkan untuk pembangunan infrastruktur daerah untuk penunjang ekonomi masyarakat dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, pada perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami penurunan untuk mendukung kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat;
- k. Belanja tidak terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya dan perkiraan pelaksanaan kegiatan kerja yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh dari Pemerintah Daerah serta sifatnya tidak biasa dan/atau tanggap darurat, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan naik;
- l. Belanja Transfer merupakan bantuan keuangan dan bagi hasil kepada pemerintahan desa yang bersifat umum. Belanja transfer dianggarkan sesuai dengan perhitungan dari peraturan perundang-undangan dan diarahkan pada pencapaian prioritas daerah di desa, pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan turun menyesuaikan dengan kewajiban daerah terhadap Pemerintahan Desa;
- m. Hasil realisasi capaian Belanja Daerah sampai dengan Triwulan I TA 2025 belum mampu terealisasi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari Total Belanja Daerah yang baru mampu teralisasi 11,99%. Angka capaian ini didapatkan dari perhitungan Belanja Operasi yang terealisasi pada angka 15,91%, Belanja Modal sebesar 7,75%, Belanja Tidak Terduga masih pada 0,00% dan Belanja Transfer mencapai 2,15%. Namun demikian, optimisme untuk pencapaian target-target Belanja pada Triwulan I Tahun 2025 akan dapat terwujud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja yang terukur.

Gambar 3.8 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I
Tahun 2025



Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Total Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp904.304.806.001 dan baru terserap sebesar Rp.108.387.586.727 atau 11,99%. Secara umum realisasi belanja daerah masih sangat minim. Sebagaimana anggaran belanja operasi sebesar Rp.577.380.576.532 baru terrealisasi sebesar Rp.91.872.195.480 atau 15,91%, kemudian anggaran belanja modal sebesar Rp.172.977.724.002 baru terrealisasi sebesar Rp.13.405.400.488 atau 7,75%. Belanja tidak terduga dengan anggaran sebesar Rp.9.000.000.000 di triwulan I 2025 belum ada realisasi dan terakhir anggaran belanja transfer sebesar Rp.144.946.505.476 baru terrealisasi sebesar Rp.3.109.990.759 atau 2.15%.

Capaian serapan belanja yang masih rendah menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat sehingga ada beberapa pos belanja yang dilakukan *refocusing* agar terhadap belanja Pemerintah Daerah agar keberlanjutan pembangunan tetap berjalan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Adapun gambaran singkat realisasi Belanja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I
Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2025 (Rp.)	Realisasi Triwulan I TA 2025 (Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	BELANJA DAERAH	904.304.806.001	108.387.586.727	11,99
5.1	Belanja Operasi	577.380.576.532	91.872.195.480	15,91
5.1.1	Belanja Pegawai	364.935.068.984	74.127.282.386	20,31
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	204.531.920.879	17.402.913.094	8,51

5.1.3	Belanja Bunga	0	0	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0	0	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.389.186.660	342.000.000	6,35
5.1.6	Belanja Bansos	2.524.400.000	0	0,00
5.2	Belanja Modal	172.977.724.002	13.405.400.488	7,75
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.799.581.850	47.351.847	0,48
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.054.149.096	606.680.045	0,71
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	73.739.266.258	12.751.368.596	17,29
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.804.726.798	0	0,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	580.000.000	0	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	0	0,00
5.3.5	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000	0	0,00
5.4	Belanja Transfer	144.946.505.476	3.109.990.759	2,15
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.652.939.000	0	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	142.293.566.476	3.109.990.759	2,19

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Capaian belanja daerah pada Triwulan I TA 2025 yang cenderung kecil diasumsikan akan naik pada akhir tahun anggaran. Hal ini dapat dilihat dari capaian realisasi Belanja Daerah pada APBD TA 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.13 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat
APBD TA 2022-2024**

Uraian	Realisasi		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
BELANJA			
Belanja Operasi	421.755.335.654,00	471.972.151.479,00	552.991.447.421,63
Belanja Modal	217.250.297.659,00	155.905.944.404,00	90.746.267.770,14
Belanja Tidak Terduga	8.171.030,94	364.550.000,00	355.000.000,00

Belanja Transfer	129.616.312.652,00	140.713.439.454,00	155.660.949.925,00
JUMLAH BELANJA	768.630.116.995,94	768.956.085.337,00	799.753.665.116,77

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Selanjutnya pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah (yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya) dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selama kurun waktu sisa tahun 2025. Gambaran Proyeksi Belanja Daerah di Kabupaten Pesisir Barat untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Target Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)			
		RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)
5	BELANJA DAERAH	896.573.116.916	904.304.806.001	935.875.176.832	39.302.059.916
5.1	Belanja Operasi	654.199.317.289	576.650.776.523	670.018.127.312	34.389.045.264
5.1.1	Belanja Pegawai	394.767.573.341	364.932.268.984	460.185.833.646	-2.375.154.100
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	245.518.106.818	203.836.920.879	201.613.707.006	-1.788.438.508
5.1.5	Belanja Hibah	9.913.637.130	5.357.186.660	5.694.186.660	337.000.000
5.1.6	Belanja Bansos	4.000.000.000	2.524.400.000	2.524.400.000	0
5.2	Belanja Modal	85.725.000.000	173.707.524.002	135.684.288.074	38.023.235.928
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.000.000.000	-		0
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.550.000.000	9.799.581.850	10.848.109.212	1.048.527.362
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.000.000.000	85.783.949.096	54.962.323.806	-30.821.625.290
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi	28.500.000.000	73.739.266.258	65.489.128.258	-8.250.138.000
5.2.5	Aset Tetap Lainnya	3.675.000.000	3.804.726.798	3.804.726.798	0
5.2.6	Aset Lainnya	0.00	580.000.000	580.000.000	0

5.3	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	0
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	0
5.4	Belanja Transfer	150.648.799.627	144.946.505.476	144.946.505.476	0
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.771.636.000	2.652.939.000	2.652.939.000	0
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	147.877.163.627	142.293.566.476	142.293.566.476	0

Sumber : Bappelitbangda, BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

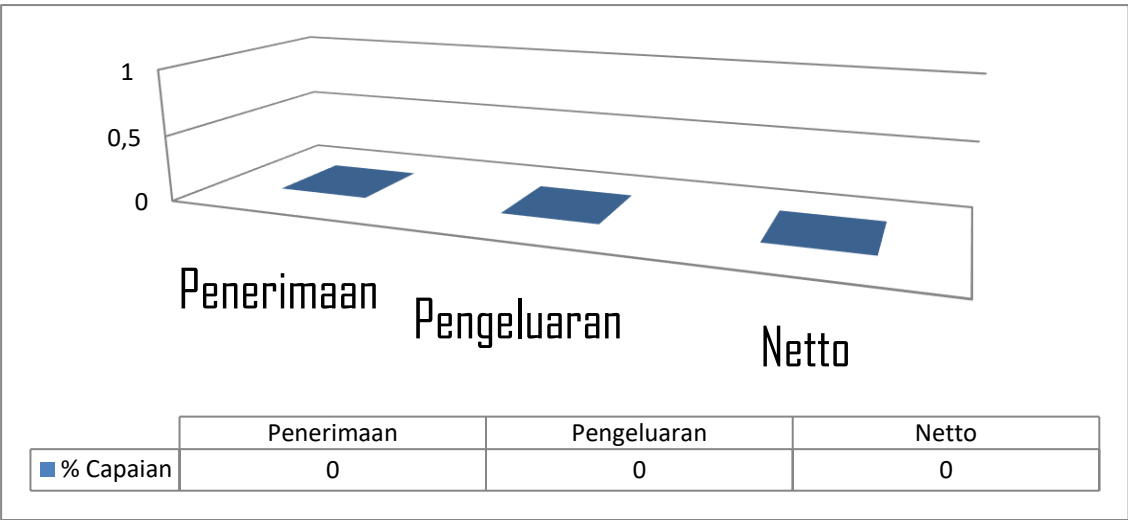
3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Tahun 2025

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara APBD. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Adapun kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ini pada dasarnya bersifat pasif, yaitu:

- a. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2024 diarahkan untuk menyeimbangkan antara kemampuan pendapatan daerah dengan belanja daerah;
- b. Hasil realisasi capaian Pembiayaan Daerah sampai dengan Triwulan I TA 2025 masih nihil atau 0,00% karena belum Penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Gambar 3.9 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Triwulan I Tahun 2025



Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2024

Total pembiayaan daerah masih belum terrealisasi dimana target yang ditetapkan pada angka Rp. 1.440.200.739. penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000.000. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah berupa penyertaan modal dengan target nihil.

Tabel 3.15 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran TA 2025 (Rp.)	Realisasi Triwulan I TA 2025(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	1.000.000.000	0	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	1.000.000.000	0	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Sebagai pembanding capaian kinerja, disajikan capaian realisasi pembiayaan daerah pada TA 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat
APBD TA 2022-2024

Uraian	Realisasi		
	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	8.868.180.385,74	7.499.612.722,44	5.742.121.276,21
Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	6.368.180.385,74	5.999.612.722,44	3.242.121.276,21
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	7.199.612.722,44	5.742.121.276,21	1.440.200.739,35

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Gambaran Proyeksi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan RKPD Tahun 2025 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17 Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan
Tahun 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)			
		RKPD 2025	APBD TA 2025	P RKPD 2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)-(4)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	2.577.238.566	1.000.000.000	1.440.200.739	440.200.739,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	5.077.238.566	1.000.000.000	1.440.200.739	440.200.739,00
6.1.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	5.077.238.566	1.000.000.000	1.440.200.739	440.200.739,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00

6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	0	0	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	0,00	0	0,00
6.2.2	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0,00
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0,00
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Pesisir Barat, 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atau target atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas dan/atau gabungan beberapa program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan Perangkat Daerah (terpilih) yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah maupun perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Sedangkan prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2025 telah dituangkan dalam dokumen RKPD tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam dokumen tersebut telah menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menyebutkan adanya efisiensi belanja termasuk terhadap Transfer ke Daerah dalam APBN Tahun 2025, serta menginstruksikan Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk membatasi atau mengurangi belanja tertentu dan menyesuaikan belanja APBD Tahun 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah, maka penyesuaian tersebut akan diakomodasi dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Dalam Perubahan RKPD tahun 2025 perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tetap mengacu dan memperhatikan:

- 1) Sasaran, arah kebijakan dan program Ranwal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029;
- 2) Hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025
- 3) Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025;

- 4) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
- 5) Kondisi internal dan eksternal daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih yang tertuang dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029.

Selanjutnya dalam rangka menjaga konsistensi, sinergi dan menjamin keselarasan sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri di atas, maka rumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1. Matriks Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Menurut Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Kabupaten Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan							
Mengembangkan Infrastruktur yang Berketahanan Pangan dan Tangguh Bencana serta Berkelanjutan	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar yang Berketahanan Pangan dan Tangguh Bencana serta Berkelanjutan		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,36	-	0,66
		Meningkatkan Layanan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	63	60	60
		Meningkatkan Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas	Angka	0,36	90*	0,43
		Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	75,77	75,77	80
		Meningkatkan Mitgasi Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	Angka	188,85	180,24	187,95
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	76,45	74,53	76,45
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam dan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,61	3,80-4,30	2,65-3,00

Ekonomi Kerakyatan	Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Optimalisasi Potensi Sumber Daya Daerah	PDRB Sektor Pertanian, Kehutana n dan Perikanan	Milyar Rupiah	1.374,78	-	1.370,75- 1.412,50
			PDRB Sektor Penyediaa n Akomodas i dan Makan Minum	Milyar Rupiah	75,57	1,78*	76,50- 80,25
			PDRB Sektor Perdagangan an Besar Kecil; Reparasi Kendaraa n Modal dan Sepeda Motor	Milyar Rupiah	572,68	11,58*	575,50- 615,25
		Pengentasan Kemiskinan dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Peningkatan Investasi yang Efektif dan Efisien	Tingkat Kemiskina n	Persen	12,64	13,04	12,50- 12,00
			Tingkat Pengangg uran Terbuka	Angka	3,04	2,41	3,03
			<i>Increment al Capital Output Rasio (ICOR)</i>	Angka	8,130	-	8,131
Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		Indeks Pembangu nan Manusia	Angka	71,04	71,25	71,54
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,75	63,79	74
		Meningkatkan Intelektualitas dan Karakter Anak Usia Sekolah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,16	12,08	12,26
		Meningkatkan Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	Indeks Kualitas Keluarga	Angka	0,10	-	0,10
			Indeks Pembangu	Angka	95,18	95,24	95,35

			nan Gender				
			Indeks Perlindun gan Anak	Angka	60,9	-	60,9
		Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangu nan Pemuda	Angka	53,17	-	53,25
Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	Mewujudkan Kehidupan Masayarakat yang Harmonis, Berbudaya dan Inklusif		Indeks Kerukuna n Umat Beragama	Angka	74,07- 74,13	74,14- 74,50	76,07- 76,96
		Meningkatkan Kemandirian Pekon	Indeks Pekon	Angka	7,76	4,31	7,76
		Mewujudkan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangu nan Kebudaya an	Angka	57,82	-	58,66
		Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Persentas e Penegaka n Hukum Peraturan Daerah	Persen	100	100	100
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Inlusif Berbasis Digital		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	65,53	C*	65,75
			Indeks Sistem Akuntabili tas Kinerja Pemerinta han	Angka	60,02	B*	60,25
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dengan Digitalisasi	Indeks Sistem Pemerinta han Berbasis Elektronik	Angka	2,94	-	2,95
			Maturitas Penyeleng garaan Sistem Pengendal ian Intern Pmerintah	Angka	2,55	-	2,55
		Meningkatkan Integritas dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,66	-	3,75

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029, 2025

Sebagai kesinambungan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, maka memasuki periode tahun keempat RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 dan tahap pertama RPJPD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045, perencanaan yang harus dilalui pada tahap ini adalah tahapan perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan dan/atau mempertahankan capaian-capaian dari kinerja yang telah dicapai.

Perubahan RKPD Tahun 2025 mensinergikan pencapaian target dari pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Tahun 2021-2026, pencapaian target dari Rencana RPJMD Tahun 2025-2029, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung. Tema dan prioritas pada Tahun Anggaran 2025 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025. Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2025 adalah **“Pemantapan Ekonomi Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas SDM Serta Meningkatkan Kualitas Infrastruktur”** ditetapkan untuk mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Pesisir Barat **“Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan”**. Berikutnya diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan serta akan mendasari gerak langkah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat selama satu tahun kedepan yaitu pada tahun 2025.

Untuk menunjang pelaksanaan Tema Pembangunan tersebut, ditetapkan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat untuk tahun 2025 dalam pelaksanaan roda pemerintahan daerah dan perencanaan pembangunan untuk peningkatan penjaminan terlaksananya pelayanan pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan layanan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini yang terjangkau dan bermutu bagi penduduk;
 - b. Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan yang terjangkau dan berkualitas;
 - c. Peningkatan pembinaan dan akses layanan keluarga berencana;
 - d. Penurunan diskriminasi dan peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga;
 - e. Pemberdayaan dan pengembangan kompetensi pemuda dan organisasi kepemudaan;
 - f. Peningkatan kompetensi dan keterampilan kerja, serta pelayanan penempatan kerja bagi penduduk usia kerja;
2. Pembangunan Infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur jaringan jalan;
 - b. Mengembangkan moda transportasi yang aman, murah dan terjangkau dan berkualitas;
 - c. Pembangunan fasilitas layanan permukiman dan perumahan yang layak dan berkualitas dengan memperhatikan penataan ruang;
 - d. Pengembangan jaringan irigasi daerah dari hulu hingga hilir;
 - e. Perencanaan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, pencemaran dan kerusakan kualitas udara, air dan lahan;

- f. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penyelamatan bencana yang efektif, efisien dan tepat guna termasuk pemadam kebakaran;
- 3. Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat, dengan arah kebijakan:
 - a. Peningkatan produktivitas industri cepat tumbuh;
 - b. Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa;
 - c. Peningkatan dan pengembangan iklim investasi yang kondusif, stabil dan berdaya saing;
 - d. Optimalisasi pengelolaan pertanian, perkebunan dan peternakan;
 - e. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan penyuluh dan petani;
 - f. Optimalisasi pengelolaan Perikanan tangkap dan budidaya;
 - g. Optimalisasi penyediaan, penyaluran dan pengendalian pangan di Masyarakat sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - h. Peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM;
 - i. Penguatan dan perluasan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial serta penanggulangan kemiskinan;
 - j. Peningkatan pengelolaan pariwisata yang terintegrasi dengan pengelolaan kebudayaan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif masyarakat;
- 4. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas, dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah dengan berpedoman pada penggunaan data dan teknologi informasi;
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen ASN yang profesional proposional;
 - d. Peningkatan dukungan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan perangkat daerah serta peningkatan layanan kepada kepala daerah dan anggota DPRD;
 - e. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - f. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pimpinan dan pemerintah daerah;
 - g. Membangun tata kelola keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat dengan arah kebijakan:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - b. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik;
 - c. Peningkatan pembangunan desa dan masyarakatnya termasuk pada kawasan transmigrasi;

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2025 secara umum masih dalam upaya pemantapan ekonomi masyarakat, kaitanya

dengan usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas daerah untuk peningkatan perekonomian daerah. Prioritas pembangunan pada tahun 2025 diarahkan pada upaya memantapkan ekonomi masyarakat dilakukan dengan revitalisasi sektor pertanian dan perikanan serta pemantapan daya saing sektor pariwisata unggulan Daerah yang berpijak pada kearifan lokal. Peningkatan kualitas SDM diarahkan untuk menyediakan manusia yang berkualitas sebagai faktor produksi untuk pembangunan daerah terutama sektor pertanian dan pariwisata serta ekonomi kreatif. Pada tahun 2025 ini juga kembali fokus pembangunan untuk penyelesaian beberapa proyek strategis daerah dalam menunjang pelayanan umum kepada masyarakat.

Melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dibawah ini ditampilkan tabel keselarasan prioritas pembangunan daerah P-RKPD Tahun 2025 dengan prioritas pembangunan nasional.

Tabel 4.2. Keselarasan Program Prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat

No	Prioritas Nasional		Prioritas Provisi Lampung	Prioritas Kabupaten Pesisir Barat
	Asta Cita	PHTC		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).			
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	1) Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian dengan Lumbung Pangan Desa, Daerah dan Nasional		
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	1) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersantasi Baik untuk yang Membutuhkan, Terutama Generasi MIlennial, Generasi Z dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Pembangunan Infrastruktur	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan

4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, da	1) Memberikan Makanan Bergizi Sehat di Sekolah dan Pesantren serta Bantuan Gizi untuk Balita dan Ibu Hamil 2) Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitasd di Kabupaten 3) Membangun Sekolah-Sekolah Unggulan Terintegrasi di Setiap Kabupaten dan Memperbaiki Sekolah-Sekolah yang Perlu di Renovasi	Peningkatan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.			
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1) Melanjutkan dan Menambah Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Penanggulangan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	1) Menaikan Gaji ASN (Terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh), TNI/POLRI dan Pejabat Negara 2) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan Meningkatkan Rasio Pnerimaan Negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%	Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur		Pemantapan Kehidupan Masyarakat yang aman, berbudaya dan demokratis Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat

Sumber : Data Diolah, 2025

Masih dalam rangka keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dalam melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dibawah ini ditampilkan tabel keselarasan prioritas pembangunan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Tabel 4.3. Keselarasan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Visi/ Misi	Prioritas Pembangunan
(1)	(2)	(3)
Visi	Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan	
1	Mengembangkan Infrastruktur yang Berketahanan Pangan dan Tangguh Bencana serta Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
3	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

Sumber : Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, 2025

Dalam upaya memastikan sinergitas perencanaan jangka menengah, prioritas pembangunan tersebut telah selaras dengan visi dan misi Gubernur Provinsi Lampung terpilih yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.4. Keselarasan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.

No	Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih
(1)	(2)	(3)
Visi	Terwujudnya Pesisir Barat yang Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan	Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045
1	Mengembangkan Infrastruktur yang Berketahanan Pangan dan Tangguh Bencana serta Berkelanjutan	Mendorong Pertumbuhan ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif

2	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam dan Ekonomi Kerakyatan	
3	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif
4	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efekif dan Berintegritas
5	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

Sumber : Rancangan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029, 2025

Tema dan prioritas pembangunan tahun 2025 tersebut juga menetapkan target sasaran makro pembangunan. Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berusaha untuk bersinergi dalam mencapai target kinerja dimaksud dalam upaya pelaksanaan sistem pembangunan nasional yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Target kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4.5 Keselarasan Target Sasaran Makro Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Perubahan Tahun 2025

No	Indikator	Pemerintah Pusat	Provinsi Lampung	Kabupaten Pesisir Barat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 - 5,6	4,9 – 5,3	2,65 – 3,50
2	Inflasi (%)	-	1,5 – 3,5	-
3	PDRB Perkapita (juta rupiah)	21,8	52,6 – 54,6	36,757-38,630
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5,0	3,8 – 3,5	2,81 - 3,03
5	Tingkat Kemiskinan (%)	7,8 – 8,0	9,5 – 10	12,00-12,50
6	Indeks Modal Manusia (Nilai), Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	0,56	72,97	71,54
7	Indeks Gini (Nilai)	0,379 – 0,382	0,282 – 0,293	0,30 - 0,29
8	Nilai Tukar Petani (Nilai)	105 – 108	109 – 110	125
9	Nilai Tukar Nelayan (Nilai)	107 – 110	-	103,7
10	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) /Ton CO2E	38,6	13	105.990,05

Sumber : Data Diolah, 2025

Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 dan sinergitas dengan Visi dan Misi Nasional Tahun 2025-2029, maka Arah Kebijakan Umum pembangunan selama kurun waktu 2025-2029 akan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni:

a. Pendekatan Pengembangan Wilayah

Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, pendekatan kewilayahan merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pengembangan Ekonomi Wilayah, Tata Ruang, Kawasan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat. Pertanian yang telah mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi. Revitalisasi Pertanian tersebut akan memungkinkan pengembangan dan transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri. Pengembangan agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri bioenergi serta pada akhirnya membantu meningkatkan sektor-sektor penunjang lainnya.

Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global dengan tindakan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan demikian, apa yang dilakukan akan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis antara pemenuhi kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan dengan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan air.

Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung, teluk, dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian alam, baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru. Dengan demikian pariwisata diharapkan dapat tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi kerakyatan.

2) Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Infrastruktur tersebut antara lain: pengembangan Bandara Krui (Bandara M Taufik Kemas);

Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik investasi, sehingga infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan sebagai *core* utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastruktur mikro meliputi antara lain: jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pengembangan Budaya

Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh sumberdaya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan demikian,

pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam periode RPJMD 2025-2029. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai proses pendidikan baik, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian. Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasarana, tenaga kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan dikembangkan fasilitas pendidikan dasar dan sistem pendidikan yang berskala internasional.

Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan pengediaan bahan makanan lengkap (secara nutrisi) dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan kesehatan akan berkaitan dengan penyediaan kemudahan layanan kesehatan, serta tersedianya tenaga kesehatan dan obat-obatan yang mencukupi. Pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang bersifat preventif.

Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat, dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari, maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, proses penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati diri.

Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu mendukung pengembangan pariwisata budaya. Dengan demikian pengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang sedang dibangun dan dikembangkan.

b. Pendekatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendekatan pembangunan melalui Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan cara pendekatan pembangunan yang menempatkan daerah sebagai perencanaan, pelaksana, pengawas dan yang bertanggungjawabkan penggunaan keuangan tersebut. Pendekatan pengelolaan keuangan daerah merupakan metode pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Optimalisasi dan Efisiensi Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan sistem informasi, sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

2) Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif dan inovatif, seperti pengembangan BUMD; pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dll. Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan sinergis dengan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.

Prioritas-prioritas serta metode pendekatan diatas diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan

yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor*, dan *pro-environment*. Masih berkaitan dengan prioritas tersebut di atas, pada Kabupaten Pesisir Barat prioritas-prioritas pembangunan untuk tahun 2025 tersebut dibebankan kepada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat dengan langkah-langkah kebijakan disusun dalam urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas, diprioritaskan pada pelaksanaan Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Tenaga Kerja, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pemuda dan Olahraga, Urusan Perpustakaan, Urusan Kearsipan, Urusan Transmigrasi;
- b. Pembangunan Ekonomi Daerah, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Pangan, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pariwisata, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian;
- c. Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Daerah, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Pertanahan, Urusan Perhubungan;
- d. Harmonisasi kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat, difokuskan pada pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Urusan Sosial, Urusan Kebudayaan, Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- e. Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, difokuskan pada pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Persandian, Unsur Sekretariat Daerah, Unsur Sekretariat DPRD, Unsur Perencanaan, Unsur Keuangan, Unsur Kepegawaian, Unsur Pendidikan dan Pelatihan, Unsur Penelitian dan Pengembangan, Unsur Inspektorat Daerah, Unsur Kecamatan.

4.2.1. Program Prioritas Daerah

Pelaksanaan program prioritas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat diarahkan untuk tahun perencanaan 2025. selanjutnya akan dijelaskan gambaran prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 disandingkan dengan program dari perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan pada pembagian pelaksanaan Urusan Wajib (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawasan, Unsur Kewilayahan, serta Unsur Pemerintahan Umum sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6 Program Prioritas Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 dalam RPJMD Tahun 2021-2026

No	Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas RPJMD 2021-2026	Indikator	Target	Perangkat Daerah Pelaksana	Prioritas RKPD Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Misi I	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara				

	Berkeadilan, Maju Dan Berdaya Saing				
Tuj 1	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	71,54		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sas 1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	71,54		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan (Persen)	100	Dinas P dan K	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Daerah yang dikelola (Lokasi)	1	Sekretariat Daerah	
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku (Persen)	35	Sekretariat Daerah	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut terhadap Perizinan Usaha (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif (Persen)	100	Dinas Kesehatan	
	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)	0.95	Dinas PP PA dan KB	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Total Fertility Rate (Angka)	2.13	Dinas PP PA dan KB	
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Angka)	62.50	Dinas PP PA dan KB	
Tuj 2	Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Pemuda Dan Penduduk Usia Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,03		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sas 2	Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	3,03		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Persen)	60.00	Dinas Pora	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pemenuhan Pengembangan kapasitas Daya Saing Keolahragaan (Persen)	60.00	Dinas Pora	
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	2.41	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)	74.71	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Hubungan Industrial	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persen)	75.00	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
Tuj 3	Meningkatkan Kesenjangan Gender Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Angka)	95.24		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sas 3	Terwujudnya Kesenjangan Gender Dan Perlindungan Anak Yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Gender (Angka)	95.24		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)	40.00	Dinas PP PA dan KB	
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan Terhadap Anak (Persen)	33.33	Dinas PP PA dan KB	
	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Pendampingan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Persen)	100	Dinas PP PA dan KB	
Misi II	Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dengan Konsep Pembangunan Inklusif Untuk Konektivitas Antar				

	Wilayah Dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana Dan Berwawasan Lingkungan				
Tuj 1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah Dan Kewilayahan	Indeks Kualitas Infrastruktur (Angka)	60.00		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
Sas 1	Tersedianya Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Transportasi Daerah	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	45,00		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan (Persen)	42.50	Dinas Pu dan PR	
	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Jalan Desa Strategis dengan kondisi baik (Persen)	35.00	Dinas PU dan PR	
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pelayanan Angkutan Darat (Persen)	72.50	Dinas Perhubungan	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Cakupan Wilayah yang terlayani Angkutan Laut (Persen)	60.00	Dinas Perhubungan	
Sas 2	Tersedianya Pemukiman Penduduk Yang Sehat Dan Berkualitas	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)	46,26		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman (Persen)	43.50	Dinas PU dan PR	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (Persen)	78.50	Dinas PU dan PR	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pelayanan Sanitasi Sub Sektor Drainase Lingkungan (Persen)	40.00	Dinas PU dan PR	
	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah Layak Huni (Persen)	88.67	Dinas PR dan KP	
	Program Kawasan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni (Persen)	46.25	Dinas PR dan KP	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Permukiman yang Tertata (Persen)	55.00	Dinas PR dan KP	

Sas 3	Tersedianya Sumber Daya Air Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Rasio Jaringan Irigasi (Persen)	41,78		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah (Persen)	45.00	Dinas PU dan PR	
Sas 4	Pembangunan Infrastruktur Daerah Yang Ramah Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	74,53		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana Sarana Umum (Persen)	50.00	Dinas PR dan KP	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam Skala Mantap (Persen)	80.00	Dinas PU dan PR	
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Persen)	5.30	Dinas PU dan PR	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Kontruksi yang Handal dan dapat Diandalkan (Persen)	42.50	Dinas PU dan PR	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog (Persen)	35.00	Dinas PU dan PR	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan hidup (Persen)	100	Dinas LH	
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	74.53	Dinas LH	
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan (Persen)	57.43	Dinas LH	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah (Persen)	5.30	Dinas LH	
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin	Cakupan Pengendalian terhadap Izin Lingkungan, Izin	100	Dinas LH	

	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Izin Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berbasis Lingkungan Hidup (PUU LH) (Persen)			
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase Penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat (Persen)	40.00	Dinas LH	
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria (Kepala Keluarga)	5.000	Dinas PR dan KP	
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rasio Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	11.20	Dinas PR dan KP	
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong (Persen)	2.95	Dinas PR dan KP	
Sas 5	Tersedianya Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pencegahan Dan Penyelamatan Bencana Daerah	Indeks Resiko Bencana (Angka)	187.95		Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Peresentase Pelayanan Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran (Persen)	100	Satpol PP dan Damkar	
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan (Persen)	100	Satpol PP dan Damkar	
	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana Daerah (Persen)	100	BPBD	
Misi III	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian Dan Perikanan				
Tuj 1	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah Dengan Fokus Pada Potensi Lokal	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	2,65 s/d 3,00		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat

Sas 1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	2,65 s/d 3,00		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (Persen)	11.58	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok (Persen)	60.00%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pengembangan Ekspor	Net Ekspor Barang dan Jasa	43.184	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) (Perusahaan/ Perorangan)	750	Dinas PM dan PTSP	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan (Persen)	80.00	Dinas PM dan PTSP	
	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA (Persen)	6.55	Dinas PM dan PTSP	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN (Persen)	17.49	Dinas PM dan PTSP	
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan (Laporan)	5	Dinas PM dan PTSP	
Sas 2	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	PDRB Perkapita (juta)	36,757-37,569		Pembangunan Ekonomi Daerah
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Persen)	42.00	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (Persen)	4.00	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
Sas 3	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Terhadap Perekonomian Masyarakat	Nilai Tukar Petani (Angka)	125		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai Tukar Petani (Angka)	101.04	Dinas KP dan Pertanian	

	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	149.944	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (Poktan)	985	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Persen)	88.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) (Persen)	88.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	28,000	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Peresentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen)	5.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan (Persen)	60.00	Dinas KP dan Pertanian	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	14.708	Dinas Perikanan	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	19.497	Dinas Perikanan	
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada dalam Batas Biologis yang Aman (Angka)	0.033	Dinas Perikanan	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (Angka)	104	Dinas Perikanan	
Sas 4	Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini (Angka)	0.30 – 0.29		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persen)	52.50	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten (Persen)	55.00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (Persen)	2.18	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
Sas 5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tingkat Kemiskinan Daerah (Persen)	12,50-12,00		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program Pemberdayaan Sosial	Terdatanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan Perlindungan dan Jaminan Perlindungan Sosial Daerah (Persen)	100	Dinas Sosial	
	Program Penanganan Bencana	Cakupan Pemenuhan pasca Bencana (Persen)	100	Dinas Sosial	
Misi IV	Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Yang Berpijak Pada Kearifan Lokal				
Tuj 1	Meningkatkan Pariwisata Daerah Yang Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (Persen)	1.78		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
Sas 1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara (persen)	23.00		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (Persen)	3.18	Dinas Pariwisata	
	Program Pemasaran Pariwisata	Kunjungan Wisatawan (Orang)	615.189	Dinas Pariwisata	
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata (Persen)	40.00	Dinas Pariwisata	
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi (Persen)	30.00	Dinas P dan K	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Penduduk Usia 10 tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni (Persen)	25.00	Dinas P dan K	
Misi V	Menyelenggarakan Pelayanan Publik				

	Yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga				
Tuj 1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	C		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
Sas 1	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Angka)	80.00		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas
	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun (Persen)	100	Dinas Capil	
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik (Persen)	85.00	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) (Persen)	82.50	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Persen)	100	Kecamatan Bangkuntat; Krui Selatan; Lemong; Ngambur; Ngaras; Pulau Pisang; Pesisir Selatan; Pesisir Utara	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Persen)	100	Kecamatan Pesisir Tengah	
Sas 2	Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP (Huruf/Predikat)	CC		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas;

	Daerah Yang Berkualitas				Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat;
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen)	92.50	Seluruh Perangkat Daerah	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik (Dokumen)	2	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara baik (Persen)	100	Dinas Kominfo Statistik dan Persandian	
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan terhadap Dokumen Penganggaran (Persen)	100	Bappelitbang da	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah terhadap Program Prioritas Pusat (Persen)	95.00	Bappelitbang da	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Indeks Inovasi daerah (Angka)	Sangat Inovatif	Bappelitbang da	
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian (Persen)	75.38	BKPSDM	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN telah yang mengikuti pelatihan kepemimpinan (Persen)	22.64	BKPSDM	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Konsistensi Perencanaan, Pengelolaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran terhadap Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan (Persen)	100	Inspektorat	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Konsistensi Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi terhadap Kepatuhan Peraturan perundang-undangan (Persen)	100	Inspektorat	
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan	90.00	Sekretariat Daerah	

		Kesejahteraan Rakyat (Persen)			
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (Persen)	90.00	Sekretariat Daerah	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi anggaran dalam Dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) (Persen)	100	Sekretariat DPRD	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Persen)	51.00	Badan Kesbangpol	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu (Persen)	84.92	Badan Kesbangpol	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif (Persen)	75.00	Badan Kesbangpol	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Persen)	67.50	Badan Kesbangpol	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial (Persen)	75.00	Badan Kesbangpol	
Sas 3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berkualitas	Opini BPK (Huruf/Predikat)	WTP		Pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Tata Kelola Keuangan Daerah	100	BPKAD	

		sesuai Aturan (Persen)			
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Tata Kelola Barang Milik Daerah sesuai Aturan (Persen)	100	BPKAD	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	4.62	Bapenda	
Sas 4	Meningkatnya Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun (Angka)	0.6900		Pembangunan SDM, baik dari Sisi Kualitas dan Kuantitas
	Program Penataan Desa	Jumlah Desa Berkembang (Pekon)	65	Dinas PMP	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pekon Tertib Administrasi (Pekon)	110	Dinas PMP	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Pekon)	110	Dinas PMP	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Nilai Rata-rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi (Angka)	42.53	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang dibina (Lokasi)	1	Dinas Trans Naker dan Perindustrian	

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026

4.2.2. Dukungan terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), menggantikan program sebelumnya *Millennium Development Goals* (MDGs) yang selesai pada akhir tahun 2015. SDGs tersebut akan otomatis berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang untuk 15 tahun ke depan di mulai pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2030. Pembangunan Berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Adapun elemen dari pembangunan berkelanjutan yaitu bidang sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Agenda SDGs disusun berdasarkan capaian MDGs, dengan target dan sasaran yang diperluas. SDGs jauh lebih komprehensif dan transformatif dibandingkan dengan MDGs. Komprehensif karena melibatkan negara maju dan berkembang dengan tujuan yang lebih luas, mencakup tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menetapkan mekanisme untuk mengimplementasikan 17 tujuannya tersebut, yaitu melalui perangkat implementasi (*means of implementations*). Kemudian, transformatif karena tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mereka yang miskin, rentan, ataupun difabel didorong untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan, dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari SDGs. Indonesia siap dan berkomitmen penuh untuk melaksanakan SDGs karena sejalan dengan visi

pembangunan Indonesia dan sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) 2025-2045. Indonesia memiliki 119 target yang sesuai dengan 169 target SDGs.

Kabupaten Pesisir Barat juga berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan seluruh sektor 17 Tujuan TPB, yaitu: (1) Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan; (2) Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, Serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan; (3) Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia; (4) Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua; (5) Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan; (6) Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih Serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua; (7) Energi bersih dan terjangkau untuk semua; (8) Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan , Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan Yang Layak; (9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi; (10) Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara; (11) Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan; (12) Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; (13) Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya; (14) Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim; (15) Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat; (16) Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh; (17) Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan serta memastikan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Berikutnya, dalam upaya pencapaian TPB/SDGs Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada kewenangan daerah disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.7. Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian Tujuan SDGs Kabupaten Pesisir Barat

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD		TPB/SDGs
(1)	(2)	(3)		(4)
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan bagi Semua Penduduk dalam segala Usia Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar sepanjang Hayat bagi Semua

	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pemuda dan Penduduk Usia Kerja	2	Menurunnya Jumlah Pengangguran Daerah	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak
	Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	3	Terwujudnya Kesenjangan gender dan Perlindungan Anak yang Berkualitas	Tujuan 5 Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	1	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Transportasi Daerah	Tujuan 9 Mempromosikan Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
		2	Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Tujuan 11 Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
		3	Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung Kedaulatan Pangan	Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua
		4	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau untuk Semua

			Ramah Lingkungan	Tujuan 14 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
		5	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya Tujuan 14 Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
Misi III Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	1	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak Tujuan 9 Mempromosikan Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
		2	Meningkatnya Pendapatan Perkapita Masyarakat	Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
		3	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap Perekonomian Masyarakat	Tujuan 2 Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi serta Mempromosikan

				Pertanian Berkelanjutan
		4	Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara
		5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Tujuan 1 Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan
Misi IV Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal	Meningkatkan Pariwisata Daerah yang Berdaya Saing	1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Tujuan 8 Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan EKonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Pekerjaan yang Layak
Misi V Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga	Meningkatkan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Tujuan 17 Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
		2	Terwujudnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Tujuan 17 Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
		3	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan dan	Tujuan 17

			Aset Daerah yang Berkualitas	Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
		4	Meningkatnya Pembangunan di Desa/ Pekon	Tujuan 16 Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 (diolah)

Upaya untuk pencapaian SDGs di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung dan juga Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung termasuk Kabupaten Pesisir Barat hendaknya dimulai dari area-area prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan. Bahwa aspek pendidikan dan kesehatan, terutama pendidikan usia dini, menengah dan tinggi merupakan hal yang harus diprioritaskan dalam pencapaian target SDGs. Oleh karena itu, agenda pembangunan sebaiknya difokuskan pada penyediaan layanan pendidikan minimal di tingkat menengah dan penguasaan IPTEK. Sementara itu, target utama pembangunan SDM dibidang kesehatan adalah tersedianya akses universal terhadap jaminan kesehatan, terutama bagi kalangan perempuan dan anak-anak. Aspek pencegahan dan hidup sehat menjadi lebih utama dibandingkan dengan aspek kuratif. Penting untuk segera mewujudkan akses universal jaminan kesehatan yang berkelanjutan, termasuk dari sisi kualitas pelayanan dan pembiayaannya.
- b. Tersedianya infrastruktur dasar secara penuh, terutama air bersih dan sanitasi yang baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Pemerintah daerah dituntut agar dapat berinovasi dalam penyediaan infrastruktur dasar tersebut mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia.
- c. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas antar wilayah termasuk ke dalam prioritas pembangunan. Kehadiran infrastruktur multi-moda yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, seperti jalan darat, kereta api, pesawat terbang dan kapal laut merupakan salah satu komponen penting untuk peningkatan PDRB di masing-masing daerah. Sekaligus hal ini dapat menjadi jalan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.
- d. Penghidupan yang layak melalui ketersediaan lapangan kerja yang layak. Penciptaan lapangan kerja yang layak dapat didorong dengan menggali potensi-potensi ekonomi yang baru dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- e. Penggunaan institusi dan tata kelola (*good governance*) yang baik akan menjamin tercapainya berbagai target dalam SDGs dengan lebih cepat dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan, kehadiran peran pemerintah dibutuhkan di seluruh pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik secara tidak langsung juga akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat pada pemerintah dan akhirnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Adapun karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik dan perlu mendapatkan jaminan untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Kerangka hukum yang adil dan merata;
- c. Pelayanan public yang responsif;
- d. Menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan semua program dan kegiatan pelayanan publik.
- b. Berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
- c. Kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan;
- d. Sumber Daya Publik dikelola secara efektif dan efisien.

4.2.3. Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah hak seluruh individu. Pemerintah wajib menjamin pemenuhannya. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan hal tersebut, bahkan menjadikan SPM sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas anggaran daerah. Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat. Karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan bernegara yang dijamin oleh konstitusi.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian. Peraturan kementerian teknis SPM di atas menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan pelaksanaan SPM di daerahnya masing-masing, maka pemerintah daerah melalui prangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif dan efisien.

Penerapan SPM sendiri merupakan pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Dalam konteks pelaksanaan tahap penerapan SPM ini, pemerintah daerah harus memastikan akses pelayanan dasar bagi seluruh warga negara, di samping juga harus memperhatikan penyediaan jenis dan mutu pelayanan dasar secara minimal agar warga negaranya dapat hidup secara layak.

Dalam konteks penerapan SPM, pemerintah daerah sebagai pelaksana pemenuhan SPM harus melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Integrasi pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. SPM menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar di daerah.

Saat ini SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Serta Sosial dengan berbagai indikatornya. Untuk itu, dalam melaksanakan SPM yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan wajib pemerintahan daerah, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM, khususnya pada perangkat daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.

Mengingat SPM sudah diterapkan secara efektif mulai pada tahun 2019 maka perangkat daerah wajib:

- a. Melakukan pengintegrasian SPM kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama dalam dokumen RKPD dan Renja, sebagai acuan dalam penyusunan RKA untuk penyusunan RAPBD;
- b. Menyampaikan pelaporan capaian SPM setiap akhir tahun anggaran yang bersinergi dengan materi muatan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
- c. Diharapkan kedepannya SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.
- d. Untuk itu diharapkan seluruh perangkat daerah untuk bersama sama melakukan satu kesatuan gerak langkah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja organisasi dan melaksanakan tugas pokok serta fungsi sebagaimana telah diamanahkan kepada masing-masing perangkat daerah.

Berikutnya, dalam upaya pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada kewenangan daerah disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.8. Sinkronisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 terhadap Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Barat

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD		Jenis SPM
(1)	(2)	(3)		(4)
Misi I Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Daerah yang Berkualitas	Pendidikan Anak Usia Dini (usia 5-6 Tahun); Pendidikan Dasar (Usia 7-15 Tahun); Pendidikan Kesenakawanan (usia 7-18 Tahun);
				Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;

				Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Pelayanan Kesehatan Balita; Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
				Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Juwa Berat; Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV);
Misi II Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Kewilayahan	2	Tersedianya Pemukiman Penduduk yang Sehat dan Berkualitas	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
		3	Tersedianya Sumber Daya Air untuk Mendukung	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari;

			Kedaulatan Pangan	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
		5	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pencegahan dan Penyelamatan Bencana Daerah	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum; Pelayanan Informasi Rawan Bencana; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Misi III Mengembangk an Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatkan Pembanguna n Ekonomi Daerah dengan Fokus pada Potensi Lokal	5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin Daerah	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar; Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar; Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar; Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial, Khususnya Gelandangan dan Pengemis; Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana;

Sumber : RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 (diolah)

4.3. Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat

Selain pendekatan yang bersifat sektoral, rencana pembangunan daerah pada tahun 20219 ini juga menggunakan pendekatan kewilayahan. Pendekatan kewilayahan tersebut dilakukan guna mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, dengan penanganan secara lintas sektoral pada setiap wilayahnya.

Dalam Penataan Ruang dikenal kawasan strategis, yaitu suatu wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting bagi perkembangan wilayah dalam aspek ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan, teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi Lampung tahun 2021, selain mengaju pada RPJPD Kabupaten

Pesisir Barat Tahun 2005–2025, juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037.

Kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam RTRW meliputi:

- a. Kawasan Strategis Nasional ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, Kawasan perbatasan negara ini terdapat di Pulau Batu Kecil, atau dalam bahasa lokal disebut sebagai Pulau Betuah, berada di Kecamatan Bangkunt yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Pulau Betuah ini merupakan salah satu pulau terluar di Wilayah Barat Indonesia.
 - b. Kawasan Strategis Provinsi, meliputi
 - Kawasan Agro Minapolitan, lokasi agrominapolitan yang dimaksud berada di Kecamatan Ngambur, Ngaras dan Bangkunt.
 - Taman Nasional Bukit Barisan Selatan/TNBBS. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (Kawasan Lindung Nasional) yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Sebagian besar sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Lampung berhulu di TNBBS dan hutan yang masih termasuk kategori primer juga hanya terdapat di TNBBS.
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
 - 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
 - Kawasan Ekowisata Pulau Pisang di Kecamatan Pulau Pisang;
 - Kawasan Labuhan Jukung di Kecamatan Pesisir Tengah;
 - Kawasan Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan; dan
 - 2) Kawasan perkotaan krui di Kecamatan Pesisir Tengah.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan adalah Kawasan Hutan Tanam Rakyat (HTR) tersebar di wilayah kabupaten.
- Untuk mencapai tujuan pembangunan kewilayahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, menempuh kebijakan dan strategi sebagai berikut:
- a. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat, terdiri atas:
 - 1) pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.
 - meningkatkan sinergitas pariwisata dengan sektor potensial dengan konsep agrowisata, minawisata dan ekowisata;
 - mengembangkan daya tarik wisata potensial dengan meningkatkan aspek pemasaran pariwisata bagi wisatawan domestik maupun mancanegara;
 - mengembangkan kapasitas masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata yang bertumpu pada pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat; dan

- membangun dan meningkatkan infrastruktur pendukung bagi kawasan wisata potensial.
- 2) pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah.
- mengembangkan pusat pelayanan yang seimbang dan berjenjang antar wilayah dengan mengutamakan pada kawasan prioritas sesuai dengan potensi wilayah;
 - membangun dan meningkatkan sistem prasarana wilayah yang meliputi prasarana utama dan prasarana lainnya secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan wilayah; dan
 - Meningkatkan instrumen tata ruang yang mempertimbangkan daya dukung wilayah.
- 3) pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern yang ramah lingkungan.
- mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - memanfaatkan potensi lahan non produktif secara lebih bijaksana bagi industri perikanan dan kelautan;
 - mengembangkan dan memanfaatkan teknologi modern dalam pengelolaan industri perikanan dan kelautan dalam rangka peningkatan produktivitas dan memiliki nilai ekonomi tinggi;
 - menguatkan pemasaran hasil perikanan dan kelautan melalui peningkatan sumber daya; dan
 - meningkatkan instrumen ruang untuk pengendalian lingkungan bagi industri perikanan dan kelautan.
- 4) pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang kompetitif dan terintegrasi antar sektor.
- mengoptimalkan kapasitas produksi sektor pertanian melalui peningkatan komoditas unggulan; dan
 - mengembangkan infrastruktur pertanian dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan.
- 5) perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing dengan memperhatikan kearifan lokal.
- mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana;
 - meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan dengan penerapan teknologi modern;
 - mengoptimalkan kearifan lokal daerah dalam upaya untuk pelestarian lingkungan;
 - melakukan pencegahan penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup melalui pengembangan instrumen perizinan, insentif dan disinsentif dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan

- mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi konservasi kawasan.
- 6) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.
- mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsinya khusus pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
 - mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan.

b. Arah Pemanfaatan Ruang

Sementara itu, berdasarkan pada Perda No 8 Tahun 2017, arahan pemanfaatan ruang untuk perencanaan Tahun 2023 diarahkan untuk pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.9. Arah Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pembangunan RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pengembangan Struktur Ruang							
A1	Pemantapan Rencana Pusat-Pusat Pelayanan							
A1.1	Peningkatan fungsi PKL Krui	Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Kantor Pemerintah Kabupaten	Pesisir Tengah				Penataan Bangunan Gedung	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Pusat Perdagangan Barang dan Jasa	Pesisir Tengah				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Kawasan pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pembanguna n Rumah Sakit Umum Daerah	Pesisir Tengah				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Tengah				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembang an SPAM Perpipaan dan Berbasis Masyarakat	Pesisir Tengah				Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pengembang an Kawasan Permukiman	Pesisir Tengah				Pengembang an Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
A1.2	Peningkatan Fungsi PKLp Kota Jawa	Pengembang an Pusat Perdagangan dan Jasa	Bangku nat				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag
		Pengembang an Kawasan Pariwisata	Bangku nat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Bangku nat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas Pertanian	Bangku nat				Penyediaan dan Pengembanga n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembanga n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Kawasan Industri	Bangku nat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
A1.3	Peningkatan Fungsi PKLp Biha	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Biha	Pesisir Selatan				Penyelenggar aan Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
		Pengembang an Pusat Perdagangan dan Jasa	Pesisir Selatan				Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperindag

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an kawasan pariwisata	Pesisir Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pesisir Selatan				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Selatan				Penyediaan dan Pengembang a n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembang a n Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Kawasan Industri	Pesisir Selatan				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
		Pengembang an Jaringan Irigasi Teknis	Pesisir Selatan				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
A1.4	Peningkatan Fungsi PKLp Lemong	Penyusunan Rencana Detail/Rinci Kawasan Perkotaan Lemong	Lemong				Penyelenggar aan Penataan Ruang	Dinas PU dan PR
		Pengembang an Pusat	Lemong				Peningkatan Sarana	Dinas Koperindag

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Perdagangan dan Jasa					Distribusi Perdagangan	
		Pengembang an kawasan pariwisata	Lemong				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Lemong				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Lemong				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.5	Peningkatan Fungsi PPK Negeri Ratu Ngambur	Pengembang an kawasan pariwisata	Ngambu r				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngambu r				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan	Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							n Prasarana Pertanian	
A1.6	Peningkatan Fungsi PPK Way Napal	Pengembang an kawasan pariwisata	Krui Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Krui Selatan				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Pusat Pelayanan Kesehatan	Krui Selatan				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
A1.7	Peningkatan Fungsi PPK Gunung Kemala	Pengembang an kawasan pariwisata	Way Krui				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an	Way Krui				Penyediaan dan Pengembang	Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Infrastruktur dan Komoditas pertanian					n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
A1.8	Peningkatan Fungsi PPK Kebuayan	Pengembang an kawasan pariwisata	Karya Pengga wa				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Karya Pengga wa				Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.9	Peningkatan Fungsi PPL Parda Suka	Pengembang an kawasan Pariwisata	Ngaras				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Ngaras				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Ngaras				Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian; Penyediaan dan	Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Pengembangan Prasarana Pertanian	
A1.10	Peningkatan Fungsi PPL Kuripan	Pengembangan kawasan pariwisata	Pesisir Utara				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pesisir Utara				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
A1.11	Peningkatan Fungsi PPL Pasar Pulau Pisang	Pengembangan Kawasan Pariwisata	Pulau Pisang				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Infrastruktur Perikanan dan Kelautan	Pulau Pisang				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Infrastruktur dan Komoditas pertanian	Pulau Pisang				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan	Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							n Prasarana Pertanian	
		Pengembang an Kawasan Industri Kecil	Pulau Pisang				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
A2	Sistem Prasarana Utama							
A2 .1	Pengembang an Sistem Prasarana Transportasi Darat	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Sistem Jaringan Jalan Kolektor Primer	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Peningkatan Jalan Kabupaten	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Peningkatan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Rehabilitasi Jaringan Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Jalan	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n, Peningkatan dan Pemeliharaan	Bangku nat, Lemong				Penyelenggar aan Lalu Lintas dan	Dinas Perhubung an

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Terminal Tipe C					Angkutan Jalan (LLAJ)	
		Pengembang an Sarana dan Prasarana Terminal	Pesisir Barat				Penyelenggar aan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubung an
		Pengembang an Jaringan Pelayanan Lalu Lintas	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubung an
A2.2	Pengembang an Sistem Prasarana Transportasi Laut	Pembanguna n dan Pengembang an Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubung an
		Pembanguna n dan pengembang an Pelabuhan Khusus Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pembanguna n, Pengembang an dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan	Pesisir Barat				Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubung an
A3	Sistem Prasarana lainnya							
A3.1	Pengembang an Sistem	Pembanguna n Sistem Jaringan	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan	Dinas Kominfo

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Jaringan Telekomunikasi	Telekomunikasi (Komunikasi, Data dan Informasi)					Komunikasi Publik	
		Pembangunan jaringan Hotspot di Kawasan Wisata	Pesisir Barat				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Kegiatan Pemerintahan dan Dunia Usaha	Pesisir Barat				Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
A3.2	Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air	Peningkatan dan Pemeliharaan Sumberdaya Air Berskala Regional Guna Menjaga Kelestarian Lingkungan Dilakukan pada Seluruh Sungai yang Berhulu di TNBBS	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Daerah Irigasi	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembang	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							n Prasarana Pertanian	
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi yang Tersebar di Seluruh Kecamatan di Pesisir Barat	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas PU dan PR; Dinas Pertanian
		Pembanguna n Prasarana Pengendalian Banjir di Seluruh Wilayah	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n dan Rehabilitasi System Drainase Primer, Sekunder dan Tersier	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
		Pengamanan Abrasi Pantai	Pesisir Barat				Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PU dan PR
A3.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan							

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A3.3.1	Pengembangan Sistem Jaringan Air Minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Berbasis Masyarakat	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
		Pembangunan dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Minum	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PU dan PR
A3.3.2	Pengembangan Sistem Jaringan Persampahan	Pembangunan Dan Peningkatan TPA	Ngaras, Krui Selatan dan Pesisir Utara				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pembangunan TPST	Pesisir Barat				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
		Pembanguun an TPS	Pesisir Barat				Pengembangan Sistem dan	Dinas PU dan PR

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Pengelolaan Persampahan	
		Pengembang an Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Pesisir Tengah				Pengembanga n Sistem dan Pengelolaan Persampahan	Dinas PU dan PR
A3.3.3	Pengembang an Sistem Jaringan Air Limbah	Pembanguna n Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Limbah di Pusat Pelayanan Kesehatan	Pesisir Barat				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Pembanguna n IPLT	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
		Pembanguna n sarana dan prasarana air limbah di pedesaan	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembanga n Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Sarana dan Prasarana pengelolaan Air Limbah	Pesisir Barat				Pengelolaan dan Pengembang an Sistem Air Limbah	Dinas PU dan PR
B	Pengembangan Pola Ruang							
B1	Pengembangan Kawasan Budidaya							
B1.1	Pengelolaan Kawasan Peruntukan Pertanian	Pengembang an Lahan Padi Sawah Beririgasi Teknis pada Areal-areal Potensial	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Lahan Pertanian Pangan Berkelanjuta n (LP2B)	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produktivitas Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembang an Budidaya Perkebunan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian;	Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Pengembangan Budidaya Peternakan	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produktivitas Produksi Perkebunan melalui Intensifikasi Lahan dan Peningkatan Keterampilan Petani Kebun	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Pengembangan Kawasan Pertanian	Pesisir Barat				Penyediaan dan Pengembangan	Dinas Pertanian

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		melalui Pendekatan Agropolitan pada Kawasan-kawasan Potensial					n Sarana Pertanian; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
B1.2	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perikanan	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Pelabuhan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sarana dan Prasaranan Perikanan Nelyanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Optimalisasi TPI	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Laut (udang, kerapu, dan rumput laut)	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembangan Sentra Budidaya Perikanan Air Tawar	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Kegiatan Minapolitan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		Pengembang an Industri Pengolahan Perikanan	Pesisir Barat				Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
B1.3	Pengembang an Kawasan Peruntukan Industri	Pembanguna n Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangku nat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
		Pengendalian Lingkungan pada Kawasan Industri	Pesisir Barat				Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas LH
		Pengembang an Sarana dan Prasarana di Kawasan Industri	Pesisir Selatan, Bangku nat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
		Pengembang an Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pesisir Barat				Perencanaan dan Pembanguna n Industri	Dinas Koperindag
B1.4	Pengembang an Kawasan	Pengembang an Kawasan	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik	Dinas Pariwisata

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Peruntukan Pariwisata	Pariwisata Berkelanjuta n					Destinasi Pariwisata	
		Pembanguna n dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Pariwisata	Pesisir Barat				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Promosi Destinasi Pariwisata Berkelanjuta n	Pesisir Barat				Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
B1.5	Pengembang an Kawasan Peruntukan Permukiman	Pengembang an Kawasan Permukiman Perkotaan	Pesisir Barat				Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pengembang an Kawasan Permukiman Pedesaan	Pesisir Barat				Kawasan Permukiman	Dinas PR dan KP
		Pembanguna n dan Peningkatan Sarana dan Prasaran Permukiman	Pesisir Barat				Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Perumahan Rakyat	Pesisir Barat				Pengembanga n Perumahan	Dinas PR dan KP
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Permukiman	Pesisir Barat				Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pembanguna n dan Peningkatan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pesisir Barat				Pengembanga n Permukiman; Kawasan Permukiman	Dinas PU dan PR; Dinas PR dan KP
		Pengembang an Prasarana dan Sarana Kawasan Cepat Tumbuh Perkotaan	Pesisir Barat				Penataan Bangunan dan Lingkungann ya	Dinas PU dan PR
C	Pengembangan Kawasan Strategis							
C1	Pengembang an Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi	Pengembang an Kawasan Pulau Pisang	Pulau Pisang				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Pengembang an Kawasan Tanjung Setia	Pesisir Selatan				Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Arah Pemanfaatan Ruang		Lokasi	Tahun Pelaksanaan			Program	Perangkat Daerah
	Indikasi Program	Kegiatan		Tahap I		Tahap II		
				2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Pengembang an Kawasan Perkotaan	Pesisir Tengah				Penataan Bangunan dan Lingkungann ya	Dinas PU dan PR

Sumber : RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PESISIR BARAT TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN								260.793.020.033,00	210.161.914.209,00	216.478.993.814,00	-44.314.026.219,00						2.171.258.665.161,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							260.393.020.033,00	209.461.914.209,00	215.778.993.814,00	-44.614.026.219,00							2.170.488.665.161,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							260.393.020.033,00	209.461.914.209,00	215.778.993.814,00	-44.614.026.219,00							2.170.488.665.161,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				92,50 Persen	92,50 Persen	194.235.631.651,00	154.708.926.709,00	152.305.456.884,00	1.918.027.043.510,00							2.112.262.675.161,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		13.640.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	190.882.861.651,00	153.188.328.709,00	150.950.374.609,00	-39.932.487.042,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.099.684.528.161,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1697 Orang /bulan	1613 Orang /bulan	190.877.361.651,00	153.182.828.709,00	150.944.874.609,00	-39.932.487.042,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.099.678.478.161,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah di Perangkat Daerah Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku				100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00	36.000.000,00	-4.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	36.000.000,00	-4.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan				2 Urusan	2 Urusan	2.013.822.000,00	480.500.000,00	467.500.000,00	-1.546.322.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		11.176.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				70 Orang	4 Orang	1.853.822.000,00	320.500.000,00	367.500.000,00	-1.486.322.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	533.516.000,00	533.516.000,00	392.400.275,00	-141.115.725,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		586.868.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.450.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			93.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	96.016.000,00	96.016.000,00	96.016.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			105.618.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				25 Dokumen	25 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	158.884.275,00	-141.115.725,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	467.300.000,00	169.000.000,00	169.000.000,00	-298.300.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		426.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	53 Unit	387.300.000,00	169.000.000,00	169.000.000,00	-218.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			426.030.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	204.542.000,00	204.542.000,00	204.542.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		242.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			46.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	157.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.542.000,00	5.542.000,00	5.542.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	81.190.000,00	80.640.000,00	73.240.000,00	-7.950.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		89.309.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	3 Unit	54.500.000,00	69.900.000,00	62.500.000,00	8.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			59.950.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	15 Unit	26.690.000,00	10.740.000,00	10.740.000,00	-15.950.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.359.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan				100 Persen	100 Persen	66.157.388.382,00	54.752.987.500,00	63.473.536.930,00	-7.931.398.382,00							58.225.990.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka partisipasi kasar SD				93.07 %	93.07 %	42.838.665.633,00	37.238.499.200,00	44.273.798.630,00	1.435.132.997,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Masyarakat		36.309.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	4 Ruang	0,00	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				-	15 Unit	0,00	2.592.000.000,00	2.592.000.000,00	2.592.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	4 Unit	250.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00	670.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	3 Ruang	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah																		
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	3 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	2 Paket	140.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				20 Peserta Didik	352 Peserta Didik	100.000.000,00	302.550.700,00	302.550.700,00	202.550.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				10 Orang	489 Orang	100.000.000,00	5.627.744.500,00	5.865.698.600,00	5.765.698.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				60 Orang	60 Orang	8.160.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	-7.900.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				128 Satuan Pendidikan	128 Satuan Pendidikan	18.053.070.000,00	18.013.522.000,00	18.013.522.000,00	-39.548.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.858.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				32 Orang	30 Orang	100.000.000,00	87.210.000,00	87.210.000,00	-12.790.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	60 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			176.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			138.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				2 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				-	22 Komunitas	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				36 Kegiatan	1 Kegiatan	120.000.000,00	87.544.000,00	87.544.000,00	-32.456.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			510.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				5 Ruang	5 Ruang	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				21 Unit	34 Unit	11.455.095.633,00	380.000.000,00	7.177.345.330,00	-4.277.750.303,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				19 Ruang	58 Ruang	1.755.500.000,00	5.910.000.000,00	5.910.000.000,00	4.154.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				11 Paket	2 Paket	450.000.000,00	357.928.000,00	357.928.000,00	-92.072.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka partisipasi kasar SMP				92.14 %	92.14 %	16.751.462.749,00	13.455.762.300,00	14.846.762.300,00	-1.904.700.449,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Masyarakat		14.369.690.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				25 Unit	2 Unit	4.042.362.749,00	450.000.000,00	450.000.000,00	-3.592.362.749,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																			
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				-	29 Ruang	0,00	1.950.000.000,00	3.341.000.000,00	3.341.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																			
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	128.100.000,00	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.910.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				-	2 Paket	0,00	103.895.300,00	103.895.300,00	103.895.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	66 Peserta Didik	3.000.000.000,00	1.935.000.000,00	1.935.000.000,00	-1.065.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				30 Peserta Didik	30 Peserta Didik	100.000.000,00	102.403.000,00	102.403.000,00	2.403.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				40 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				38 Satuan Pendidikan	38 Satuan Pendidikan	8.031.200.000,00	8.020.504.000,00	8.020.504.000,00	-10.696.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				32 Orang	220 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				40 Orang	30 Orang	100.000.000,00	80.108.000,00	80.108.000,00	-19.892.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				0 Komunitas	37 Komunitas	80.000.000,00	61.452.000,00	61.452.000,00	-18.548.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				32 Orang	22 Orang	130.000.000,00	134.500.000,00	134.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	109.800.000,00	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.780.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				11 Paket	11 Paket	450.000.000,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka partisipasi kasar PAUD				74 %	74 %	6.201.700.000,00	3.764.246.000,00	4.058.496.000,00	-2.143.204.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Masyarakat		7.171.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				-	3 Unit	0,00	60.000.000,00	354.250.000,00	354.250.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	30 Orang	125.000.000,00	119.120.000,00	119.120.000,00	-5.880.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			135.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				118 Satuan Pendidikan	118 Satuan Pendidikan	2.216.700.000,00	2.095.805.000,00	2.095.805.000,00	-120.895.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PAUD	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	92.644.000,00	92.644.000,00	-7.356.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				32 Orang	32 Orang	1.000.000.000,00	94.865.000,00	94.865.000,00	-905.135.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				40 Konten Digital	40 Konten Digital	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.050.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				36 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000,00	30.734.000,00	30.734.000,00	-149.266.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			190.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				10 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	172.948.000,00	172.948.000,00	-127.052.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			320.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				10 Komunitas	5 Komunitas	120.000.000,00	60.788.000,00	60.788.000,00	-59.212.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				-	2 Ruang	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				36 Peserta didik	480 Peserta didik	510.000.000,00	244.372.000,00	244.372.000,00	-265.628.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			561.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	30 Orang	200.000.000,00	192.970.000,00	192.970.000,00	-7.030.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				10 Paket	10 Paket	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Warga negara dalam pendidikan kesetaraan				325 Orang	325 Orang	365.560.000,00	294.480.000,00	294.480.000,00	-71.080.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Masyarakat		376.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	290.560.000,00	264.480.000,00	264.480.000,00	-26.080.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				3 Paket	3 Paket	75.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			76.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							400.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	300.000.000,00							770.000.000,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							400.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	300.000.000,00							770.000.000,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 Tahun keatas yang Terlibat Pertunjukan Seni				25,00 Persen	25,00 Persen	300.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	360.000.000,00							660.000.000,00	
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni				65 %	65 %	300.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	300.000.000,00			-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat		660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi				30,00 Persen	30,00 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	10.000.000,00							110.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Terdaftar				2 Objek	2 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				2 Objek	2 Objek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN								105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00					111.178.638.818,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Kesehatan				95 %	95 %	37.487.292.160,00	31.420.623.600,00	31.350.822.254,00	-5.701.668.560,00							31.785.623.600,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				92,5 % 95 %	92,5 % 95 %	112.164.400,00	112.164.400,00	112.164.400,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		112.164.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	12.466.800,00	42.025.000,00	42.025.000,00	29.558.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.025.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.610.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-14.610.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.610.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-14.610.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.610.000,00	14.195.000,00	14.195.000,00	-5.415.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.195.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	19.610.000,00	14.195.000,00	14.195.000,00	-5.415.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.195.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	16.257.600,00	26.749.400,00	26.749.400,00	10.491.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.749.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				95 %	95 %	35.926.413.900,00	30.432.623.600,00	30.432.623.600,00	-5.493.790.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		30.432.623.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				417 Orang/ bulan	417 Orang/ bulan	35.914.413.900,00	30.420.623.600,00	30.420.623.600,00	-5.493.790.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.420.623.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				95 %	95 %	75.000.000,00	0,00	0,00	-75.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				95 %	95 %	85.000.000,00	0,00	0,00	-85.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		85.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah				95 %	95 %	584.253.860,00	450.215.600,00	380.414.254,00	-203.839.606,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		550.215.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.122.600,00	6.122.600,00	6.122.600,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.122.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.671.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.671.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.636.760,00	44.636.760,00	44.636.760,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.636.760,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	53.123.500,00	53.123.500,00	53.123.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			53.123.500,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material																			
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.300.000,00	36.300.000,00	36.300.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			36.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.400.000,00	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	320.000.000,00	285.961.740,00	216.160.394,00	-103.839.606,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			285.961.740,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				95 %	95 %	202.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	-120.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		187.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	55.000.000,00	0,00	0,00	-55.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	55.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 %	95 %	147.360.000,00	108.720.000,00	108.720.000,00	-38.640.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		108.720.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	50.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-38.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			96.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	960.000,00	720.000,00	720.000,00	-240.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			720.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95 %	95 %	355.100.000,00	234.900.000,00	234.900.000,00	-120.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		234.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	4 Unit	20.800.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	-7.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	5 Unit	249.900.000,00	181.400.000,00	181.400.000,00	-68.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			181.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				73 Unit	25 Unit	51.500.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-24.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	32.900.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00		
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	24.277.004.639,00	19.971.019.800,00	19.971.019.800,00	-4.305.984.839,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur		28.288.089.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun				2 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																			
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	13 Unit	2.000.000.000,00	5.633.187.400,00	5.633.187.400,00	3.633.187.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.789.187.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	0 Unit	3.000.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				1 Unit	0 Unit	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				1 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	3.755.904.000,00	3.755.904.000,00	1.755.904.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.955.904.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan				2 Unit	3 Unit	1.500.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-900.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			600.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				2 Unit	15 Unit	2.000.000.000,00	963.000.000,00	963.000.000,00	-1.037.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			757.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi																			
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center				11 Unit	0 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				11 Unit	11 Unit	110.000.000,00	51.001.000,00	51.001.000,00	-58.999.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			51.001.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																			
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	0 Unit	5.000.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.255.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	10 Paket	2.407.004.639,00	6.726.651.400,00	6.726.651.400,00	4.319.646.761,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.678.721.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1000 Keluarga	1000 Keluarga	50.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)																			
			Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan				1000 Layanan	1000 Layanan	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				11 Paket	11 Paket	50.000.000,00	141.276.000,00	141.276.000,00	91.276.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			141.276.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3281 Orang	3456 Orang	100.000.000,00	120.600.000,00	120.600.000,00	20.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3132 Orang	3448 Orang	100.000.000,00	86.085.000,00	86.085.000,00	-13.915.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			86.085.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																			
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2983 Orang	3311 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				144444 Orang	15894 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17479 Orang	19818 Orang	100.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	-45.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				115820 Orang	17750 Orang	100.000.000,00	60.836.000,00	60.836.000,00	-39.164.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.836.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15743 Orang	17750 Orang	100.000.000,00	129.618.800,00	129.618.800,00	29.618.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			129.618.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Diabetes yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20834 Orang	21270 Orang	100.000.000,00	91.432.000,00	91.432.000,00	-8.568.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			91.432.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				927 Orang	947 Orang	100.000.000,00	43.232.000,00	43.232.000,00	-56.768.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			43.232.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				271 Orang	275 Orang	100.000.000,00	47.535.000,00	47.535.000,00	-52.465.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.535.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2500 Orang	2182 Orang	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			197.930.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3300 Orang	2630 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	153.823.000,00	153.823.000,00	53.823.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			153.823.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	83.947.000,00	83.947.000,00	33.947.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			83.947.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	173.836.000,00	173.836.000,00	73.836.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			173.836.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	366.975.000,00	366.975.000,00	266.975.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			366.975.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	152.465.000,00	152.465.000,00	102.465.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			152.465.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				141746 Orang	141746 Orang	50.000.000,00	16.674.000,00	16.674.000,00	-33.326.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.674.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				141746 Orang	141746 Orang	50.000.000,00	27.382.000,00	27.382.000,00	-22.618.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.382.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	269.335.000,00	269.335.000,00	169.335.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			269.335.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																			
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				5000 Orang	5000 Orang	50.000.000,00	22.380.000,00	22.380.000,00	-27.620.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.380.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket	2 Paket	50.000.000,00	83.600.000,00	83.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			83.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	7 Dokumen	165.000.000,00	2.800.500.000,00	2.800.500.000,00	2.635.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.800.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	383.659.000,00	383.659.000,00	333.659.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			383.659.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				11 Unit	11 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																			
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			140.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2500 Orang	2500 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3300 Orang	3300 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2500 Orang	2500 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																			
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				2 Tatanan	1 Tatanan	50.000.000,00	68.005.000,00	68.005.000,00	18.005.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			68.005.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	395.315.000,00	395.315.000,00	295.315.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			395.315.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				144444 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji																			
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				4 Dokumen	3 Dokumen	418.601.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-109.966.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			308.635.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				11 Unit	11 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan				100 %	100 %	170.000.000,00	4.050.534.900,00	4.190.534.900,00	651.034.900,00							821.034.900,00		
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	50.000.000,00	61.500.900,00	61.500.900,00	11.500.900,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		61.500.900,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	36.500.900,00	36.500.900,00	11.500.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.500.900,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	95.000.000,00	3.422.330.000,00	3.562.330.000,00	3.467.330.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		192.830.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	3.249.500.000,00	3.389.500.000,00	3.349.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				100 Orang	100 Orang	30.000.000,00	30.336.000,00	30.336.000,00	336.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.336.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	142.494.000,00	142.494.000,00	117.494.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			142.494.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentasenya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	25.000.000,00	566.704.000,00	566.704.000,00	541.704.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		566.704.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	566.704.000,00	566.704.000,00	541.704.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			566.704.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat Pengawasan dan Tindak Lanjut Terhadap Perizinan Usaha				100 %	100 %	170.000.000,00	137.428.200,00	137.428.200,00	-32.571.800,00							137.428.200,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100 %	100 %	50.000.000,00	44.261.000,00	44.261.000,00	-5.739.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		44.261.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	44.261.000,00	44.261.000,00	-5.739.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			44.261.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				100 %	100 %	50.000.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	-12.900.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		37.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	37.100.000,00	37.100.000,00	-12.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			37.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				100 %	100 %	50.000.000,00	36.067.200,00	36.067.200,00	-13.932.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		36.067.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				11 Unit	11 Unit	50.000.000,00	36.067.200,00	36.067.200,00	-13.932.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			36.067.200,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	50.000.000,00	58.808.000,00	58.808.000,00	8.808.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		58.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	58.808.000,00	58.808.000,00	8.808.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			58.808.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	100.000.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00	5.500.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		105.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	105.500.000,00	105.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			105.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	86.267.200,00	86.267.200,00	36.267.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			86.267.200,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS LEMONG								105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00						111.178.638.818,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	50.844.000,00	103.384.000,00	103.384.000,00	52.540.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			103.384.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1200 Orang	1200 Orang	5.035.000,00	0,00	0,00	-5.035.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2800 Orang	2800 Orang	30.850.000,00	49.490.000,00	49.490.000,00	18.640.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.490.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	48 Orang	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				329 Orang	329 Orang	2.690.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	3.940.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.630.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				120 Orang	120 Orang	2.320.000,00	0,00	0,00	-2.320.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	245.545.000,00	223.050.000,00	223.050.000,00	-22.495.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			223.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	12.740.000,00	12.740.000,00	12.740.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.740.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	10.450.000,00	10.730.000,00	10.730.000,00	280.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.730.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	20.951.000,00	21.040.000,00	21.040.000,00	89.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.040.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	430 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	5 Dokumen	182.400.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	-41.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			141.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	1.678.000.000,00	1.828.920.800,00	1.828.920.800,00	150.920.800,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.828.920.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	7 Dokumen	222.800.000,00	228.690.000,00	228.690.000,00	5.890.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			228.690.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.870.000,00	0,00	0,00	-2.870.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				62 Orang	62 Orang	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1340 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	18.190.000,00	22.486.000,00	22.486.000,00	4.296.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.486.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	2 Dokumen	111.030.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	-108.910.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.120.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	66.220.000,00	66.220.000,00	66.220.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			66.220.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	12.090.000,00	5.530.000,00	5.530.000,00	-6.560.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.530.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PUGUNG TAMPAK							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00					111.178.638.818,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				156 Orang	156 Orang	53.800.000,00	116.064.000,00	116.064.000,00	62.264.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			116.064.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				148 Orang	148 Orang	2.925.000,00	0,00	0,00	-2.925.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				320 Orang	320 Orang	39.105.000,00	35.320.000,00	35.320.000,00	-3.785.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			35.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	68 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			21.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				38 Orang	38 Orang	4.730.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	11.770.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	204.150.000,00	176.426.000,00	176.426.000,00	-27.724.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			176.426.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	8.610.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.610.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	3.410.000,00	9.350.000,00	9.350.000,00	5.940.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	10.500.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	-6.980.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1100 Orang	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.520.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	5 Dokumen	129.170.000,00	118.350.000,00	118.350.000,00	-10.820.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			118.350.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	715.000.000,00	730.571.800,00	730.571.800,00	15.571.800,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			730.571.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	7 Dokumen	184.005.000,00	190.844.000,00	190.844.000,00	6.839.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			190.844.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.720.000,00	0,00	0,00	-2.720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				240 Orang	240 Orang	1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				8 Orang	8 Orang	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1200 Orang	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	21.240.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	-13.320.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	1 Dokumen	71.680.000,00	990.000,00	990.000,00	-70.690.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	23.040.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	32.040.000,00	10.296.000,00	10.296.000,00	-21.744.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.296.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PULAU PISANG								105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00						111.178.638.818,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00		-		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				62 Orang	62 Orang	7.680.000,00	15.928.000,00	15.928.000,00	8.248.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.928.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				82 Orang	82 Orang	3.655.000,00	0,00	0,00	-3.655.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				116 Orang	116 Orang	16.560.000,00	15.980.000,00	15.980.000,00	-580.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.980.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	28 Orang	0,00	3.520.000,00	3.520.000,00	3.520.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.520.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	6.600.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	4.080.000,00	0,00	0,00	-4.080.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	133.315.000,00	121.407.000,00	121.407.000,00	-11.908.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			121.407.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	5.780.000,00	5.780.000,00	5.780.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.780.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	7.010.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-1.010.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	19.960.000,00	13.260.000,00	13.260.000,00	-6.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.260.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	820 Orang	0,00	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.720.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	5 Dokumen	52.880.000,00	74.160.000,00	74.160.000,00	21.280.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			74.160.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	260.000.000,00	250.900.000,00	250.900.000,00	-9.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			250.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	6 Dokumen	115.650.000,00	150.590.000,00	150.590.000,00	34.940.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.590.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	7.920.000,00	0,00	0,00	-7.920.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				23 Orang	23 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	680 Orang	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	45.240.000,00	55.315.000,00	55.315.000,00	10.075.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.315.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				2 Dokumen	2 Dokumen	35.500.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	-33.880.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.620.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	27.040.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00	-22.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.840.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KARYA PENGGAWA							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00					111.178.638.818,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	33.600.000,00	62.880.000,00	62.880.000,00	29.280.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	5.820.000,00	0,00	0,00	-5.820.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				420 Orang	420 Orang	34.730.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	67.270.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			102.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	180 Orang	0,00	7.260.000,00	7.260.000,00	7.260.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				48 Orang	48 Orang	8.950.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	290.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				21 Orang	21 Orang	23.680.000,00	0,00	0,00	-23.680.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	5 Dokumen	206.550.000,00	198.550.000,00	198.550.000,00	-8.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			198.550.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.740.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	16.560.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	-10.620.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.940.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	20.176.000,00	10.120.000,00	10.120.000,00	-10.056.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.120.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1800 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	5 Dokumen	107.475.000,00	122.670.000,00	122.670.000,00	15.195.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			122.670.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	1.161.779.290,00	1.193.180.090,00	1.193.180.090,00	31.400.800,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.193.180.090,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	7 Dokumen	183.352.000,00	187.744.000,00	187.744.000,00	4.392.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			187.744.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	2.640.000,00	0,00	0,00	-2.640.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				42 Orang	42 Orang	5.760.000,00	0,00	0,00	-5.760.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				18 Orang	18 Orang	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				-	2100 Orang	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			550.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	26.640.000,00	15.360.000,00	15.360.000,00	-11.280.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.360.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	77.280.000,00	440.000,00	440.000,00	-76.840.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			440.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	7.920.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				1 Dokumen	2 Dokumen	5.760.000,00	8.396.000,00	8.396.000,00	2.636.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.396.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUKESMAS KRUI								105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00						111.178.638.818,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				undefined undefined	undefined undefined	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				1 Orang	1 Orang	54.600.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	12.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			67.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				300 Orang	300 Orang	7.365.000,00	0,00	0,00	-7.365.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				1200 Orang	1200 Orang	49.240.000,00	95.520.000,00	95.520.000,00	46.280.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			95.520.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	320 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				230 Orang	230 Orang	4.850.000,00	11.790.000,00	11.790.000,00	6.940.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.790.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				28 Orang	28 Orang	2.720.000,00	0,00	0,00	-2.720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	249.850.000,00	304.500.000,00	304.500.000,00	54.650.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			304.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00	8.960.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.960.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	43.560.000,00	62.220.000,00	62.220.000,00	18.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			62.220.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1480 Orang	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.840.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	5 Dokumen	137.500.000,00	102.800.000,00	102.800.000,00	-34.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			102.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	1.901.363.750,00	2.265.805.200,00	2.265.805.200,00	364.441.450,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.265.805.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	7 Dokumen	222.400.000,00	243.270.000,00	243.270.000,00	20.870.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			243.270.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	15.465.000,00	0,00	0,00	-15.465.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.760.000,00	0,00	0,00	-1.760.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				65 Orang	65 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	25.880.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	-21.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.380.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	79.110.000,00	2.240.000,00	2.240.000,00	-76.870.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.240.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.520.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.697.000,00	0,00	0,00	-65.697.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	12.110.000,00	10.470.000,00	10.470.000,00	-1.640.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.470.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS BIHA								105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00						111.178.638.818,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				280 Orang	280 Orang	55.200.000,00	126.500.000,00	126.500.000,00	71.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			126.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				218 Orang	218 Orang	8.200.000,00	0,00	0,00	-8.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				890 Orang	890 Orang	56.540.000,00	55.680.000,00	55.680.000,00	-860.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.680.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	380 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				89 Orang	89 Orang	4.500.000,00	10.760.000,00	10.760.000,00	6.260.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.760.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				32 Orang	32 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	239.940.000,00	219.850.000,00	219.850.000,00	-20.090.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			219.850.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.520.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	14.410.000,00	19.470.000,00	19.470.000,00	5.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.470.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.600.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	1.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1580 Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	5 Dokumen	125.100.000,00	118.940.000,00	118.940.000,00	-6.160.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			118.940.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	1.749.744.000,00	1.948.358.700,00	1.948.358.700,00	198.614.700,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.948.358.700,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	7 Dokumen	220.736.000,00	225.644.000,00	225.644.000,00	4.908.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			225.644.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				32 Orang	32 Orang	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				18 Orang	18 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	-2.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1380 Orang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	12.660.000,00	18.960.000,00	18.960.000,00	6.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.960.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	96.260.000,00	3.580.000,00	3.580.000,00	-92.680.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.580.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	23.540.000,00	23.540.000,00	23.540.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.540.000,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	43.315.000,00	7.276.000,00	7.276.000,00	-36.039.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.276.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS NGAMBUR								105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00						111.178.638.818,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				260 Orang	260 Orang	22.140.000,00	98.928.000,00	98.928.000,00	76.788.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			98.928.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				180 Orang	180 Orang	40.320.000,00	0,00	0,00	-40.320.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				328 Orang	328 Orang	68.490.000,00	60.060.000,00	60.060.000,00	-8.430.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.060.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	340 Orang	0,00	8.882.000,00	8.882.000,00	8.882.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			8.882.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				162 Orang	162 Orang	5.760.000,00	9.180.000,00	9.180.000,00	3.420.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.180.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				60 Orang	60 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	236.525.000,00	224.850.000,00	224.850.000,00	-11.675.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			224.850.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.280.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	15.940.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00	-5.230.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.710.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	20.895.000,00	11.280.000,00	11.280.000,00	-9.615.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.280.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	2130 Orang	0,00	9.912.000,00	9.912.000,00	9.912.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.912.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	4 Dokumen	133.430.000,00	133.960.000,00	133.960.000,00	530.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			133.960.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	1.598.400.000,00	1.902.793.800,00	1.902.793.800,00	304.393.800,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.902.793.800,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				3 Dokumen	7 Dokumen	209.000.000,00	213.458.000,00	213.458.000,00	4.458.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			213.458.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	5.760.000,00	0,00	0,00	-5.760.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				56 Orang	56 Orang	3.960.000,00	0,00	0,00	-3.960.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				22 Orang	22 Orang	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	27.040.000,00	32.238.000,00	32.238.000,00	5.198.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			32.238.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	42.300.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00	-40.410.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.890.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	11.880.000,00	11.880.000,00	11.880.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.880.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	14.940.000,00	6.982.000,00	6.982.000,00	-7.958.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.982.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS NGARAS							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat	49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				280 Orang	280 Orang	45.300.000,00	64.400.000,00	64.400.000,00	19.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			64.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				189 Orang	189 Orang	6.075.000,00	0,00	0,00	-6.075.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				380 Orang	380 Orang	34.260.000,00	69.560.000,00	69.560.000,00	35.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			69.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	290 Orang	0,00	15.840.000,00	15.840.000,00	15.840.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				129 Orang	129 Orang	9.020.000,00	16.970.000,00	16.970.000,00	7.950.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.970.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	1.360.000,00	0,00	0,00	-1.360.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	233.040.000,00	213.640.000,00	213.640.000,00	-19.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			213.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.480.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	11.880.000,00	13.410.000,00	13.410.000,00	1.530.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	15.730.000,00	14.760.000,00	14.760.000,00	-970.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			14.760.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	2200 Orang	0,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.325.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	5 Dokumen	137.605.000,00	112.040.000,00	112.040.000,00	-25.565.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			112.040.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	1.005.628.200,00	1.005.628.200,00	5.628.200,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.005.628.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	7 Dokumen	199.790.000,00	207.036.000,00	207.036.000,00	7.246.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			207.036.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	1.320.000,00	0,00	0,00	-1.320.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				38 Orang	38 Orang	6.600.000,00	0,00	0,00	-6.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				12 Orang	12 Orang	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1680 Orang	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.530.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	23.130.000,00	23.040.000,00	23.040.000,00	-90.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.040.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	82.560.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	-78.480.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.080.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	23.175.000,00	23.175.000,00	23.175.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			23.175.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	17.420.000,00	10.011.000,00	10.011.000,00	-7.409.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.011.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS BANGKUNAT							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00						111.178.638.818,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				385 Orang	385 Orang	41.750.000,00	135.960.000,00	135.960.000,00	94.210.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			135.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				280 Orang	280 Orang	8.300.000,00	0,00	0,00	-8.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				828 Orang	828 Orang	57.775.000,00	73.780.000,00	73.780.000,00	16.005.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			73.780.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	390 Orang	0,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				165 Orang	165 Orang	2.520.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	6.820.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	6.780.000,00	0,00	0,00	-6.780.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	237.276.000,00	255.140.000,00	255.140.000,00	17.864.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			255.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	7.480.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	-880.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	11.460.000,00	11.020.000,00	11.020.000,00	-440.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.020.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	2400 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	5 Dokumen	183.420.000,00	155.500.000,00	155.500.000,00	-27.920.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			155.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	3.994.800.000,00	4.579.887.830,00	4.579.887.830,00	585.087.830,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.579.887.830,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	7 Dokumen	223.080.000,00	232.532.000,00	232.532.000,00	9.452.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			232.532.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				64 Orang	64 Orang	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				20 Orang	20 Orang	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	8.115.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	1.545.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			9.660.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	122.075.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	-120.245.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.830.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				-	1 Dokumen	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	7.025.000,00	7.248.000,00	7.248.000,00	223.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.248.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS WAY KRUI							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00						111.178.638.818,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	41.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			96.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2.360.000,00	0,00	0,00	-2.360.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	23.970.000,00	33.990.000,00	33.990.000,00	10.020.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			33.990.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				-	158 Orang	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2.640.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	5.160.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	2.800.000,00	0,00	0,00	-2.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				0 Dokumen	6 Dokumen	199.895.000,00	174.500.000,00	174.500.000,00	-25.395.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			174.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				0 Dokumen	2 Dokumen	18.580.000,00	18.240.000,00	18.240.000,00	-340.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			18.240.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				0 Dokumen	3 Dokumen	28.810.000,00	41.370.000,00	41.370.000,00	12.560.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			41.370.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1180 Orang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				0 Dokumen	5 Dokumen	70.160.000,00	78.820.000,00	78.820.000,00	8.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			78.820.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	843.860.800,00	677.246.600,00	677.246.600,00	-166.614.200,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			677.246.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	7 Dokumen	7.920.000,00	187.718.000,00	187.718.000,00	179.798.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			187.718.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1280 Orang	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				0 Dokumen	1 Dokumen	37.600.000,00	47.840.000,00	47.840.000,00	10.240.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			47.840.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				0 Dokumen	1 Dokumen	89.280.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00	-87.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.580.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan																			
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan</i>				-	1 Dokumen	0,00	24.200.000,00	24.200.000,00	24.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			24.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	<i>Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</i>				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i>				0 Dokumen	0 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	<i>Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif</i>				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				0 Dokumen	1 Dokumen	49.325.000,00	5.662.000,00	5.662.000,00	-43.663.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.662.000,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS KRUI SELATAN								105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00						111.178.638.818,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00		
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	<i>Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan</i>				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																			
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				210 Orang	210 Orang	23.000.000,00	66.720.000,00	66.720.000,00	43.720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			66.720.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																			
			<i>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				116 Orang	116 Orang	11.440.000,00	0,00	0,00	-11.440.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			<i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				300 Orang	300 Orang	70.132.000,00	79.620.000,00	79.620.000,00	9.488.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			79.620.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i>				-	280 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				190 Orang	190 Orang	9.600.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	6.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			16.300.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			<i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>				180 Orang	180 Orang	3.200.000,00	0,00	0,00	-3.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	6 Dokumen	192.375.000,00	165.422.000,00	165.422.000,00	-26.953.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			165.422.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				-	1 Dokumen	0,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.060.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	2 Dokumen	19.130.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00	-8.570.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3 Dokumen	17.588.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.412.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																			
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				-	1050 Orang	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.740.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				3 Dokumen	5 Dokumen	73.000.000,00	90.920.000,00	90.920.000,00	17.920.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	3 Dokumen	720.000.000,00	757.474.100,00	757.474.100,00	37.474.100,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			757.474.100,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				2 Dokumen	7 Dokumen	175.210.000,00	178.858.000,00	178.858.000,00	3.648.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			178.858.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																			
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	0,00	0,00	-13.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				30 Orang	30 Orang	8.800.000,00	0,00	0,00	-8.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	1190 Orang	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.200.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	1 Dokumen	23.200.000,00	25.400.000,00	25.400.000,00	2.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1 Dokumen	52.270.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-50.770.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan				-	1 Dokumen	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			26.400.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100 %	100 %	550.898.000,00	308.635.000,00	308.635.000,00	-242.263.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		308.635.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.660.000,00	0,00	0,00	-6.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Puskesmas/Fasilitas Kesehatan Yang Melaksanakan Kegiatan Promotif dan Preventif				100 %	100 %	455.430.000,00	335.148.200,00	335.148.200,00	-120.281.800,00							335.148.200,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	305.430.000,00	170.840.200,00	170.840.200,00	-134.589.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		170.840.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	34.365.000,00	7.862.000,00	7.862.000,00	-26.503.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.862.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD KH. MUHAMMAD THOHIR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00						111.178.638.818,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							105.467.548.638,00	105.678.138.818,00	106.656.864.834,00	1.189.316.196,00							111.178.638.818,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan				100 %	100 %	67.184.826.478,00	69.734.403.918,00	70.642.931.280,00	10.914.577.440,00							78.099.403.918,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	42.306.923.839,00	49.404.749.118,00	50.313.276.480,00	8.006.352.641,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		49.452.679.518,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	2 Dokumen	2.362.025.999,00	2.464.896.818,00	2.464.896.818,00	102.870.819,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Way Suluh	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.464.896.818,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	2 Dokumen	4.100.000.000,00	4.454.454.380,00	5.362.981.742,00	1.262.981.742,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Way Suluh	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.454.454.380,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							60.096.675.417,00	150.291.125.102,00	104.343.024.482,00	44.246.349.065,00						66.065.900.900,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							60.096.675.417,00	150.291.125.102,00	104.343.024.482,00	44.246.349.065,00							66.065.900.900,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							60.096.675.417,00	150.291.125.102,00	104.343.024.482,00	44.246.349.065,00							66.065.900.900,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				92,50 Persen	92,50 Persen	6.630.750.900,00	6.217.184.400,00	5.962.346.900,00	501.650.000,00							7.132.400.900,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	46.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	-2.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		49.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	2.666.750.900,00	2.852.320.400,00	2.852.320.400,00	185.569.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		2.768.100.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				448 Orang/ bulan	448 Orang/ bulan	2.653.250.900,00	2.838.820.400,00	2.838.820.400,00	185.569.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.753.250.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				100 %	100 %	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-50.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		66.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kepegawaian dan sumber daya manusia				100 %	100 %	350.000.000,00	254.500.000,00	254.500.000,00	-95.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		395.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				71 Paket	2 Paket	150.000.000,00	54.500.000,00	54.500.000,00	-95.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			175.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	1.628.000.000,00	1.636.914.000,00	1.382.076.500,00	-245.923.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		1.790.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	14 Paket	23.000.000,00	56.070.000,00	56.070.000,00	33.070.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				45 Paket	46 Paket	150.000.000,00	126.488.000,00	126.488.000,00	-23.512.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				40 Paket	10 Paket	50.000.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan</i>				8 Paket	6 Paket	170.000.000,00	148.856.000,00	148.856.000,00	-21.144.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			187.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			660.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	510.000.000,00	255.162.500,00	-244.837.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja</i>				100 %	100 %	655.000.000,00	0,00	0,00	-655.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Perangkat Daerah		715.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				4 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar																		
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Unit	0 Unit	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			99.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				14 Unit	0 Unit	165.000.000,00	0,00	0,00	-165.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			176.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan Layanan Pendukung kantor</i>				100 %	100 %	465.000.000,00	740.500.000,00	740.500.000,00	275.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		511.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	4 Laporan	85.000.000,00	327.000.000,00	327.000.000,00	242.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			93.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	143.200.000,00	143.200.000,00	-6.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	5 Laporan	230.000.000,00	270.300.000,00	270.300.000,00	40.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			253.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik</i>				100 %	100 %	760.000.000,00	678.950.000,00	678.950.000,00	-81.050.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Perangkat Daerah		836.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				9 Unit	9 Unit	410.000.000,00	296.950.000,00	296.950.000,00	-113.050.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			451.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																			
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	162.000.000,00	162.000.000,00	-38.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Daerah				45,00 Persen	45,00 Persen	9.200.000.000,00	5.462.261.436,00	9.181.719.436,00	920.000.000,00							10.120.000.000,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai				45 %	45 %	7.200.000.000,00	2.749.665.546,00	7.224.665.546,00	24.665.546,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		7.920.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				1 Lembaga	0 Lembaga	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																			
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				0,5 KM	0,1 KM	1.000.000.000,00	533.625.940,00	533.625.940,00	-466.374.060,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1 KM	0,15 KM	5.000.000.000,00	2.216.039.606,00	6.691.039.606,00	1.691.039.606,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																			
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,5 KM	0 KM	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah yang direhabilitasi				45 %	45 %	2.000.000.000,00	2.712.595.890,00	1.957.053.890,00	-42.946.110,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				1 KM	1 KM	1.000.000.000,00	2.712.595.890,00	1.957.053.890,00	957.053.890,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																			
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	0 KM	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap sumber daya air yang sehat dan aman				43,50 Persen	43,50 Persen	2.000.000.000,00	5.814.390.600,00	5.814.390.600,00	200.000.000,00							2.200.000.000,00		
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan				43,5 %	43,5 %	2.000.000.000,00	5.814.390.600,00	5.814.390.600,00	3.814.390.600,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1,8 Liter/Detik	1,8 Liter/Detik	500.000.000,00	5.814.390.600,00	5.814.390.600,00	5.314.390.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PENUGASAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				1,8 Liter/Detik	0 Liter/Detik	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman				78,50 Persen	78,50 Persen	1.800.000.000,00	4.649.379.000,00	4.649.379.000,00	180.000.000,00							1.980.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air Limbah Domestik) Layak dan aman				78,5 %	78,5 %	1.800.000.000,00	4.649.379.000,00	4.649.379.000,00	2.849.379.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		1.980.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman																		
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				432 M³/Hari	275 M³/Hari	1.000.000.000,00	4.649.379.000,00	4.649.379.000,00	3.649.379.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-PENUGASAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				25 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pelayanan sanitasi sub sektor drainase lingkungan				40,00 Persen	40,00 Persen	3.722.179.801,00	3.493.844.988,00	3.493.844.988,00	497.820.199,00							4.220.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat				40 %	40 %	3.722.179.801,00	3.493.844.988,00	3.493.844.988,00	-228.334.813,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		4.220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				800 M	800 M	3.522.179.801,00	3.493.844.988,00	3.493.844.988,00	-28.334.813,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				200 Meter	0 Meter	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase ketersediaan fasilitas pengurangan sampah di perkotaan				100 %	100 %	2.550.000.000,00	0,00	0,00	255.000.000,00							2.805.000.000,00	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang tersedia				100 %	0 %	2.550.000.000,00	0,00	0,00	-2.550.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		2.805.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0008	Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi				1 UNIT	0 UNIT	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0009	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan				1 Ton/hari	0 Ton/hari	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun				1 Ton/hari	0 Ton/hari	2.000.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Prasarana Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan Daerah dalam skala mantap				80,00 Persen	80,00 Persen	5.300.000.000,00	62.950.166.696,00	24.164.946.076,00	530.000.000,00							5.830.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Ketersediaannya Gedung Pemerintah				80 %	80 %	5.300.000.000,00	62.950.166.696,00	24.164.946.076,00	18.864.946.076,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		5.830.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				1 Bangunan Gedung	0 Bangunan Gedung	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan,	Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000.000,00	62.800.166.696,00	24.014.946.076,00	19.014.946.076,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	30 Dokumen	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Kawasan yang memiliki ruang terbuka hijau (RTH)				5,30 Persen	5,30 Persen	800.000.000,00	96.087.000,00	96.087.000,00	80.000.000,00							880.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan				5,3 %	5,3 %	800.000.000,00	96.087.000,00	96.087.000,00	-703.913.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		880.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				1 Kawasan	1 Kawasan	300.000.000,00	96.087.000,00	96.087.000,00	-203.913.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan				42,50 Persen	42,50 Persen	25.800.000.000,00	59.173.066.712,00	48.693.247.712,00	2.580.000.000,00							28.380.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota				42,5 %	42,5 %	25.800.000.000,00	59.173.066.712,00	48.693.247.712,00	22.893.247.712,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		28.380.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				8 Dokumen	8 Dokumen	3.000.000.000,00	1.882.591.913,00	2.262.591.913,00	-737.408.087,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	0 Jembatan	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				1 KM	1 KM	2.000.000.000,00	3.489.582.295,00	3.489.582.295,00	1.489.582.295,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PKB	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				2 KM	3,5 KM	5.000.000.000,00	38.544.251.962,00	16.684.432.962,00	11.684.432.962,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DBH SAWIT OPSEN PKB	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				4 KM	2 KM	5.000.000.000,00	14.485.379.135,00	21.385.379.135,00	16.385.379.135,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			5.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				1 Jembatan	0 Jembatan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi</i>				6 Jembatan	6 Jembatan	4.000.000.000,00	43.929.513,00	43.929.513,00	-3.956.070.487,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			4.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																			
			<i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>				1 Jembatan	1 Jembatan	3.000.000.000,00	177.331.894,00	4.277.331.894,00	1.277.331.894,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																			
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>				100 KM	460,1 KM	100.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																			
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				10 KM	0 KM	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jasa Konstruksi yang handal dan dapat diandalkan				42,50 Persen	42,50 Persen	1.350.000.000,00	745.926.000,00	745.747.000,00	135.000.000,00							1.485.000.000,00		
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	<i>Terlatihnya tenaga terampil kontruksi</i>				20 Orang	30 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	275.500.000,00	-24.500.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																			
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>				30 Orang	30 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	275.500.000,00	-24.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya sistem informasi jasa konstruksi</i>				100 %	100 %	350.000.000,00	279.926.000,00	369.247.000,00	19.247.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		385.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>				2 Dokumen	3 Dokumen	250.000.000,00	279.926.000,00	369.247.000,00	119.247.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			275.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																			
			<i>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan</i>				1 Layanan Informasi	0 Layanan Informasi	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	<i>Persentase pengawasan dan evaluasi pekerjaan fisik</i>				100 %	100 %	700.000.000,00	166.000.000,00	101.000.000,00	-599.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		770.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk</i>				12 Bangunan Konstruksi	0 Bangunan Konstruksi	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																			
			<i>Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk</i>				2 Lembaga	2 Lembaga	200.000.000,00	166.000.000,00	101.000.000,00	-99.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			220.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha</i>				1 Badan Usaha	0 Badan Usaha	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta Analog				35,00 Persen	35,00 Persen	943.744.716,00	1.688.818.270,00	1.541.315.770,00	89.755.284,00							1.033.500.000,00		
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Penyelesaian Materi Teknis dari Bimbingan Teknis RTRW</i>				35 %	35 %	283.744.716,00	1.576.448.820,00	1.451.448.820,00	1.167.704.104,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		307.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																			
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	121.594.200,00	74.094.200,00	49.094.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	1.438.966.370,00	1.361.466.370,00	1.261.466.370,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																			
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	58.744.716,00	15.888.250,00	15.888.250,00	-42.856.466,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian materi teknis dari bantuan teknis RDTR				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																			
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Ruang				12 Bulan	12 Bulan	80.000.000,00	36.947.200,00	26.949.700,00	-53.050.300,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		88.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																			
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				1 Layanan	1 Layanan	50.000.000,00	36.947.200,00	26.949.700,00	-23.050.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang																			
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan terhadap RTRW				35 %	35 %	80.000.000,00	75.422.250,00	62.917.250,00	-17.082.750,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat dan Perangkat Daerah		88.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																			
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	75.422.250,00	62.917.250,00	32.917.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								5.335.947.400,00	3.773.327.700,00	3.603.240.200,00	-1.732.707.200,00					6.398.465.030,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.134.797.000,00	3.653.327.700,00	3.502.240.200,00	-632.556.800,00							5.221.465.030,00		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							4.134.797.000,00	3.653.327.700,00	3.502.240.200,00	-632.556.800,00							5.221.465.030,00		
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ketersediaan sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran dan meningkatkan SDM Aparatur dalam mendukung pelayanan kinerja				92.50 persen	92.50 persen	2.379.797.000,00	2.477.667.700,00	2.369.386.700,00	431.942.030,00							2.811.739.030,00		
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan laporan kinerja Pwerangkat Daerah				12 Bulan	12 Bulan	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		13.640.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kruai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kruai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 persen	100 persen	1.742.407.400,00	1.923.827.700,00	1.923.827.700,00	181.420.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2.116.210.470,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.736.907.400,00	1.918.327.700,00	1.918.327.700,00	181.420.300,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.110.160.470,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik				100 persen	0 persen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	0 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 persen	100 persen	300.705.600,00	312.313.000,00	229.149.000,00	-71.556.600,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		327.176.160,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	0 Paket	4.809.600,00	0,00	0,00	-4.809.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.290.560,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.896.000,00	47.751.000,00	47.751.000,00	-5.145.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			58.185.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	5 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	5.500.000,00	-5.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	60 Laporan	195.000.000,00	216.562.000,00	163.898.000,00	-31.102.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			214.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prsarana Pendukung Kinerja				100 persen	100 persen	158.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	-89.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		173.800.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			88.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	0 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	63.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			69.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 persen	100 persen	65.774.000,00	62.117.000,00	57.000.000,00	-8.774.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		72.351.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	8.774.000,00	5.117.000,00	0,00	-8.774.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.651.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 persen	100 persen	80.510.000,00	78.010.000,00	78.010.000,00	-2.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		88.561.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	64.000.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00	-1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			70.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	0 Unit	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	15.510.000,00	15.510.000,00	15.510.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			17.061.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Rumah Layak Huni				88,67 persen	88,67 persen	675.000.000,00	193.910.000,00	168.938.000,00	82.801.000,00							757.801.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Atau yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni				100 persen	0 persen	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		192.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				4 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Laporan	0 Laporan	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																		
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				30 Orang	0 Orang	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota				12 Bulan	12 Bulan	240.000.000,00	43.605.000,00	38.105.000,00	-201.895.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		267.965.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	5 Unit Rumah	40.000.000,00	43.605.000,00	38.105.000,00	-1.895.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			47.965.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				10 Unit Rumah	0 Unit Rumah	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah				10 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Cakupan Pengelolaan Rumah Susun				12 Bulan	12 Bulan	95.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		159.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			49.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	50.305.000,00	30.833.000,00	-59.167.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		55.335.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	50.305.000,00	30.833.000,00	-59.167.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.335.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				6 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)				6 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio Permukiman Layak Huni				46,25 persen	46,25 persen	350.000.000,00	350.000.000,00	346.565.500,00	370.500.000,00							720.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman				12 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				12 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani				0,5 Ha	0 Ha	105.000.000,00	0,00	0,00	-105.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		115.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				1 Dokumen	0 Dokumen	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			49.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina				3 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	0 Dokumen	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			33.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan				12 Bulan	12 Bulan	195.000.000,00	350.000.000,00	346.565.500,00	151.565.500,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	350.000.000,00	346.565.500,00	301.565.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			385.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				0,5 Ha	0 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				0,5 Ha	0 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Permukiman yang Tertata				55,00 persen	55,00 persen	365.000.000,00	381.090.000,00	381.090.000,00	109.199.000,00							474.199.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh				20 persen	20 persen	365.000.000,00	381.090.000,00	381.090.000,00	16.090.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		474.199.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	315.000.000,00	381.090.000,00	381.090.000,00	66.090.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			419.199.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				30 Orang	0 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana umum				50 persen	50 persen	365.000.000,00	250.660.000,00	236.260.000,00	92.226.000,00							457.226.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan Yang Sudah dilengkapi PSU				30 persen	30 persen	365.000.000,00	250.660.000,00	236.260.000,00	-128.740.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		457.226.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1 Lokasi	1 Lokasi	100.000.000,00	130.000.000,00	115.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			143.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Laporan	0 Laporan	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			66.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan				1 Lokasi	2 Lokasi	100.000.000,00	120.660.000,00	120.660.000,00	20.660.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			132.726.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan																			
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	0 Lokasi	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			44.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan				1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			16.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.201.150.400,00	120.000.000,00	101.000.000,00	-1.100.150.400,00							1.177.000.000,00		
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							1.201.150.400,00	120.000.000,00	101.000.000,00	-1.100.150.400,00							1.177.000.000,00		
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reformasi Agraria				5000 KK	5000 KK	50.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00							55.000.000,00		
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Sengketa Tanah				12 Bulan	0 Bulan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	0 Berita Acara	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			27.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rasio Luas Tanah yang Disediakan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya				11,20 persen	11,20 persen	900.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00							990.000.000,00		
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Kerugian				12 Bulan	0 Bulan	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		990.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	900.000.000,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			990.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan Pemanfaatan tanah kosong				2,95 persen	2,95 persen	251.150.400,00	120.000.000,00	101.000.000,00	-119.150.400,00							132.000.000,00		
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Luas Lahan Bersertifikat				100 persen	100 persen	251.150.400,00	120.000.000,00	101.000.000,00	-150.150.400,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat Kabupaten Pesisir Barat		132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong																			
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				48 Laporan	297 Laporan	251.150.400,00	120.000.000,00	101.000.000,00	-150.150.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN								4.912.720.800,00	5.679.543.400,00	5.623.052.100,00	710.331.300,00						5.404.652.880,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.912.720.800,00	5.679.543.400,00	5.623.052.100,00	710.331.300,00							5.404.652.880,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							4.912.720.800,00	5.679.543.400,00	5.623.052.100,00	710.331.300,00							5.404.652.880,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah				100 Persen	100 Persen	2.839.331.800,00	2.840.175.800,00	2.817.184.500,00	284.593.180,00							3.123.924.980,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu				100 Persen	100 Persen	4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-2.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		4.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	2.283.131.800,00	2.153.960.800,00	2.153.960.800,00	-129.171.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.512.104.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/b ulan	17 Orang/b ulan	2.278.231.800,00	2.151.060.800,00	2.151.060.800,00	-127.171.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.506.054.980,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana				100 Persen	100 Persen	63.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	237.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		63.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	60 Paket	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			52.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 Persen	100 Persen	128.000.000,00	76.515.000,00	53.523.700,00	-74.476.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		140.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	0,00	0,00	-24.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.500.000,00	26.515.000,00	26.515.000,00	15.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.150.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	5.500.000,00	0,00	0,00	-5.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.050.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	50.000.000,00	27.008.700,00	-42.991.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			77.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		60.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja				100 Persen	100 Persen	117.700.000,00	117.700.000,00	117.700.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		129.470.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.570.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	107.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			117.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	193.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	-3.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		212.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			49.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	145.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			159.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				100 Persen	100 Persen	1.452.729.000,00	1.279.707.600,00	1.257.707.600,00	145.272.900,00							1.598.001.900,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keterliban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase gangguan trantibum yang tertangani				100 %	100 %	1.348.579.000,00	1.194.675.000,00	1.194.675.000,00	-153.904.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Mayarakat		1.483.436.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Keterliban Umum																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	218.079.000,00	0,00	0,00	-218.079.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			239.886.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				2 Dokumen	2 Dokumen	7.840.000,00	11.280.000,00	11.280.000,00	3.440.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.624.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				12 laporan	12 laporan	1.111.000.000,00	1.172.425.000,00	1.172.425.000,00	61.425.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.222.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				4 Laporan	4 Laporan	3.060.000,00	5.970.000,00	5.970.000,00	2.910.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.366.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Keterlibatan Umum																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keterlibatan Umum yang Tersedia				8 Unit	8 Unit	3.600.000,00	0,00	0,00	-3.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.960.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Pergub yang Terlaksana				100 Persen	100 Persen	95.000.000,00	75.882.600,00	60.882.600,00	-34.117.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Mayarakat		104.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				7 Laporan	7 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				40 Laporan	40 Laporan	20.000.000,00	7.982.600,00	7.982.600,00	-12.017.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				40 Laporan	40 Laporan	35.000.000,00	67.900.000,00	52.900.000,00	17.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	persentase pembinaan PPNS Kabupaten				100 Persen	100 Persen	9.150.000,00	9.150.000,00	2.150.000,00	-7.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		10.065.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	9.150.000,00	9.150.000,00	2.150.000,00	-7.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.065.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan kebakaran				100 Persen	100 Persen	620.660.000,00	1.559.660.000,00	1.548.160.000,00	62.066.000,00							682.726.000,00		
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran persentase pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran				100 % 100 Persen	100 % 100 Persen	620.660.000,00	1.559.660.000,00	1.548.160.000,00	927.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Mayarakat		682.726.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	570.660.000,00	1.559.660.000,00	1.548.160.000,00	977.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			627.726.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				70 Orang	70 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							3.596.632.876,00	3.963.622.700,00	3.861.287.700,00	264.654.824,00						3.776.885.797,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.596.632.876,00	3.963.622.700,00	3.861.287.700,00	264.654.824,00							3.776.885.797,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							3.596.632.876,00	3.963.622.700,00	3.861.287.700,00	264.654.824,00							3.776.885.797,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.881.793.376,00	2.913.251.700,00	2.870.586.700,00	144.070.699,00							3.025.864.075,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu				100 %	100 %	15.190.090,00	15.135.000,00	15.135.000,00	-55.090,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		15.960.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.401.200,00	7.321.000,00	7.321.000,00	-80.200,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Kampung Jawa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.770.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700.920,00	707.500,00	707.500,00	6.580,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			735.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	700.920,00	707.500,00	707.500,00	6.580,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			735.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	698.550,00	699.500,00	699.500,00	950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			735.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	698.550,00	699.500,00	699.500,00	950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			735.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.989.950,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.250.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Peraturan yang Ada				100 %	100 %	2.077.134.686,00	2.374.122.700,00	2.374.122.700,00	296.988.014,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.180.992.695,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15/14 Oran g/bulan	15/14 Oran g/bulan	2.071.635.900,00	2.368.622.700,00	2.368.622.700,00	296.986.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.175.217.695,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.499.700,00	2.500.000,00	2.500.000,00	300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.625.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	1.999.150,00	2.000.000,00	2.000.000,00	850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.100.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	999.936,00	1.000.000,00	1.000.000,00	64,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.050.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		21.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	0 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				14 Orang	14 Orang	10.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrtasi Umum Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	197.712.900,00	193.799.000,00	151.134.000,00	-46.578.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		207.567.895,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.250.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.689.600,00	13.299.000,00	13.299.000,00	609.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.324.080,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.200.000,00	0,00	0,00	-25.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.450.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.353.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-853.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.600.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.550.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	118.470.300,00	145.000.000,00	102.335.000,00	-16.135.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			124.393.815,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				100 %	0 %	210.000.000,00	0,00	0,00	-210.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		220.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			210.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	169.472.700,00	160.515.000,00	160.515.000,00	-8.957.700,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		177.946.335,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.920.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00	1.680.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			17.766.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			138.600.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	20.552.700,00	9.915.000,00	9.915.000,00	-10.637.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.580.335,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara				100 %	100 %	192.283.000,00	144.680.000,00	144.680.000,00	-47.603.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		201.897.150,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	37.658.000,00	35.850.000,00	35.850.000,00	-1.808.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			39.540.900,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	126.625.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00	-35.125.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.956.250,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	18.000.000,00	17.330.000,00	17.330.000,00	-670.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.900.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	714.839.500,00	1.050.371.000,00	990.701.000,00	36.182.222,00							751.021.722,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten				100 %	100 %	49.609.600,00	184.611.000,00	161.611.000,00	112.001.400,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		52.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				100 Orang	100 Orang	49.609.600,00	184.611.000,00	161.611.000,00	112.001.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			52.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				100 %	100 %	327.825.350,00	510.800.000,00	489.130.000,00	161.304.650,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		344.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				4 Unit	0 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			21.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																		
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				2 Kawasan	2 Kawasan	222.251.650,00	310.800.000,00	310.800.000,00	88.548.350,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			233.300.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				25 Orang	0 Orang	13.476.600,00	0,00	0,00	-13.476.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			14.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	200.000.000,00	178.330.000,00	128.330.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			52.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				2 Kawasan	0 Kawasan	22.097.100,00	0,00	0,00	-22.097.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			23.200.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten				100 %	100 %	169.479.100,00	260.000.000,00	260.000.000,00	90.520.900,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		178.000.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				10 Orang	10 Orang	119.479.100,00	250.000.000,00	250.000.000,00	130.520.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			125.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				10 Orang	10 Orang	50.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			52.500.000,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	167.925.450,00	94.960.000,00	79.960.000,00	-87.965.450,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		176.321.722,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				3 Dokumen	3 Dokumen	167.925.450,00	94.960.000,00	79.960.000,00	-87.965.450,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			176.321.722,00	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL							4.484.769.200,00	3.712.917.600,00	3.647.667.400,00	-837.101.800,00						4.932.246.120,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.484.769.200,00	3.712.917.600,00	3.647.667.400,00	-837.101.800,00							4.932.246.120,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							4.484.769.200,00	3.712.917.600,00	3.647.667.400,00	-837.101.800,00							4.932.246.120,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah (%)				92,50 %	92,50 %	2.655.737.900,00	2.762.693.000,00	2.742.406.000,00	265.573.790,00							2.921.311.690,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu				100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		13.640.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pelaporan keuangan tepat waktu				100 %	100 %	2.105.269.300,00	2.208.417.800,00	2.208.417.800,00	103.148.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.315.796.230,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.099.769.300,00	2.202.917.800,00	2.202.917.800,00	103.148.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.309.746.230,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				100 %	100 %	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	248.798.600,00	276.705.200,00	286.418.200,00	37.619.600,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		273.678.460,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	65.798.600,00	68.705.200,00	68.705.200,00	2.906.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.378.460,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	27.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	160.000.000,00	194.713.000,00	74.713.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	55.500.000,00	30.000.000,00	0,00	-55.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		61.050.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	0 Unit	55.500.000,00	30.000.000,00	0,00	-55.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.050.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	95.720.000,00	110.120.000,00	110.120.000,00	14.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		105.292.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	92.000.000,00	107.000.000,00	107.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			101.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			792.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	118.050.000,00	125.050.000,00	125.050.000,00	7.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		129.855.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	59.800.000,00	58.800.000,00	58.800.000,00	-1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			65.780.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	48.500.000,00	56.500.000,00	56.500.000,00	8.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			53.350.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	8 Unit	9.750.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.725.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terdatanya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)				100 %	100 %	64.960.250,00	40.340.000,00	40.340.000,00	6.496.025,00							71.456.275,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	64.960.250,00	40.340.000,00	40.340.000,00	-24.620.250,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	PSKS		71.456.275,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	64.960.250,00	40.340.000,00	40.340.000,00	-24.620.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			71.456.275,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan Pemenuhan SPM bidang sosial				100 %	100 %	1.569.414.200,00	694.659.800,00	677.159.800,00	156.941.420,00							1.726.355.620,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang menerima bantuan				100 %	100 %	223.374.350,00	115.000.000,00	100.000.000,00	-123.374.350,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	PMKS		245.711.785,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Orang	95 Orang	130.000.000,00	61.599.200,00	56.599.200,00	-73.400.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			143.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	10 Orang	63.374.350,00	28.000.800,00	25.500.800,00	-37.873.550,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			69.711.785,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	25.400.000,00	17.900.000,00	-12.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang tertangani				100 %	100 %	1.346.039.850,00	579.659.800,00	577.159.800,00	-768.880.050,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	PMKS		1.480.643.835,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	75.039.850,00	69.659.800,00	67.159.800,00	-7.880.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			82.543.835,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	0 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			12.100.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000.000,00	510.000.000,00	510.000.000,00	-750.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			1.386.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	cakupan perlindungan dan jaminan perlindungan sosial daerah				100 %	100 %	132.656.850,00	158.865.400,00	137.772.200,00	13.265.685,00							145.922.535,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase daerah yang aktif melakukan peutakhiran dan data terpadu penanggulangan kemiskinan				100 %	100 %	132.656.850,00	158.865.400,00	137.772.200,00	5.115.350,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Fakir miskin		145.922.535,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				114000 Orang	10457 Orang	87.000.000,00	105.224.800,00	55.631.600,00	-31.368.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			95.700.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10541 Keluarga	10541 Keluarga	45.656.850,00	53.640.600,00	82.140.600,00	36.483.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			50.222.535,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	cakupan pemenuhan pasca bencana				100 %	100 %	62.000.000,00	56.359.400,00	49.989.400,00	5.200.000,00							67.200.000,00	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	persentase warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi				100 %	100 %	62.000.000,00	56.359.400,00	49.989.400,00	-12.010.600,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Tagana		67.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Orang	16 Orang	62.000.000,00	56.359.400,00	49.989.400,00	-12.010.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			67.200.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN								2.703.786.200,00	3.104.340.500,00	2.993.215.500,00	289.429.300,00						2.982.210.820,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							2.405.976.200,00	2.643.515.500,00	2.568.515.500,00	162.539.300,00							2.649.119.820,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							2.405.976.200,00	2.643.515.500,00	2.568.515.500,00	162.539.300,00							2.649.119.820,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	2.106.936.200,00	2.435.815.500,00	2.385.815.500,00	212.843.620,00							2.319.779.820,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		13.640.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.684.286.200,00	1.976.715.500,00	1.976.715.500,00	292.429.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.852.714.820,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.678.786.200,00	1.971.215.500,00	1.971.215.500,00	292.429.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.846.664.820,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		11.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	230.500.000,00	230.000.000,00	180.000.000,00	-50.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		233.750.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			550.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.400.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	170.000.000,00	120.000.000,00	-30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			143.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	20.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	37.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		44.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	57.500.000,00	57.500.000,00	37.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	73.500.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-1.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		80.800.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.600.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			73.700.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	76.250.000,00	67.200.000,00	67.200.000,00	-9.050.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		83.875.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	66.000.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	-4.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.600.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	5.250.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.775.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka				2,41 %	2,41 %	145.000.000,00	144.125.000,00	135.125.000,00	9.000.000,00							154.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi				25 orang	25 orang	120.000.000,00	144.125.000,00	135.125.000,00	15.125.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		132.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				25 Orang	25 Orang	120.000.000,00	144.125.000,00	135.125.000,00	15.125.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			132.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggand disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				74,71 %	74,71 %	94.040.000,00	63.575.000,00	47.575.000,00	15.300.000,00							109.340.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	0 Orang	44.040.000,00	0,00	0,00	-44.040.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		54.340.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																				
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	0 Orang	44.040.000,00	0,00	0,00	-44.040.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			54.340.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online				2000 Orang	2000 Orang	50.000.000,00	63.575.000,00	47.575.000,00	-2.425.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																				
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				2000 Orang	2000 Orang	50.000.000,00	63.575.000,00	47.575.000,00	-2.425.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			55.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
4.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial				75 %	75 %	60.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00							66.000.000,00			
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pemeriksaan Perusahaan				83 Perusahaan	0 Perusahaan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendaftaran dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																				
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PPI/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun				2 Perkara	0 Perkara	40.000.000,00	0,00	0,00	-40.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		44.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	0 Perkara	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>				2 Lembaga	0 Lembaga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			22.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							297.810.000,00	460.825.000,00	424.700.000,00	126.890.000,00							333.091.000,00		
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							182.810.000,00	207.700.000,00	207.700.000,00	24.890.000,00							201.091.000,00		
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin				42 %	42 %	126.394.000,00	119.200.000,00	119.200.000,00	12.639.400,00							139.033.400,00		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Kelompok Pengrajin yang Dibina</i>				20 IKM	20 IKM	126.394.000,00	119.200.000,00	119.200.000,00	-7.194.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		139.033.400,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	42.745.000,00	0,00	0,00	-42.745.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			47.019.500,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	119.200.000,00	119.200.000,00	89.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			33.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	32.000.000,00	0,00	0,00	-32.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			35.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																			
			<i>Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	21.649.000,00	0,00	0,00	-21.649.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			23.813.900,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
2.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan Pengelolaan Kontibusi Industri Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB				4 %	4 %	56.416.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	5.641.600,00							62.057.600,00		
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Website yang Dikelola Dengan Baik</i>				1 Website	1 Website	56.416.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	32.084.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		62.057.600,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																			
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	56.416.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	32.084.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			62.057.600,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							115.000.000,00	253.125.000,00	217.000.000,00	102.000.000,00							132.000.000,00		
1.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Nilai Rata-Rata Indeks Perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementrian yang Direvitalisasi				44 %	44 %	60.000.000,00	120.000.000,00	102.500.000,00	6.000.000,00							66.000.000,00		
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Eks Transmigran</i>				4 Kelompok	4 Kelompok	60.000.000,00	120.000.000,00	102.500.000,00	42.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat		66.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi																			
			<i>Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan</i>				40 Orang	40 Orang	60.000.000,00	120.000.000,00	102.500.000,00	42.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			66.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
2.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina (Lokasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	55.000.000,00	133.125.000,00	114.500.000,00	11.000.000,00							66.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Cakupan Pengembangan Daerah Transmigran				1 Lokasi	1 Lokasi	55.000.000,00	133.125.000,00	114.500.000,00	59.500.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat		66.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman																		
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				30 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			27.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman																		
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	1 Satuan Permukiman	35.000.000,00	133.125.000,00	114.500.000,00	79.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENDIDIKAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			38.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA								9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	8.871.818.300,00	-354.929.100,00					8.701.062.400,00		
	2	NON URUSAN							9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	8.871.818.300,00	-354.929.100,00							8.701.062.400,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.363.096.400,00	1.009.268.000,00	919.277.000,00	-4.443.819.400,00							668.002.000,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				92,50 %	92,50 %	4.192.096.400,00	4.175.943.300,00	4.114.862.300,00	0,00							4.192.096.400,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	26.124.000,00	26.124.000,00	26.124.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	A		26.124.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	7.400.000,00	0,00	0,00	-7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	0,00	0,00	-3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	8.871.818.300,00	-354.929.100,00							8.701.062.400,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.363.096.400,00	1.009.268.000,00	919.277.000,00	-4.443.819.400,00							668.002.000,00	
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.431.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	NON URUSAN							9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	8.871.818.300,00	-354.929.100,00							8.701.062.400,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.363.096.400,00	1.009.268.000,00	919.277.000,00	-4.443.819.400,00							668.002.000,00	
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	0,00	0,00	-3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	8.871.818.300,00	-354.929.100,00							8.701.062.400,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.363.096.400,00	1.009.268.000,00	919.277.000,00	-4.443.819.400,00							668.002.000,00	
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.431.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	NON URUSAN							9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	8.871.818.300,00	-354.929.100,00							8.701.062.400,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.363.096.400,00	1.009.268.000,00	919.277.000,00	-4.443.819.400,00							668.002.000,00	
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2,00 Laporan	2,00 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	3.573.996.400,00	3.603.198.300,00	3.603.198.300,00	29.201.900,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.573.996.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14,00 Orang/bulan	14,00 Orang/bulan	3.568.496.400,00	0,00	0,00	-3.568.496.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18,00 Laporan	18,00 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	277.295.000,00	290.640.000,00	238.689.000,00	-38.606.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		277.295.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12,00 Paket	12,00 Paket	4.225.000,00	0,00	0,00	-4.225.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12,00 Paket	12,00 Paket	25.070.000,00	0,00	0,00	-25.070.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12,00 Dokumen	12,00 Dokumen	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11,00 Laporan	11,00 Laporan	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12,00 Laporan	12,00 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	15.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	9.500.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1.00 Unit	1.00 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan Layanan Pendukung</i>				100 %	100 %	94.581.000,00	87.381.000,00	87.381.000,00	-7.200.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		94.581.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	12.00 Laporan	19.200.000,00	0,00	0,00	-19.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				3.00 Laporan	3.00 Laporan	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12.00 Laporan	12.00 Laporan	3.381.000,00	0,00	0,00	-3.381.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik</i>				100 %	100 %	205.100.000,00	144.100.000,00	134.970.000,00	-70.130.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		205.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				28.00 Unit	28.00 Unit	198.100.000,00	0,00	0,00	-198.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				30.00 Unit	30.00 Unit	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.226.747.400,00	9.107.890.300,00	8.871.818.300,00	-354.929.100,00							8.701.062.400,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							5.363.096.400,00	1.009.268.000,00	919.277.000,00	-4.443.819.400,00							668.002.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender				100 %	100 %	428.875.000,00	323.875.000,00	261.875.000,00	-340.000.000,00							88.875.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase meningkatnya Pengetahuan, tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				100 %	100 %	88.875.000,00	88.875.000,00	81.875.000,00	-7.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	-		88.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota																		
			<i>Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota</i>				25 Orang	25 Orang	88.875.000,00	88.875.000,00	81.875.000,00	-7.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			88.875.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	340.000.000,00	235.000.000,00	180.000.000,00	-160.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				0 Organisasi	0 Organisasi	340.000.000,00	235.000.000,00	180.000.000,00	-160.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan				100 %	100 %	125.561.000,00	96.181.000,00	96.181.000,00	-98.400.000,00							27.161.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan				100 %	100 %	27.161.000,00	27.161.000,00	27.161.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		27.161.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Layanan	5 Layanan	27.161.000,00	27.161.000,00	27.161.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			27.161.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Data serta Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak korban Kekerasan dan TPPO				100 %	100 %	98.400.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	-29.380.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				0 Orang	0 Orang	88.400.000,00	69.020.000,00	69.020.000,00	-19.380.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-				-	-	52.880.000,00	77.880.000,00	74.880.000,00	0,00							52.880.000,00		
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	52.880.000,00	77.880.000,00	74.880.000,00	22.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		52.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	52.880.000,00	77.880.000,00	74.880.000,00	22.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			52.880.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
4.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Lembaga Penyedia Layanan terhadap Anak				33,33 %	33,33 %	129.245.000,00	170.000.000,00	145.000.000,00	0,00							129.245.000,00		
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Pengetahuan tentang Pemenuhan Hak-hak Anak Menuju kabupaten Layak Anak				100 %	100 %	129.245.000,00	170.000.000,00	145.000.000,00	15.755.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		129.245.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	129.245.000,00	170.000.000,00	145.000.000,00	15.755.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			129.245.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
5.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan pendampingan anak yang membutuhkan perlindungan khusus				100 %	100 %	434.439.000,00	334.470.000,00	334.479.000,00	-71.460.000,00							362.979.000,00		
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersampainya Informasi tentang kekerasan Terhadap Anak pada 700 Anak di 5 Kecamatan				100 %	100 %	130.000.000,00	101.491.000,00	101.500.000,00	-28.500.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																			
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				1 Orang	761 Orang	130.000.000,00	101.491.000,00	101.500.000,00	-28.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kasus Anak yang terlayani				100 %	100 %	304.439.000,00	232.979.000,00	232.979.000,00	-71.460.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		232.979.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				40 Orang	40 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																			
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				1 Layanan	40 Layanan	274.439.000,00	202.979.000,00	202.979.000,00	-71.460.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			202.979.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3.863.651.000,00	8.098.622.300,00	7.952.541.300,00	4.088.890.300,00							8.033.060.400,00	
1.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana				92,50 %	92,50 %	4.192.096.400,00	4.175.943.300,00	4.114.862.300,00	0,00							4.192.096.400,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	26.124.000,00	26.124.000,00	26.124.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	A		26.124.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2,00 Dokumen	2,00 Dokumen	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.431.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.431.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2,00 Laporan	2,00 Laporan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	3.573.996.400,00	3.603.198.300,00	3.603.198.300,00	29.201.900,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		3.573.996.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14,00 Oran g/bulan	14,00 Oran g/bulan	0,00	3.597.698.300,00	3.597.698.300,00	3.597.698.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.568.496.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1,00 Laporan	1,00 Laporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18,00 Laporan	18,00 Laporan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1,00 Dokumen	1,00 Dokumen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			1.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	277.295.000,00	290.640.000,00	238.689.000,00	-38.606.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		277.295.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12,00 Paket	12,00 Paket	0,00	4.225.000,00	4.225.000,00	4.225.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			4.225.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1,00 Paket	1,00 Paket	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12.00 Paket	0,00	38.415.000,00	28.464.000,00	28.464.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			25.070.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	0,00	12.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11.00 Laporan	11.00 Laporan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	0,00	200.000.000,00	152.000.000,00	152.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	15.000.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	9.500.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	24.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung Daerah				100 %	100 %	94.581.000,00	87.381.000,00	87.381.000,00	-7.200.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		94.581.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3.00 Laporan	3.00 Laporan	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			72.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	0,00	3.381.000,00	3.381.000,00	3.381.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.381.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	205.100.000,00	144.100.000,00	134.970.000,00	-70.130.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		205.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28.00 Unit	28.00 Unit	0,00	137.100.000,00	128.400.000,00	128.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			198.100.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30.00 Unit	30.00 Unit	0,00	7.000.000,00	6.570.000,00	6.570.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk				0,95 %	0,95 %	247.600.000,00	176.400.000,00	176.400.000,00	-12.000.000,00							235.600.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)				100 %	100 %	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>				5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	13.000.000,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																			
			<i>Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan</i>				0 Kegiatan	0 Kegiatan	12.000.000,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersedianya Indikator Program Bangsa Kencana dalam Kebijakan Pembangunan</i>				100 %	100 %	222.600.000,00	176.400.000,00	176.400.000,00	-46.200.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		222.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																			
			<i>Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>				11.0 Laporan	11.0 Laporan	87.600.000,00	86.400.000,00	86.400.000,00	-1.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			87.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																			
			<i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>				11.0 Dokumen	11.0 Dokumen	120.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain																			
			<i>Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk</i>				11 Unit	11 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Total Fertility Rate				2,13 Angka	2,13 Angka	2.336.451.000,00	1.624.741.000,00	1.609.741.000,00	-3.825.000,00							2.332.626.000,00		
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK</i>				100 %	100 %	870.000.000,00	821.265.000,00	821.265.000,00	-48.735.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		870.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK</i>				11.0 Laporan	11.0 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				10.00 Laporan	10.00 Laporan	315.000.000,00	474.192.000,00	474.192.000,00	159.192.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			315.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																			
			<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>				11.00 Laporan	11.00 Laporan	165.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	-55.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																			
			<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>				11.00 Dokumen	11.00 Dokumen	100.000.000,00	80.073.000,00	80.073.000,00	-19.927.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																			
			<i>Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																			
			<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>				11.00 Organisasi	11.00 Organisasi	150.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	-53.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terbinanya PPKBD <i>Kabupaten Pesisir Barat</i>				100 %	100 %	379.000.000,00	0,00	0,00	-379.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		379.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		
			<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>				118.00 Orang	118.00 Orang	379.000.000,00	0,00	0,00	-379.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			379.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Pendistribusian Alkon di Fasilitas Kesehatan</i>				100 %	100 %	642.701.000,00	638.876.000,00	623.876.000,00	-18.825.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		638.876.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				12.00 Laporan	12.00 Laporan	7.000.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	4.700.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			11.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>				1000 Orang	1000 Orang	534.401.000,00	517.826.000,00	517.826.000,00	-16.575.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			517.826.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>				11.00 Laporan	11.00 Laporan	11.300.000,00	19.350.000,00	19.350.000,00	8.050.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			19.350.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			<i>Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</i>				4.00 Laporan	4.00 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	75.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Persentase Kader dan Kelompok kerja (pokja) yang terbentuk dan terbina di kampung KB</i>				100 %	100 %	444.750.000,00	164.600.000,00	164.600.000,00	-280.150.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		444.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	3.750.000,00	164.600.000,00	164.600.000,00	160.850.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			3.750.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>				28.00 Kampung	28.00 Kampung	441.000.000,00	0,00	0,00	-441.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			441.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga				62,50 Angka	62,50 Angka	1.279.600.000,00	2.128.400.000,00	2.058.400.000,00	0,00							1.279.600.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Persentase Forum Generasi Berencana, Kelompok BKB-HI, Forum Asosiasi Kelompok UPPKS dan Kader Poktan PKB dan PPKBD yang mendapatkan pembinaan tentang ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta tim pendamping keluarga yang mendapatkan biaya operasional</i>				100 %	100 %	360.400.000,00	1.044.000.000,00	1.044.000.000,00	683.600.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		360.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>				11.00 Unit	11.00 Unit	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			300.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			<i>Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>				-	0 Kelompok	0,00	944.000.000,00	944.000.000,00	944.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																			
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				22 Kelompok	22 Kelompok	60.400.000,00	0,00	0,00	-60.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			60.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pekon, Kecamatan yang mengikuti Lomba Kesra, serta Kader Perempuan yang mendapat Pembinaan P3KSS dan GSI				100 %	100 %	919.200.000,00	1.084.400.000,00	1.014.400.000,00	95.200.000,00		-	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	-		919.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																			
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				11 Organisasi	11 Organisasi	40.000.000,00	165.000.000,00	95.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				0 laporan	0 laporan	402.000.000,00	402.000.000,00	402.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			402.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				0,00 laporan	0,00 laporan	477.200.000,00	517.400.000,00	517.400.000,00	40.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			477.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN							7.624.498.250,00	7.653.858.700,00	7.890.508.700,00	266.010.450,00					9.299.905.355,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.241.430.800,00	6.309.265.700,00	6.188.915.700,00	-52.515.100,00							7.152.169.310,00		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							6.241.430.800,00	6.309.265.700,00	6.188.915.700,00	-52.515.100,00							7.152.169.310,00		
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,50 %	92,50 %	5.782.941.400,00	6.037.265.700,00	5.982.265.700,00	860.030.870,00							6.642.972.270,00		
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	12.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	1.000.000,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		14.740.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.240.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu				100 %	100 %	4.911.443.000,00	5.217.765.700,00	5.217.765.700,00	306.322.700,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.739.542.270,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/b ulan	47 Orang/b ulan	4.905.943.000,00	5.212.265.700,00	5.212.265.700,00	306.322.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.733.492.270,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	370.948.400,00	335.450.000,00	280.450.000,00	-90.498.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		370.975.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.980.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.148.400,00	31.450.000,00	31.450.000,00	1.301.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			34.595.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	280.000.000,00	245.000.000,00	190.000.000,00	-90.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			269.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana kantor				100 %	100 %	100.000.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	-40.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		65.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				16 Unit	8 Unit	100.000.000,00	59.500.000,00	59.500.000,00	-40.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			65.450.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	212.400.000,00	228.400.000,00	228.400.000,00	16.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		251.240.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	44.400.000,00	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			48.840.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	167.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			200.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	175.750.000,00	182.750.000,00	182.750.000,00	7.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		201.025.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	45.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	7.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			57.750.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	130.250.000,00	130.250.000,00	130.250.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			143.275.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama				28000 Ton	28000 Ton	267.359.000,00	190.680.000,00	145.330.000,00	38.648.900,00							306.007.900,00		
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)				85.20 %	85.20 %	129.783.000,00	158.080.000,00	117.330.000,00	-12.453.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		158.161.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				1 Laporan	1 Laporan	44.783.000,00	50.000.000,00	44.250.000,00	-533.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			49.261.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	1 laporan	40.000.000,00	77.875.000,00	53.875.000,00	13.875.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			50.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota																			
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				24 Laporan	24 Laporan	15.000.000,00	30.205.000,00	19.205.000,00	4.205.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			25.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota																			
			Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																			
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah				20 %	0 %	71.806.000,00	0,00	0,00	-71.806.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		78.986.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				4 Ton	0 Ton	51.806.000,00	0,00	0,00	-51.806.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			56.986.600,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota																			
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				8 Ton	0 Ton	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			22.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)				87.90 %	87.90 %	65.770.000,00	32.600.000,00	28.000.000,00	-37.770.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		68.860.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																			
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	0 Laporan	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	1 Laporan	35.770.000,00	32.600.000,00	28.000.000,00	-7.770.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			35.860.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
3.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan				5 %	5 %	100.000.000,00	36.920.000,00	22.920.000,00	16.600.000,00							116.600.000,00		
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Cakupan Informasi Daearah Rawan Pangan				100 %	100 %	20.000.000,00	36.920.000,00	22.920.000,00	2.920.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		28.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																			
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	36.920.000,00	22.920.000,00	2.920.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			28.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan Daerah Rawan Pangan				1 Lokasi	0 Lokasi	80.000.000,00	0,00	0,00	-80.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		88.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi																			
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
4.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan				60 %	60 %	91.130.400,00	44.400.000,00	38.400.000,00	-4.541.260,00							86.589.140,00		
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan				100 %	100 %	91.130.400,00	44.400.000,00	38.400.000,00	-52.730.400,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat			86.589.140,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	17.500.000,00	0,00	0,00	-17.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			19.250.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																			
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	0 Dokumen	16.817.400,00	0,00	0,00	-16.817.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			18.499.140,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	30.813.000,00	31.622.000,00	31.622.000,00	809.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			34.784.200,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																			
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.000.000,00	12.778.000,00	6.778.000,00	-19.222.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			14.055.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							1.383.067.450,00	1.344.593.000,00	1.701.593.000,00	318.525.550,00							2.147.736.045,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							1.383.067.450,00	1.344.593.000,00	1.701.593.000,00	318.525.550,00							2.147.736.045,00		
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai Tukar Petani (NTP)				101.04 Angka	101.04 Angka	374.060.950,00	328.137.000,00	259.137.000,00	56.235.345,00							430.296.295,00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian				0.3 %	0.3 %	237.648.000,00	248.137.000,00	199.137.000,00	-38.511.000,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani Kios Pupuk dan Aparatur			327.317.100,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																			
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	209.913.000,00	170.913.000,00	70.913.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			175.904.300,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	37.648.000,00	38.224.000,00	28.224.000,00	-9.424.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			41.412.800,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan																			
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan																			
			Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Produksi Komoditi Pertanian				0.5 %	0.5 %	97.795.500,00	80.000.000,00	60.000.000,00	-37.795.500,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani			60.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																			
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	97.795.500,00	80.000.000,00	60.000.000,00	-37.795.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			60.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.02.2.06	Penyediaan Bibit/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Populasi Ternak				3 %	0 %	38.617.450,00	0,00	0,00	-38.617.450,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani			42.479.195,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain																			
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				2000 Ekor	0 Ekor	38.617.450,00	0,00	0,00	-38.617.450,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			42.479.195,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Produksi Sektor Pertanian				149944 Ton	149944 Ton	162.469.500,00	356.616.000,00	350.616.000,00	313.246.250,00							475.715.750,00		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan data, informasi dan kajian lingkup pertanian				100 %	100 %	80.779.500,00	356.616.000,00	350.616.000,00	269.836.500,00		-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani			385.856.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya																			
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya				2 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			363.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan																			
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	0 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			4.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				1 Unit	0 Unit	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			4.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan																		
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	0 Unit	3.222.500,00	0,00	0,00	-3.222.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			3.544.750,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota																		
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	9.557.000,00	26.616.000,00	20.616.000,00	11.059.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			10.512.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang terbangun dan ber kondisi baik				84 %	0 %	81.690.000,00	0,00	0,00	-81.690.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani		89.859.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian																		
			Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	-11.670.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkunt, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			12.837.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani																		
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	-11.670.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			12.837.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit																		
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	-11.670.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			12.837.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air																		
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	-11.670.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			12.837.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya																		
			Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	-11.670.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			12.837.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	-11.670.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			12.837.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani																		
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	11.670.000,00	0,00	0,00	-11.670.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			12.837.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis				88 %	88 %	209.550.000,00	80.000.000,00	59.000.000,00	-121.550.000,00							88.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terproteksinya ternak dan HPR dari penyakit hewan menular				88 %	88 %	148.750.000,00	48.775.000,00	32.775.000,00	-115.975.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Peternak dan Kesmavet		53.652.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				1 Laporan	1 Laporan	148.750.000,00	48.775.000,00	32.775.000,00	-115.975.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			53.652.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Terjaminnya Keamanan Daging yang beredar di Masyarakat				100 %	100 %	60.800.000,00	31.225.000,00	26.225.000,00	-34.575.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Pedagang dan Kesmavet		34.347.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				1 Laporan	1 Laporan	60.800.000,00	31.225.000,00	26.225.000,00	-34.575.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			34.347.500,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)				88 %	88 %	138.960.000,00	75.000.000,00	250.000.000,00	136.040.000,00							275.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penurunan persentase gangguan OPT/Kegagalan panen pada komoditi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				10 %	10 %	138.960.000,00	75.000.000,00	250.000.000,00	111.040.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani		275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				50 Ha	800 Ha	138.960.000,00	75.000.000,00	250.000.000,00	111.040.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani				985 Kelompok Tani	985 Kelompok Tani	498.027.000,00	504.840.000,00	782.840.000,00	380.697.000,00							878.724.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Kualitas SDM Penyuluh dan Kelembagaan Pertanian yang ditingkatkan				85 %	85 %	498.027.000,00	504.840.000,00	782.840.000,00	284.813.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani dan Penyuluh Pertanian		878.724.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Unit	11 Unit	258.540.000,00	181.680.000,00	173.680.000,00	-84.860.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			199.848.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				11 Unit	11 Unit	206.585.000,00	219.160.000,00	513.160.000,00	306.575.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			564.476.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				11 Unit	11 Unit	32.902.000,00	104.000.000,00	96.000.000,00	63.098.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			114.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00						3.830.499.905,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup				92,50 Persen	92,50 Persen	3.202.315.450,00	3.076.962.000,00	2.994.079.550,00	-1.994.734.645,00							1.207.580.805,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	11.756.300,00	11.756.000,00	11.756.000,00	-300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		12.670.134,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.057.500,00	4.057.500,00	4.057.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.138.650,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.072.850,00	2.072.600,00	2.072.600,00	-250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.793.015,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	626.000,00	626.000,00	626.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			638.520,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.999.950,00	4.999.900,00	4.999.900,00	-50,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.099.949,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	2.025.548.600,00	2.151.986.000,00	2.151.986.000,00	126.437.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		6.599.910,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	13 Orang/bulan	0,00	2.145.516.000,00	2.145.516.000,00	2.145.516.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	NON URUSAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	2.470.600,00	2.470.600,00	2.470.600,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.520.267,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	NON URUSAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	2.999.600,00	2.999.600,00	2.999.600,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.059.847,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	NON URUSAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	999.800,00	999.800,00	999.800,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.019.796,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	268.574.550,00	239.760.000,00	156.877.550,00	-111.697.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		273.946.041,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	60.995.100,00	60.995.100,00	60.995.100,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.786.041,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	NON URUSAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2	NON URUSAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00		
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.220.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	155.764.900,00	72.882.450,00	-87.117.550,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			163.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	111.300.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	-104.854.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		113.526.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	111.300.000,00	6.446.000,00	6.446.000,00	-104.854.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			113.526.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung Daerah				100 %	100 %	75.556.000,00	65.554.000,00	65.554.000,00	-10.002.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		77.067.120,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			68.340.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	8.554.000,00	8.554.000,00	8.554.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.727.120,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	NON URUSAN							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							5.977.313.850,00	5.812.916.000,00	5.675.783.550,00	-301.530.300,00							3.830.499.905,00	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	709.580.000,00	601.460.000,00	601.460.000,00	-108.120.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		723.771.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	53.150.000,00	55.450.000,00	55.450.000,00	2.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			54.213.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	487.810.000,00	387.310.000,00	387.310.000,00	-100.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			497.566.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																		
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	162.700.000,00	158.700.000,00	158.700.000,00	-4.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.954.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	5.920.000,00	0,00	0,00	-5.920.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.038.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				100 Persen	100 Persen	370.705.000,00	445.000.000,00	410.750.000,00	7.414.100,00							378.119.100,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan dokumen KLHS dalam K/R/P				100 %	100 %	370.705.000,00	445.000.000,00	410.750.000,00	40.045.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		378.119.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	370.705.000,00	445.000.000,00	410.750.000,00	40.045.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			378.119.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				74,53 Angka	74,53 Angka	50.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	1.000.000,00							51.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pencegahan pencemaran lingkungan hidup				100 %	100 %	50.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) Persatuan Luas Wilayah				5,30 Persen	5,30 Persen	250.000.000,00	328.554.000,00	320.554.000,00	5.000.000,00							255.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan RTH				100 %	100 %	250.000.000,00	328.554.000,00	320.554.000,00	70.554.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		255.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				4.50 Ha	4.50 Ha	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			71.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																		
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	328.554.000,00	320.554.000,00	140.554.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK AIR TANAH PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			183.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan Pengendalian terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan peraturan perundang-undangan yang berbasis lingkungan hidup (PUULH)				100 Persen	100 Persen	70.000.000,00	35.000.000,00	28.000.000,00	1.400.000,00							71.400.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan				100 %	100 %	70.000.000,00	35.000.000,00	28.000.000,00	-42.000.000,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Aparatur dan Masyarakat		71.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																		
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				10 Dokumen	10 Dokumen	70.000.000,00	35.000.000,00	28.000.000,00	-42.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			71.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan				57,43 Persen	57,43 Persen	2.034.293.400,00	1.902.400.000,00	1.902.400.000,00	-166.893.400,00							1.867.400.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani				21,37 Persen	21,37 Persen	2.034.293.400,00	1.902.400.000,00	1.902.400.000,00	-131.893.400,00			-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Aparatur dan Masyarakat		1.867.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				3297 Ton	3297 Ton	2.034.293.400,00	1.902.400.000,00	1.902.400.000,00	-131.893.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			1.867.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.231.449.700,00	3.425.810.700,00	3.251.560.700,00	20.111.000,00							3.554.594.670,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3.231.449.700,00	3.425.810.700,00	3.251.560.700,00	20.111.000,00							3.554.594.670,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				92,50 %	92,50 %	2.796.911.000,00	2.946.272.000,00	2.858.772.000,00	279.691.100,00							3.076.602.100,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		13.640.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	2.131.949.800,00	2.231.310.700,00	2.231.310.700,00	99.360.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.345.144.780,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	2.126.449.800,00	2.225.810.700,00	2.225.810.700,00	99.360.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.339.094.780,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	266.745.000,00	242.415.100,00	154.915.100,00	-111.829.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		293.419.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	3.745.000,00	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.119.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.000.000,00	40.670.100,00	40.670.100,00	670.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	87.500.000,00	-87.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			192.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung Daerah				100 %	100 %	228.916.200,00	299.396.200,00	299.396.200,00	70.480.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		251.807.820,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	94.966.200,00	48.166.200,00	48.166.200,00	-46.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			104.462.820,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	129.000.000,00	247.000.000,00	247.000.000,00	118.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			141.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.950.000,00	4.230.000,00	4.230.000,00	-720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.445.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	156.900.000,00	160.750.000,00	160.750.000,00	3.850.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		172.590.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	55.800.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	2.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.380.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	43.300.000,00	47.300.000,00	47.300.000,00	4.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			47.630.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	57.800.000,00	55.450.000,00	55.450.000,00	-2.350.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			63.580.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan				100 %	100 %	266.000.000,00	287.000.000,00	256.500.000,00	26.600.000,00							292.600.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk				100 %	100 %	35.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		38.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				2000 Dokumen	1000 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	30.000.000,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran Penduduk				100 %	100 %	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		198.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				5500 Dokumen	687 Dokumen	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk				100 %	100 %	51.000.000,00	72.000.000,00	46.500.000,00	-4.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		56.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				50000 Dokumen	20000 Dokumen	51.000.000,00	72.000.000,00	46.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			56.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil				100 %	100 %	56.538.700,00	64.538.700,00	43.038.700,00	5.653.870,00							62.192.570,00	
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pencatatan Sipil				100 %	100 %	56.538.700,00	64.538.700,00	43.038.700,00	-13.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		62.192.570,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	56.538.700,00	64.538.700,00	43.038.700,00	-13.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.192.570,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan				100 %	100 %	56.000.000,00	64.000.000,00	43.250.000,00	5.600.000,00							61.600.000,00	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100 %	100 %	56.000.000,00	64.000.000,00	43.250.000,00	-12.750.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		61.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				12 Dokumen	12 Dokumen	56.000.000,00	64.000.000,00	43.250.000,00	-12.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Data Kependudukan Skala Kabupaten dalam 1 Tahun				100 %	100 %	56.000.000,00	64.000.000,00	50.000.000,00	5.600.000,00							61.600.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Profil Kependudukan				100 %	100 %	56.000.000,00	64.000.000,00	50.000.000,00	-6.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		61.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				75 Dokumen	75 Dokumen	56.000.000,00	64.000.000,00	50.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON							9.606.068.924,00	6.736.078.080,00	6.816.215.268,00	-2.789.853.656,00							7.969.830.027,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.606.068.924,00	6.736.078.080,00	6.816.215.268,00	-2.789.853.656,00							7.969.830.027,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							9.606.068.924,00	6.736.078.080,00	6.816.215.268,00	-2.789.853.656,00							7.969.830.027,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon				100 %	100 %	2.762.068.924,00	2.730.041.436,00	2.610.040.700,00	176.761.103,00							2.938.830.027,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		12.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	2.208.500.000,00	2.076.479.200,00	2.076.479.200,00	-132.020.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.310.583.247,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17/14 Oran g/bulan	17/14 Oran g/bulan	2.200.000.000,00	2.067.979.200,00	2.067.979.200,00	-132.020.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.301.445.047,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.928.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.210.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				4 orang	4 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	330.868.924,00	327.884.436,00	207.883.700,00	-122.985.224,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		371.309.085,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.333.736,00	4.333.736,00	4.333.000,00	-736,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.767.110,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.250.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.535.188,00	35.550.700,00	35.550.700,00	15.512,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.981.975,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.310.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	120.000.000,00	-120.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			270.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	76.980.000,00	76.980.000,00	69.480.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	76.980.000,00	76.980.000,00	69.480.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	104.200.000,00	135.050.600,00	135.050.600,00	30.850.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		120.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.200.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-2.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	122.000.000,00	122.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	11.250.600,00	11.250.600,00	1.250.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	78.600.000,00	81.247.200,00	81.247.200,00	2.647.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		104.337.695,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	67.600.000,00	70.050.000,00	70.050.000,00	2.450.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			86.308.695,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				11 Unit	11 Unit	11.000.000,00	11.197.200,00	11.197.200,00	197.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.029.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	jumlah desa berkembang				67 desa	67 desa	315.000.000,00	955.024.484,00	1.242.512.408,00	585.000.000,00							900.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	jumlah sarana dan prasarana yang terfasilitasi				1 desa	1 desa	315.000.000,00	955.024.484,00	1.242.512.408,00	927.512.408,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	masyarakat pekon yang terfasilitasi		900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi				1 Unit	1 Unit	315.000.000,00	955.024.484,00	1.242.512.408,00	927.512.408,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pekon Tertib Administrasi				116 pekon	116 pekon	4.433.000.000,00	1.499.373.660,00	1.430.623.660,00	-2.478.000.000,00							1.955.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	cangkupan pekon tertib administrasi				116 pekon	116 pekon	4.433.000.000,00	1.499.373.660,00	1.430.623.660,00	-3.002.376.340,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	pekon di kabupaten pesisir barat		1.955.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000.000,00	1.127.972.060,00	1.127.972.060,00	-72.027.940,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				116 Dokumen	116 Dokumen	110.000.000,00	93.400.000,00	82.150.000,00	-27.850.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			135.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				116 Dokumen	116 Dokumen	193.000.000,00	160.001.600,00	135.001.600,00	-57.998.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			210.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				116 Dokumen	116 Dokumen	75.000.000,00	70.000.000,00	55.000.000,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				42 Laporan	42 Laporan	2.800.000.000,00	0,00	0,00	-2.800.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	48.000.000,00	30.500.000,00	-24.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				12 bulan	12 bulan	2.096.000.000,00	1.551.638.500,00	1.533.038.500,00	80.000.000,00							2.176.000.000,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100 %	100 %	2.096.000.000,00	1.551.638.500,00	1.533.038.500,00	-562.961.500,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat di desa		2.176.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				900 Lembaga	900 Lembaga	1.326.000.000,00	1.196.638.500,00	1.184.138.500,00	-141.861.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.326.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000,00	355.000.000,00	348.900.000,00	-351.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON
		DINAS PERHUBUNGAN							5.070.371.795,00	4.835.110.700,00	4.739.435.950,00	-330.935.845,00							5.687.408.975,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.070.371.795,00	4.835.110.700,00	4.739.435.950,00	-330.935.845,00							5.687.408.975,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							5.070.371.795,00	4.835.110.700,00	4.739.435.950,00	-330.935.845,00							5.687.408.975,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Perhubungan				100 %	100 %	2.928.823.400,00	3.348.415.700,00	3.291.090.450,00	292.882.340,00							3.221.705.740,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	42.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	-30.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		46.640.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	0 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.963.423.400,00	2.690.610.700,00	2.690.610.700,00	727.187.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.159.765.740,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.957.923.400,00	2.685.110.700,00	2.685.110.700,00	727.187.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.153.715.740,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas				2 Orang	2 Orang	175.000.000,00	129.440.000,00	129.440.000,00	-45.560.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		192.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	0 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			99.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	0 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	80.000.000,00	129.440.000,00	129.440.000,00	49.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			88.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	340.000.000,00	254.625.000,00	197.299.750,00	-142.700.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		374.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	6.026.000,00	6.026.000,00	-974.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	48.599.000,00	48.599.000,00	3.599.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			49.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				17 Dokumen	17 Dokumen	40.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9 Laporan	200.000.000,00	130.000.000,00	72.674.750,00	-127.325.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	30.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-3.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		33.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	131.000.000,00	146.340.000,00	146.340.000,00	15.340.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		144.100.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	49.000.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	-19.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			53.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	57.000.000,00	92.000.000,00	92.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	24.740.000,00	24.740.000,00	-260.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		27.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupatèn/Kota				100 %	100 %	247.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	-159.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		271.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	80.000.000,00	88.000.000,00	88.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			88.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	0 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			121.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.700.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				70 %	100 %	1.771.548.395,00	1.454.295.000,00	1.415.945.500,00	177.154.840,00							1.948.703.235,00		
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Kota				100 %	0 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				70 %	100 %	920.000.000,00	950.000.000,00	934.150.500,00	14.150.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		1.012.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				20 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				20 Unit	20 Unit	900.000.000,00	950.000.000,00	934.150.500,00	34.150.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGALISTRIK DARI SUMBER LAIN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAANN KINERJA TAHUN BERJALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			990.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pemenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				70 %	100 %	10.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	190.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																			
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	190.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Pemenuhan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				70 %	0 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	- -			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				70 %	100 %	367.548.395,00	169.430.000,00	146.930.000,00	-220.618.395,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		404.303.235,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	20.925.000,00	20.925.000,00	10.925.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	11.800.000,00	1.800.000,00	-8.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas																			
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan ReKayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				12 Laporan	12 Laporan	327.548.395,00	123.705.000,00	111.205.000,00	-216.343.395,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			360.303.235,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Audit dan Inspeksi				100 %	0 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																			
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				12 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				70 %	100 %	330.000.000,00	134.865.000,00	134.865.000,00	-195.135.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		363.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	320.000.000,00	134.865.000,00	134.865.000,00	-185.135.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			352.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan</i>				70 %	100 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pemenuhan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				70 %	0 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.16	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				70 %	0 %	94.000.000,00	0,00	0,00	-94.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		103.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.16.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	0 Laporan	94.000.000,00	0,00	0,00	-94.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			103.400.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
3.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran				60 %	100 %	370.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	147.000.000,00							517.000.000,00		
	2.15.03.2.06	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	<i>Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota</i>				50 %	100 %	360.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	-327.600.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		506.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.06.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	360.000.000,00	32.400.000,00	32.400.000,00	-327.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			506.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan				40 %	0 %	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal																		
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				2 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan			11.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN							7.222.714.300,00	5.511.385.763,00	5.225.469.986,00	-1.997.244.314,00						0,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.222.714.300,00	5.511.385.763,00	5.225.469.986,00	-1.997.244.314,00							0,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							6.989.369.300,00	5.362.172.763,00	5.105.320.986,00	-1.884.048.314,00							0,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	3.401.874.700,00	2.661.577.013,00	2.551.979.956,00	-3.401.874.700,00							0,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	1.487.953.100,00	1.513.012.500,00	1.513.012.500,00	25.059.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.482.453.100,00	1.507.512.500,00	1.507.512.500,00	25.059.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	1.632.965.600,00	949.108.513,00	839.511.456,00	-793.454.144,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	205.588.600,00	237.164.600,00	237.164.600,00	31.576.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.102.800.000,00	345.000.000,00	345.000.000,00	-757.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	199.577.000,00	241.943.913,00	132.346.856,00	-67.230.144,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	167.000.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	-81.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	167.000.000,00	85.500.000,00	85.500.000,00	-81.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	5.556.000,00	5.556.000,00	5.556.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.556.000,00	5.556.000,00	5.556.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	96.000.000,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Publik				85,00 Persen	85,00 Persen	2.185.707.500,00	1.446.963.650,00	1.360.873.930,00	-2.185.707.500,00							0,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persentase	92,5 Persentase	2.185.707.500,00	1.446.963.650,00	1.360.873.930,00	-824.833.570,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				100 Laporan	100 Laporan	1.340.527.000,00	779.528.150,00	779.528.150,00	-560.998.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				11 Komunitas	11 Komunitas	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				12 Permohonan	12 Permohonan	8.677.500,00	5.677.500,00	5.677.500,00	-3.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	361.000.000,00	287.400.000,00	284.033.000,00	-76.967.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi																		
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				80 Persentase	80 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				1 Media	1 Media	87.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	-81.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				12 Konten	12 Konten	382.703.000,00	367.558.000,00	284.835.280,00	-97.867.720,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bintek/pelatihan				2 Orang	2 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				82,5 Persen	82,5 Persen	1.401.787.100,00	1.253.632.100,00	1.192.467.100,00	-1.401.787.100,00							0,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				82,5 Persen	82,5 Persen	19.170.000,00	27.195.000,00	19.695.000,00	525.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	19.170.000,00	27.195.000,00	19.695.000,00	525.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				82,5 Persen	82,5 Persen	1.382.617.100,00	1.226.437.100,00	1.172.772.100,00	-209.845.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional																		
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional				50 Aplikasi	50 Aplikasi	16.206.500,00	144.006.500,00	139.266.500,00	123.060.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				2 Laporan	2 Laporan	122.978.000,00	35.598.000,00	23.968.000,00	-99.010.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah																		
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.364.700,00	50.364.700,00	29.500.700,00	-20.864.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				2 Aplikasi	2 Aplikasi	68.343.000,00	136.143.000,00	132.133.000,00	63.790.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				3 Aplikasi	3 Aplikasi	198.483.000,00	10.983.000,00	8.613.000,00	-189.870.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																			
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	44.547.900,00	41.147.900,00	39.062.900,00	-5.485.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi																			
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				2 Layanan	2 Layanan	16.235.000,00	13.735.000,00	6.235.000,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE																			
			Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan				4 Aplikasi	4 Aplikasi	25.459.000,00	10.459.000,00	9.993.000,00	-15.466.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	840.000.000,00	784.000.000,00	784.000.000,00	-56.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							51.045.000,00	41.045.000,00	36.981.000,00	-14.064.000,00							0,00		
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik				2 Dokumen	2 Dokumen	51.045.000,00	41.045.000,00	36.981.000,00	-51.045.000,00							0,00		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Data dan Informasi Statistik Daerah yang Tersusun dengan Baik				2 Dokumen	2 Dokumen	51.045.000,00	41.045.000,00	36.981.000,00	-14.064.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.20.02.2.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																			
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				39 Orang	39 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																			
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar																			
			Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik				1 Dokumen	1 Dokumen	41.045.000,00	41.045.000,00	36.981.000,00	-4.064.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							182.300.000,00	108.168.000,00	83.168.000,00	-99.132.000,00							0,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik				100 Persen	100 Persen	182.300.000,00	108.168.000,00	83.168.000,00	-182.300.000,00							0,00		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik				100 Persen	100 Persen	47.500.000,00	38.460.000,00	33.460.000,00	-14.040.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	47.500.000,00	38.460.000,00	33.460.000,00	-14.040.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik				100 Persen	100 Persen	134.800.000,00	69.708.000,00	49.708.000,00	-85.092.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	134.800.000,00	69.708.000,00	49.708.000,00	-85.092.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN								3.861.707.800,00	3.071.626.400,00	2.966.273.400,00	-895.434.400,00							3.958.737.800,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.062.915.800,00	2.900.998.400,00	2.828.645.400,00	-234.270.400,00							3.109.945.800,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							3.062.915.800,00	2.900.998.400,00	2.828.645.400,00	-234.270.400,00							3.109.945.800,00		
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan				92,50 Persen	92,50 Persen	2.546.945.800,00	2.420.031.400,00	2.315.781.400,00	25.000.000,00							2.571.945.800,00		
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu (%)				100 Persen	100 Persen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		12.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.400.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)				100 Persen	100 Persen	1.823.707.800,00	1.933.626.400,00	1.933.626.400,00	109.918.600,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.823.707.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	1.816.707.800,00	1.926.626.400,00	1.926.626.400,00	109.918.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.816.707.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	25.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 Persen	100 Persen	377.338.000,00	215.005.000,00	137.005.000,00	-240.333.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		377.338.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	65.338.000,00	38.005.000,00	38.005.000,00	-27.333.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			65.338.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	20 Dokumen	24.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	250.000.000,00	105.000.000,00	52.000.000,00	-198.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 Persen	100 Persen	45.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-29.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	45.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	-29.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			45.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 Persen	100 Persen	86.500.000,00	71.500.000,00	60.750.000,00	-25.750.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		86.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	1.250.000,00	-10.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 Persen	100 Persen	177.000.000,00	161.500.000,00	146.000.000,00	-31.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		177.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	168.000.000,00	157.000.000,00	141.500.000,00	-26.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			168.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	9.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif				52,5 Persen	52,5 Persen	80.000.000,00	91.500.000,00	81.382.000,00	13.000.000,00							93.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-						80.000.000,00	91.500.000,00	81.382.000,00	1.382.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		93.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	80.000.000,00	91.500.000,00	81.382.000,00	1.382.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			93.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi Berkompeten				50 Persen	50 Persen	120.000.000,00	70.557.000,00	112.572.000,00	5.000.000,00							125.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurus Koperasi Peserta Pelatihan yang Berkompeten				100 Persen	100 Persen	120.000.000,00	70.557.000,00	112.572.000,00	-7.428.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	50 Orang	120.000.000,00	70.557.000,00	112.572.000,00	-7.428.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			125.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kontribusi UMKM terhadap PDRB				2,18 Persen	2,18 Persen	315.970.000,00	318.910.000,00	318.910.000,00	4.030.000,00							320.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Kemitraan, Kemudahan dan Penguatan Kelembagaan				100 Persen	100 Persen	315.970.000,00	318.910.000,00	318.910.000,00	2.940.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		320.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	200.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-80.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				50 Orang	50 Orang	115.970.000,00	198.910.000,00	198.910.000,00	82.940.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							798.792.000,00	170.628.000,00	137.628.000,00	-661.164.000,00							848.792.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							798.792.000,00	170.628.000,00	137.628.000,00	-661.164.000,00							848.792.000,00	
1.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB				11,58 Persen	11,58 Persen	130.918.000,00	94.518.000,00	61.518.000,00	50.000.000,00							180.918.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terfasilitasi				100 Persen	100 Persen	130.918.000,00	94.518.000,00	61.518.000,00	-69.400.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		180.918.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	0 Unit	50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	2 Unit	80.918.000,00	64.518.000,00	61.518.000,00	-19.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			80.918.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan harga Barang Kebutuhan Pokok				60 Persen	60 Persen	329.000.000,00	76.110.000,00	76.110.000,00	0,00							329.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Monitoring Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok				100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	46.110.000,00	46.110.000,00	-3.890.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				48 Laporan	48 Laporan	50.000.000,00	46.110.000,00	46.110.000,00	-3.890.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Harga dan Stok Barang				100 Persen	100 Persen	254.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-224.000.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	-		254.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				52 Laporan	52 Laporan	40.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			40.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	214.000.000,00	0,00	0,00	-214.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			214.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pupuk dan Pestisida Terawasi				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	-		25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Net Ekspor Barang dan Jasa				43,184 Juta	43,184 Juta	338.874.000,00	0,00	0,00	0,00							338.874.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pameran Dagang Terealisasi				100 Persen	100 Persen	338.874.000,00	0,00	0,00	-338.874.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		338.874.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	338.874.000,00	0,00	0,00	-338.874.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			338.874.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							5.277.352.286,00	3.084.560.400,00	2.868.060.400,00	-2.409.291.886,00							4.458.877.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.277.352.286,00	3.084.560.400,00	2.868.060.400,00	-2.409.291.886,00							4.458.877.850,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							5.277.352.286,00	3.084.560.400,00	2.868.060.400,00	-2.409.291.886,00							4.458.877.850,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				92,50 persen	92,50 persen	2.150.967.200,00	2.584.560.400,00	2.449.560.400,00	1.081.624.500,00							3.232.591.700,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		12.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	1.721.467.200,00	2.090.060.400,00	2.090.060.400,00	368.593.200,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		2.463.491.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	1.715.967.200,00	2.084.560.400,00	2.084.560.400,00	368.593.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.457.991.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terciptanya peningkatan SDM yang berdaya saing				6 Orang	6 Orang	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertibnya administrasi SKPD				12 bulan	12 bulan	253.600.000,00	319.400.000,00	184.400.000,00	-69.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat		513.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.600.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	-4.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	270.000.000,00	135.000.000,00	-40.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			435.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tesedianya barang milik daerah				13 unit	3 unit	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		59.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	0 Unit	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			59.400.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan				12 bulan	12 bulan	58.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	14.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		73.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	57.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			72.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah dengan kondisi baik				12 Bulan	12 Bulan	75.700.000,00	75.700.000,00	75.700.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur Sipil Negara		75.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	73.100.000,00	73.100.000,00	73.100.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			73.100.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA)				750 Perusa haan/Peror angan	750 Perusa haan/Peror angan	344.409.399,00	0,00	0,00	-344.409.399,00							0,00		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal				12 Bulan	12 Bulan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	0 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	194.409.399,00	0,00	0,00	-194.409.399,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	194.409.399,00	0,00	0,00	-194.409.399,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA				6,55 persen	6,55 persen	1.155.332.601,00	125.485.000,00	120.485.000,00	-1.025.431.451,00							129.901.150,00		
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peminat investasi				130 Pengu njung	130 Pengu njung	1.155.332.601,00	125.485.000,00	120.485.000,00	-1.034.847.601,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		129.901.150,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1 Dokumen	1.155.332.601,00	125.485.000,00	120.485.000,00	-1.034.847.601,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			129.901.150,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN				17,49 persen	17,49 persen	1.030.258.086,00	175.000.000,00	158.500.000,00	-530.258.086,00							500.000.000,00		
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik				12 bulan	12 bulan	1.030.258.086,00	175.000.000,00	158.500.000,00	-871.758.086,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				600 Pelaku Usaha	600 Pelaku Usaha	985.258.086,00	130.000.000,00	130.000.000,00	-855.258.086,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			455.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																			
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	45.000.000,00	45.000.000,00	28.500.000,00	-16.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			45.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rasio Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Perizinan				80 persen	80 persen	471.385.000,00	74.515.000,00	47.015.000,00	0,00							471.385.000,00		
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal				12 bulan	12 bulan	471.385.000,00	74.515.000,00	47.015.000,00	-424.370.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		471.385.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																			
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				1200 Kegiatan Usaha.	0 Kegiatan Usaha.	82.089.000,00	0,00	0,00	-82.089.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			82.089.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				189 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	244.436.000,00	0,00	0,00	-244.436.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			244.436.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																			
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	144.860.000,00	74.515.000,00	47.015.000,00	-97.845.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			144.860.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan				5 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	92.500.000,00	0,00							125.000.000,00		
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan				5 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	92.500.000,00	-32.500.000,00		-		Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat		125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																			
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	92.500.000,00	-32.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA								4.282.346.500,00	4.496.560.800,00	4.129.419.950,00	-152.926.550,00						4.282.346.500,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4.282.346.500,00	4.496.560.800,00	4.129.419.950,00	-152.926.550,00							4.282.346.500,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							4.282.346.500,00	4.496.560.800,00	4.129.419.950,00	-152.926.550,00							4.282.346.500,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota				100 %	100 %	2.512.348.500,00	2.426.562.300,00	2.267.562.300,00	0,00							2.512.348.500,00		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu				100 %	100 %	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00		-		Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		6.400.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.400.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan tepat waktu				100 %	100 %	1.930.270.500,00	1.815.176.800,00	1.675.176.800,00	-255.093.700,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.930.270.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.907.346.500,00	1.791.562.800,00	1.651.562.800,00	-255.783.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.907.346.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	17.424.000,00	18.114.000,00	18.114.000,00	690.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			17.424.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang berkinerja baik				100 %	100 %	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	350.830.000,00	397.637.500,00	362.637.500,00	11.807.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		350.830.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.004.000,00	3.211.500,00	3.211.500,00	-1.792.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.004.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	61.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.131.400,00	21.731.400,00	36.731.400,00	14.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.131.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	201.694.600,00	251.694.600,00	201.694.600,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			201.694.600,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan pendukung				100 %	100 %	96.748.000,00	81.748.000,00	81.748.000,00	-15.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		96.748.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	67.000.000,00	64.000.000,00	64.000.000,00	-3.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			67.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.748.000,00	5.748.000,00	5.748.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.748.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	108.100.000,00	105.600.000,00	121.600.000,00	13.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		108.100.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 unit Unit	3 unit Unit	61.600.000,00	61.100.000,00	61.100.000,00	-500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			61.600.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	3.500.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00	19.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	27.000.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	-12.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				100 %	100 %	444.998.000,00	695.498.400,00	899.607.550,00	0,00							444.998.000,00		
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja bidang pemerintah dan pembangunan manusia				100 %	100 %	129.998.000,00	295.498.400,00	559.607.550,00	429.609.550,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		129.998.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota																			
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				10 Orang	8 Orang	39.999.700,00	84.999.700,00	124.108.850,00	84.109.150,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			39.999.700,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota																			
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				3 Kegiatan	3 Kegiatan	49.999.450,00	94.999.450,00	199.999.450,00	150.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			49.999.450,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				10 Orang	10 Orang	39.998.850,00	115.499.250,00	235.499.250,00	195.500.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualftas Sumber Daya Manusia			39.998.850,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian kinerja bidang pemerintah dan pembangunan manusia				100 %	100 %	315.000.000,00	400.000.000,00	340.000.000,00	25.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		315.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				44 Organisasi	42 Organisasi	315.000.000,00	400.000.000,00	340.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			315.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				100 %	100 %	1.325.000.000,00	1.374.500.100,00	962.250.100,00	0,00							1.325.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan sarana dan prasarana olahraga				100 %	100 %	90.000.000,00	100.000.100,00	100.000.100,00	10.000.100,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		90.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				100 Unit	100 Unit	90.000.000,00	100.000.100,00	100.000.100,00	10.000.100,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			90.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lomba / kejuaraan olahraga yang dilaksanakan				100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		70.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				2 Kegiatan	2 Kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			70.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan kegiatan kejuaraan /perlombaan di luar daerah Provinsi				100 %	100 %	270.000.000,00	270.000.000,00	324.000.000,00	54.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		270.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				15 Orang	15 Orang	270.000.000,00	270.000.000,00	324.000.000,00	54.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			270.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bantuan operasional organisasi keolahragaan				100 %	100 %	845.000.000,00	745.000.000,00	410.000.000,00	-435.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualftas Sumber Daya Manusia	masyarakat		845.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota																		
			Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				20 Dokumen	18 Dokumen	845.000.000,00	745.000.000,00	410.000.000,00	-435.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			845.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi di fasilitasi pemda				100 %	100 %	50.000.000,00	189.500.000,00	58.250.000,00	8.250.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat		50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	189.500.000,00	58.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERIKANAN							3.019.819.700,00	3.257.659.600,00	3.066.128.400,00	46.308.700,00							3.032.406.900,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.019.819.700,00	3.257.659.600,00	3.066.128.400,00	46.308.700,00							3.032.406.900,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							3.019.819.700,00	3.257.659.600,00	3.066.128.400,00	46.308.700,00							3.032.406.900,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.591.619.013,00	2.901.659.600,00	2.837.934.350,00	787.887,00							2.592.406.900,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	6.710.940,00	12.400.000,00	12.400.000,00	5.689.060,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		7.250.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.710.940,00	7.400.000,00	7.400.000,00	5.689.060,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.750.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Telaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100% Persen	100% Persen	2.003.097.200,00	2.265.937.100,00	2.265.937.100,00	262.839.900,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.003.300.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.994.819.700,00	2.257.659.600,00	2.257.659.600,00	262.839.900,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.995.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.777.500,00	2.777.500,00	2.777.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.800.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100% Persen	100% Persen	10.953.973,00	50.000.000,00	20.000.000,00	9.046.027,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	1 Orang	10.953.973,00	50.000.000,00	20.000.000,00	9.046.027,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				93% Persen	93% Persen	254.101.900,00	306.687.500,00	277.962.250,00	23.860.350,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		254.101.900,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.421.780,00	4.407.000,00	4.407.000,00	-14.780,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.421.780,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	-21.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.166.404,00	20.559.600,00	20.559.600,00	5.393.196,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.166.404,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	190.513.716,00	237.720.900,00	229.995.650,00	39.481.934,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			190.513.716,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93% Persen	93% Persen	81.755.000,00	98.555.000,00	98.555.000,00	16.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		81.755.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	19.200.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	2.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			19.200.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			57.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	5.555.000,00	19.955.000,00	19.955.000,00	14.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.555.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93% Persen	93% Persen	235.000.000,00	168.080.000,00	163.080.000,00	-71.920.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		235.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	1.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	9 Unit	180.000.000,00	97.350.000,00	67.350.000,00	-112.650.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			180.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				21 Unit	31 Unit	20.000.000,00	29.330.000,00	54.330.000,00	34.330.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap				14.708 Ton	14.708 Ton	118.900.000,00	75.000.000,00	68.776.250,00	100.000,00							119.000.000,00		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	meningkatnya produksi perikanan tangkap di danau sungai waduk, rawa, genangan air lainnya				14708 Ton	14708 Ton	80.000.000,00	75.000.000,00	68.776.250,00	-11.223.750,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Nelayan		80.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																			
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				6 Unit	6 Unit	30.000.000,00	75.000.000,00	68.776.250,00	38.776.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				310 Orang	310 Orang	38.900.000,00	0,00	0,00	-38.900.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Nelayan		39.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																			
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya				50 Kelompok	50 Kelompok	38.900.000,00	0,00	0,00	-38.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			39.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-				-	-	113.487.009,00	131.000.000,00	106.485.000,00	512.991,00							114.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				5 Kelompok	5 Kelompok	65.487.009,00	81.000.000,00	57.111.000,00	-8.376.009,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pembudidaya Ikan		66.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	10 Kelompok	25.000.000,00	81.000.000,00	57.111.000,00	32.111.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				10 Kelompok	10 Kelompok	40.487.009,00	0,00	0,00	-40.487.009,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			41.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya				15 Unit	15 Unit	48.000.000,00	50.000.000,00	49.374.000,00	1.374.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pembudidaya Ikan		48.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25 Unit	25 Unit	28.000.000,00	50.000.000,00	49.374.000,00	21.374.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			28.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				25 Unit	25 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			20.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-				-	-	65.000.000,00	75.000.000,00	25.750.000,00	0,00							65.000.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan di Wilayah Sungai, Waduk, Danau dan Genangan Air Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	75.000.000,00	25.750.000,00	-39.250.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Pelaku Usaha Perikanan		65.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota				12 Pelaku Usaha	12 Pelaku Usaha	35.000.000,00	13.850.000,00	350.000,00	-34.650.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota																		
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				12 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	30.000.000,00	61.150.000,00	25.400.000,00	-4.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			30.000.000,00	DINAS PERIKANAN
5.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-				-	-	130.813.678,00	75.000.000,00	27.182.800,00	11.186.322,00							142.000.000,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	terselenggaranya kegiatan gelar produk dan pemasaran hasil perikanan				1 Kali	1 Kali	30.500.000,00	0,00	0,00	-30.500.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan		30.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	30.500.000,00	0,00	0,00	-30.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			30.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan				5000 Ton	5000 Ton	100.313.678,00	75.000.000,00	27.182.800,00	-73.130.878,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan		111.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				6000 Ton	6000 Ton	30.015.302,00	0,00	0,00	-30.015.302,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			35.500.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	70.298.376,00	75.000.000,00	27.182.800,00	-43.115.576,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			76.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PARIWISATA							10.715.431.600,00	4.297.105.600,00	4.170.005.600,00	-6.545.426.000,00							11.786.974.760,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							10.715.431.600,00	4.297.105.600,00	4.170.005.600,00	-6.545.426.000,00							11.786.974.760,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							10.715.431.600,00	4.297.105.600,00	4.170.005.600,00	-6.545.426.000,00							11.786.974.760,00	
1.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	4.255.431.600,00	3.391.105.600,00	3.280.005.600,00	425.543.160,00							4.680.974.760,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.468.000,00	18.468.000,00	18.468.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		20.314.800,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.068.000,00	6.068.000,00	6.068.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.674.800,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	2.161.274.600,00	2.413.013.600,00	2.408.013.600,00	246.739.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.377.402.060,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	2.130.431.600,00	2.397.105.600,00	2.397.105.600,00	266.674.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.343.474.760,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	25.343.000,00	10.408.000,00	5.408.000,00	-19.935.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.877.300,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		82.500.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	6 Orang	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			82.500.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	704.999.000,00	384.254.000,00	278.154.000,00	-426.845.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		775.498.900,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	153.999.000,00	149.254.000,00	149.254.000,00	-4.745.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			169.398.900,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	261.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	-256.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			287.650.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	215.000.000,00	108.900.000,00	-141.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			275.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	32.360.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	-26.680.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		35.596.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	16.180.000,00	0,00	0,00	-16.180.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			17.798.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	1 Unit	16.180.000,00	5.680.000,00	5.680.000,00	-10.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			17.798.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	1.028.000.000,00	284.250.000,00	284.250.000,00	-743.750.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.130.800.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	111.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			122.100.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			73.700.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	850.000.000,00	76.250.000,00	76.250.000,00	-773.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			935.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	235.330.000,00	235.440.000,00	235.440.000,00	110.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		258.863.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	134.870.000,00	135.220.000,00	135.220.000,00	350.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			148.357.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	50.220.000,00	50.220.000,00	40.220.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	1 Unit	90.460.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-40.460.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			99.506.000,00	DINAS PARIWISATA	
2.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PAD Sektor Wisata				3.18 %	3.18 %	2.660.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	266.000.000,00							2.926.000.000,00		
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				7 Destinasi	5 Destinasi	2.660.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-2.060.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Destinasi Wisata		2.926.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				7 Dokumen	0 Dokumen	1.200.000.000,00	0,00	0,00	-1.200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			1.320.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisani, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	0 Lokasi	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			660.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	860.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-260.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			946.000.000,00	DINAS PARIWISATA
3.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Kunjungan Wisatawan				614,788 Orang	614,788 Orang	2.900.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00	290.000.000,00							3.190.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan				25,00 %	25,00 %	2.900.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00	-2.754.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		3.190.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			220.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	0 Kegiatan	2.500.000.000,00	0,00	0,00	-2.500.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			2.750.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Promosi	3 Promosi	200.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	-154.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			220.000.000,00	DINAS PARIWISATA
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata				40 %	40 %	900.000.000,00	160.000.000,00	144.000.000,00	90.000.000,00							990.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				40 %	40 %	900.000.000,00	160.000.000,00	144.000.000,00	-756.000.000,00			-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat	Masyarakat		990.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				2 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	75.000.000,00	69.000.000,00	-231.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			330.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				6 Orang	4 Orang	600.000.000,00	85.000.000,00	75.000.000,00	-525.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat Peningkatan Kualitas Ekonomi Masyarakat			660.000.000,00	DINAS PARIWISATA
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT							108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				90,00 Persen	90,00 Persen	7.685.448.449,00	6.850.944.000,00	7.171.389.300,00	-7.685.448.449,00							0,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat				90 persen	90 persen	5.854.410.863,00	4.938.468.000,00	5.063.895.500,00	-790.515.363,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	1.621.465.273,00	979.068.000,00	1.504.495.500,00	-116.969.773,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	4.161.884.190,00	3.959.400.000,00	3.559.400.000,00	-602.484.190,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAANN KINERJA TAHUN BERJALAN	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	0 Dokumen	71.061.400,00	0,00	0,00	-71.061.400,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DAERAH							108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							179.029.802,00	178.856.000,00	108.971.000,00	-70.058.802,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							145.000.000,00	145.000.000,00	90.115.000,00	-54.885.000,00							0,00	
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah perpustakaan Daerah yang dikelola				1 Lokasi	1 Lokasi	145.000.000,00	145.000.000,00	90.115.000,00	-145.000.000,00							0,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	indeks pembangunan manusia				95 persen	95 persen	40.000.000,00	40.000.000,00	22.115.000,00	-17.885.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpust akaan	10 Perpust akaan	18.000.000,00	18.000.000,00	10.115.000,00	-7.885.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1 Eksemplar	1 Eksemplar	22.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	indeks pembangunan manusia				90 persen	90 persen	105.000.000,00	105.000.000,00	68.000.000,00	-37.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perpustakaan		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				10 Perpust akaan	10 Perpust akaan	105.000.000,00	105.000.000,00	68.000.000,00	-37.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							34.029.802,00	33.856.000,00	18.856.000,00	-15.173.802,00							0,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku				35,00 Persen	35,00 Persen	34.029.802,00	33.856.000,00	18.856.000,00	-34.029.802,00							0,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	indeks pembangunan manusia				90 persen	90 persen	21.514.198,00	18.774.000,00	10.774.000,00	-10.740.198,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Arsip		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1 Berkas	1 Berkas	10.263.398,00	8.387.000,00	4.887.000,00	-5.376.398,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	11.250.800,00	10.387.000,00	5.887.000,00	-5.363.800,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	indeks pembangunan manusia				90 persen	90 persen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Arsip		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1 Arsip	0 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN				100 persen	100 persen	12.515.604,00	15.082.000,00	8.082.000,00	-4.433.604,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Arsip		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				5 Pengguna	5 Pengguna	12.515.604,00	15.082.000,00	8.082.000,00	-4.433.604,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEMERINTAHAN							108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00							0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				90,00 Persen	90,00 Persen	7.685.448.449,00	6.850.944.000,00	7.171.389.300,00	-7.685.448.449,00							0,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase pelaporan administrasi tata pemerintahan Tepat Waktu				95 persen	95 persen	916.235.350,00	1.230.278.000,00	1.162.778.000,00	246.542.650,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	635.755.750,00	915.000.000,00	882.500.000,00	246.744.250,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	140.205.250,00	219.259.000,00	201.759.000,00	61.553.750,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	140.274.350,00	96.019.000,00	78.519.000,00	-61.755.350,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	cakupan pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah				95 persen	95 persen	87.182.000,00	83.497.000,00	65.997.000,00	-21.185.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	87.182.000,00	83.497.000,00	65.997.000,00	-21.185.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN HUKUM							108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00						0,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				90,00 Persen	90,00 Persen	7.685.448.449,00	6.850.944.000,00	7.171.389.300,00	-7.685.448.449,00							0,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan fasilitasi dan koordinasi hukum				95 persen	95 persen	827.620.236,00	598.701.000,00	878.718.800,00	51.098.564,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				1 Dokumen	4 Dokumen	405.014.000,00	335.701.000,00	361.847.550,00	-43.166.450,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	1 Kasus	381.795.236,00	243.000.000,00	504.465.750,00	122.670.514,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				1 Dokumen	50 Dokumen	40.811.000,00	20.000.000,00	12.405.500,00	-28.405.500,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM							108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00						0,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan				90,00 Persen	90,00 Persen	1.596.748.327,00	489.075.500,00	634.144.000,00	-1.596.748.327,00							0,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				90 persen	90 persen	308.780.482,00	58.050.000,00	38.050.000,00	-270.730.482,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	227.101.822,00	47.750.000,00	32.750.000,00	-194.351.822,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	81.678.660,00	10.300.000,00	5.300.000,00	-76.378.660,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				90 persen	90 persen	140.183.168,00	26.414.000,00	14.414.000,00	-125.769.168,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	47.672.988,00	5.390.000,00	3.390.000,00	-44.282.988,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	36.633.988,00	10.300.000,00	5.300.000,00	-31.333.988,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	55.876.192,00	10.724.000,00	5.724.000,00	-50.152.192,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN							108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00						0,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah				92,50 Persen	92,50 Persen	99.301.636.799,00	105.462.198.050,00	106.581.996.334,00	-99.301.636.799,00							0,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				90 persen	90 persen	15.400.000,00	6.224.500,00	6.224.500,00	-9.175.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.400.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	-4.394.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.061.000,00	1.061.000,00	-939.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.067.000,00	1.067.000,00	-933.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	-986.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	1.047.000,00	1.047.000,00	-953.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	1.029.500,00	1.029.500,00	-970.500,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan				90,00 Persen	90,00 Persen	1.596.748.327,00	489.075.500,00	634.144.000,00	-1.596.748.327,00							0,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan laporan fasilitasi pelaksanaan administrasi pembangunan yang tersedia				90 persen	90 persen	611.887.027,00	236.792.500,00	186.361.000,00	-425.526.027,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	123.293.610,00	22.358.500,00	12.650.250,00	-110.643.360,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	168.491.000,00	151.981.500,00	56.981.500,00	-111.509.500,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	320.102.417,00	62.452.500,00	116.729.250,00	-203.373.167,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.								108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00						0,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00		
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan				90,00 Persen	90,00 Persen	1.596.748.327,00	489.075.500,00	634.144.000,00	-1.596.748.327,00							0,00		
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Presentase pelaksanaan pelelangan pengadaan barang/jasa secara elektronik				90 persen	90 persen	535.897.650,00	167.819.000,00	395.319.000,00	-140.578.650,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	104.009.600,00	54.469.000,00	104.469.000,00	459.400,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	368.587.400,00	66.400.000,00	198.900.000,00	-169.687.400,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				25 Orang	25 Orang	63.300.650,00	46.950.000,00	91.950.000,00	28.649.350,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		BAGIAN UMUM								108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00						0,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah				92,50 Persen	92,50 Persen	99.301.636.799,00	105.462.198.050,00	106.581.996.334,00	-99.301.636.799,00							0,00		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				90 persen	90 persen	66.800.861.800,00	88.429.691.250,00	87.903.291.250,00	21.102.429.450,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/b ulan	12 Orang/b ulan	66.796.542.100,00	88.429.691.250,00	87.903.291.250,00	21.106.749.150,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0 Laporan	1.439.900,00	0,00	0,00	-1.439.900,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	0 Laporan	1.439.900,00	0,00	0,00	-1.439.900,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0 Dokumen	1.439.900,00	0,00	0,00	-1.439.900,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				95 persen	95 persen	500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yg berkinerja baik				98 persen	98 persen	195.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	-87.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	0 Unit	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	-42.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				90 persen	90 persen	2.230.948.058,00	920.165.000,00	970.165.000,00	-1.260.783.058,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	109.935.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00	-83.785.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	323.704.800,00	71.430.000,00	221.430.000,00	-102.274.800,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	0 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.059.600,00	32.000.000,00	32.000.000,00	-53.059.600,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1.140.800.000,00	490.585.000,00	490.585.000,00	-650.215.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	546.448.658,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-346.448.658,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				90 persen	90 persen	897.949.750,00	7.000.000,00	207.000.000,00	-690.949.750,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	835.980.000,00	0,00	0,00	-835.980.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0 Unit	23.625.000,00	0,00	0,00	-23.625.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	38.344.750,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-31.344.750,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan Layanan Pendukung</i>				90 persen	90 persen	22.063.360.000,00	12.184.395.500,00	12.632.395.500,00	-9.430.964.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.950.000.000,00	1.410.000.000,00	1.410.000.000,00	-540.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	956.000.000,00	780.000.000,00	808.000.000,00	-148.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	1 Laporan	19.157.360.000,00	9.994.395.500,00	10.414.395.500,00	-8.742.964.500,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi bai</i>				90 persen	90 persen	2.415.080.000,00	1.273.400.000,00	1.285.400.000,00	-1.129.680.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	826.515.000,00	666.800.000,00	678.800.000,00	-147.715.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				1 Unit	1 Unit	836.845.000,00	404.600.000,00	404.600.000,00	-432.245.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	1 Unit	327.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	-225.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	424.720.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-324.720.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan penyediaan administrasi dan keuangan dan operasional KDH/WKDH				90 persen	90 persen	711.346.000,00	897.226.800,00	897.226.800,00	185.880.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	347.346.000,00	347.226.800,00	347.226.800,00	-119.200,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	161.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan				90 persen	90 persen	1.412.417.690,00	1.064.064.000,00	1.064.064.000,00	-348.353.690,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	767.334.400,00	586.280.000,00	586.280.000,00	-181.054.400,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	580.334.400,00	432.280.000,00	432.280.000,00	-148.054.400,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.748.890,00	45.504.000,00	45.504.000,00	-19.244.890,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN ORGANISASI							108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00						0,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah				92,50 Persen	92,50 Persen	99.301.636.799,00	105.462.198.050,00	106.581.996.334,00	-99.301.636.799,00							0,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Cakupan Pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah yang tertata dengan baik				85 persen	85 persen	252.532.100,00	124.788.000,00	94.788.000,00	-157.744.100,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.765.000,00	54.930.000,00	44.930.000,00	-20.835.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	75.793.100,00	24.929.000,00	14.929.000,00	-60.864.100,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	87.702.000,00	24.929.000,00	14.929.000,00	-72.773.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	16.403.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-6.403.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6.869.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	3.131.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN								108.762.863.377,00	112.981.073.550,00	114.496.500.634,00	5.733.637.257,00						0,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							108.583.833.575,00	112.802.217.550,00	114.387.529.634,00	5.803.696.059,00							0,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat Daerah				92,50 Persen	92,50 Persen	99.301.636.799,00	105.462.198.050,00	106.581.996.334,00	-99.301.636.799,00							0,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Fasilitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				95 persen	95 persen	1.806.741.401,00	347.243.000,00	1.313.441.284,00	-493.300.117,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitas Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan				1 Laporan	1 Laporan	665.477.000,00	171.189.000,00	845.613.218,00	180.136.218,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitas Komunikasi Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	1.006.200.000,00	165.354.000,00	457.128.066,00	-549.071.934,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1 Laporan	1 Laporan	135.064.401,00	10.700.000,00	10.700.000,00	-124.364.401,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD								35.179.712.899,00	26.102.833.756,00	24.705.276.524,00	-10.474.436.375,00						37.635.405.499,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.179.712.899,00	26.102.833.756,00	24.705.276.524,00	-10.474.436.375,00							37.635.405.499,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							35.179.712.899,00	26.102.833.756,00	24.705.276.524,00	-10.474.436.375,00							37.635.405.499,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat DPRD				92,50 Persen	92,50 Persen	21.331.155.757,00	18.270.663.691,00	17.988.984.091,00	1.177.655.940,00							22.508.811.697,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dsan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		11.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	1.834.535.900,00	2.115.028.500,00	2.115.028.500,00	280.492.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.277.428.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/b ulan	16 Orang/b ulan	1.829.035.900,00	2.109.528.500,00	2.109.528.500,00	280.492.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.271.928.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang berkinerja baik				100 %	100 %	520.000.000,00	321.000.000,00	321.000.000,00	-199.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		520.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				20 Paket	20 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				16 Orang	16 Orang	500.000.000,00	301.000.000,00	301.000.000,00	-199.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	1.954.364.350,00	2.208.078.400,00	2.028.898.800,00	74.534.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.020.980.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.812.500,00	32.589.000,00	32.589.000,00	-3.223.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.812.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.772.800,00	35.072.000,00	35.072.000,00	13.299.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			32.960.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	45.626.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	-126.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			45.680.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	272.963.050,00	285.967.400,00	285.967.400,00	13.004.350,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			328.338.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	347.500.000,00	508.950.000,00	508.950.000,00	161.450.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			347.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	8 Laporan	380.690.000,00	450.000.000,00	270.820.400,00	-109.869.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			380.690.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	249.600.000,00	351.680.000,00	351.680.000,00	102.080.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		624.505.028,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	99.600.000,00	170.510.000,00	170.510.000,00	70.910.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			229.780.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	181.170.000,00	181.170.000,00	31.170.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			394.725.028,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Layanan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	1.328.306.800,00	1.276.290.000,00	1.276.290.000,00	-52.016.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.286.306.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	288.000.000,00	451.800.000,00	451.800.000,00	163.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			288.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99.000.000,00	99.000.000,00	99.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			57.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	941.306.800,00	725.490.000,00	725.490.000,00	-215.816.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			941.306.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang milik Daerah yang dalam kondisi baik				100 %	100 %	731.879.838,00	1.018.843.053,00	1.018.843.053,00	286.963.215,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.198.121.800,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	215.700.000,00	216.400.000,00	216.400.000,00	700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			297.250.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	354.038.038,00	584.043.053,00	584.043.053,00	230.005.015,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	162.141.800,00	218.400.000,00	218.400.000,00	56.258.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			200.871.800,00	SEKRETARIAT DPRD	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				100 %	100 %	14.401.176.799,00	10.668.452.038,00	10.565.952.038,00	-3.835.224.761,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		14.271.176.999,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																			
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	13.700.676.999,00	10.060.266.688,00	10.060.266.688,00	-3.640.410.311,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.700.676.999,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				125 Paket	125 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	25 Orang	400.499.800,00	308.185.350,00	205.685.350,00	-194.814.450,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			270.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang Terpenuhi				100 %	100 %	298.892.070,00	298.891.700,00	298.891.700,00	-370,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		298.892.070,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				34 Laporan	34 Laporan	66.421.080,00	66.420.800,00	66.420.800,00	-280,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.421.080,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																			
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				60 Laporan	60 Laporan	232.470.990,00	232.470.900,00	232.470.900,00	-90,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			232.470.990,00	SEKRETARIAT DPRD	
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tersusun dan Terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)				100 Persen	100 Persen	13.848.557.142,00	7.832.170.065,00	6.716.292.433,00	1.278.036.660,00							15.126.593.802,00		
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang Sesuai Regulasi				100 %	100 %	576.435.720,00	576.435.450,00	495.515.700,00	-80.920.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		576.435.720,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	16.335.720,00	16.335.450,00	16.335.450,00	-270,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.335.720,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				4 Dokumen	2 Dokumen	560.100.000,00	560.100.000,00	479.180.250,00	-80.919.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			560.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Rapat Pembahasan Anggaran				100 %	100 %	431.528.000,00	431.973.000,00	431.973.000,00	445.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		405.030.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				6 Dokumen	6 Dokumen	62.818.000,00	62.898.000,00	62.898.000,00	80.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.818.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				6 Dokumen	6 Dokumen	62.818.000,00	62.898.000,00	62.898.000,00	80.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.818.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	91.206.000,00	91.286.000,00	91.286.000,00	80.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			91.206.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				6 Dokumen	6 Dokumen	91.206.000,00	91.286.000,00	91.286.000,00	80.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			91.206.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pertanggungjawaban APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	123.480.000,00	123.605.000,00	123.605.000,00	125.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			96.982.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-				-	-	103.726.000,00	103.630.000,00	103.630.000,00	-96.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		103.726.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				10 Laporan	10 Laporan	20.726.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.726.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				10 Laporan	10 Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	-24.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																			
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				10 Laporan	10 Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	-24.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				10 Laporan	10 Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	-24.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				10 Laporan	10 Laporan	20.750.000,00	20.726.000,00	20.726.000,00	-24.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD				100 %	100 %	2.472.802.010,00	1.520.270.000,00	1.221.711.000,00	-1.251.091.010,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.752.711.560,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	4 Dokumen	2.002.532.010,00	1.050.000.000,00	751.441.000,00	-1.251.091.010,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.282.441.560,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																			
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				4 Orang	4 Orang	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			195.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																			
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	275.270.000,00	275.270.000,00	275.270.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			275.270.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan Pokir yang terealisasi				100 %	100 %	939.637.750,00	917.152.750,00	778.673.875,00	-160.963.875,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur, Masyarakat		1.545.875.350,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				36 Laporan	20 Laporan	230.000.000,00	230.000.000,00	118.150.000,00	-111.850.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																			
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	27.152.750,00	27.152.750,00	26.593.875,00	-558.875,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.152.750,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																			
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	2 Dokumen	682.485.000,00	660.000.000,00	633.930.000,00	-48.555.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.288.722.600,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terintegrasi Program-program DPRD untuk Melaksanakan fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD				100 %	100 %	9.324.427.662,00	4.282.708.865,00	3.684.788.858,00	-5.639.638.804,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		9.742.815.172,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				28 Dokumen	25 Dokumen	9.264.427.662,00	4.222.708.865,00	3.624.788.858,00	-5.639.638.804,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.682.815.172,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								8.336.493.500,00	6.743.139.800,00	6.151.894.800,00	-2.184.598.700,00						7.836.493.500,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.336.493.500,00	6.743.139.800,00	6.151.894.800,00	-2.184.598.700,00							7.836.493.500,00		
	5.01	PERENCANAAN							6.639.985.500,00	6.068.139.800,00	5.599.394.800,00	-1.040.590.700,00							6.139.985.500,00		
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				90 %	90 %	4.195.922.500,00	4.136.420.800,00	4.001.420.800,00	0,00							4.195.922.500,00		
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	24.900.000,00	24.900.000,00	24.900.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		24.900.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	2.888.626.500,00	3.048.639.800,00	3.013.639.800,00	125.013.300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.888.626.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/b ulan	19 Orang/b ulan	2.883.126.500,00	3.043.139.800,00	3.008.139.800,00	125.013.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.883.126.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang Berkinerja Baik				100 %	100 %	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				19 Orang	19 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	976.436.000,00	792.671.000,00	642.671.000,00	-333.765.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		976.436.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			216.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	122.436.000,00	108.671.000,00	108.671.000,00	-13.765.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			122.436.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	470.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	-320.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			470.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	60.750.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	14.250.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		60.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	60.750.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	14.250.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	145.210.000,00	145.210.000,00	145.210.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		145.210.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	133.850.000,00	133.850.000,00	133.850.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			133.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	11.360.000,00	11.360.000,00	11.360.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.360.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Dokumen Perencanaan Terhadap Dokumen Penganggaran				100 %	100 %	1.583.720.000,00	1.239.361.000,00	1.013.361.000,00	-500.000.000,00							1.083.720.000,00		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD				100 %	100 %	1.325.428.000,00	982.659.000,00	836.659.000,00	-488.769.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		825.428.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	1 Dokumen	165.714.000,00	41.664.000,00	41.664.000,00	-124.050.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.714.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	267.217.000,00	287.997.000,00	236.997.000,00	-30.220.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			267.217.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																			
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				1 Usulan	1 Usulan	64.823.000,00	66.647.000,00	50.647.000,00	-14.176.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			64.823.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	827.674.000,00	586.351.000,00	507.351.000,00	-320.323.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			327.674.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Data dan Informasi Pembangunan Daerah				100 %	100 %	68.148.000,00	89.158.000,00	64.158.000,00	-3.990.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		68.148.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				39 Orang	39 Orang	68.148.000,00	89.158.000,00	64.158.000,00	-3.990.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			68.148.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD				100 %	100 %	190.144.000,00	167.544.000,00	112.544.000,00	-77.600.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		190.144.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	73.547.000,00	56.697.000,00	31.697.000,00	-41.850.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			73.547.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	116.597.000,00	110.847.000,00	80.847.000,00	-35.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			116.597.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Konsistensi Keselarasan Program Prioritas Daerah Terhadap Program Prioritas Pusat				80 %	80 %	860.343.000,00	692.358.000,00	584.613.000,00	0,00							860.343.000,00		
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rata-rata Capaian Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				70 %	70 %	454.395.000,00	351.060.000,00	266.060.000,00	-188.335.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		454.395.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	84.642.000,00	84.642.000,00	64.642.000,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			84.642.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	0 Laporan	81.681.000,00	0,00	0,00	-81.681.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			81.681.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	90.885.000,00	90.885.000,00	70.885.000,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			90.885.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	0 Laporan	57.335.000,00	0,00	0,00	-57.335.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			57.335.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	64.355.000,00	78.355.000,00	63.355.000,00	-1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			64.355.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	75.497.000,00	97.178.000,00	67.178.000,00	-8.319.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			75.497.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rata-rata Capaian Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				70 %	70 %	101.500.000,00	69.175.000,00	44.553.800,00	-56.946.200,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		101.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	101.500.000,00	69.175.000,00	44.553.800,00	-56.946.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			101.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rata-rata Capaian Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				70 %	70 %	304.448.000,00	272.123.000,00	273.999.200,00	-30.448.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		304.448.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	101.624.000,00	101.624.000,00	61.602.400,00	-40.021.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			101.624.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP.JMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	2 Laporan	101.421.000,00	101.421.000,00	166.900.400,00	65.479.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			101.421.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP.JMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	101.403.000,00	69.078.000,00	45.496.400,00	-55.906.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			101.403.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.696.508.000,00	675.000.000,00	552.500.000,00	-1.144.008.000,00							1.696.508.000,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah				90 %	90 %	1.696.508.000,00	675.000.000,00	552.500.000,00	0,00							1.696.508.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				80 %	80 %	518.259.000,00	346.000.000,00	223.500.000,00	-294.759.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		518.259.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Laporan	1 Laporan	115.195.250,00	90.613.000,00	58.113.000,00	-57.082.250,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			115.195.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	223.422.750,00	84.814.000,00	54.814.000,00	-168.608.750,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			223.422.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	1 Laporan	84.716.000,00	84.682.000,00	54.682.000,00	-30.034.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			84.716.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	94.925.000,00	85.891.000,00	55.891.000,00	-39.034.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			94.925.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan				80 %	80 %	528.249.000,00	329.000.000,00	329.000.000,00	-199.249.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		528.249.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	2 Dokumen	528.249.000,00	329.000.000,00	329.000.000,00	-199.249.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			528.249.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				80 %	80 %	650.000.000,00	0,00	0,00	-650.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	0 Dokumen	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen	0 Dokumen	325.000.000,00	0,00	0,00	-325.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			325.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH							190.309.514.291,00	176.787.713.563,00	176.787.713.463,00	-13.521.800.828,00								201.814.639.291,00
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							190.309.514.291,00	176.787.713.563,00	176.787.713.463,00	-13.521.800.828,00							201.814.639.291,00	
	5.02	KEUANGAN							190.309.514.291,00	176.787.713.563,00	176.787.713.463,00	-13.521.800.828,00							201.814.639.291,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan pemerintah Daerah Pada BPKAD				92.50 %	92.50 %	21.471.095.966,00	18.014.956.337,00	17.884.996.737,00	11.000.000.000,00							32.471.095.966,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		15.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Pembayaran Gaji, Tunjangan PNS, Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian ASN dan Iuran Tapera ASN Kabupaten Pesisir Barat				100 %	100 %	19.774.529.866,00	16.559.588.337,00	16.559.588.337,00	-3.214.941.529,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		30.774.529.866,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	19.769.529.866,00	16.554.588.337,00	16.554.588.337,00	-3.214.941.529,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.769.529.866,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas				100 %	100 %	335.000.000,00	100.000.000,00	139.900.000,00	-195.100.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		335.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3 Paket	35.000.000,00	0,00	39.900.000,00	4.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	25 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	884.271.050,00	808.330.000,00	638.470.400,00	-245.800.650,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		884.271.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakdan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	327.771.050,00	326.796.000,00	190.992.400,00	-136.778.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			327.771.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	15 Dokumen	43.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	188.500.000,00	188.534.000,00	154.478.000,00	-34.022.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			188.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Tersedia				100 %	100 %	86.100.000,00	121.200.000,00	121.200.000,00	35.100.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		86.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	86.100.000,00	121.200.000,00	121.200.000,00	35.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			86.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung Daerah				100 %	100 %	221.201.550,00	236.230.000,00	236.230.000,00	15.028.450,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		221.201.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	213.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			213.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.201.550,00	8.230.000,00	8.230.000,00	28.450,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.201.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	154.493.500,00	174.108.000,00	174.108.000,00	19.614.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		154.493.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	140.350.000,00	156.258.000,00	156.258.000,00	15.908.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			140.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	14.143.500,00	17.850.000,00	17.850.000,00	3.706.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.143.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Cakupan Tata kelola barang milik daerah sesuai aturan				100 %	100 %	166.475.669.625,00	157.435.781.226,00	157.565.740.726,00	505.125.000,00							166.980.794.625,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen penganggaran daerah tepat waktu				100 %	100 %	2.849.358.800,00	2.028.305.000,00	1.995.255.800,00	-854.103.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.849.358.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	289.896.150,00	214.640.000,00	213.240.000,00	-76.656.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			289.896.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	289.896.150,00	214.640.000,00	213.240.000,00	-76.656.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			289.896.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.305.500,00	43.110.000,00	39.270.000,00	-11.035.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.305.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.305.500,00	43.110.000,00	39.270.000,00	-11.035.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.305.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.429.400,00	43.195.000,00	39.355.000,00	-11.074.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.429.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.429.400,00	43.195.000,00	39.355.000,00	-11.074.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.429.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	790.346.650,00	591.430.000,00	618.750.000,00	-171.596.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			790.346.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	799.046.650,00	591.480.000,00	618.800.000,00	-180.246.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			799.046.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	478.703.400,00	243.505.000,00	173.975.800,00	-304.727.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			478.703.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Dokumen penatausahaan keuangan daerah tepat waktu				100 %	100 %	1.531.700.950,00	1.389.771.750,00	1.389.702.950,00	-141.998.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.531.700.950,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				36 Dokumen	36 Dokumen	289.298.050,00	467.023.000,00	507.733.000,00	218.434.950,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			289.298.050,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				2 Dokumen	2 Dokumen	147.182.500,00	72.527.500,00	77.627.500,00	-69.555.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			147.182.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	298.959.650,00	367.685.000,00	306.135.000,00	7.175.350,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			298.959.650,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	12 Dokumen	375.523.500,00	393.325.000,00	417.185.000,00	41.661.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			375.523.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				45 Orang	45 Orang	420.737.250,00	89.211.250,00	81.022.450,00	-339.714.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			420.737.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	709.655.800,00	348.024.000,00	348.024.000,00	-361.631.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		709.655.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>				2 Laporan	2 Laporan	154.474.100,00	125.635.000,00	144.130.200,00	-10.343.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			154.474.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>				1 Laporan	1 Laporan	332.690.500,00	119.933.000,00	119.933.000,00	-212.757.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			332.690.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	187.491.200,00	102.456.000,00	83.960.800,00	-103.530.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			187.491.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	0,00	0,00	-35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	<i>Cakupan pemenuhan penunjang pengelolaan keuangan daerah</i>				100 %	100 %	161.199.650.925,00	153.533.705.476,00	153.533.705.476,00	-7.665.945.449,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		161.199.650.925,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>				12 Laporan	12 Laporan	6.945.750.000,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	2.054.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.945.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	12 Laporan	153.253.900.925,00	144.533.705.476,00	144.533.705.476,00	-8.720.195.449,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			153.253.900.925,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	<i>Cakupan penggunaan SIPD dalam keuangan daerah</i>				100 %	100 %	185.303.150,00	135.975.000,00	299.052.500,00	113.749.350,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		690.428.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah</i>				-	1 Dokumen	0,00	0,00	299.052.500,00	299.052.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			505.125.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i>				10 Orang	0 Orang	185.303.150,00	135.975.000,00	0,00	-185.303.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			185.303.150,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Tata kelola barang milik daerah sesuai aturan				100 %	100 %	2.362.748.700,00	1.336.976.000,00	1.336.976.000,00	0,00							2.362.748.700,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	<i>Cakupan pencatatan aset daerah</i>				100 %	100 %	2.362.748.700,00	1.336.976.000,00	1.336.976.000,00	-1.025.772.700,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		2.362.748.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			<i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	333.774.200,00	193.581.000,00	193.581.000,00	-140.193.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			333.774.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				2 Laporan	2 Laporan	631.393.800,00	351.033.800,00	351.033.800,00	-280.360.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			631.393.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i>				1 Laporan	1 Laporan	255.077.700,00	166.258.000,00	166.258.000,00	-88.819.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			255.077.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	564.977.000,00	475.977.200,00	475.977.200,00	-88.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			564.977.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	577.526.000,00	150.126.000,00	150.126.000,00	-427.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			577.526.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH								5.326.291.650,00	4.397.007.100,00	4.218.648.100,00	-1.107.643.550,00						5.858.612.815,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							5.326.291.650,00	4.397.007.100,00	4.218.648.100,00	-1.107.643.550,00							5.858.612.815,00	
	5.02	KEUANGAN							5.326.291.650,00	4.397.007.100,00	4.218.648.100,00	-1.107.643.550,00							5.858.612.815,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah				90 %	90 %	3.406.507.498,00	3.050.289.300,00	2.950.689.300,00	340.342.750,00							3.746.850.248,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		13.640.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	14 Bulan	2.202.767.700,00	2.222.507.100,00	2.272.907.100,00	70.139.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		2.423.044.470,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.197.267.700,00	2.217.007.100,00	2.267.407.100,00	70.139.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.416.994.470,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		330.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			330.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				90 %	90 %	462.589.798,00	393.192.200,00	243.192.200,00	-219.397.598,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		508.540.778,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			27.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	82.107.500,00	85.088.200,00	85.088.200,00	2.980.700,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			90.010.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	21.104.298,00	21.104.000,00	21.104.000,00	-298,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			23.214.728,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	322.378.000,00	250.000.000,00	100.000.000,00	-222.378.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			354.615.800,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 unit	12 unit	111.000.000,00	0,00	0,00	-111.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		122.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	111.000.000,00	0,00	0,00	-111.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			122.100.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 laporan	12 laporan	190.000.000,00	182.540.000,00	182.540.000,00	-7.460.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		209.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	-7.460.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 unit	8 unit	127.750.000,00	139.650.000,00	139.650.000,00	11.900.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		140.525.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	112.750.000,00	124.650.000,00	124.650.000,00	11.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			124.025.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
2.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah				4,26 %	4,26 %	1.919.784.152,00	1.346.717.800,00	1.267.958.800,00	191.978.415,00							2.111.762.567,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah				4,26 %	4,26 %	1.919.784.152,00	1.346.717.800,00	1.267.958.800,00	-651.825.352,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		2.111.762.567,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	265.693.000,00	0,00	0,00	-265.693.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			292.262.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	106.045.602,00	97.454.000,00	89.954.000,00	-16.091.602,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			116.650.162,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	524.887.600,00	108.430.000,00	107.430.000,00	-417.457.600,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			577.376.360,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	485.410.000,00	188.000.000,00	180.000.000,00	-305.410.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			533.951.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	207.479.800,00	158.455.900,00	108.196.900,00	-99.282.900,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			228.227.780,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	1 Laporan	250.642.950,00	142.462.500,00	137.462.500,00	-113.180.450,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			275.707.245,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				1 Laporan	1 Laporan	79.625.200,00	651.915.400,00	644.915.400,00	565.290.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			87.587.720,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							3.852.637.800,00	3.834.904.000,00	4.169.811.900,00	317.174.100,00						4.198.919.703,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							3.852.637.800,00	3.834.904.000,00	4.169.811.900,00	317.174.100,00							4.198.919.703,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							3.644.107.000,00	3.625.922.000,00	4.003.329.900,00	359.222.900,00							4.034.814.153,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92.50 Persen	92.50 Persen	2.362.664.600,00	2.448.897.000,00	2.448.897.000,00	46.919.231,00							2.409.583.831,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	14.399.950,00	14.400.000,00	14.400.000,00	50,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		15.084.948,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.770.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.540.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	499.950,00	500.000,00	500.000,00	50,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			524.948,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28 Laporan	28 Laporan	1.883.137.800,00	2.096.608.000,00	2.096.608.000,00	213.470.200,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.977.294.690,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.877.637.800,00	2.091.108.000,00	2.091.108.000,00	213.470.200,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.971.519.690,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.625.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.050.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1 Orang	1 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	0 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				56 Dokumen	56 Dokumen	239.056.850,00	160.469.000,00	160.469.000,00	-78.587.850,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		251.009.693,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	43.582.500,00	40.469.000,00	40.469.000,00	-3.113.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			45.761.625,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	147.474.350,00	72.000.000,00	72.000.000,00	-75.474.350,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			154.848.068,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah				4 Unit	4 Unit	60.980.000,00	0,00	0,00	-60.980.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	60.980.000,00	0,00	0,00	-60.980.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang				12 Laporan	12 Laporan	67.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	65.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		73.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	67.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			73.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				14 Unit	14 Unit	88.090.000,00	45.420.000,00	45.420.000,00	-42.670.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		92.494.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	1 Unit	79.570.000,00	36.900.000,00	36.900.000,00	-42.670.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			83.548.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	8.520.000,00	8.520.000,00	8.520.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.946.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian				75,38 Persen	75,38 Persen	1.281.442.400,00	1.177.025.000,00	1.554.432.900,00	343.787.922,00							1.625.230.322,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tercapainya Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	650.564.550,00	583.818.600,00	405.280.500,00	-245.284.050,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		683.092.778,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	548.952.900,00	431.835.700,00	278.797.600,00	-270.155.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			576.400.545,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																			
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	2 Dokumen	23.824.200,00	23.823.900,00	16.823.900,00	-7.000.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.015.410,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																			
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	42.819.000,00	42.211.000,00	34.711.000,00	-8.108.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.959.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	20.779.150,00	71.759.000,00	70.759.000,00	49.979.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.818.108,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	14.189.300,00	14.189.000,00	4.189.000,00	-10.000.300,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.898.765,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tercapainya Mutasi dan Promosi ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	422.613.200,00	424.814.000,00	1.021.760.000,00	599.146.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		723.459.660,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	72.613.200,00	424.814.000,00	405.364.000,00	332.750.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			76.243.860,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	0,00	616.396.000,00	266.396.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			647.215.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tercapainya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1005 Orang	1005 Orang	208.264.650,00	168.392.400,00	127.392.400,00	-80.872.250,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		218.677.884,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																			
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Laporan	2 Laporan	79.586.850,00	40.785.000,00	40.785.000,00	-38.801.850,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			83.566.193,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1000 Orang	1000 Orang	95.825.750,00	95.825.400,00	70.825.400,00	-25.000.350,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			100.617.038,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				5 Orang	5 Orang	32.852.050,00	31.782.000,00	15.782.000,00	-17.070.050,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			34.494.653,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							208.530.800,00	208.982.000,00	166.482.000,00	-42.048.800,00							164.105.550,00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN telah yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan				22.64 Persen	22.64 Persen	208.530.800,00	208.982.000,00	166.482.000,00	-44.425.250,00							164.105.550,00		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis				40 Orang	40 Orang	52.239.800,00	0,00	0,00	-52.239.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				40 Orang	0 Orang	52.239.800,00	0,00	0,00	-52.239.800,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Tercapainya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	156.291.000,00	208.982.000,00	166.482.000,00	10.191.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		164.105.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	2 Laporan	156.291.000,00	208.982.000,00	166.482.000,00	10.191.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			164.105.550,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT								6.420.695.300,00	7.773.167.300,00	7.567.631.950,00	1.146.936.650,00						7.058.143.230,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							6.420.695.300,00	7.773.167.300,00	7.567.631.950,00	1.146.936.650,00							7.058.143.230,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							6.420.695.300,00	7.773.167.300,00	7.567.631.950,00	1.146.936.650,00							7.058.143.230,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.540.485.900,00	5.980.999.800,00	6.352.549.800,00	449.426.990,00							4.989.912.890,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselesaikannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	6.716.000,00	6.716.000,00	6.716.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		6.716.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.716.000,00	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.716.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselesaikannya Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	3.252.870.900,00	4.778.667.300,00	5.292.467.300,00	2.039.596.400,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		3.577.607.990,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.247.370.900,00	4.773.167.300,00	5.286.967.300,00	2.039.596.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.572.107.990,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya aparatur yg berkinerja baik				100 %	100 %	245.520.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-145.520.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		270.072.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				18 Orang	18 Orang	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			220.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	45.520.000,00	0,00	0,00	-45.520.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.072.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	429.599.000,00	476.446.500,00	334.196.500,00	-95.402.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		469.158.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.599.000,00	5.599.000,00	5.599.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.158.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	120.000.000,00	122.347.500,00	122.347.500,00	2.347.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	8 Laporan	270.000.000,00	314.500.000,00	172.250.000,00	-97.750.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			297.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya pemenuhan Prasarana dan prasarana pendukung kinerja				100 %	100 %	130.980.000,00	190.830.000,00	190.830.000,00	59.850.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		144.078.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	10.980.000,00	5.430.000,00	5.430.000,00	-5.550.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.078.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	120.000.000,00	185.400.000,00	185.400.000,00	65.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Persentase pemenuhan Layanan Pendukung Kinerja Perangkat Daerah				100 %	100 %	320.000.000,00	285.040.000,00	285.040.000,00	-34.960.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		352.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	280.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			308.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	30.040.000,00	30.040.000,00	-9.960.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	154.800.000,00	143.300.000,00	143.300.000,00	-11.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		170.280.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.800.000,00	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.780.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	8 Unit	88.500.000,00	96.400.000,00	96.400.000,00	7.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			97.350.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	26.500.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	-19.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.150.000,00	INSPEKTORAT	
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	cakupan konsistensi perencanaan,pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan				100 %	100 %	1.350.000.000,00	1.274.112.000,00	855.476.650,00	135.000.000,00							1.485.000.000,00		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Tercapainya konsistensi perencanaan,pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran terhadap kepatuhan peraturan peundang- undangan				100 %	100 %	990.000.000,00	870.162.000,00	607.946.050,00	-382.053.950,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.089.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				25 Laporan	16 Laporan	180.000.000,00	170.000.000,00	147.034.050,00	-32.965.950,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			198.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				110 Laporan	60 Laporan	210.000.000,00	145.960.000,00	80.460.000,00	-129.540.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			231.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				3 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	53.960.000,00	38.010.000,00	-41.990.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			88.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				8 Laporan	6 Laporan	80.000.000,00	84.100.000,00	51.600.000,00	-28.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			88.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				40 Laporan	21 Laporan	160.000.000,00	139.932.000,00	79.932.000,00	-80.068.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			176.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																			
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakan	2 Kesepakan	60.000.000,00	69.710.000,00	59.710.000,00	-290.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	6 Dokumen	220.000.000,00	206.500.000,00	151.200.000,00	-68.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			242.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tercapainya konsistensi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan				100 %	100 %	360.000.000,00	403.950.000,00	247.530.600,00	-112.469.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		396.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																			
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	148.800.000,00	99.450.000,00	-50.550.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			165.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20 Laporan	10 Laporan	210.000.000,00	255.150.000,00	148.080.600,00	-61.919.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			231.000.000,00	INSPEKTORAT	
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	cakupan konsistensi perumasan kebijakan, pendampingan dan asistensi terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan				100 %	100 %	530.209.400,00	518.055.500,00	359.605.500,00	53.020.940,00							583.230.340,00		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tercapainya konsistensi perumusan kebijakan teknis terhadap kepatuhan peraturan peundang-undangan				100 %	100 %	120.000.000,00	123.737.000,00	72.437.000,00	-47.563.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		132.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan																			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	2 Rekomendasi	60.000.000,00	74.580.000,00	44.580.000,00	-15.420.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																			
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				3 Rekomendasi	2 Rekomendasi	60.000.000,00	49.157.000,00	27.857.000,00	-32.143.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Tercapainya konsistensi perumusan kebijakan teknis terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan				100 %	100 %	410.209.400,00	394.318.500,00	287.168.500,00	-123.040.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		451.230.340,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				39 perangkat daerah	28 perangkat daerah	170.209.400,00	190.480.000,00	136.830.000,00	-33.379.400,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			187.230.340,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				3 perangkat daerah	2 perangkat daerah	60.000.000,00	41.257.000,00	24.757.000,00	-35.243.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				12 Kegiatan	8 Kegiatan	120.000.000,00	121.024.000,00	91.024.000,00	-28.976.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			132.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				39 perangkat daerah	39 perangkat daerah	60.000.000,00	41.557.500,00	34.557.500,00	-25.442.500,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			66.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN BANGKUNAT																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							835.700.000,00	874.600.000,00	874.600.000,00	38.900.000,00							835.700.000,00	
	7.01	KECAMATAN							835.700.000,00	874.600.000,00	874.600.000,00	38.900.000,00							835.700.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				90 %	90 %	789.545.900,00	828.445.900,00	828.445.900,00	0,00							789.545.900,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	4.999.750,00	4.999.750,00	4.999.750,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		4.999.750,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.999.750,00	4.999.750,00	4.999.750,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.999.750,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	511.199.500,00	550.099.500,00	550.099.500,00	38.900.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		511.199.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	505.700.000,00	544.600.000,00	544.600.000,00	38.900.000,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			505.700.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.499.950,00	2.499.950,00	2.499.950,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.499.950,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.999.850,00	1.999.850,00	1.999.850,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.999.850,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	999.700,00	999.700,00	999.700,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			999.700,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	183.031.150,00	183.031.150,00	183.031.150,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		183.031.150,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.918.500,00	9.918.500,00	9.918.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.918.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	26.261.650,00	26.261.650,00	26.261.650,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.261.650,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.300.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.551.000,00	32.551.000,00	32.551.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			32.551.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	28.815.500,00	28.815.500,00	28.815.500,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		28.815.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.507.500,00	4.507.500,00	4.507.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.507.500,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.308.000,00	8.308.000,00	8.308.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.308.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	61.500.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		61.500.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.500.000,00	KECAMATAN BANGKUNAT
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	46.154.100,00	46.154.100,00	46.154.100,00	0,00							46.154.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	46.154.100,00	46.154.100,00	46.154.100,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		46.154.100,00	KECAMATAN BANGKUNAT	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	46.154.100,00	46.154.100,00	46.154.100,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Bangkumat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			46.154.100,00	KECAMATAN BANGKUNAT	
		KECAMATAN NGARAS							801.900.000,00	1.163.400.000,00	1.163.400.000,00	361.500.000,00					801.900.000,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							801.900.000,00	1.163.400.000,00	1.163.400.000,00	361.500.000,00							801.900.000,00		
	7.01	KECAMATAN							801.900.000,00	1.163.400.000,00	1.163.400.000,00	361.500.000,00							801.900.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	757.954.000,00	1.119.454.000,00	1.119.454.000,00	0,00							757.954.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		4.990.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.990.000,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.990.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	477.369.850,00	538.869.850,00	538.869.850,00	61.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		477.369.850,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	471.900.000,00	533.400.000,00	533.400.000,00	61.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			471.900.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.493.850,00	2.493.850,00	2.493.850,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.493.850,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.981.000,00	1.981.000,00	1.981.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.981.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	995.000,00	995.000,00	995.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			995.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	185.581.900,00	181.081.900,00	181.081.900,00	-4.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		185.581.900,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.509.400,00	7.509.400,00	7.509.400,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.509.400,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.897.500,00	22.897.500,00	22.897.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.897.500,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.300.000,00	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.300.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40.875.000,00	40.875.000,00	40.875.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.875.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	55.500.000,00	55.500.000,00	-4.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			60.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	28.412.250,00	28.412.250,00	28.412.250,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		28.412.250,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.750.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.662.250,00	8.662.250,00	8.662.250,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.662.250,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	61.600.000,00	366.100.000,00	366.100.000,00	304.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		61.600.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	37.000.000,00	61.500.000,00	61.500.000,00	24.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.600.000,00	KECAMATAN NGARAS	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	43.946.000,00	43.946.000,00	43.946.000,00	0,00							43.946.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	43.946.000,00	43.946.000,00	43.946.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		43.946.000,00	KECAMATAN NGARAS	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	43.946.000,00	43.946.000,00	43.946.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngaras, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.946.000,00	KECAMATAN NGARAS	
		KECAMATAN NGAMBUR							795.400.000,00	831.200.000,00	831.200.000,00	35.800.000,00							1.058.420.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							795.400.000,00	831.200.000,00	831.200.000,00	35.800.000,00							1.058.420.000,00		
	7.01	KECAMATAN							795.400.000,00	831.200.000,00	831.200.000,00	35.800.000,00							1.058.420.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				90 %	90 %	752.725.500,00	788.525.500,00	788.525.500,00	263.020.000,00							1.015.745.500,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100% %	100% %	9.999.750,00	9.980.000,00	9.980.000,00	-19.750,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		9.999.750,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.999.750,00	9.980.000,00	9.980.000,00	-19.750,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.999.750,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	475.901.350,00	511.721.400,00	511.721.400,00	35.820.050,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		738.921.350,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	465.400.000,00	501.200.000,00	501.200.000,00	35.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			728.420.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	3.523.100,00	3.523.100,00	23.100,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.500.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.999.950,00	4.997.000,00	4.997.000,00	-2.950,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.999.950,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.001.400,00	2.001.300,00	2.001.300,00	-100,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.001.400,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	154.799.900,00	154.799.600,00	154.799.600,00	-300,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		154.799.900,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.140.250,00	9.140.000,00	9.140.000,00	-250,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			9.140.250,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.629.500,00	21.629.500,00	21.629.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			21.629.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.150.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	25.880.150,00	25.880.100,00	25.880.100,00	-50,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.880.150,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	43.000.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung Daerah				100 %	100 %	35.534.500,00	35.534.500,00	35.534.500,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		35.534.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.533.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.401.500,00	10.401.500,00	10.401.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.401.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	76.490.000,00	76.490.000,00	76.490.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		76.490.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50.550.000,00	50.550.000,00	50.550.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.550.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.940.000,00	KECAMATAN NGAMBUR
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	42.674.500,00	42.674.500,00	42.674.500,00	0,00							42.674.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	42.674.500,00	42.674.500,00	42.674.500,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		42.674.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.674.500,00	42.674.500,00	42.674.500,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Ngambur, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.674.500,00	KECAMATAN NGAMBUR
		KECAMATAN PESIR SELATAN								829.200.000,00	856.400.000,00	856.400.000,00	27.200.000,00					829.200.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							829.200.000,00	856.400.000,00	856.400.000,00	27.200.000,00							829.200.000,00	
	7.01	KECAMATAN							829.200.000,00	856.400.000,00	856.400.000,00	27.200.000,00							829.200.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				90 %	90 %	800.158.000,00	812.358.000,00	812.358.000,00	0,00							800.158.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	4.519.000,00	4.519.000,00	4.519.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		4.519.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.519.000,00	4.519.000,00	4.519.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.519.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	504.541.000,00	531.741.000,00	531.741.000,00	27.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		504.541.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	499.200.000,00	526.400.000,00	526.400.000,00	27.200.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			499.200.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.413.000,00	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.413.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.930.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	998.000,00	998.000,00	998.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			998.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	194.149.000,00	179.149.000,00	179.149.000,00	-15.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		194.149.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.048.000,00	6.048.000,00	6.048.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.048.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.946.000,00	29.946.000,00	29.946.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.946.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.155.000,00	22.155.000,00	22.155.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			22.155.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	-15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			75.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	35.813.000,00	35.813.000,00	35.813.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		35.813.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.605.000,00	3.605.000,00	3.605.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.605.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.208.000,00	16.208.000,00	16.208.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			16.208.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	61.136.000,00	61.136.000,00	61.136.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		61.136.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	40.750.000,00	40.750.000,00	40.750.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			40.750.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			14.000.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.386.000,00	6.386.000,00	6.386.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.386.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	29.042.000,00	44.042.000,00	44.042.000,00	0,00							29.042.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	29.042.000,00	44.042.000,00	44.042.000,00	15.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		29.042.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.042.000,00	44.042.000,00	44.042.000,00	15.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.042.000,00	KECAMATAN PESISIR SELATAN	
		KECAMATAN KRUI SELATAN								801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00						801.900.000,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00							801.900.000,00		
	7.01	KECAMATAN							801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00							801.900.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,5 Persen	92,5 Persen	781.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	0,00							781.900.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 Persen	100 Persen	20.124.000,00	20.124.000,00	20.124.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	ASN		20.124.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.400.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.431.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.431.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.431.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.431.000,00	3.431.000,00	3.431.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.431.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu</i>				100 Persen	100 Persen	478.400.000,00	514.700.000,00	514.700.000,00	36.300.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Pegawai		478.400.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	471.900.000,00	508.200.000,00	508.200.000,00	36.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			471.900.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				18 Laporan	18 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.500.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja</i>				90 Persen	90 Persen	139.351.500,00	180.818.000,00	180.818.000,00	41.466.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	ASN		139.351.500,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	7.141.000,00	7.141.000,00	7.141.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.141.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	31.079.700,00	31.037.000,00	31.037.000,00	-42.700,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			31.079.700,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	25.580.000,00	32.270.000,00	32.270.000,00	6.690.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.580.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	48.370.000,00	48.370.000,00	30.370.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.550.800,00	25.000.000,00	25.000.000,00	4.449.200,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.550.800,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja</i>				100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	24.365.000,00	24.365.000,00	-635.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	ASN		25.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	24.365.000,00	24.365.000,00	-635.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung Daerah				100 Persen	100 Persen	37.534.500,00	39.207.000,00	39.207.000,00	1.672.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	ASN		37.534.500,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.533.000,00	7.142.000,00	7.142.000,00	1.609.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.533.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.401.500,00	10.465.000,00	10.465.000,00	63.500,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.401.500,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dalam Kondisi Baik				100 Persen	100 Persen	81.490.000,00	58.986.000,00	58.986.000,00	-22.504.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	ASN		81.490.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	50.550.000,00	33.326.000,00	33.326.000,00	-17.224.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.550.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	16.420.000,00	16.420.000,00	-8.580.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.940.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	3.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.940.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Kepemudaan				92,5 Persen	92,5 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00							20.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pengembangan Pemuda				100 Persen	100 Persen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Krui Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.000.000,00	KECAMATAN KRUI SELATAN	
		KECAMATAN PESIRIS TENGAH								3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00						3.596.310.700,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00							3.596.310.700,00		
	7.01	KECAMATAN							3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00							3.596.310.700,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				90 %	90 %	1.386.900.000,00	1.468.200.000,00	1.468.200.000,00	15.273.700,00							1.402.173.700,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.950.000,00	KECAMATAN PESIRIS TENGAH	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.950.000,00	KECAMATAN PESIRIS TENGAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	1.061.427.000,00	1.142.727.000,00	1.142.727.000,00	81.300.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	A		1.061.427.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.056.900.000,00	1.138.200.000,00	1.138.200.000,00	81.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.056.900.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.377.800,00	1.377.800,00	1.377.800,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.377.800,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.635.600,00	2.635.600,00	2.635.600,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.635.600,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	513.600,00	513.600,00	513.600,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			513.600,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	120.256.000,00	123.456.000,00	123.456.000,00	3.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		122.146.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.037.000,00	10.037.000,00	10.037.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.037.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.224.000,00	52.224.000,00	52.224.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			52.224.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	4.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.790.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6.495.000,00	7.495.000,00	7.495.000,00	1.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.495.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.600.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	19.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			19.000.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	-3.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	133.837.000,00	121.037.000,00	121.037.000,00	-12.800.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		147.220.700,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	133.837.000,00	0,00	0,00	-133.837.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	121.037.000,00	121.037.000,00	121.037.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			147.220.700,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	43.600.000,00	47.800.000,00	47.800.000,00	4.200.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		43.600.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	33.600.000,00	32.800.000,00	32.800.000,00	-800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			33.600.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	25.830.000,00	31.230.000,00	31.230.000,00	5.400.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		25.830.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	25.830.000,00	31.230.000,00	31.230.000,00	5.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.830.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
		KELURAHAN PASAR KRUI																				3.596.310.700,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00							3.596.310.700,00				
	7.01	KECAMATAN							3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00							3.596.310.700,00				
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	1.994.670.000,00	2.254.670.000,00	2.254.670.000,00	199.467.000,00							2.194.137.000,00				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	1.994.670.000,00	2.254.670.000,00	2.254.670.000,00	260.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		2.194.137.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	590.935.000,00	0,00	0,00	-590.935.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	590.935.000,00	590.935.000,00	590.935.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			650.028.500,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	406.400.000,00	0,00	0,00	-406.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																					
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	588.000.000,00	588.000.000,00	588.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			447.040.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
		KELURAHAN PASAR KOTA KRUI																				3.596.310.700,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00							3.596.310.700,00				
	7.01	KECAMATAN							3.381.570.000,00	3.722.870.000,00	3.722.870.000,00	341.300.000,00							3.596.310.700,00				
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100 %	100 %	1.994.670.000,00	2.254.670.000,00	2.254.670.000,00	199.467.000,00							2.194.137.000,00				
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelurahan				100 %	100 %	1.994.670.000,00	2.254.670.000,00	2.254.670.000,00	260.000.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur dan Masyarakat		2.194.137.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	590.935.000,00	0,00	0,00	-590.935.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	1 Unit	0,00	590.935.000,00	590.935.000,00	590.935.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			650.028.500,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	406.400.000,00	0,00	0,00	-406.400.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			0,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	1 Pokmas / Ormas	0,00	484.800.000,00	484.800.000,00	484.800.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kota Krui	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			447.040.000,00	KECAMATAN PESISIR TENGAH	
		KECAMATAN WAY KRUI							778.500.000,00	813.000.000,00	813.000.000,00	34.500.000,00								778.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							778.500.000,00	813.000.000,00	813.000.000,00	34.500.000,00							778.500.000,00		
	7.01	KECAMATAN							778.500.000,00	813.000.000,00	813.000.000,00	34.500.000,00							778.500.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				90 %	90 %	778.500.000,00	813.000.000,00	813.000.000,00	0,00							778.500.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	4.692.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	438.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		4.692.000,00	KECAMATAN WAY KRUI		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.692.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	438.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.692.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	461.338.500,00	497.508.500,00	497.508.500,00	36.170.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		461.338.500,00	KECAMATAN WAY KRUI		
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	448.500.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00	34.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			448.500.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.255.000,00	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.255.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.261.500,00	5.296.500,00	5.296.500,00	1.035.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.261.500,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	4.322.000,00	4.957.000,00	4.957.000,00	635.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.322.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	184.623.500,00	199.395.500,00	199.395.500,00	14.772.000,00		-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		184.623.500,00	KECAMATAN WAY KRUI		
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.113.000,00	13.660.000,00	13.660.000,00	1.547.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.113.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.100.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	15.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.100.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.150.000,00	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			28.150.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	59.260.500,00	63.625.500,00	63.625.500,00	4.365.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			59.260.500,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	18.000.000,00	26.860.000,00	26.860.000,00	8.860.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	48.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	-15.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			48.000.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	40.146.000,00	42.766.000,00	42.766.000,00	2.620.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		40.146.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.597.000,00	5.847.000,00	5.847.000,00	250.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.597.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.200.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.000.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12.349.000,00	14.719.000,00	14.719.000,00	2.370.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.349.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	87.700.000,00	68.200.000,00	68.200.000,00	-19.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		87.700.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	62.700.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	-19.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			62.700.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Way Krui, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN WAY KRUI	
		KECAMATAN KARYA PENGGAWA							801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00					801.900.000,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00							801.900.000,00		
	7.01	KECAMATAN							801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00							801.900.000,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	0,00							801.900.000,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	3.187.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		3.187.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.187.000,00	3.187.000,00	3.187.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.187.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	480.161.400,00	516.461.400,00	516.461.400,00	36.300.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		480.161.400,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	471.900.000,00	508.200.000,00	508.200.000,00	36.300.000,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			471.900.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.524.000,00	2.524.000,00	2.524.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.524.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.305.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.432.400,00	3.432.400,00	3.432.400,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.432.400,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	229.875.600,00	229.875.600,00	229.875.600,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		229.875.600,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	7.981.000,00	7.981.000,00	7.981.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.981.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	13.350.000,00	13.350.000,00	13.350.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			13.350.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.600.000,00	25.600.000,00	25.600.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.600.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.594.600,00	75.594.600,00	75.594.600,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			75.594.600,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	44.350.000,00	44.350.000,00	44.350.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.350.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			51.000.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	19.876.000,00	19.876.000,00	19.876.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		19.876.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.632.000,00	5.632.000,00	5.632.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.632.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.244.000,00	8.244.000,00	8.244.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Karya Penggawa, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.244.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	68.800.000,00	68.800.000,00	68.800.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		68.800.000,00	KECAMATAN KARYA PENGGAWA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.100,00	12.000.100,00	100,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			18.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	45.102.750,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-102.750,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			45.102.750,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung Daerah				100 %	100 %	28.534.000,00	28.534.000,00	28.534.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		28.534.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	12 Laporan	3.533.000,00	3.533.000,00	3.533.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.533.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.600.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8.401.000,00	8.401.000,00	8.401.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.401.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	99.388.250,00	74.388.000,00	74.388.000,00	-25.000.250,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		99.388.250,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	1 Unit	50.549.750,00	50.410.000,00	50.410.000,00	-139.750,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			50.549.750,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12 Unit	42.900.000,00	17.900.000,00	17.900.000,00	-25.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.900.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12 Unit	5.938.500,00	6.078.000,00	6.078.000,00	139.500,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.938.500,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				100 %	-	42.675.000,00	42.675.000,00	42.675.000,00	0,00							42.675.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				100 %	-	42.675.000,00	42.675.000,00	42.675.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		42.675.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.675.000,00	42.675.000,00	42.675.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Utara, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			42.675.000,00	KECAMATAN PESISIR UTARA	
		KECAMATAN LEMONG							825.299.800,00	863.400.000,00	863.400.000,00	38.100.200,00							1.033.199.800,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							825.299.800,00	863.400.000,00	863.400.000,00	38.100.200,00							1.033.199.800,00		
	7.01	KECAMATAN							825.299.800,00	863.400.000,00	863.400.000,00	38.100.200,00							1.033.199.800,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	782.104.800,00	820.205.000,00	820.205.000,00	207.900.000,00							990.004.800,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	5.319.750,00	5.311.950,00	5.311.950,00	-7.800,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		5.319.750,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.319.750,00	5.311.950,00	5.311.950,00	-7.800,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.319.750,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	501.914.450,00	540.014.450,00	540.014.450,00	38.100.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		709.814.450,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	495.300.000,00	533.400.000,00	533.400.000,00	38.100.000,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			703.200.000,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.568.750,00	2.568.750,00	2.568.750,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.568.750,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.769.900,00	2.769.900,00	2.769.900,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.769.900,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.275.800,00	1.275.800,00	1.275.800,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.275.800,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	161.077.600,00	161.085.600,00	161.085.600,00	8.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		161.077.600,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.342.000,00	26.495.200,00	26.495.200,00	18.153.200,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.342.000,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.495.200,00	8.350.000,00	8.350.000,00	-18.145.200,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.495.200,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.150.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.150.000,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15.990.400,00	15.990.400,00	15.990.400,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			15.990.400,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			12.000.000,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	35.100.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			35.100.000,00	KECAMATAN LEMONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			38.000.000,00	KECAMATAN LEMONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	31.453.000,00	31.453.000,00	31.453.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		31.453.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.394.000,00	4.394.000,00	4.394.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.394.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.000.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			10.000.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	11.059.000,00	11.059.000,00	11.059.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			11.059.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	82.340.000,00	82.340.000,00	82.340.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		82.340.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			51.500.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.840.000,00	30.840.000,00	30.840.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			30.840.000,00	KECAMATAN LEMONG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	43.195.000,00	43.195.000,00	43.195.000,00	0,00							43.195.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	43.195.000,00	43.195.000,00	43.195.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	-		43.195.000,00	KECAMATAN LEMONG	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	43.195.000,00	43.195.000,00	43.195.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Lemong, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			43.195.000,00	KECAMATAN LEMONG	
		KECAMATAN PULAU PISANG							801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00							802.119.500,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00							802.119.500,00		
	7.01	KECAMATAN							801.900.000,00	838.200.000,00	838.200.000,00	36.300.000,00							802.119.500,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah				90 %	90 %	757.300.350,00	792.275.000,00	792.275.000,00	219.500,00							757.519.850,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				100 %	100 %	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		5.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				100 %	100 %	477.400.750,00	513.700.000,00	513.700.000,00	36.299.250,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		477.400.750,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/b ulan	14 Orang/b ulan	471.900.750,00	508.200.000,00	508.200.000,00	36.299.250,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			471.900.750,00	KECAMATAN PULAU PISANG	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.500.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja				100 %	100 %	188.848.100,00	184.676.000,00	184.676.000,00	-4.172.100,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		188.848.100,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.195.700,00	6.085.000,00	6.085.000,00	-110.700,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			6.195.700,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28.672.000,00	25.025.000,00	25.025.000,00	-3.647.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			28.672.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.300.000,00	24.620.000,00	24.620.000,00	320.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.300.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.480.400,00	25.021.000,00	25.021.000,00	1.540.600,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			23.480.400,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			7.200.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				11 Laporan	11 Laporan	24.000.000,00	27.725.000,00	27.725.000,00	3.725.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			75.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung				100 %	100 %	43.631.000,00	46.899.000,00	46.899.000,00	3.268.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		43.631.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.133.000,00	5.133.000,00	5.133.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.133.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.800.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			25.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.698.000,00	11.966.000,00	11.966.000,00	3.268.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.698.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	42.420.500,00	42.000.000,00	42.000.000,00	-420.500,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		42.640.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	37.250.000,00	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			37.250.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	780.500,00	250.000,00	250.000,00	-530.500,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.000.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	4.390.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	110.000,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.390.000,00	KECAMATAN PULAU PISANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				100 %	100 %	44.599.650,00	45.925.000,00	45.925.000,00	0,00							44.599.650,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100 %	100 %	44.599.650,00	45.925.000,00	45.925.000,00	1.325.350,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		44.599.650,00	KECAMATAN PULAU PISANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	44.599.650,00	45.925.000,00	45.925.000,00	1.325.350,00	Kab. Pesisir Barat, Pulaupisang, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			44.599.650,00	KECAMATAN PULAU PISANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.378.615.630,00	5.504.306.760,00	4.954.306.760,00	575.691.130,00						4.816.477.193,00		
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							4.378.615.630,00	5.504.306.760,00	4.954.306.760,00	575.691.130,00							4.816.477.193,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							4.378.615.630,00	5.504.306.760,00	4.954.306.760,00	575.691.130,00							4.816.477.193,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				92,50 Persen	92,50 Persen	2.196.978.500,00	2.622.120.100,00	2.542.120.100,00	219.697.850,00							2.416.676.350,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu				92,50 Persen	92,50 Persen	12.400.000,00	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		13.640.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kruai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			8.140.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			5.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu				92,50 Persen	92,50 Persen	1.399.338.500,00	1.727.120.100,00	1.727.120.100,00	327.781.600,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		1.539.272.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/b ulan	15 Orang/b ulan	1.394.338.500,00	1.722.120.100,00	1.722.120.100,00	327.781.600,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kruai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.533.772.350,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kruai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kruai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			2.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Pesisir Tengah, Pasar Kruai	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			1.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja</i>				92,50 Persen	92,50 Persen	300.628.000,00	344.920.000,00	264.920.000,00	-35.708.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		330.690.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	3.781.000,00	5.295.000,00	5.295.000,00	1.514.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			4.159.100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	27.100.000,00	72.700.000,00	72.700.000,00	45.600.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			29.810.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	58.747.000,00	40.925.000,00	40.925.000,00	-17.822.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			64.621.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			26.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			24.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	160.000.000,00	80.000.000,00	-85.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			181.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan Layanan Pendukung</i>				92,50 Persen	92,50 Persen	385.612.000,00	440.180.000,00	440.180.000,00	54.568.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		424.173.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	208.800.000,00	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			229.680.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	173.988.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	50.012.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			191.386.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	2.824.000,00	7.380.000,00	7.380.000,00	4.556.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			3.106.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dalam kondisi baik</i>				92,50 Persen	92,50 Persen	99.000.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	-1.500.000,00			-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas	Aparatur		108.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	78.500.000,00	78.500.000,00	-1.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			88.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas			20.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan wawasan kebangsaan				51,00 Persen	51,00 Persen	983.000.000,00	800.000.000,00	763.000.000,00	98.300.000,00							1.081.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025		RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				51,00 Persen	51,00 Persen	983.000.000,00	800.000.000,00	763.000.000,00	-220.000.000,00			-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat		1.081.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				100 Orang	100 Orang	125.000.000,00	100.000.000,00	65.000.000,00	-60.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			137.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				35 Orang	35 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			2.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																			
			Jumlah Paskibraka				40 Orang	40 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	698.000.000,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			770.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																			
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			165.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tingkat Partisiapasi Masyarakat Dalam Pemilu				84,92 Persen	84,92 Persen	466.637.130,00	482.186.660,00	449.686.660,00	46.663.713,00							513.300.843,00		
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik				84,92 Persen	84,92 Persen	466.637.130,00	482.186.660,00	449.686.660,00	-16.950.470,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		513.300.843,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	150 Orang	458.637.130,00	382.186.660,00	382.186.660,00	-76.450.470,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			504.500.843,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				35 Orang	35 Orang	6.000.000,00	100.000.000,00	67.500.000,00	61.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif				75,00 Persen	75,00 Persen	133.000.000,00	1.250.000.000,00	987.500.000,00	13.300.000,00							146.300.000,00		
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				75,00 Persen	75,00 Persen	133.000.000,00	1.250.000.000,00	987.500.000,00	854.500.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat		146.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	125.000.000,00	1.150.000.000,00	920.000.000,00	795.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			137.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				35 Orang	35 Orang	6.000.000,00	100.000.000,00	67.500.000,00	61.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			2.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				67,50 Persen	67,50 Persen	133.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	13.300.000,00							146.300.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama				67,50 Persen	67,50 Persen	133.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-103.000.000,00			-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat		146.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	125.000.000,00	100.000.000,00	30.000.000,00	-95.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			137.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				35 Orang	35 Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			6.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			2.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Koordinasi dan Peran Lembaga dan Elemen Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Konflik Sosial				75,00 Persen	75,00 Persen	466.000.000,00	250.000.000,00	182.000.000,00	46.600.000,00							512.600.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Koordinasi, Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				75,00 Persen	75,00 Persen	466.000.000,00	250.000.000,00	182.000.000,00	-284.000.000,00			-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat	Masyarakat		512.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				200 Orang	200 Orang	250.000.000,00	100.000.000,00	71.500.000,00	-178.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				70 Orang	70 Orang	12.000.000,00	150.000.000,00	110.500.000,00	98.500.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			13.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			4.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Pesisir Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Budaya Masyarakat			220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								896.573.116.916,00	904.304.806.001,00	862.454.977.465,00	-34.118.139.451,00							2.719.964.251.899,00	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang memuat perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan, sub kegiatan perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Perubahan yang terjadi ini disebabkan oleh dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2025 ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara proses serta dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan pada pelaksanaan sisa tahun anggaran 2025 yang memusatkan pada pencapaian Tujuan, Sasaran, Prioritas dan Tema Pembangunan Tahun 2025 selain masih mengacu pada Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat untuk tahun kedua RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021-2026 namun menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangkaian Pilkada 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah tersebut serta demi terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi kinerja pembangunan dari semua pemangku kepentingan, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025;
- 2) Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 3) Masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan diharapkan dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai mitra ataupun sebagai salah satu unsur pemberi masukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan, sub kegiatan;
- 4) Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan melalui penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan melalui upaya pengendalian internal dan melaporkannya secara triwulan kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat;

- 5) Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat melakukan evaluasi, verifikasi serta pengendalian terhadap laporan triwulanan hasil pemantauan dan pengendalian dari Kepala Perangkat Daerah dan apabila dari hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah dimaksud;
- 6) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Bupati Pesisir Barat melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat;
- 7) Pada akhir pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap target capaian kinerja tahunan dan lima tahunan serta target capaian keuangan pelaksanaan pembangunan melalui pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Tahun 2025 dan disampaikan dalam bentuk Laporan Ikhtisar Keuangan Tahunan serta dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP).

Demikianlah Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

BUPATI PESISIR BARAT,

DEDI IRAWAN